



STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI KABUPATEN DAN KOTA DI INDONESIA

Dr. Muhammad Ghafur Wibowo, dkk.

**Magister Ekonomi Syariah (MES)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta**

STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI KABUPATEN DAN KOTA DI INDONESIA

Muhammad Ghafur Wibowo, dkk.

Magister Ekonomi Syariah (MES)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI KABUPATEN DAN KOTA DI INDONESIA

Penulis:

- **Muhammad Ghafur Wibowo, Astuti Eka Rahmawati**
- **Abdul Qoyum, Nurul Ilmi**
- **M. Yazid Afandi, lin Priany Poetri**
- **Syafiq M. Hanafi, Fudzi Hanafi**
- **Abdul Haris, Fadia Dini Aulia**
- **Slamet Haryono, Hasnidar Yuslin**
- **Ibnu Muhdir, Ita Eviyanah**
- **Sunaryati, Juhariyah**
- **Taosige Wau, Putri Deflyanty S.**
- **Darmawan, Muhammad jundi assiddiq**
- **Misnen Ardiansyah. Yuliana**
- **Afdawaiza, Muhammad Idham Khalid**

Cetakan I, Juli 2021

16 x 23 cm; vi + 284 hlm.

Diterbitkan oleh:

Magister Ekonomi Syariah (MES)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

ISBN : 978-623-97540-1-3

Hak Cipta © dilindungi Undang-undang

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan pada Allah SWT. atas limpahan taufiq dan hidayat-Nya sehingga buku **“Strategi Pembangunan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Indonesia”** ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Beliau merupakan tokoh yang memberikan pengaruh positif sepanjang masa. ***Buku ini merupakan hasil karya kolaborasi dosen dan mahasiswa Prodi Magister Ekonomi Syariah (MES), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.***

Kabupaten dan Kota memiliki peran dan tanggung jawab untuk terus memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi yang baik dalam suatu daerah mencerminkan kesejahteraan penduduknya. Karena itu, penulis berusaha dengan sekuat tenaga menghadirkan buku ini sebagai bentuk partisipasi dalam memajukan perekonomian untuk menjadi lebih baik lagi.

Selain itu, buku ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa dalam memahami strategi pembangunan ekonomi di Kabupaten dan Kota. Bagi peneliti, buku ini diharapkan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi di Kabupaten dan Kota, dan bagi masyarakat umum,

buku ini diharapkan sebagai dasar pandangan dalam melihat keadaan perekonomian di Kabupaten dan Kota yang ada di Indonesia.

Yogyakarta, Juli 2021

Penulis

Tim Prodi MES

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	v

PENDIDIKAN SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Dr. Muhammad Ghafur Wibowo, Astuti Eka Rahmawati	1
--	---

ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN DI WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT

Dr. Abdul Qoyum, Nurul Ilmi.....	31
----------------------------------	----

FAKTOR PENYEBAB PENGANGGURAN DAN *PROBLEM SOLVING* PEMERINTAH DALAM MENGATASI PENGANGGURAN BERDASARKAN ANGKATAN KERJA DI KAB BONE TAHUN 2020.....

Dr. M. Yazid Afandi, Iin Priany Poetri.....	53
---	----

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGURANGI KEMISKINAN DI KABUPATEN KUNINGAN

Dr. Syafiq M. Hanafi, Fudzi Hanafi	73
--	----

DAMPAK AKTIVITAS PEMBANGUNAN EKONOMI TERHADAP EKSTERNALITAS NEGATIF KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KOTA PONTIANAK.....

Dr. Abdul Haris, Fadia Dini Aulia	93
---	----

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN MANUSIA YANG DIANALISIS DARI KOMPONEN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI KABUPATEN BONE	
Dr. Slamet Haryono, Hasnidar Yuslin.....	119
KORUPSI SEBAGAI HAMBATAN PEMBANGUNAN EKONOMI: STUDI KASUS KABUPATEN BREBES, JAWA TENGAH	
Dr. Ibnu Muhdir, Ita Eviyanah	147
STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAJINAN KERIS DI KOTA SUMENEP MELALUI TRANSAKSI EKSPOR	
Dr. Sunaryati, Juhariyah	175
PENANGANAN PRODUKSI PERTANIAN AKIBAT PERUBAHAN IKLIM DALAM MENJAGA PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BONE	
Dr. Taosige Wau, Putri Deflyanty S.....	199
PENGARUH POPULASI DAN PERTUMBUHAN UKM (USAHA KECIL MENENGAH) PADA PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA BATAM	
Dr. Darmawan, Muhammad jundi assiddiq	219
ANALISIS TINGKAT KESEHATAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN.....	239
Dr. Misnen Ardiansyah. Yuliana	239
POTENSI INVESTASI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN BULUNGAN KALIMANTAN UTARA	
Dr. Afdawaiza, Muhammad Idham Khalid	263

PENDIDIKAN SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Dr. Muhammad Ghafur Wibowo
(muhammad.ghafur@uin-suka.ac.id)

Astuti Eka Rahmawati
(astutieka611@gmail.com)

PENDAHULUAN

Pangandaran telah resmi menjadi sebuah kabupaten dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat. Sebagai daerah otonom baru, tentu pemerintah Pangandaran memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola sendiri sumber daya yang dimiliki. Otonomi daerah telah memberikan kebebasan dalam merencanakan pembangunan yang sesuai dengan keperluan daerah masing-masing. Banyak aspek yang perlu dibenahi dan ditata kembali dalam proses pembangunan daerah Pangandaran. Selain pembangunan fisik dalam bentuk sarana dan prasarana, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan juga merupakan suatu keharusan.

Pendidikan merupakan salah satu langkah dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Namun potret pendidikan di Pangandaran masih perlu pembenahan dan penanganan yang lebih serius. Hal tersebut dikarenakan masih banyak siswa yang putus sekolah dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, masih banyak siswa di Pangandaran yang terbatas pada lulusan SMP atau SMA. Hal ini tercermin dari data Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang masih rendah.

Tabel 1. Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2020

No	Jenjang Pendidikan	APM	APK
1	SD/MI	95,76	102,81
2	SMP/MTS	84,62	95,72
3	SMA/SMK/MA	67,48	83,94

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis, (2021)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator untuk mengetahui banyaknya siswa yang sekolah pada jenjang yang sesuai. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) digunakan untuk mengetahui jumlah siswa yang sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan anak usia sekolah pada jenjang tersebut (Kemdikbud, 2021). Dari nilai APK di atas, dapat diketahui bahwa jumlah siswa SMP/MTS di Pangandaran yang sekolah sebanyak 95%. Artinya dari setiap 100 orang siswa SMP terdapat 5 orang yang tidak sekolah. Sedangkan nilai APK siswa jenjang SMA/SMK/MA yaitu sebanyak 84%, artinya dari 100 orang siswa yang sekolah pada jenjang tersebut, terdapat 16 siswa yang tidak bersekolah. Data tersebut membuktikan bahwa masih

banyak anak usia sekolah yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, padahal pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi sumber daya manusia untuk pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut harus menjadi fokus pembangunan bagi pemerintah Kabupaten Pangan-daran demi terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang unggul. Selain itu, dalam rangka mendukung dan mewujudkan program pemerintah Indonesia yaitu program wajib belajar 12 tahun.

Pendidikan sebagai sarana pencapaian tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, juga berperan dalam kesetaraan dan keadilan sosial. Todaro & Smith (2012) menyatakan bahwa pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk kemampuan dan mengembangkan kapasitas manusia agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, pendidikan dan pelatihan dapat menjadi nilai tambah bagi manusia. Hal ini dijelaskan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang dan semakin banyak pelatihan yang diikuti, maka kemampuan dan keterampilan yang dimiliki akan semakin tinggi. Selain itu, Schultz (1961) menerangkan bahwa pembangunan dalam bidang pendidikan dengan fokus intinya adalah manusia, telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sehingga pembangunan sektor pendidikan diyakini merupakan prasyarat kunci untuk pertumbuhan sektor-sektor lainnya.

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Anand dkk (2015) yang menunjukkan bahwa pendidikan merupakan upaya pengimplementasian pembangunan berkelanjutan dengan langkah kolaborasi regional. Artinya, pendidikan tidak hanya sebagai transfer keilmuan tetapi dapat lebih aplikatif yaitu membantu permasalahan regional. Selain

itu, penelitian juga dilakukan oleh Ylikoski & Kivela (2017) dengan hasil bahwa pendidikan khususnya di perguruan tinggi harus memiliki dampak terhadap peningkatan kerjasama regional yaitu melalui bisnis dan industri lokal. Sehingga *output* dari perguruan tinggi harus mampu mengatasi permasalahan regional dan mengembangkan potensi industri lokal.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut terkait program atau kebijakan yang sudah, belum, dan akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam rangka pembangunan daerah melalui sektor pendidikan.

KERANGKA TEORITIS

People Centered Development Theory

People centered development theory yang diartikan sebagai pembangunan berwawasan kependudukan merupakan suatu konsep dimana subjek dan objek yang menjadi titik sentral pembangunan yaitu penduduk (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2015). Sebagai subjek, penduduk harus mampu menjadi sumber penggerak pembangunan. Sedangkan sebagai objek pembangunan, penduduk harus dapat menikmati hasil pembangunan yang bersangkutan (Tjiptoherijanto, 2000). Proses pembangunan dilakukan oleh penduduk dan untuk penduduk, sehingga lebih menitikberatkan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia disamping pembangunan infrastruktur.

Pengintegrasian penduduk dalam perencanaan pembangunan daerah memiliki manfaat dasar yang diperoleh yaitu harapan penduduk yang ada di daerah tersebut menjadi pelaku utama pembangunan dan penikmat hasil pem-

bangunan. Hal ini peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan berwawasan kependudukan menekankan pada pembangunan lokal, perencanaan yang berasal dari bawah (*bottom up planning*), disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal, serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan (Tjiptoherijanto, 2000).

Pembangunan Berwawasan Kependudukan berkaitan dengan tiga konsep lainnya, yaitu:

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan menurut *World Commission on Environment and Development* (WCED), adalah pembangunan yang menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan manusia dengan sistem perlindungan lingkungan alam sehingga dapat memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi selanjutnya (Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, 2014). Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga aspek yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pembangunan Sumber Daya Manusia

Konsep ini menekankan pentingnya produktivitas dalam pembangunan. Produktivitas dapat ditingkatkan ketika terdapat akses yang optimal terhadap sumber daya yang tersedia. Ada tiga pendekatan dalam pembangunan sumber daya manusia yaitu pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, dan pemanfaatan SDM (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2015). Pengendalian kuantitas dilakukan guna menyeimbangkan antara permintaan dan penawaran terhadap kebutuhan sumber daya yang tersedia. Kemudian peningkatan kualitas SDM menjadi syarat bagi peningkatan produktivitas sebagai hasil dari pemanfaatan

SDM yang optimal.

Pembangunan sumber daya manusia mencakup teori *human capital* didalamnya. *Human capital* menitikberatkan kepada manusia sebagai bentuk modal dimana manusia memiliki peran dan tanggung jawab dalam segala aktifitas. Au dkk (2008) menjelaskan bahwa *human capital* merupakan segala sesuatu yang didapatkan dari akumulasi proses tertentu. Proses tersebut yaitu berbagai aktifitas pendidikan seperti sekolah, kursus dan pelatihan yang akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia merupakan proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (United Nations Development Programme, 1990). Konsep pembangunan manusia memiliki sejumlah asumsi, yaitu:

- 1) Pembangunan berorientasi pada penduduk sebagai fokus perhatian.
- 2) Pembangunan tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan, tetapi terpusat pada penduduk secara keseluruhan dari berbagai aspek.
- 3) Pembangunan manusia merupakan upaya meningkatkan kemampuan sekaligus upaya memanfaatkan kemampuan tersebut secara optimal.
- 4) Pembangunan manusia didukung empat pilar utama, yaitu pemerataan, produktifitas, pemberdayaan, dan kesinambungan.
- 5) Pembangunan manusia dijadikan dasar penentuan tujuan pembangunan dan menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Pendidikan dalam Pembangunan Berkelanjutan

Pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembangunan terutama pembangunan yang terkait dengan manusia. Pembangunan manusia menjadi bagian penting dari investasi yang dibutuhkan dalam proses pembangunan. Pendidikan dianggap sebagai investasi modal manusia yang setara dengan investasi modal fisik seperti infrastruktur. Mahat & Idrus (2016) memaparkan bahwa modal manusia merupakan indikator penting bagi kemampuan individu atau kelompok dalam memberikan sumbangsih secara maksimum bagi pembangunan ekonomi melalui pendidikan yang mapan, keterampilan kerja, perbaikan kesehatan, dan komponen lain yang sejenis. Selain itu, pendidikan akan menciptakan manusia yang mampu membuat siklus hidupnya secara individu untuk membuat pilihan-pilihan terbaik (Lemos & Agrawal, 2006).

Todaro & Smith (2012) juga menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai bentuk modal manusia. Kedua hal tersebut menjadi faktor yang saling terkait satu sama lain dimana semakin tinggi pendidikan seseorang dan semakin banyak pelatihan yang diikuti akan berbanding lurus dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Kemudian, kesehatan memegang peranan kunci untuk proses pencapaian pendidikan yang tinggi. Pendidikan yang tinggi tanpa diimbangi dengan tubuh yang sehat berimplikasi pada produktifitas yang stagnan. Selain itu, pendidikan tinggi juga dapat mempengaruhi tingkat kesadaran kesehatan seseorang.

Pembangunan berkelanjutan yang meletakkan pendidikan sebagai prioritas utama dikenal sebagai istilah Education for Sustainable Development (ESD). Pendidikan sebagai upaya pembangunan yang berkelanjutan merupakan

proses pembelajaran yang didasarkan pada cita-cita luhur dan prinsip-prinsip yang mendasarkan pada keberlanjutan. ESD memusatkan perhatian pada semua tingkat dan jenis pembelajaran untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan pengembangan pembangunan manusia yang berkelanjutan (Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, 2014).

Berdasarkan hasil Deklarasi Lingkungan Hidup Konferensi Tingkat Tinggi tahun 1992 di De Jainero, ada empat poin yang menjadi prioritas utama dalam pengimplementasian ESD, yaitu (Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, 2014):

- a. Perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan, yaitu dengan menjamin setiap orang untuk memperoleh hak sama dalam pendidikan dan kesempatan menambah pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan perspektif yang mendukung partisipasi dalam pengambilan keputusan.
- b. Reorientasi pendidikan pada semua jenjang, yaitu menjamin pedagogi dan kurikulum dari mulai pra-sekolah sampai dengan universitas menekankan pada pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan perspektif masa depan yang berkelanjutan.
- c. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu melalui pendidikan masyarakat baik formal maupun informal untuk membangun kewaspadaan dan pengertian tentang pembangunan yang berkelanjutan.
- d. Pelatihan sumber daya manusia guna membangun kemampuan membuat keputusan dan unjuk kerja dalam perilaku yang berkelanjutan.

Pendidikan dan *Maqashid* Syariah

Islam memandang pendidikan sebagai proses menuntut ilmu yang sangat penting dalam kehidupan karena berhubungan erat dengan harkat dan martabat seorang manusia. Menuntut ilmu dianggap sebagai titik tolak yang dahsyat dalam menumbuhkan kesadaran sikap manusia (Ramly, 2005). Selain itu, pendidikan berperan dalam melakukan proses internalisasi nilai-nilai keislaman seperti nilai-nilai ketuhanan, keadilan, dan kesetaraan pada setiap peserta didik (Muzakki, 2013). Dengan demikian, telah menjadi kewajiban bagi setiap umat manusia untuk menuntut ilmu sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut.

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: “Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim”.

Diwajibkanannya umat manusia untuk menuntut ilmu karena dengan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh, umat manusia akan dapat membedakan antara kebenaran dan kebathilan (Angelia & Hasan, 2017).

Selain itu, pendidikan merupakan salah satu upaya untuk menciptakan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Ibnu ‘Asyur mengembangkan teori *maqashid* syariah dalam rangka pencapaian *mashlahah* melalui pendidikan dengan pergeseran dari penjagaan dan perlindungan, menjadi pengembangan dan hak-hak asasi (Firdaus, 2018). *Maqashid* versi Ibnu ‘Asyur merupakan konsep nilai dan sistem yang dijelaskan sebagai berikut (Auda, 2015).

a. *Hifz al-Din* (Perlindungan Agama)

Konsep pendidikan yang dapat ditetapkan dalam rangka perlindungan terhadap agama yaitu dengan cara

menghadirkan pendidikan yang membentuk karakter religius dan menanamkan semangat *ruh al-da'wah*. Tujuannya untuk mendorong individu sadar terhadap hukum dan mampu menegakkan hukum yang adil. Selain itu, murid mampu mengamalkan ilmunya untuk memelihara dan menghidupkan nilai-nilai islam.

b. *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa Raga)

Pendidikan dalam pandangan Islam harus mampu menanamkan rasa kasih sayang terhadap sesama dan makhluk lain. Pendidik harus mampu menutup jalan terjadinya *bullying* dan perpeloncoan karena ajaran islam sangat menjaga kehormatan dan harga diri pemeluknya. Pendidikan harus mampu mendorong kesetaraan gender dimana perempuan dan laki-laki berhak memperoleh hak yang sama ketika menanggung peran dan tanggung jawab yang sama.

c. *Hifz al-Aql* (Perlindungan Akal)

Hifz al-Aql bisa dimaknai dengan penyelenggaraan pendidikan berkualitas yang mampu mendorong murid untuk berinovasi dan mengembangkan bakat. Menurut Al-Shawi (Firdaus, 2018), bentuk menjaga akal dapat berupa hak untuk belajar, hak mendapatkan informasi, serta hak mendapatkan perlindungan dari hal-hal yang bisa membahayakan akal pikiran seperti ajaran sesat, narkoba, dan informasi yang salah. Kemudian, Abd al-Shamad al-Hanawi (Firdaus, 2018) mengartikan *hifz al-aql* sebagai kebebasan berpikir intelektual yang disertai kepercayaan diri sehingga tidak merasa rendah diri terhadap kelebihan yang dimiliki oleh orang lain.

d. *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan)

Al-Shawi (Firdaus, 2018) menjelaskan bahwa konsep *hifz*

al-nasl dapat diimplementasikan dengan menyiapkan generasi terbaik yang sehat dan bebas dari penyakit fisik dan psikologis. Hal tersebut dapat tercapai dengan menjaga generasi penerus dari hal-hal yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, perlu lingkungan yang sesuai dan mendukung daya kembangnya.

e. *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta)

Pendidikan berbasis *maqashid* syariah harus mampu menciptakan kesejahteraan umum dalam aspek sosio-ekonomi. Salah satu peran pendidikan yang sangat penting yaitu pengentasan kemiskinan. Pendidikan sebagai solusi dalam pengentasan kemiskinan didasarkan pada teori *human capital* yang menyatakan bahwa manusia merupakan faktor utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi selain modal dan teknologi. Selain itu, pelayanan pendidikan harus bersifat non diskriminatif dimana minat dan bakat dijadikan dasar dalam seleksi siswa untuk memperoleh pelayanan pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan variabel-variabel pendidikan yang diamati untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan dan kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu daerah. Adapun data yang digunakan dalam penelitian berupa data sekunder dari laporan Badan Pusat Statistik mulai tahun 2015-2019. Data tersebut berupa data rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka partisipasi murni, dan data anggaran daerah untuk pendidikan.

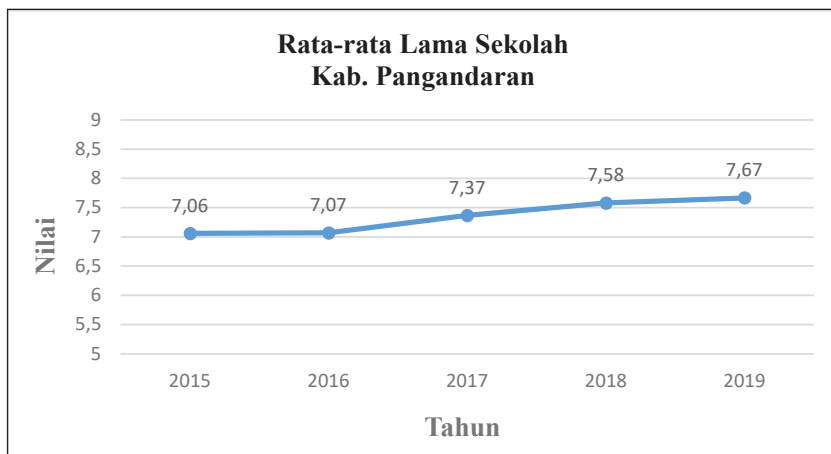
Penelitian ini mengambil daerah Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat sebagai objek penelitiannya. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Pangandaran merupakan kabupaten yang masih baru karena baru diresmikan pada tahun 2012. Sehingga menarik untuk dikaji bagaimana partisipasi masyarakat dan kualitas pendidikan di daerah tersebut dalam rangka mendukung pembangunan sebagai daerah otonom baru.

Potret Pendidikan Di Kabupaten Pangandaran

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan penduduk dalam menjalani pendidikan formal (Badan Pusat Statistik, 2021). Adapun cakupan penduduk yang digunakan yaitu penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Gambar 1. Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Pangandaran Tahun 2015-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (2021)

Gambar di atas menjelaskan rata-rata lama sekolah di kabupaten Pangandaran mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Gambar tersebut memberikan informasi bahwa rata-rata lama sekolah di kabupaten Pangandaran mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2015 rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas sebesar 7,06 tahun dan tahun 2019 naik menjadi 7,67 tahun. Angka tersebut menandakan bahwa pada tahun 2019, penduduk usia 25 tahun ke atas di kabupaten Pangandaran telah mampu menyelesaikan pendidikan hingga kelas VII atau kelas 1 Sekolah Menengah Pertama dan hampir menyelesaikan kelas VIII pada Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Angka tersebut masih dikategorikan rendah apabila dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 8,37 tahun pada 2019. Artinya, rata-rata penduduk di Provinsi Jawa Barat usia 25 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikan hampir kelas 3 SMP, sedangkan di Kabupaten Pangandaran hanya hampir kelas 2 SMP. Perbandingan rata-rata lama sekolah tersebut tidak terlalu jauh, namun perbedaan yang sedikit itulah yang membedakan kualitas sumber daya manusianya baik dari pengetahuan maupun keterampilan yang dimiliki. Artinya, jika di level provinsi, sumber daya manusia usia 25 tahun ke atas pada tahun 2019 di Kabupaten Pangandaran kurang memiliki daya saing jika dibandingkan penduduk di Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak usia tertentu pada masa mendatang (Badan Pusat Statistik, 2021). Angka harapan lama sekolah

dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Angka ini digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Gambar 2. Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Pangandaran Tahun 2015-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (2021)

Gambar di atas merupakan data harapan lama sekolah di Kabupaten Pangandaran mulai periode 2015 sampai tahun 2019. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa angka harapan lama sekolah di Kabupaten Pangandaran mengalami peningkatan dari tahun ke tahun walaupun peningkatannya hanya sedikit. Pada tahun 2015, lamanya sekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh penduduk hampir mencapai 12 tahun dan pada tahun 2019, harapan lama sekolah sudah mencapai 12 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk pada jenjang pendidikan formal pada tahun 2019 di kabupaten Pangandaran memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,06 tahun atau setara dengan kelas 9 Sekolah Menengah Atas. Hal ini menunjukkan bahwa

kondisi pembangunan pendidikan di kabupaten Pangandaran baik dari segi sistem pendidikan dan hanya mampu mendidik penduduk usia sekolah sampai jenjang SMA.

Jika dibandingkan dengan harapan lama sekolah di Provinsi Jawa Barat, kabupaten Pangandaran masih tertinggal. Jawa Barat mencatat harapan lama sekolah di angka 12,48 tahun pada tahun 2019. Hal tersebut memberikan informasi bahwa penduduk usia sekolah yang masuk pendidikan formal tahun 2019 di Jawa Barat memiliki peluang untuk meneruskan jenjang pendidikan sampai tingkat Diploma 1. Kondisi pembangunan pendidikan di kabupaten Pangandaran harus menjadi fokus perhatian demi mewujudkan pemerataan pendidikan yang bukan hanya pemerataan gender tetapi lebih kepada pemerataan sistem pendidikan.

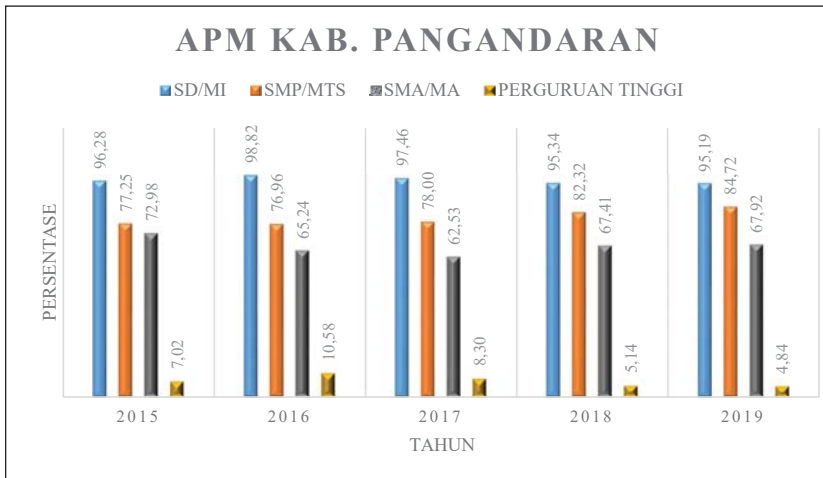
Angka Partisipasi Murni (APM)

APM merupakan indikator untuk mengetahui banyaknya siswa yang sekolah pada jenjang yang sesuai. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai jenjang pendidikannya.

Gambar 3 menunjukkan data Angka Partisipasi Murni dari jenjang SD sampai dengan Perguruan Tinggi di Kabupaten Pangandaran. Pada jenjang SD, angka partisipasi murni mengalami penurunan dari tahun 2015 sebesar 96,28% menjadi 95,19% pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2019, hanya 95% penduduk kabupaten Pangandaran yang berusia 7-12 tahun bersekolah tepat waktu pada jenjang Sekolah Dasar. Kemudian pada jenjang SMP, menunjukkan angka yang meningkat dari 77,25% tahun 2015 menjadi 84,72% pada tahun 2019. Data tersebut menunjukkan semakin banyak penduduk usia SMP

yang mampu memanfaatkan fasilitas pendidikan pada jenjang yang sesuai.

Gambar 3. Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Pangandaran Tahun 2015-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (2021a)

Selanjutnya pada jenjang SMA, partisipasi penduduk mengalami penurunan dari tahun 2015 ke tahun 2016, dan selanjutnya mengalami peningkatan sampai tahun 2019 namun nilainya tidak melebihi tahun 2015. Lalu, pada jenjang Perguruan Tinggi bisa dikatakan angka partisipasi masyarakat masih sangat kecil. Ditunjukkan oleh data tersebut bahwa penduduk usia sekolah yang sekolah pada jenjang perguruan tinggi hanya 4,84% pada tahun 2019. Artinya, masih banyak penduduk yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang Perguruan Tinggi.

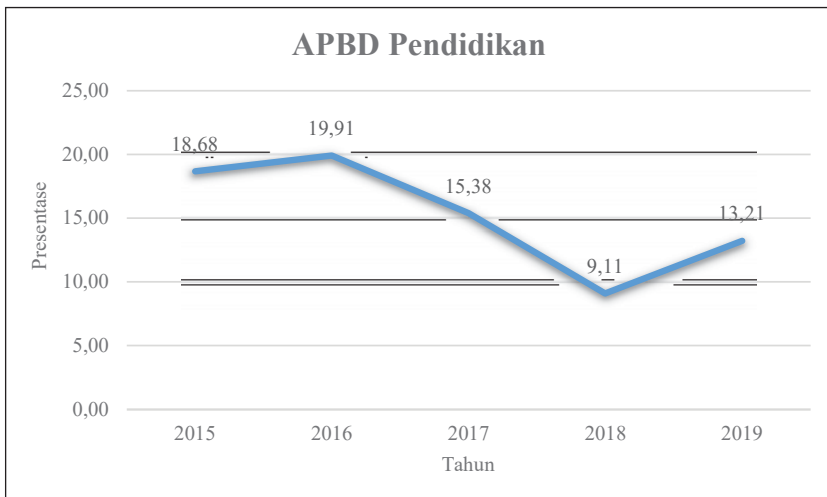
Selain itu, gambar di atas memberikan informasi bahwa penduduk usia sekolah di kabupaten Pangandaran yang sekolah pada jenjang yang sesuai mengalami penurunan pada setiap kenaikan jenjang pendidikan. Hal tersebut

memberikan bukti bahwa partisipasi masyarakat untuk mengenyam pendidikan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi masih rendah. Padahal penduduk sebagai subjek pembangunan bukan hanya penting dari segi kuantitas, tetapi yang lebih penting yaitu kualitas sumber daya manusianya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bidang Pendidikan

APBD bidang pendidikan menunjukkan keberpihakan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerahnya. Berikut data APBD kabupaten Pangandaran dalam bidang pendidikan.

Gambar 4. APBD Bidang Pendidikan Kabupaten Pangandaran Tahun 2015-2019



Sumber: Kemdikbud (2020)

Data di atas menunjukkan bahwa persentase APBD pemerintah daerah Pangandaran untuk bidang pendidikan nilainya fluktuatif dari tahun ke tahun. APBD pendidikan tertinggi yaitu tahun 2016 yaitu sebesar 19,91% dari total

APBD. Namun pada tahun 2018 mengalami penurunan hingga mencapai angka 9,11%. Kemudian pada tahun 2019 persentase APBD Pendidikan sebesar 13,21%. Selain itu, data tersebut memberikan informasi bahwa keberpihakan pemerintah daerah terhadap pendidikan masih kurang. Hal tersebut terbukti dari besarnya persentase APBD yang nilainya mengalami penurunan jika dilihat dari tahun 2015 sebesar 18,68% menjadi 13,21% pada tahun 2019.

Jika menilik dari penduduk ditempatkan sebagai objek pembangunan, pemerintah daerah seharusnya lebih fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia disamping peningkatan pembangunan fisik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan besarnya APBD untuk bidang Pendidikan yang setidaknya persentasenya stabil atau lebih baik meningkat dari tahun ke tahun. Walaupun investasi dalam bidang sumber daya manusia manfaatnya tidak bisa dirasakan dalam jangka pendek, tetapi investasi tersebut merupakan kunci utama dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Kebijakan Pemerintah Daerah Sebagai Upaya Peningkatan Sektor Pendidikan

Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran menerapkan beberapa kebijakan sebagai langkah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Adapun beberapa kebijakan yang dilakukan, yaitu:

Program Pangandaran Hebat

Pangandaran hebat merupakan upaya peningkatan layanan pendidikan melalui penyaluran dana APBD kepada satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Pangandaran (JDIH Kabupaten Pangandaran, 2017a). Hal tersebut dilakukan guna membantu instansi pendidikan dalam penyelenggaraan

pendidikan, sehingga mengurangi atau menghilangkan dana yang berseumber dari masyarakat. Selain itu, dana ini merupakan dana pendamping BOS yang diterima oleh sekolah dalam rangka membantu biaya satuan pendidikan.

Adapun penerima atau sasaran dari program ini yaitu seluruh sekolah/madrasah baik negeri maupun swasta di wilayah Kabupaten Pangandaran mulai dari jenjang SD/MI, sampai SMA/MA/SMK. Sedangkan untuk penggunaan dana, program Pangandaran Hebat menetapkan urutan prioritas yang wajib dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan. Urutan prioritas pemanfaatan dana tersebut yaitu:

- 1) Biaya pribadi peserta didik
- 2) Biaya investasi
- 3) Biaya operasional non-personal
- 4) Biaya operasional personal

Adanya program ini bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu, terjangkau, dan terbuka bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Pangandaran. Sehingga dapat mengurangi angka putus sekolah, meningkatkan partisipasi masyarakat usia sekolah, dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua siswa untuk mengenyam pendidikan.

Program Ajengan Masuk Sekolah

Pemerintah Kabupaten Pangandaran memberikan perhatian khusus dalam membangun karakter masyarakat melalui pengembangan nilai-nilai dan ajaran agama islam melalui program Ajengan Masuk Sekolah (JDIH Kabupaten Pangandaran, 2017b). Ajengan disini yaitu orang-orang yang memiliki kompetensi dan ilmu dalam agama Islam dan diakui oleh masyarakat secara umum serta memiliki rekomendasi dari MUI Kabupaten Pangandaran. Program ini menempatkan Ajengan sebagai narasumber dan pendamping pendidik

dalam kegiatan proses pembelajaran di sekolah. Harapannya, dapat mewujudkan karakter peserta didik yang religius, meningkatkan kompetensi siswa terutama dalam hal sikap, serta menciptakan budaya sekolah yang religius.

Kegiatan AMS dilaksanakan di seluruh kecamatan di Kabupaten Pangandaran pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Tercatat ada 179 sekolah dengan kebutuhan jumlah Ajengan sebanyak 681 orang. Waktu pelaksanaan kegiatan AMS di sekolah disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah dengan jadwal agar Ajengan dapat menyampaikan materi selama 2 jam pelajaran dalam seminggu. Adapun materi yang diberikan oleh Ajengan meliputi materi tentang 18 nilai budaya dan karakter bangsa serta nilai-nilai ajaran Islam.

Harapannya, dengan adanya program Ajengan Masuk Sekolah penerapan nilai-nilai agama dilakukan sejak masyarakat masuk pendidikan dasar. Hal tersebut sebagai upaya membentuk pondasi untuk menjalani kehidupan sehari-hari serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya dari segi moral dan akhlak.

Program Pangandaran Mengaji

Dilatarbelakangi oleh masyarakat Pangandaran yang mayoritas beragama Islam, program ini merupakan proses bimbingan keagamaan dalam tatanan masyarakat. Program Pangandaran Mengaji ditujukan seluruh lapisan masyarakat agar mempunyai kepribadian muslim baik disetiap ucapan, gerak, dan perbuatannya serta mampu menyaring budaya negatif dalam kehidupan sehari-hari (JDIH Kabupaten Pangandaran, 2017b). Program Pangandaran Mengaji ini di-sasarkan kepada peserta didik Diniyah Takmiliah, TPQ, Pesantren, masyarakat dan aparaturn pemerintahan melalui

Majelis Taklim, satuan pendidikan keagamaan, serta penyelenggara dan pengelola Diniyah Takmiliah, TPQ, Pesantren, dan Majelis Taklim.

Adapun materi yang diberikan yaitu ilmu agama yang didasarkan pada kajian kitab-kitab agama Islam. Harapannya mampu menghasilkan pribadi peserta didik, masyarakat, dan aparatur pemerintahan yang berilmu dan berakhlak mulia. Selain itu dapat menghasilkan satuan pendidikan keagamaan sebagai pusat pembudayaan ilmu yang bersumber dari ajaran Agama Islam. Kemudian mampu membentuk pengelolaan pendidikan Diniyah Takmiliah, TPQ, Pesantren, dan Majelis Taklim yang profesional dan akuntabel.

Program Ekstrakurikuler Pramuka

Kepramukaan ditetapkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada jenjang SD dan SMP di wilayah Kabupaten Pangandaran (JDIH Kabupaten Pangandaran, 2017b). Kegiatan ini bekerjasama dengan Kwartir Ranting atau Kwartir Cabang. Keterampilan kepramukaan yang dipelajari berupa simpul dan ikatan, peta dan kompas, berkemah, wirausaha, dan lain sebagainya. Selain itu dikembangkan pula kegiatan berupa berbaris, memimpin, dinamika kelompok, berkomunikasi, dan lain-lain. Hal tersebut sebagai upaya agar mampu mencetak peserta didik yang berkepribadian dan berwatak luhur serta tinggi mental, moral, dan budi pekerti serta kuat keyakinan agamanya. Selain itu, poin penting diadakannya kegiatan ini yaitu untuk mencetak warga negara yang berjiwa pancasila dan diimbangi dengan tingkat kecerdasan serta keterampilan yang tinggi.

Program Pengembangan Seni dan Budaya Di Sekolah

Program ini merupakan kegiatan berbasis seni dan nilai-nilai budaya lokal yang diterapkan di lingkungan sekolah sebagai salah bentuk mewujudkan visi Kabupaten Pangandaran sebagai daerah tujuan wisata dunia (JDIH Kabupaten Pangandaran, 2017b). Program ini dibagi menjadi tiga kegiatan yaitu ekstrakurikuler seni dan budaya, hari budaya sunda, dan sekolah pusat budaya. Kegiatan ekstrakurikuler seni dan budaya dapat dikembangkan secara fleksibel oleh sekolah disesuaikan dengan keadaan dan kurikulum. Kegiatan kesenian yang dapat dikembangkan berupa seni tari, seni musik lokal, seni lukis, seni kerajinan, dan lain sebagainya.

Kemudian untuk hari budaya sunda, pemerintah Kabupaten Pangandaran menetapkan pada tanggal 25 setiap bulan. Pada tanggal tersebut setiap pegawai dinas pemerintahan harus memakai pakaian dinas yang disesuaikan dengan adat sunda. Selain itu, sekolah diharapkan bisa mengembangkan kegiatan lain seperti penggunaan bahasa sunda, pertunjukan sederhana kesenian sunda maupun lomba-lomba sebagai bentuk apresiasi kepada peserta didik.

Selanjutnya pemerintah Kabupaten Pangandaran menunjuk beberapa sekolah untuk pusat pengembangan kesenian dan kebudayaan. Ada 10 sekolah jenjang SD yang terbagi ke dalam 10 kecamatan dan 4 sekolah jenjang SMP masing-masing satu sekolah setiap komisiariat. Disebut sekolah pusat budaya karena sekolah tersebut merupakan sekolah binaan dalam pengembangan kebudayaan tradisional daerah.

Program-program di atas merupakan bentuk investasi kabupaten Pangandaran dalam bentuk human capital, dimana masyarakat atau peserta didik diberikan kesempatan yang

sama untuk mengenyam pendidikan. Selain itu, pelatihan dan pengembangan bakat dari kegiatan ekstrakurikuler merupakan langkah untuk menghasilkan sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas.

Adapun dalam hal pembangunan berwawasan kependudukan, pemerintah kabupaten Pangandaran menempatkan peserta didik sebagai objek pembangunan dengan adanya program Pangandaran Hebat. Program tersebut sangat penting dalam mencetak sumber daya manusia yang berpendidikan tanpa mendiskriminasi masyarakat. Artinya, setiap lapisan masyarakat diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Output dari program tersebut yaitu berupa sumber daya manusia yang mampu menjadi subjek atau penggerak pembangunan. Sehingga apapun bentuk pembangunan yang dilakukan di kabupaten Pangandaran, semuanya berpusat pada sumber daya manusia yang dimiliki.

Pentingnya Pendidikan Bagi Pembangunan Ekonomi Daerah

Tyler dalam Widiensyah (2017) menyatakan bahwa pendidikan dapat meningkatkan produktivitas seseorang yang berdampak pula pada peningkatan jumlah pendapatannya. Peningkatan pendapatan ini yang kemudian berpengaruh terhadap pendapatan daerah yang bersangkutan serta akan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan merupakan wadah utama dalam mencetak tenaga kerja yang terdidik maupun terlatih yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja perekonomian daerah yang diukur dari Produk Domestik Regional Bruto. Psacharopoulos dalam Widiensyah (2017) menyebutkan peran pendidikan dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu sebagai berikut.

- a. Mendukung terciptanya angkatan kerja yang lebih produktif karena memiliki bekal keterampilan dan pengetahuan yang bisa diaplikasikan dalam dunia usaha.
- b. Terciptanya kelompok pemimpin yang terdidik.
- c. Tersedianya program-program ekonomi yang berbasis pendidikan untuk mendorong kemampuan dan kualitas output sumber daya manusia yang memiliki daya saing.

Meningat pentingnya pendidikan bagi pembangunan salah satunya ekonomi, diperlukan strategi-strategi yang aplikatif untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Masino & Zarazua (2015) menawarkan beberapa strategi dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Adapun kebijakan-kebijakan tersebut yaitu:

- a. Intervensi kapabilitas sisi penawaran melalui penyediaan sumber daya fisik dan manusia serta materi pembelajaran. Intervensi ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi siswa melalui peningkatan infrastuktur fisik, penyediaan bahan ajar, dan mempekerjakan guru tambahan.
- b. Intervensi untuk mengubah preferensi dan sikap dari agen yang terlibat dalam pendidikan, yaitu guru, siswa, dan orangtua. Insentif untuk guru bertujuan untuk meningkatkan kinerja guru, meningkatkan kualitas pengajaran, dan mencegah ketidakhadiran guru. Sedangkan untuk perilaku siswa dan orangtua, yaitu dengan memberikan voucher sekolah yang bertujuan untuk memfasilitasi pendaftaran sehingga siswa yang berprestasi rendah dapat sekolah di sekolah yang lebih berkualitas. Selain itu bisa dengan Bantuan Tunai Bersyarat dan beasiswa serta hibah berbasis prestasi demi mendorong perubahan perilaku dalam pemanfaatan layanan pendidikan.

- c. Intervensi partisipatif dan manajemen *botom-up* dan *top-down* seperti komunitas lokal, asosiasi orang tua dan guru, komite sekolah, dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan sistem pendidikan. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan kebutuhan terhadap layanan pendidikan yang berkualitas. Inisiatif semacam ini berusaha mengubah norma-norma sosial diskriminatif yang membatasi permintaan akan layanan pendidikan serta menciptakan lingkungan sosial yang kondusif.

Masino & Zarazua (2015) menyebutkan bahwa intervensi akan lebih berhasil apabila kebijakan-kebijakan di atas tidak diaplikasikan secara individu tetapi secara simultan atau digabungkan. Investasi dalam hal pendidikan tidak hanya memerlukan satu atau dua tahun untuk melihat *return* yang dapat dirasakan. Tetapi investasi ini tergolong ke dalam investasi jangka panjang yang manfaatnya dapat dirasakan setelah peserta didik melewati semua jenjang pendidikan.

Selain program-program yang telah diterapkan, strategi-strategi di atas bisa dijadikan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam rangka pembangunan di bidang pendidikan. Hal tersebut merupakan langkah awal demi terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Kualitas sumber daya manusia itulah yang nantinya diperlukan sebagai penggerak pembangunan dalam rangka mendukung visi Kabupaten Pangandaran yaitu menjadi tujuan wisata global.

KESIMPULAN

Proses pembangunan tidak pernah terlepas dari penggerak utamanya yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas tentu dihasilkan dari pendidikan yang juga berkualitas. Kabupaten Pangandaran yang tergolong masih daerah otonom baru, memiliki perhatian atau fokus dalam permasalahan di bidang pendidikan dalam rangka mendukung pembangunan daerah. Ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagai bentuk investasi dalam sumber daya manusia. Pertama, Program Pangandaran Hebat yang memberikan bantuan operasional kepada peserta didik ataupun sekolah dengan harapan setiap peserta didik dapat menempuh pendidikan selama 12 tahun yaitu sampai jenjang SMA/SMK/MA. Selain itu, ada beberapa program pendidikan karakter yang juga diterapkan mulai dari Pangandaran Mengaji, Ajengan Masuk Sekolah, Kepramukaan, serta Pengembangan Seni dan Budaya Lokal. Program pendidikan karakter ini sebagai bekal bagi sumber daya manusia agar memiliki karakter yang religius dengan menerapkan nilai-nilai keagamaan serta jiwa nasionalisme yang tinggi. Program-program tersebut merupakan langkah pemerintah Pangandaran dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, terampil, dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

Anand, C. K., Bisaillon, V., Webster, A., & Amor, M. B. (2015). Integration of Sustainable Development in Higher Education-A Regional Initiative In Quebec (Canada). *Journal Cleaner Production*. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.06.134>

- Angelia, Y., & Hasan, I. (2017). Merantau Dalam Menuntut Ilmu (Studi Living Hadis Oleh Masyarakat Minangkabau). *Jurnal Living Hadis*, 2(1).
- Au, A. K. M., Altman, Y., & Roussel, J. (2008). Employee Training Needs and Perceived Value of Training In the Pearl River Delta of China-A Human Capital Development Approach. *Journal of European Industrial Training*, 32(1), 19–31. <https://doi.org/10.1108/03090590810846548>.
- Auda, J. (2015). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. PT Mizan Pustaka.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2015). *Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)*. BKKBN Pusat.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Varaibel Dalam IPM Metode Baru*. Indeks Pembangunan Manusia. <https://ipm.bps.go.id/page/ipm>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis. (2021). *Kabupaten Pangandaran Dalam Angka*. CV. Rikma Karya.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2021). *Komponen IPM*. <https://jabar.bps.go.id/indicator/26/76/1/komponen-ipm.html>.
- Firdaus, M. A. (2018). Maqashid Al-Syari'ah: Kajian Mashlahah Pendidikan dalam Konteks UN Sustainable Development Goals. *Journal of Research and Thought of Islamic Education*, 1(1).
- JDIH Kabupaten Pangandaran. (2017a). *Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pendidikan Pangandaran Hebat*. Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran. <https://jdih.pangandarankab.go.id/>.

- JDIH Kabupaten Pangandaran. (2017b). *Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Karakter Di Kabupaten Pangandaran*. Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran. <https://jdih.pangandarankab.go.id/>.
- Kemdikbud. (2020). *Neraca Pendidikan Daerah*. <https://npd.kemdikbud.go.id/?appid=anggaran>.
- Kemdikbud. (2021). *APK-APM*. <http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>.
- Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO. (2014). *Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan (Education for Sustainable Development) di Indonesia: Implementasi dan Kisah Sukses*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Lemos, M. C., & Agrawal, A. (2006). Environmental Governance. *Annual Review of Environment and Resource*, 31, 297–325.
- Mahat, H., & Idrus, S. (2016). Education For Sustainable Development In Malaysia: A Study of Teacher And Student Awereness. *Malaysia Journal of Society and Space*, 12(6), 77–88.
- Masino, S., & Zarazua, M. N. (2015). What Works To Improve The Quality of Student Learning In Developing Countries. *International Journal of Educational Development*. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijedudev.2015.11.012>
- Muzakki, A. (2013). *Gus Dur: Pembaharu Pendidikan Humanis Islam Indonesia Abad 21*. Idea Press.
- Ramly, N. (2005). *Membangun Pendidikan Yang Memberdayakan Dan Mencerdaskan*. Grafindo.
- Schultz, T. W. (1961). Investment In Human Capital. *The American Economic Review*, 51(1).

- Tjiptoherijanto, P. (2000). Menuju Pembangunan Berwawasan Kependudukan. *Jurnal Populasi*, 11(1).
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic Development* (Eleven). Pearson Education Limited.
- United Nations Development Programme. (1990). *Human Development Report*. Oxford University Press.
- Widiansyah, A. (2017). Peran Ekonomi dalam Pendidikan Dan Pendidikan Dalam Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Cakrawala*, XVII(2).
- Ylikoski, T., & Kivela, S. (2017). Spatiality In Higher Education: A Case Study In Integrating Pedagogy, Community Engagement, And Regional Development. *International Journal Innovation and Learning*, 21(3), 348–363.

ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN DI WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT

Dr. Abdul Qoyum

(abdul.qoyum@uin-suka.ac.id)

Nurul Ilmi

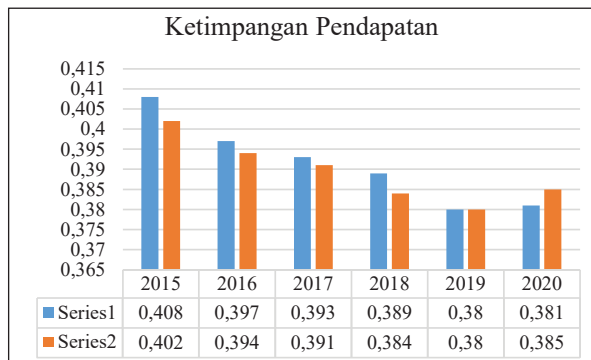
(ilmiiin1214@gmail.com)

PENDAHULUAN

Pandemi covid-19 merupakan bencana global yang tentunya dirasakan oleh seluruh negara. Pandemi ini mengakibatkan penurunan kinerja di beberapa negara. *International Monetary Fund* (IMF) menyebutkan bahwa dampak dari covid-19 akan sama dengan krisis ekonomi di tahun 1997. Dalam menghadapi pandemi ini, pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan yang mengharuskan masyarakatnya untuk tetap di rumah dan menghindari segala aktivitas di luar rumah demi mengurangi penyebaran virus. Kebijakan tersebut menyebabkan penurunan daya beli masyarakat Indonesia yang kemudian menurunkan kinerja perusahaan dan mengharuskan perusahaan untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan. Pengurangan biaya dilakukan dengan pengurangan karyawan (Putus Hubungan Kerja) dan pengurangan pembayaran intensif karyawan.

Dengan menurunnya jumlah dan sumber penghasilan masyarakat menjadikan distribusi pendapatan di Indonesia tidak merata. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ruiz Estrada (2020) menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang terinfeksi virus dapat menunjukkan level ketimpangan pendapatan sebuah daerah. Permasalahan distribusi pendapatan sebenarnya sudah menjadi tugas bagi negara berkembang, begitu pula dengan negara Indonesia. Sehingga pandemi ini dapat dikatakan menambah tugas pemerintah dalam mengurangi angka atau tingkat ketimpangan pendapatan negara. Ketimpangan pendapatan yang meningkat menandakan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hindun et al. (2019) menjelaskan bahwa distribusi pendapatan yang adil jika seluruh masyarakat dapat menikmati hasil produksi nasional sehingga masyarakat lebih sejahtera. Sehingga apabila suatu wilayah mengalami ketimpangan pendapatan yang tinggi, maka kesejahteraannya akan rendah.

Grafik 1. Ketimpangan Pendapatan Indonesia Tahun 2015-2020



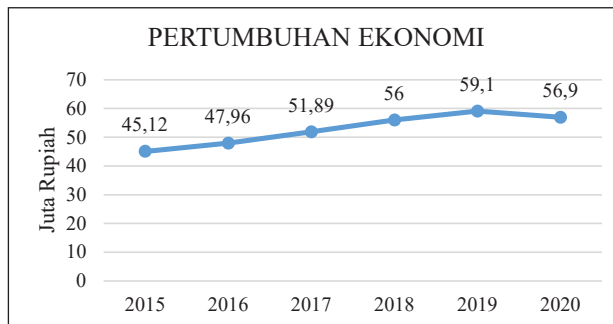
Sumber: data BPS

Berdasarkan grafik di atas, ketimpangan pendapatan di Indonesia terus menurun dari tahun 2015 hingga tahun

2019. Tetapi, ketimpangan pendapatan Indonesia mengalami peningkatan sebesar 0,005 sehingga angka ketimpangan pendapatan di tahun 2020 adalah sebesar 0,385. Berdasarkan angka gini ratio, ketimpangan Indonesia berada pada tingkat rendah.

Tidak hanya pada ketimpangan pendapatan, tetapi pada pertumbuhan ekonomi pun mengalami penurunan. Wahyudianto, Suman, dan Wahyudi (2020) mengatakan kriteria suksesnya sebuah pengembangan dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di antara masyarakat dan sektor-sektor perusahaan. Penurunan kinerja perusahaan di beberapa sektor menjadikan pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2015-2020

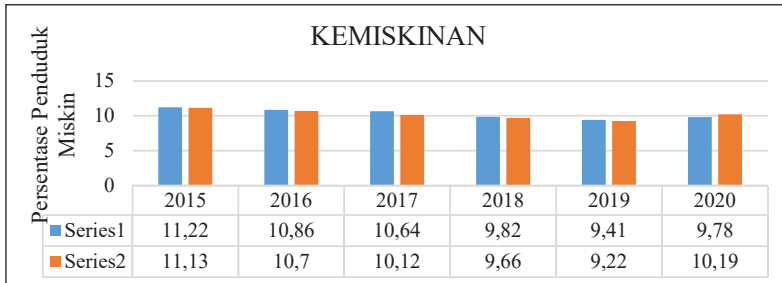


Sumber: databoks.katadata

Berdasarkan grafik tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditunjukkan melalui produk domestik bruto per kapita diketahui terus meningkat dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Tetapi, pada masa pandemi, pertumbuhan ekonomi menurun sebesar 2,2 juta rupiah sehingga PDRB per kapita tahun 2020 menjadi 56,9 juta rupiah.

Selain itu, angka kemiskinan di Indonesia pun mengalami peningkatan selama masa pandemi, dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3. Kemiskinan Indonesia Tahun 2015-2020



Sumber: data BPS

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa angka kemiskinan di Indonesia juga terus menurun dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Tetapi, dengan adanya pandemi ini mengakibatkan peningkatan persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2020 menjadi 10.19%, meningkat sebesar 0.87%.

Ketimpangan pendapatan memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di suatu daerah. Sebagaimana yang dijelaskan Kuznet dalam Todaro & Smith, (2011), ketimpangan pendapatan akan mengalami peningkatan hingga pada titik tertentu pada awal pembangunan, kemudian akan menurun kembali. Hal ini dijelaskan Todaro & Smith (2011) di mana berdasarkan model Lewis bahwa pada tahap awal pertumbuhan akan terkonsentrasi pada sektor industri modern di mana lapangan kerja terbatas tetapi upah dan produktivitas tinggi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Brueckner & Lederman (2018) menemukan hubungan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan ada-

lah positif di negara yang berpendapatan rendah dan berhubungan negatif di negara yang berpendapatan tinggi. Rubin & Segal (2015) melakukan penelitian di Amerika dan menemukan hubungan yang positif antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Begitupula dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyudianto, Suman, dan Wahyudi (2020) yang menemukan hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Mereka menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah lainnya, sehingga menyebabkan peningkatan ketimpangan pendapatan. Tetapi, Iyke & Ho (2017) menemukan ketimpangan pendapatan memiliki dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi di Italia baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Lee & Son (2016) juga menemukan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki efek yang negatif bagi pertumbuhan ekonomi. Begitupula dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahiba & Weriemmi (2014) yang menemukan hubungan negatif antara ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di Tunisia.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat ketimpangan pendapatan dan hubungan ketimpangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai tingkat ketimpangan pendapatan di NTB dan bagaimana hubungan ketimpangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

KAJIAN LITERATUR

Teori Ketimpangan Pendapatan

Suatu ketimpangan selalu mengacu pada perbandingan antar elemen. Lucky & Sam (2018) menjelaskan perbedaan pada ketimpangan dapat berupa segala hal antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak menerima jumlah yang besar daripada pihak lainnya. Kyroglou (2017), ketimpangan pendapatan mengacu pada perbedaan yang diidentifikasi dalam uang yang diperoleh dan standar kesejahteraan secara keseluruhan di antara berbagai kelompok orang atau populasi. Piketty (2014) dalam Kyroglou (2017), alasan utama yang mendorong ketimpangan pendapatan adalah meningkatnya ketimpangan upah dan gaji, terutama antara tenaga kerja berketerampilan tinggi dan rendah, serta antara negara maju dan negara berkembang. Di Falco (2014) dalam Laskiene et al. (2020) mengatakan ketimpangan pendapatan muncul dari interaksi berbagai faktor. Kemudian Laskiene et al. (2020) menambahkan bahwa ketimpangan pendapatan dapat dipengaruhi oleh wilayah, jenis kelamin, pendidikan, agama, status sosial, dan faktor lainnya. Todaro & Smith (2011) menjelaskan pengentasan ketimpangan pendapatan harus dilakukan karena ketimpangan ini dapat menyebabkan inefisiensi ekonomi, merusak stabilitas sosial dan solidaritas, dan ketidakadilan.

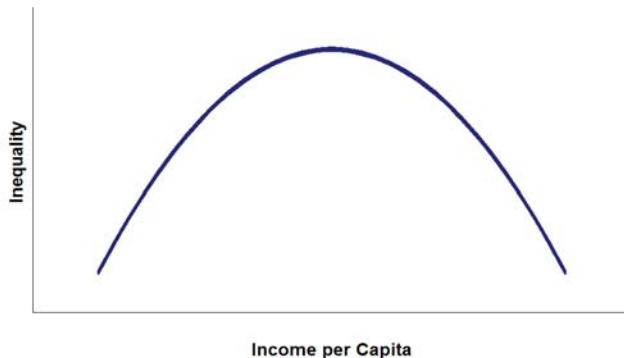
Ketimpangan Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan Kuznets (1955) dalam Kaasa (2005) menjelaskan hubungan antara pembangunan ekonomi (GDP per kapita) dengan ketimpangan pendapatan berbentuk U

terbalik. Kuznets menjelaskan bahwa ketika GDP meningkat, maka pertama-tama ketimpangan pendapatan akan meningkat dan kemudian akan menurun pada satu titik tertentu. Menurut Kuznets dalam Aguslilim (2016) peningkatan ketimpangan pendapatan pada awal pembangunan disebabkan oleh proses urbanisasi dan industrialisasi. Kemudian, penurunan ketimpangan pendapatan di akhir proses pembangunan disebabkan oleh sektor-sektor ekonomi di daerah perkotaan sudah mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja yang berasal dari pedesaan. Berdasarkan hipotesis Kuznets, maka kurva U terbalik dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Kurva U Terbalik



Niyimbanira (2017) menjelaskan bahwa distribusi pendapatan di suatu negara diasumsikan berfluktuasi dari kesetaraan relatif menjadi ketidaksetaraan dan kembali ke kesetaraan yang lebih besar seiring dengan berkembangnya suatu negara. Ia menambahkan bahwa pendapatan per kapita adalah pengukuran pertumbuhan ekonomi yang efektif sehingga ia menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Maka, secara teori, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan di periode tertentu.

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan keadaan ekonomi masyarakat di mana mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Lucky & Sam (2018) mengatakan kemiskinan terjadi ketika seseorang tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi standar hidup tertentu. Sehingga kemiskinan dipengaruhi oleh pendapatan seseorang maupun suatu kelompok. Ogbeide & Agu (2015), distribusi pendapatan yang lebih baik dapat membantu masyarakat yang berpenghasilan paling rendah untuk meningkatkan pendapatannya sehingga mereka dapat keluar dari kemiskinan. Bourguignon (2004) dalam Ogbeide & Agu (2015) menjelaskan bahwa kemiskinan dan ketimpangan pendapatan secara teori telah diidentifikasi berhubungan erat dan keberadaan salah satunya sering menyiratkan keberadaan yang lainnya. Ogbeide & Agu (2015) juga menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan dapat memiliki hubungan langsung dan tidak langsung dengan kemiskinan. (1) hubungan langsung lebih jelas ketika melihat per individu di mana seseorang atau sekelompok orang tidak memiliki cukup nafkah untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup serta mengasuh anak-anaknya dalam hal pengembangan sumber daya manusia (pendidikan dan kesehatan) sehingga mereka tergolong miskin. (2) sedangkan hubungan tidak langsung ditunjukkan melalui pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan lain-lain.

Ketimpangan Pendapatan dalam Islam

Salah satu prinsip agama islam adalah kesejahteraan masyarakat. Setiap bidang yang diajarkan dalam islam mengandung prinsip kesejahteraan masyarakat. Sebuah ketimpangan merupakan hal yang berlawanan dengan islam. Begitu pula dengan ketimpangan pendapatan. Chaudry

(2012) dalam Fadila (2019) menjelaskan bahwa islam melarang pemusatan kekayaan, pendapatan, dan sumber daya ekonomi hanya di beberapa orang. Fadila (2019) mengatakan bahwa islam mendorong distribusi dan sirkulasi kekayaan, pendapatan, dan sumber daya ekonomi yang adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat, sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

"Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya."

Makna agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu secara terang-terangan melarang adanya ketimpangan distribusi pendapatan. Islam menyuruh kepada umatnya agar distribusi pendapatan dilakukan secara adil sehingga tidak ada seorang umat yang tidak mendapatkan pendapatan. Distribusi yang adil dijelaskan Fadila (2019) sebagai pembagian pendapatan yang sesuai dengan proporsinya berdasarkan kontribusi setiap orang terhadap aktivitas perekonomian. Ia menambahkan bahwa islam melarang penimbunan dan peredaran kekayaan hanya di mereka yang kaya dan melarang eksploitasi orang miskin agar tidak tercipta kesenjangan ekonomi yang besar. Al-Bukhari (2001) dalam Bashir (2018) they are promised eternal bliss and everlasting happiness in the life to come. On the other hand, zakāh evasion is considered a punishable crime (in this life and the hereafter juga memaparkan

kandungan hadits riwayat Muslim nomor 2664 bahwa bekal yang lebih baik adalah yang didapatkan dari usaha sendiri. Hadits tersebut juga menjelaskan bahwa Allah lebih menyukai umatnya yang bekerja keras yang dapat bermanfaat bagi dirinya, keluarga, maupun masyarakat.

PEMBAHASAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang dilakukan secara deskriptif. Penelitian ini mendeskripsikan data-data yang diperoleh dan melakukan pengolahan data. Data yang digunakan bersifat sekunder yang diperoleh melalui laman resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Data yang digunakan berupa gini ratio untuk menjelaskan tingkat ketimpangan pendapatan, PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) untuk menjelaskan pertumbuhan perekonomian, dan persentase jumlah penduduk miskin untuk menjelaskan kemiskinan di suatu wilayah.

Telah banyak penelitian yang menggunakan gini ratio sebagai alat untuk mengukur ketimpangan pendapatan di sebuah wilayah. Wan (2001); Fellman (2018); Ogbeide & Agu (2015); Shmueli (2004); Ichim (2018) menjelaskan bahwa gini ratio umum digunakan dalam penelitian dan pengukuran ketimpangan pendapatan. Demenech et al. (2020) dan Shmueli (2004) menjelaskan bahwa gini ratio bervariasi dari 0 sampai 1, di mana semakin tinggi nilainya maka semakin tinggi pula ketimpangan pendapatannya. Dalam berkas DPR dijelaskan mengenai rentang koefisien gini dengan lebih rinci dalam tabel berikut:

Tabel 1. Gini Ratio

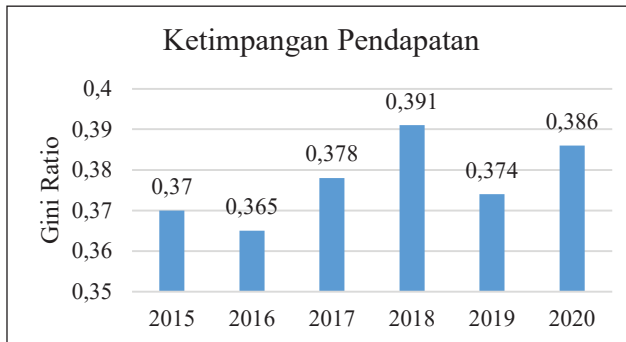
Nilai Koefisien	Distribusi Pendapatan
0	Distribusi Merata Sempurna
< 0,4	Ketimpangan Rendah
0,4 – 0,5	Ketimpangan Sedang
> 0,5	Ketimpangan Tinggi
1	Ketimpangan Sempurna

Sumber: dpr.go.id

Selanjutnya akan dibahas mengenai data-data yang telah diuji dan yang telah diperoleh. Urutan pembahasan mengenai ketimpangan akan diawali dengan penjelasan deskriptif pergerakan ketimpangan pendapatan dari tahun ke tahun dan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai hasil uji korelasi data ketimpangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Selanjutnya, pembahasan mengenai pergerakan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan serta pergerakan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Kemudian, pembahasan yang terakhir mengenai ketimpangan pendapatan dan kemiskinan kota dan desa di provinsi NTB.

Pertama, mengenai pergerakan ketimpangan pendapatan Provinsi NTB dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik di bawah:

Grafik 4. Ketimpangan Pendapatan Tahun 2015-2020



Sumber: diolah peneliti, 2021

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa ketimpangan pendapatan Provinsi NTB bergerak cenderung meningkat dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Ketimpangan pendapatan meningkat signifikan dari tahun 2017 hingga tahun 2018, kemudian menurun signifikan pada tahun 2019 dan kembali meningkat di tahun 2020. Dari grafik di atas juga dapat diketahui bahwa gini ratio di tahun 2015 adalah sebesar 0,37. Artinya, ketimpangan pendapatan di NTB pada tahun 2015 masih pada tingkat rendah. Pada tahun 2016, diketahui angka gini ratio menurun menjadi 0,365 yang artinya ketimpangan pendapatan di NTB pada tahun 2016 masih pada tingkat rendah. Pada tahun 2018, diketahui angka gini ratio meningkat menjadi 0,378 yang artinya ketimpangan pendapatan di NTB masih pada tingkat rendah. Pada tahun 2019, diketahui angka gini ratio menurun menjadi 0,374 yang artinya ketimpangan pendapatan di NTB masih pada tingkat rendah. Pada tahun 2020, diketahui angka gini ratio meningkat menjadi 0,386 yang artinya ketimpangan pendapatan di NTB sama dengan tahun-tahun sebelumnya, masih di tingkat rendah. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan dari tahun 2015 hingga tahun 2020

masih pada tingkat rendah meskipun cenderung mengalami peningkatan. Namun, angka-angka tersebut hampir mencapai angka 0,4, sehingga pemerintah perlu memperhatikan ketimpangan pendapatan di NTB agar tidak meningkat ke tingkat sedang.

Kedua mengenai hasil uji korelasi, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Korelasi

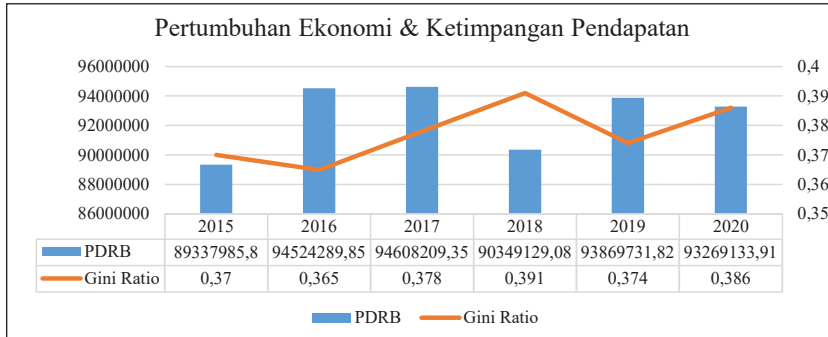
Keterangan	Korelasi
Gini Ratio & PDRB ADHK	-0,250347979
Gini Ratio & Kemiskinan	-0,724462717

Sumber: data diolah peneliti, 2021

Pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil uji korelasi antara gini ratio dengan PDRB ADHK adalah sebesar -0,25035. Dari angka tersebut, dapat diketahui bahwa hubungan antara ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB adalah negatif, di mana ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka ketimpangan pendapatan akan menurun dan sebaliknya. Namun, angka 0,25035 menunjukkan bahwa hubungan tersebut bersifat lemah. Kemudian, dapat diketahui juga bahwa hasil uji korelasi gini ratio dengan jumlah masyarakat miskin adalah sebesar -0,72446. Dari angka tersebut, dapat diketahui bahwa hubungan antara ketimpangan pendapatan dengan kemiskinan di Provinsi NTB berlawanan dengan teori yang ada. Hubungan ketimpangan pendapatan dengan kemiskinan adalah negatif, di mana ketika kemiskinan meningkat maka ketimpangan pendapatan akan menurun dan sebaliknya. Angka 0,72446 juga menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan dan kemiskinan memiliki hubungan yang kuat.

Pergerakan ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 5. Grafik Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Tahun 2015-2020



Sumber: diolah peneliti, 2021

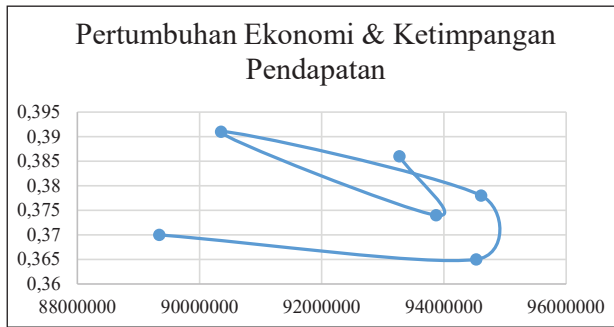
Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB bergerak fluktuatif dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan di tahun 2018 dan 2020 serta mengalami peningkatan di tahun 2017 dan tahun 2019.

Pada tahun 2016, ketimpangan pendapatan menurun seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2017, ketimpangan pendapatan meningkat seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2018, ketimpangan pendapatan meningkat seiring dengan penurunan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2019, ketimpangan pendapatan menurun seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2020, ketimpangan pendapatan meningkat seiring dengan penurunan pertumbuhan ekonomi.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa hubungan negatif kedua variabel tersebut terjadi pada tahun 2016 dan tahun 2018 hingga tahun 2020. Penurunan ketimpangan pendapatan di tahun 2016 disebabkan oleh peningkatan permintaan kredit, sehingga pertumbuhan ekonomi juga meningkat karena masyarakat banyak yang mendapatkan modal untuk usaha. Kemudian, peningkatan ketimpangan pendapatan di tahun 2018 dan tahun 2020 disebabkan oleh bencana gempa bumi dan pandemi Covid19 yang mengakibatkan hilang maupun turunnya penghasilan masyarakat Provinsi NTB sehingga menurunnya pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2019, penurunan ketimpangan pendapatan disebabkan oleh bantuan-bantuan dari berbagai wilayah serta bantuan pemerintah yang berupa dana dan pembangunan rumah anti gempa sehingga pertumbuhan ekonomi kembali meningkat. Sedangkan pada tahun 2017 menunjukkan hubungan yang positif, sesuai dengan hipotesis kuznet yang berbunyi “ketimpangan pendapatan akan meningkat ketika pemerintah melakukan pembangunan ekonomi”. Pada tahun 2017, pemerintah melakukan pembangunan ekonomi berupa pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan pelabuhan Gili Mas untuk menambah sumber penghasilan masyarakat.

Apabila data ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi dimasukkan dalam kurva kuznet, dapat diketahui bentuk kurva sebagai berikut:

Gambar 2. Kurva Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan

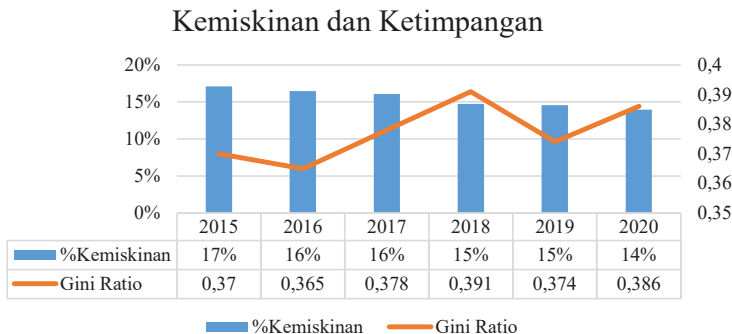


Sumber: diolah peneliti, 2021

Berdasarkan kurva di atas, dapat diketahui bahwa pergerakan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan tidak berbentuk kurva U terbalik. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya berbagai bencana yang terjadi.

Setelah melihat pergerakan ketimpangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi, selanjutnya adalah ketimpangan pendapatan dengan kemiskinan. Grafik pergerakan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan adalah sebagai berikut:

Grafik 6. Grafik Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Tahun 2015-2020



Sumber: diolah peneliti, 2021

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa persentase penduduk miskin di Provinsi NTB menurun setiap tahun. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2018. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa di tahun 2018 dan tahun 2020 terdapat bencana yang terjadi di Provinsi NTB di mana bencana tersebut dapat meningkatkan jumlah masyarakat miskin. Namun, yang terjadi adalah kemiskinan menurun di 2 tahun tersebut. Dapat dikatakan bahwa upaya pemerintah dalam menghadapi dampak bencana cukup sukses dilakukan. Upaya-upaya yang dilakukan di tahun 2018 telah disebutkan sebelumnya. Sedangkan upaya yang dilakukan di tahun 2020 berupa bantuan tunai dan berlakunya Kartu Prakerja.

Berdasarkan grafik di atas juga dapat diketahui bahwa pergerakan ketimpangan pendapatan cenderung meningkat seiring dengan penurunan kemiskinan yang dapat dilihat pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2020. Hal ini sesuai dengan hasil uji korelasi yang menunjukkan hubungan negatif yang kuat antara ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Sedangkan pada tahun 2019, ketimpangan pendapatan menurun seiring dengan menurunnya kemiskinan. Hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Bourguignon (2004) dalam Ogbeide & Agu (2015) yang menjelaskan hubungan positif antara ketimpangan pendapatan dan kemiskinan.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa di tahun 2016 pergerakan pertumbuhan ekonomi meningkat seiring dengan penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi meningkat seiring dengan penurunan tingkat kemiskinan, tetapi terjadi peningkatan pada ketimpangan pendapatan. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi menurun yang diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan ketimpangan

pendapatan. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi meningkat seiring dengan penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi menurun yang diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan ketimpangan pendapatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di NTB berada pada level rendah. Tetapi, angka yang ditunjukkan hampir mencapai level sedang. Sehingga, pemerintah dianjurkan untuk lebih memperhatikan distribusi pendapatan di NTB agar tingkat ketimpangan pendapatan tidak meningkat ke level sedang. Kemudian, berdasarkan data yang telah diolah, dapat disimpulkan bahwa hubungan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di NTB adalah negatif dan bersifat lemah. Artinya, peningkatan tingkat ketimpangan pendapatan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Sedangkan hubungan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan adalah negatif dan bersifat kuat. Artinya, peningkatan tingkat ketimpangan pendapatan akan menurunkan tingkat kemiskinan dan sebaliknya.

Pada analisis hubungan ketimpangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, data yang digunakan adalah tingkat ketimpangan pendapatan di NTB, PDRB ADHK, dan persentase penduduk miskin. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data yang lebih sesuai dengan hubungan ketiga variabel. Selain itu, diperlukan penelitian lanjutan yang menganalisis struktur ekonomi di Provinsi NTB agar dapat menjelaskan ketidaksesuaian hasil penelitian dengan teori-teori yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusalim, L. (2016). Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan Dan Desentralisasi Di Indonesia. *Kinerja*, 20(1), 53. <https://doi.org/10.24002/kinerja.v20i1.697>
- Bashir, A. H. (2018). Reducing poverty and income inequalities: Current approaches and Islamic perspective. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 31(1), 93–104. <https://doi.org/10.4197/Islec.31-1.5>
- Brueckner, M., & Lederman, D. (2018). Inequality and economic growth: the role of initial income. *Journal of Economic Growth*, 23(3), 341–366. <https://doi.org/10.1007/s10887-018-9156-4>
- Demenech, L. M., Dumith, S. de C., Vieira, M. E. C. D., & Neiva-Silva, L. (2020). Income inequality and risk of infection and death by covid-19 in brazil. *Revista Brasileira de Epidemiologia*, 23. <https://doi.org/10.1590/1980-549720200095>
- Fadila, N. R. (2019). *Correlation of Zakat Distribution With Gini Index : Maximizing the Potential of Zakat for*. 2(1), 54–65.
- Fellman, J. (2018). Income Inequality Measures. *Theoretical Economics Letters*, 08(03), 557–574. <https://doi.org/10.4236/tel.2018.83039>
- Hindun, H., Soejoto, A., & Hariyati, H. (2019). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 8(3), 250. <https://doi.org/10.26418/jebik.v8i3.34721>
- Ichim, A. (2018). Drivers and consequences of income inequality. *Risk in Contemporary Economy*, 208–214.

- Iyke, B., & Ho, S.-Y. (2017). Income Inequality and Growth: New Insights from Italy. *Economia Internazionale / International Economics*, 70(4), 419–442.
- Kaasa, A. (2005). Factors of Income Inequality and Their Influence Mechanisms : *Working Paper No 40*.
- Krokeyi, W., & Obayori, J. (2020). Income Distribution and Poverty Reduction in Nigeria. *Journal of Management Science and Entrepreneurship*, 20(7), 42–50.
- Kyroglou, G. (2017). *The Importance of Income Inequality at the Top End of the Distribution as Opposed to the Bottom End as Determinant of Growth*. November, 1–35. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.32138.52165>
- Laskiene, D., Pekarskiene, I., & Kontautiene, R. (2020). Regional income inequality in lithuania1. *Economy of Region*, 16(4), 1104–1114. <https://doi.org/10.17059/EKON.REG.2020-4-7>
- Lee, D. J., & Son, J. C. (2016). Economic Growth and Income Inequality: Evidence from Dynamic Panel Investigation. *Global Economic Review*, 45(4), 331–358. <https://doi.org/10.1080/1226508X.2016.1181980>
- Lucky, L. A., & Sam, A. D. (2018). Poverty and Income Inequality in Nigeria: An Illustration of Lorenz Curve from NBS Survey. *American Economic & Social Review*, 2(1), 80–92. <https://doi.org/10.46281/aesr.v2i1.157>
- Nguyen, H. N., Le, Q. H., & Nguyen, T. T. C. (2020). The linkages between growth, poverty and inequality in vietnam: An empirical analysis. *Accounting*, 6(2), 177–184. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2019.10.005>
- Niyimbanira, F. (2017). *International Journal of Economics and Financial Issues Analysis of the Impact of Economic Growth on Income Inequality and Poverty in South*

- Africa: The Case of Mpumalanga Province*. 7(4), 254–261.
- Ogbeide-osaretin, E. N., Ifelunini, I., & Ugwu, S. (2017). *Examination of the Dynamic Relationship Between Poverty and Inequality: Evidence from Nigeria Micro Data*. February 2020.
- Ogbeide, E. N. O., & Agu, D. O. (2015). Poverty and Income Inequality in Nigeria: Any Causality? *Asian Economic and Financial Review*, 5(3), 439–452. <https://doi.org/10.18488/journal.aefr/2015.5.3/102.3.439.452>
- Rubin, A., & Segal, D. (2015). The effects of economic growth on income inequality in the US. *Journal of Macroeconomics*, 45, 258–273. <https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2015.05.007>
- Ruiz Estrada, M. A. (2020). Can COVID-19 Shows Income Inequality? *SSRN Electronic Journal*, June. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3638160>
- Shmueli, A. (2004). Population health and income inequality: New evidence from Israeli time-series analysis. *International Journal of Epidemiology*, 33(2), 311–317. <https://doi.org/10.1093/ije/dyh035>
- Todaro, M., & Smith, S. C. (2011). Chapter 5: Poverty, Inequality and Development. In *Economic Development*.
- Wahiba, N. F., & Weriemmi, M. El. (2014). The relationship between economic growth and income inequality. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 4(1), 135–143.
- Wahyudianto, Hendra Eka., Suman, Agus., Wahyudi, Setyo Tri. (2020). Economic Growth, Income Inequality, and Poverty in West Kalimantan. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics, and Law*, 21(5), 31-35.

- Wan, G. H. (2001). Changes in regional inequality in rural China: Decomposing the Gini index by income sources. *Australian Journal of Agricultural and Resource Economics*, 45(3), 361–381. <https://doi.org/10.1111/1467-8489.00148>
- Young, A. O. (2019). Does reduction in inequality of income distribution matter for poverty reduction? Evidence from Nigeria's poverty trends. *International Research Journal of Finance and ...*, April. https://www.researchgate.net/profile/Ademola_Young/publication/332343265_Does_Reduction_in_Inequality_of_Income_Distribution_Matter_for_Poverty_Reduction_Evidence_from_Nigeria's_Poverty_Trends/links/5caedb0a299bf120975d780a/Does-Reduction-in-Inequality-of

FAKTOR PENYEBAB PENGANGGURAN DAN *PROBLEM SOLVING* PEMERINTAH DALAM MENGATASI PENGANGGURAN BERDASARKAN ANGKATAN KERJA DI KAB BONE TAHUN 2020

Dr. M. Yazid Afandi

(mukhamad.afandi@uin-suka.ac.id)

Iin Priany Poetri

(Iinprianypoetri05@gmail.com)

PENDAHULUAN

Penduduk merupakan salah satu modal utama dalam pembangunan. Penduduk yang berkualitas baik secara jasmani maupun rohani yang memiliki kemampuan dan keterampilan akan sangat membantu dalam pembangunan. Dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah tidak terlepas oleh kontribusi berbagai sumber daya yang ada didalamnya yang dapat dilihat dari meningkatnya aktivitas, produktivitas dan pendapatan suatu daerah. Jumlah penduduk juga merupakan salah satu dari beberapa indikasi berkembangnya pembangunan ekonomi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 terdapat sebanyak 270.203.917

penduduk Indonesia yang terbagi atas 137,91 penduduk yang termasuk angkatan kerja.

Mengingat terbatasnya sumber-sumber produksi dan keterbatasan kemampuan pemerintah tentunya dikaitkan dengan jumlah penduduk yang demikian besar menjadikan tidak tertampungnya seluruh angkatan kerja di dalam dunia pekerjaan. Kondisi inilah yang menjadi pemicu terjadinya pengangguran yang setiap tahun jumlah angka pengangguran terus mengalami peningkatan yang dikarenakan setiap bertambahnya jumlah angkatan kerja tidak diimbangi dengan peningkatan daya tampung lapangan pekerjaan oleh pemerintah (Aljileedi Mustafa Rayhan et al., 2020). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut (Dongoran, 2016).

Upaya pemerintah harus meningkatkan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat dalam meningkatkan jiwa kewirausahaan, memperluas usaha kecil menengah, agar dapat mandiri secara ekonomi (Franita, 2016). Angka pengangguran akan berkurang seiring dengan perbaikan ekonomi yang dilakukan pemerintah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Probosiwi (2016) mengemukakan bahwa berhasilnya penanggulangan pengangguran di Kota Yogyakarta diperlukan komitmen yang kuat, konsisten, dan konsekuen dari semua pihak, baik dari unsur pemerintah, swasta maupun masyarakat

Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan di dalam dan di luar negeri untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Sugianto & Permadhy (2020)

faktor penyebab terjadinya pengangguran salah satunya dari sisi pendidikan, tidak memiliki keterampilan yang memadai, lapangan kerja yang minim pada daerah tersebut dan keterbatasan menerima informasi

Pengangguran pada usia produktif yang disebabkan oleh kurangnya keterampilan (Axelrad et al., 2018). Permasalahan serupa juga dialami salah satu daerah di Sulawesi Selatan yakni Kab. Bone memiliki lapangan kerja yang cukup memadai, namun sumber daya yang ada belum mampu untuk memenuhi kriteria yang diminta. Penelitian yang dilakukan oleh Permadhy (2020) bahwa faktor penyebab terjadinya pengangguran salah satunya dari sisi pendidikan, tidak memiliki keterampilan yang memadai, lapangan kerja yang minim pada daerah tersebut dan keterbatasan menerima informasi.

Kab. Bone memiliki presentase tingkat pengangguran sebesar 11.260 jiwa yang dimana Kab. Bone menduduki urutan ketiga penyumbang pengangguran terbesar dari 24 kabupaten/kota dalam wilayah Sulawesi Selatan yang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1 Indikator Ketenagakerjaan Terbesar Prov. Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Angkatan Kerja		
		Bekerja	Pengangguran	Total
1.	Makassar	585.325	110.833	696.158
2.	Gowa	368.615	25.385	394.000
3.	Bone	340.746	11.260	352.006
4.	Maros	155.993	10.453	166.446
5.	Wajo	203.816	9.221	213.037
6.	Palopo	76.211	8.815	85.026

Sumber: BPS Kab. Bone, 2021

Tingginyatingkatpengangguran,otomatisakanmenjadi penghambat dalam proses pembangunan dan pertumbuhan Kab. Bone. Jika diukur berdasarkan daerah tempat tinggal, TPT daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan, yaitu sebesar 8,71 % untuk perkotaan dan 1,59 % untuk perdesaan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Bone Tahun 2020

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)		Sebaran TPT	
Perkotaan	8,71%	Laki-laki	3,9%
Pedesaan	1,59%	Perempuan	2,15%

Sumber: BPS Kab. Bone, 2021

Pada tabel diatas, jumlah pengangguran di perkotaan lebih banyak dibandingkan pengangguran yang ada di pedesaan. Lapangan pekerjaan di daerah pedesaan khususnya sektor pertanian mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dibandingkan daerah perkotaan karena masih tersedianya lahan pertanian yang luas dan tidak memerlukan pendidikan yang tinggi untuk bekerja di sektor tersebut. Berdasarkan lapangan pekerjaan utama, sektor pertanian masih menjadi sektor utama yang banyak menyerap tenaga kerja (Priastiwi & Handayani, 2019). Selanjutnya tinjau menurut jenis kelamin, TPT laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, yaitu 3,9% untuk laki-laki dan 2,15% untuk perempuan. Keadaan ini dikarenakan perempuan cenderung bekerja di sektor informal seperti pekerja tidak dibayar atau yang membuka usaha informal di rumah, misalnya menjual makanan yang dimasak sendiri.

Maka berdasarkan data di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai faktor-faktor penyebab pengangguran serta solusi (Problem Solving) pemerintah

untuk mengatasi masalah pengangguran di Kab. Bone pada tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor penyebab tingginya pengangguran di Kab. Bone serta untuk mengetahui solusi pemerintah untuk mengatasi permasalahan pengangguran pada tahun 2020.

Mengacu pada tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka selanjutnya penelitian ini diupayakan memiliki manfaat dalam proses dan hasilnya dengan memperhatikan bidang-bidang implikasi dari manfaat yang diharapkan adalah dalam bidang praktik yang dapat bermanfaat bagi komponen penelitian secara praktis yang mewakili subjek wilayah pemerintah Kab. Bone dan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai informasi faktor-faktor penyebab pengangguran dan solusi pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Serta penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan perluasan lapangan tenaga kerja khususnya Kab. Bone Sulawesi Selatan tahun 2020.

KERANGKA TEORITIS

Search Theory yang diperkenalkan oleh Milton Friedman yang mengemukakan bahwa pengangguran disebabkan karena sejumlah orang yang menganggur karena orang tersebut keluar dari pekerjaannya yang lama dan memilih untuk mencari pekerjaan yang lebih baik (Engka, 2019). Selanjutnya terdapat pula Theory of Intertemporal Subtitusion menjelaskan pekerja dianggap sama dengan pemilik modal dalam menawarkan tenaga kerja di pasar. Artinya pekerja memiliki fleksibilitas untuk menentukan jam kerja. Dalam konteks ketenagakerjaan, penduduk dibagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Angkatan kerja digolongkan dengan penduduk usia kerja (15-64 tahun) yang terdiri dari mereka yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja atau pengangguran (Dongoran, 2016). Maka yang termasuk sebagai angkatan kerja adalah mereka yang bekerja, menganggur dan yang mencari pekerjaan. Adapun penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja adalah penduduk usia (15-64 tahun) yang masih menempuh pendidikan, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya (Bps, 2020).

Pengangguran dapat diartikan sebagai seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan. Permasalahan yang timbul ke permukaan berkaitan dengan pesatnya pertumbuhan penduduk adalah ketidakseimbangan antara pertumbuhan lapangan pekerjaan dengan tingkat tenaga kerja yang semakin bertambah. Hal ini akan menimbulkan kelebihan penawaran tenaga kerja dibandingkan dengan permintaannya. Sehingga fenomena ini memunculkan adanya pengangguran.

Pengangguran termasuk masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung. Bagi kebanyakan orang kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis (Kolibu et al., 2019). Pengangguran merupakan mereka tergolong angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau mereka yang mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja.

Dengan konsep atau definisi tersebut biasanya disebut sebagai penganggur terbuka. Secara singkat pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja yang ingin mendapatkan kerja tetapi mereka

belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut (Hartanto, 2017). Kesamaan konsep yang digunakan mengenai batasan penganggur oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Pusat Statistik, bahwa penganggur merupakan bagian dari angkatan kerja yang kegiatan utamanya aktif mencari pekerjaan dengan jumlah jam, minimal satu jam per minggu (Probosiwi, 2016b).

Di satu sisi pengangguran menunjukkan adanya selisih antara permintaan (demand for labor) dan penawaran tenaga kerja (supply of labor) dalam suatu perekonomian. Diluar itu terdapat juga sebab-sebab non ekonomis seperti pranata, sikap dan pola tingkah laku yang berhubungan dengan pengamanan hak kerja, serta keinginan penganggur untuk menerima jenis pekerjaan yang lebih cocok dengan kualifikasi, aspirasi atau selera mereka (Kolibu et al., 2019).

Dalam perspektif Islam, ditekankan dengan tegas baik di al-Quran maupun hadits yang menganjurkan manusia untuk bekerja keras dan cerdas. Bahkan Islam menganggap bahwa bekerja merupakan salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah, sehingga bekerja dinilai sebagai bentuk ibadah karena dengan bekerja berarti seseorang telah memanfaatkan sumber daya yang telah disediakan oleh Allah (Subhan, 2018). Sebaliknya, menganggur berarti menyia-nyiakan amanah Allah.

Segala urusan untuk memenuhi kebutuhan itu sendiri dalam Islam telah dijelaskan diberbagai ayat al-Quran yang menunjukkan bahwa setiap manusia sebenarnya dianjurkan untuk bekerja dan melakukan usaha guna memenuhi kebutuhan sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran surah Ash-Sharsh (94:7-8) berikut:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

Artinya: Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

Jika orang-orang yang wajib bekerja telah berupaya mencari pekerjaan, namun ia tidak memperoleh pekerjaan sementara ia mampu bekerja dan telah berusaha mencari pekerjaan tersebut, maka peran pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan atau memberikan berbagai fasilitas agar orang yang bersangkutan dapat bekerja untuk mencari nafkah penghidupan. Rasulullah saw bersabda:

الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته (رواه مسلم)

Artinya: “Seorang Imam (Khalifah) adalah adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya.” (HR Muslim).

Menurut Al-Badri tahun 1992 dalam Sutjipto (2003), menceritakan bahwa suatu ketika Amirul Mukminin, Umar bin Khathab ra memasuki sebuah masjid di luar waktu shalat lima waktu. Didapatinya ada dua orang yang sedang berdoa kepada Allah SWT. Umar ra lalu bertanya: “Apa yang sedang kalian kerjakan, sedangkan orang-orang di sana kini sedang sibuk bekerja? Mereka menjawaba; “Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah SWT.” mendengar jawaban tersebut, maka marahlah Umar ra seraya berkata: “Kalian adalah orang-orang yang malas bekerja, padahal kalian tahu bahwa langit tidak akan menurunkan hujan emas dan perak. Kemudian Umar ra. mengusir mereka dari mesjid namun memberi mereka setakar biji-bijian. Beliau mengatakan: “Tanamlah dan bertawakkallah kepada Allah SWT.”

Berdasarkan keadaan tersebut, maka jelas bahwa siapapun yang berada di muka bumi ini pada dasarnya diwajibkan atas mereka untuk bekerja sebagai pemenuhan kebutuhan individu. Dari hadist tersebut juga disebutkan bahwa langit tidak akan menurunkan hujan emas dan perak. Artinya apabila seseorang tidak melakukan suatu usaha (bekerja) maka tidak akan ada pula keberkahan yang didapatkan.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan format desain deskriptif kualitatif. Menurut Hasim (2018) mengemukakan bahwa metode deskriptif dapat di artikan sebagai prosedur dalam pemecahan suatu problem penelitian dengan menggambarkan keadaan objek atau subjek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan sebagaimana adanya.

Dalam deskriptif kualitatif, pengumpulan data dan analisis berjalan seiring untuk mengembangkan suatu teori yang substantif berdasarkan data empirik yang berhubungan dengan aspek sosial ekonomi (Sugianto & Permadhy, 2020). Menurut Sugiyono (2015), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.

Objek penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan yang terbagi kedalam 27 kecamatan dengan presentasi tingkat pengangguran sebesar 3,25% dengan sebaran yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.3 Sebaran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kab. Bone Tahun 2020**

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	
Perkotaan	8,71%
Pedesaan	1,59%

Sumber: BPS Kab. Bone, 2021

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS Kab. Bone, literatur lain baik buku, dokumen, jurnal maupun artikel yang berkaitan tingkat pengangguran di suatu wilayah.

Kabupaten Bone adalah salah satu daerah otonom di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kota Watampone dengan luas 4.593 km² yang terdiri dari 27 kecamatan, 238 desa dan 44 kelurahan (wikipedia, 2021).

Kota watampone atau yang lebih dikenal sebagai kabupaten Bone ini dalam kaitannya dengan dimensi ketenagakerjaan, yang sering dilihat adalah angka pengangguran. Salah satu persoalan pokok pembangunan kota yang dihadapi setiap tahunnya. Munculnya pengangguran disebabkan laju pertumbuhan angkatan kerja yang jauh melampaui laju pertumbuhan kesempatan kerja, sehingga mengakibatkan relatif masih tingginya angka pengangguran terbuka di kabupaten Bone.

Indikator ketenagakerjaan diperoleh dari penduduk usia 15 tahun keatas yang dikelompokkan menjadi penduduk yang termasuk angkatan kerja, bekerja, pengangguran dan penduduk bukan angkatan kerja. Penduduk angkatan kerja terdiri dari mereka yang bekerja dan menganggur (termasuk didalamnya mereka yang mencari kerja (Subhan, 2018). Sedangkan penduduk bukan angkatan kerja adalah mereka

yang sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya (Sutjipto, 2003).

Dalam membahas aspek ketenagakerjaan, pada umumnya yang paling sering dilihat adalah angka pengangguran. Salah satu persoalan pokok pembangunan kota yang dihadapi kabupaten Bone selama periode 2014-2020 adalah relatif menurun, tetapi tidak dipungkiri presentase penurunan pengangguran di kabupaten ini tidak berada dalam batas aman. Jumlah penduduk yang begitu besar masih berpotensi untuk menambah angka pengangguran.

Munculnya pengangguran ini disebabkan laju pertumbuhan angkatan kerja yang jauh melampaui laju pertumbuhan kesempatan kerja sehingga mengakibatkan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Bone masih ada. Dapat dilihat pada tabel berikut presentasi pengangguran di Kabupaten Bone tahun 2014-2020.

Tabel 1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Bone Tahun 2014-2020

	2014	2015	2017	2019	2020
Kabupaten	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)
Bone	4.96	4.36	4.55	3.25	3.20

Sumber: data diolah, 2021

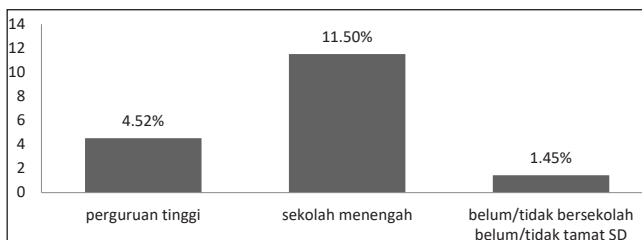
Dari tabel diatas, tingkat pengangguran di Kabupaten Bone dari tahu 2014 sampai tahun 2020 mengalami penurunan yang mulanya sebesar 4,96% hingga tahun 2020 menjadi 3,20%. Penurunan persentase pengangguran tidak selamanya dinilai berhasil, karena setiap tahunnya, wilayah ini akan tetap menciptakan angka pengangguran baru.

Hal ini pengangguran ini perlu menjadi perhatian, baik yang berkaitan langsung dengan upaya setiap orang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga dapat hidup layak dan tidak menjadi beban sosial, maupun untuk mendorong mereka supaya dapat aktif secara ekonomi.

Faktor-faktor penyebab pengangguran di kota Bone adalah yang pertama, jumlah angkatan kerja lebih besar dari pada kesempatan kerja yang tersedia (BPS, 2020). Secara umum, lapangan kerja yang tersedia di Kab. Bone sendiri dapat dikatakan cukup banyak tersedia. Namun lapangan kerja tersebut tidak cukup untuk menampung semua angkatan kerja yang bertambah setiap tahunnya. Sehingga tidak dipungkiri bahwa banyak angkatan kerja yang berasal dari Kab. Bone lebih memilih untuk mencari pekerjaan diluar Kab. Bone.

Selanjutnya adalah tingkat pendidikan yang rendah, sehingga berdampak pada sulitnya bersaing untuk mendapatkan pekerjaan dengan standar tinggi. Berdasarkan data dibawah ini, dapat dilihat pada tahun 2020 jumlah pengangguran untuk penduduk yang belum/tidak bersekolah sebesar 1,45% yang lebih memilih untuk bekerja dibidang pertanian. Hal tersebut sejalan dengan skill yang tidak memenuhi standar lapangan pekerjaan yang ada.

Gambar 1.1 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Pendidikan yang Ditamatkan dan Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Bone, 2020

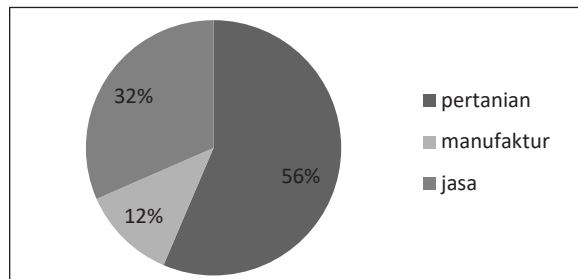


Sumber: Sakernas Mei 2021, diolah

Adanya budaya terlalu memilih pekerjaan dapat pula menjadi salah satu faktor yang menimbulkan pengangguran di Kab. Bone. Penilaian terhadap diri sendiri untuk pantas mendapatkan pekerjaan yang melebihi kemampuan. Hal tersebut secara otomatis dapat mengulur atau dapat menjadikan seseorang lebih lama untuk mendapatkan pekerjaan. Latar belakang pendidikan yang dimiliki tidak sesuai dengan pekerjaan yang ada juga menjadikan faktor terciptanya pengangguran di Kabupaten ini.

Kurangnya keterampilan yang dimiliki lulusan perguruan tinggi atau lulusan SMA/ sederajat yang telah tergolong usia kerja, namun belum memiliki keterampilan yang menunjang bidang pekerjaan atau dapat dikatakan skill terhadap pekerjaan yang diinginkan masih kurang, sehingga susah dalam bersaing mencari pekerjaan dengan lulusan yang memiliki skill. Maka kebanyakan masyarakat Kab. Bone lebih memilih untuk bekerja di bidang pertanian seperti gambar dibawah ini

Gambar 1.2. Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Bone, 2020



Sumber: Sakernas Mei 2021, diolah

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka Kab. Bone melakukan beberapa kebijakan melalui program unggulan

yang kiranya dapat mengatasi permasalahan tenaga kerja yang ada. Menurut (Disnaker, 2019) adapun program yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Program mandiri

Program mandiri ini menawarkan kegiatan kepada masyarakat yang masih tergolong angkatan kerja agar tetap dapat berkontribusi dalam lingkup perkotaan/pedesaan melalui berbagai program diantaranya:

- a. Program peningkatan pemerataan dan kualitas derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan.
- b. Program peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga medis.
- c. Penerapan inovasi dibidang kesehatan berbasis kearifan lokal.
- d. Program peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik.
- e. Penerapan inovasi dibidang pendidikan berbasis kearifan lokal.
- f. Program pembinaan dan pemberdayaan perempuan dan anak serta masyarakat penyandang disabilitas.
- g. Program pengentasan kemiskinan by name by address

Program berdaya saing

Program berdaya saing ini diciptakan agar output yang dihasilkan dapat berkualitas dan tentunya dapat dinilai baik serta berdaya saing sehingga nantinya program ini dapat dilakukan secara terus menerus. Adapun upaya pemerintah dalam menghasilkan output yang dimaksud adalah melalui

program berikut:

- a. Program penerapan E-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan Pembangunan dan Pemanfaatan Pusat Layanan Keselamatan Terpadu (Safety Center)
- b. Program pewilayahan komoditas unggulan sumber daya alam berbasis desa/kelurahan.
- c. Program menjadikan Bone sebagai Pusat Kebudayaan Bugis di Indonesia.
- d. Program pengembangan infrastruktur wilayah kecamatan luar kota (membangun desa menata kota).
- e. Program layanan data terpusat untuk pengembangan potensi dan kemudahan peluang investasi (Potential Regional Dashboard)
- f. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sumber daya alam

Program sejahtera

Program sejahtera diupayakan dapat meningkatkan kualitas masyarakat pelatihan dan bantuan sarana usaha yang ditujukan bagi tenaga kerja sukarela dan kelompok binaan melalui berbagai upaya diantaranya:

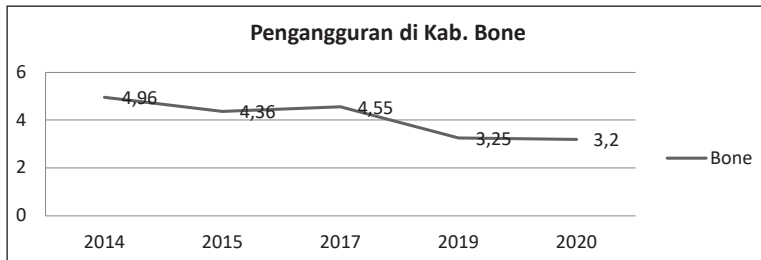
- a. Penguatan jaringan ekonomi desa dengan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa.
- b. Pembangunan pusat ekonomi kawasan kecamatan dan peningkatan bantuan modal usaha bagi industri dan UMKM
- c. Program pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- d. Program pengembangan kehidupan beragama dan pemberian insentif Imam Mesjid dan Guru Mengaji.

- e. Ekstensifikasi dan intensifikasi pemanfaatan lahan pertanian serta pemanfaatan teknologi dalam peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- f. Program pelatihan calon tenaga kerja berbasis desa/kelurahan serta fasilitasi penempatan dan pembinaan tenaga kerja.
- g. Program bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

Beberapa program yang telah disebutkan, terdapat beberapa program yang memiliki kontribusi cukup besar dalam mengatasi permasalahan pengangguran. Program pelatihan calon tenaga kerja berbasis desa/kelurahan serta fasilitasi penempatan dan pembinaan tenaga kerja dinilai bisa menambah skill angkatan kerja sehingga dapat bersaing dengan angkatan kerja lainnya. Program unggulan ini memberikan pelatihan hingga satu bulan untuk mendalami skill angkatan kerja.

Dalam kegiatannya, pelatihan tersebut mencakup pelatihan komputer, menjahit, teknisi, perakitan dll. Tentu program kegiatan tersebut disesuaikan dengan kondisi lapangan pekerjaan di Kab. Bone. Akhir dari pelatihan tersebut nantinya para angkatan kerja mendapatkan insentif yang bervariasi kiranya dimaksudkan untuk membuka lapangan pekerjaan baru sesuai dengan pelatihan yang dilakukan selama sebulan. Sehingga program tersebut berkontribusi besar dalam penurunan persentase tingkat pengangguran di Kab. Bone yang dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.3. Persentase pengangguran di Kab. Bone tahun 2014-2020



Sumber: Sakernas Mei 2021, diolah

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab pengangguran di Kab. Bone adalah kurangnya keterampilan para angkatan kerja yang disebabkan oleh pendidikan yang tidak menunjang dalam standar pekerjaan yang ada. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui berbagai program ketenagakerjaan, salah satunya adalah memberikan pelatihan kepada angkatan kerja untuk menambah skill mereka dalam menghadapi persaingan dunia kerja sehingga dapat membantu untuk mengatasi permasalahan ketimpangan ini.

Penelitian ini tentunya masih ada kekurangan sehingga disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk lebih mengkaji faktor eksternal lain dari ketimpangan ketenagakerjaan di Kab. Bone ataupun di kota-kota lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aljileedi Mustafa Rayhan, A., Rusdarti, R., & Yanto, H. (2020). Factors Influencing Unemployment Rate: A Comparison Among Five Asean Countries. *Journal Of Economic Education*. <https://doi.org/10.15294/jeec.v9i1.38358>
- Axelrad, H., Malul, M., & Luski, I. (2018). Unemployment Among Younger And Older Individuals: Does Conventional Data About Unemployment Tell Us The Whole Story? *Journal For Labour Market Research*. <https://doi.org/10.1186/S12651-018-0237-9>
- Bps. (2020). Berita Resmi Statistik. *Bps.Go.Id*.
- Bps. (2020). *Bone 2020*.
- Disnaker. (2019). *Visi Dan Misi Pemerintah Kabupaten Bone 2018-2023*. Disnaker. <https://disnaker.bone.go.id/2019/11/20/visi-dan-misi-pemerintah-kabupaten-bone-2018-2023/>
- Dongoran, F. (2016). Analisis Jumlah Pengangguran Dan Ketenagakerjaan Terhadap Keberadaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Medan. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.30596/edutech.v2i2.599>
- Engka, D. S. M. (2019). Pengangguran Di Sulawesi Utara The Effect Of Working Workforce And Total Population Towards Unemployment Rate In North Sulawesi. *Emba*.
- Franita, R. (2016). Analisa Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*.
- Hartanto, T. B. (2017). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum Dan Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Terhadap Jumlah Pengangguran

- Di Kabupaten Dan Kotaproinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*. <https://doi.org/10.20473/jiet.V2i1.5502>
- Hasim, D. (2018). Studi Komparatif Tereduksinya Kampung Nelayan Di Kota Tidore Kepulauan Dan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara (Studi Kasus *Jurnal Ekonomi Pembangunan (Jepa)*.
- Kolibu, M.-, Rumat, V. A., & Engka, D. S. M. (2019). Pengaruh Tingkat Inflasi, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*. <https://doi.org/10.35794/jpekd.16456.19.3.2017>
- Permadhy, Y. T. (2020). *Penanganan Permasalahan Pengangguran Pada Desa Bojongcae , Cibadak Lebak*. 2(3), 54–63.
- Priastiwi, D., & Handayani, H. R. (2019). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum, Dan Pdrb Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Journal Of Economics*.
- Probosiwi, R. (2016a). Pengangguran Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kemiskinan. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 15(02), 89–100.
- Probosiwi, R. (2016b). Pengangguran Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kemiskinan. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*.
- Subhan, M. (2018). Pengangguran Dan Tawaran Solutif Dalam Perspektif Islam. *Jes (Jurnal Ekonomi Syariah)*. <https://doi.org/10.30736/jesa.V3i2.44>
- Sugianto, & Permadhy, Y. T. (2020). Faktor Penyebab Pengangguran Dan Strategi Penanganan Permasalahan

Pengangguran Pada Desa Bojongcae, Cibadak Lebak Provinsi Banten. *Jurnal Ikra_Ith Ekonomika*.

Sugiyono. (2015). Sugiyono, Metode Penelitian Dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D , (Bandung: Alfabeta, 2015), 407 1. *Metode Penelitian Dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*.

Sutjipto, H. (2003). Solusi Islam Terhadap Masalah Ketenagakerjaan. *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*. <https://doi.org/10.29313/Mimbar.V19i4.118>

Wikipedia. (N.D.). *Kab. Bone*. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bone

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGURANGI KEMISKINAN DI KABUPATEN KUNINGAN

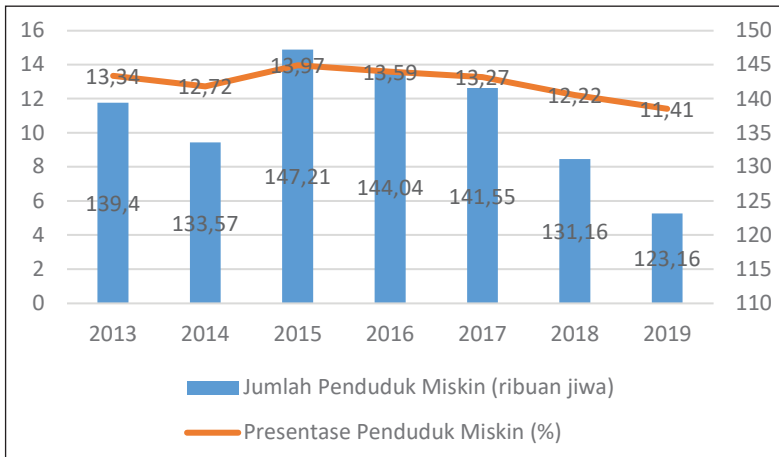
Dr. Syafiq M. Hanafi
(syafiq.hanafi@uins-suka.ac.id)

Fudzi Hanafi
(fudzihanafi28@gmail.com)

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang terjadi di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Kuningan. Menurut BPS Kabupaten Kuningan (2020), jumlah penduduk miskin Kabupaten Kuningan pada tahun 2019 sebanyak 123,16 ribu jiwa atau 11,41 persen dari total keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Kuningan. Selama kurun waktu 2013 sampai 2019, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kuningan mengalami perubahan yang cukup fluktuatif.

**Grafik 1.1 Perkembangan Jumlah dan Persentase
Penduduk Miskin Kabupaten Kuningan tahun 2013–2019**

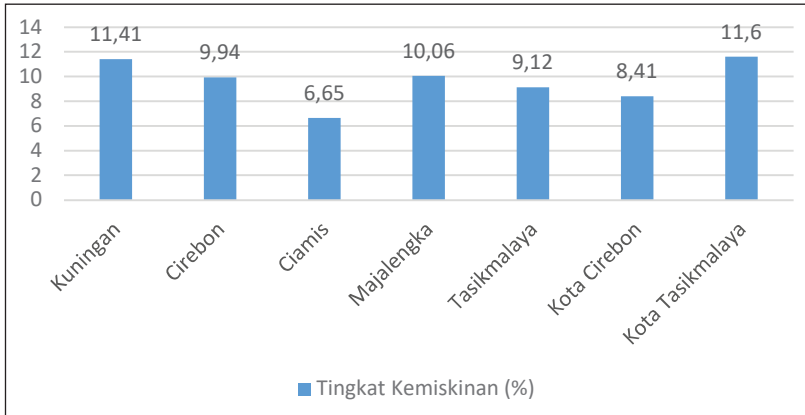


Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2018

Berdasarkan grafik 1.1. dapat dilihat, dalam periode 2013 – 2019 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kuningan menurun, sebanyak 7,9 ribu jiwa berhasil keluar dari garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kuningan terjadi peningkatan dari tahun 2014 sebesar 12,72%, pada tahun 2015 menjadi sebesar 13,97%. Kemudian pada kurun waktu 2015 – 2019 tingkat kemiskinan di Kabupaten Kuningan mengalami penurunan menjadi 11,41%.

Secara umum, pada periode 2013 – 2019, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kuningan mengalami penurunan sebesar 0,81%. Akan tetapi penurunan angka persentase masih relatif lamban, apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Jawa Barat terutama wilayah yang dekat secara geografis, Kabupaten Kuningan terbilang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi di Provinsi Jawa Barat.

Grafik 1.2 Perkembangan Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Kuningan dan Sekitarnya Tahun 2019



Sumber: BPS Jawa Barat, 2019

Dari grafik 1.2 terlihat bahwa apabila dibandingkan dengan Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat, terutama Kabupaten sekitar yang berdekatan secara geografis, Kabupaten Kuningan lebih tinggi tingkat kemiskinannya, menempati posisi ke-2 dengan tingkat kemiskinan sebesar 12,22% setelah Kota Tasikmalaya dengan tingkat kemiskinan sebesar 12,71%.

Pada tahun 2020 pasca terjadinya Covid-19, BPS Provinsi Jawa Barat (2021) menerangkan bahwa angka persentase penduduk miskin Kabupaten Kuningan kembali mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar 11,41% dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 12,82%. Ada kenaikan 1,41% atau sekitar 16 ribu jiwa penduduk Kabupaten Kuningan masuk dalam kategori penduduk miskin baru.

Todaro & Smith (2011) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan adalah tingkat pendapat yang rendah, dilanjut dengan pertumbuhan

ekonomi rendah, distribusi pendapatan tidak merata, fasilitas kesehatan masih terbatas, dan tingkat pendidikan yang masih rendah.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis kondisi kemiskinan di Kabupaten Kuningan dengan menggunakan indikator MPI (Multi-dimensional Poverty Index), (2) menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan di Kabupaten Kuningan (3) menganalisis kebijakan-kebijakan apa saja yang sudah dilaksanakan Pemerintah Daerah Kuningan dalam upaya mengatasi kemiskinan di Kabupaten Kuningan.

LANDASARAN TEORI

Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensional. Kemiskinan adalah kondisi di mana masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar. BPS menerangkan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan dalam memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi makanan maupun non makanan (BPS, 2018). Sementara World Bank (2007) memperluas definisi kemiskinan hingga mencakup dimensi-dimensi lain, seperti konsumsi, pendidikan, kesehatan dan akses infrastuktur.

Pada dasarnya definisi tentang kemiskinan dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut dilihat dari kondisi tingkat pendapatan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan kemiskinan relatif dilihat dari ketimpangan sosial yang diukur dari ketimpangan pendapatan antara golongan atas dan golongan bawah.

Todaro (2011) menyebutkan ada beberapa faktor penyebab kemiskinan yang terjadi di negara berkembang,

diantaranya adalah: (1) perbedaan geografis, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan, (2) perbedaan sejarah, (3) perbedaan kekayaan alam dan kualitas sumber daya manusia, (4) perbedaan peranan sektor swasta dan negara, (5) perbedaan struktur industri, (6) *perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik negara lain dan (7) perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik, dan kelembagaan dalam negeri.*

Melihat pemaparan Todaro (2011) memperlihatkan bahwa hubungan antara kemiskinan tidak bisa dilihat hanya dari aspek ekonomi saja, akan tetapi harus dilihat juga dari aspek non ekonomi. Setidaknya faktor yang mempengaruhi kemiskinan adalah tingkat pendapat yang rendah, dilanjut dengan pertumbuhan ekonomi rendah, distribusi pendapatan tidak merata, fasilitas kesehatan masih terbatas, dan tingkat pendidikan yang masih rendah dan juga dimensi pemerintah dan struktur politik.

Pada awal perkembangan ekonomi pembangunan, kemiskinan hanya diukur melalui pendekatan ekonomi saja. Akan tetapi di era sekarang muncul gagasan mengukur kemiskinan dengan memperhatikan aspek non ekonomi. Menurut *Bourgignon & Chakravarty (2003)* bahwa *kemiskinan atau kesejahteraan seseorang tergantung pada variabel keuangan maupun non keuangan, oleh karena itu pengukuran kemiskinan harus didasarkan pada indikator-indikator pendapatan atau pengeluaran dan juga pada indikator-indikator non-income sehingga dapat mengidentifikasi aspek-aspek dari kesejahteraan atau kemiskinan yang tidak tertangkap oleh hanya variabel pendapatan.*

Kemudian pada tahun 2020 UNDP menerapkan indeks kemiskinan dengan menggunakan Multidimensional Poverty Index (MPI). MPI merupakan ukuran kemiskinan

multidimensional yang dihitung dengan menggunakan metode perhitungan Alkire-Foster Methodology yang dikembangkan oleh Alkire dan Foster (2011). *Dalam pengukuran kemiskinannya MPI menggunakan data level rumah tangga sehingga mampu mengetahui persentase penduduk yang mengalami kemiskinan dalam berbagai dimensi.*

Beberapa keunggulan dari perhitungan Multidimensional Poverty Index (MPI) menurut Alkire dan Foster (2011) diantaranya adalah:

- a. Sesuai dan tepat apabila diterapkan pada data ordinal atau data yang bersifat kategorik.
- b. Fokus pada kemiskinan dan deprivasi.
- c. Fleksibel untuk menerapkan pembobotan yang setimbang atau berbeda pada masing masing dimensi yang berbeda.
- d. Robust dalam mengidentifikasi individu termiskin dan penduduk miskin dengan menaikkan *aggregate cut off point*.

Setelah memperkenalkan alat pengukuran kemiskinan dengan menggunakan Multidimensional Poverty Index, penelitian ini menambah variabel faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan dengan pendekatan multidimensional. Apabila dilihat dari dimensi kemiskinan multidimensional dibagi kedalam 4 dimensi, yaitu dimensi ekonomi, dimensi pendidikan, dimensi kesehatan dan dimensi infrastruktur dasar.

Dimensi Ekonomi

Dimensi ekonomi dalam penelitian ini akan menggunakan pertumbuhan ekonomi. Menurut Budiono (1999) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan

berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Todaro (2011) berpendapat bahwa cara terbaik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya sehingga dapat melampaui tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan cara tersebut, angka pendapatan per kapita akan meningkat sehingga secara otomatis terjadi pula peningkatan kemakmuran masyarakat dan pada akhirnya akan mengurangi jumlah penduduk miskin.

Dimensi Pendidikan

Seseorang yang mengenyam pendidikan yang lebih tinggi biasanya memiliki akses yang lebih besar untuk mendapat pekerjaan dengan bayaran lebih tinggi, dibandingkan dengan individu dengan tingkat pendidikan lebih rendah. Melalui pendidikan yang memadai, penduduk miskin akan mendapat kesempatan yang lebih baik untuk keluar dari status miskin di masa depan. (Wirawan, 2015). Dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable development), sektor pendidikan memainkan peranan sangat strategis yang dapat mendukung proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya. Dalam konteks ini, pendidikan dianggap sebagai alat untuk mencapai target yang berkelanjutan, karena dengan pendidikan aktivitas pembangunan dapat tercapai, sehingga peluang untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan akan lebih baik.

Ada dua indikator dalam mengukur dimensi pendidikan, yaitu lama sekolah (years of schooling) dan kehadiran di sekolah (attendance of school). Dua indikator ini mencerminkan kemampuan masyarakat mengakses pendidikan dasar, tetapi tidak mencerminkan kualitas pendidikan yang diperoleh. Seseorang dikatakan terdeprivasi

pada indikator lama sekolah apabila terdapat anggota rumah tangga berusia di atas 10 tahun yang tidak selesai menempuh pendidikan enam tahun. Di sisi lain, pada indikator kehadiran di sekolah, seseorang dikatakan terdeprivasi apabila terdapat usia anak di rumah tangga yang tidak bersekolah sampai usia dimana mereka harus menyelesaikan kelas delapan.

Dimensi Kualitas Hidup

Standar kualitas hidup mencerminkan pola kehidupan keseharian masyarakat. Kemiskinan akan menjadikan masyarakat tidak dapat memenuhi kualitas standar dari kehidupan yang layak. Indikator dimensi kualitas hidup terdiri atas: 1) Bahan Bakar memasak. Rumah tangga terdeprivasi pada indikator tersebut bila memasak menggunakan arang atau kayu. 2) Sanitasi. Rumah tangga dianggap memiliki akses ke sanitasi jika memiliki toilet atau jamban yang berventilasi baik atau toilet kompos dan tidak berbagi dengan rumah tangga lain. Jika rumah tangga tidak memenuhi kondisi tersebut, maka dianggap kekurangan akses terhadap sanitasi. 3) Akses air bersih. Seseorang dianggap memiliki akses terhadap air minum bersih jika mendapatkan air dari salah satu sumber air berikut: pipa air, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung, semi dilindungi, atau air hujan, dan sumber air tersebut berada dalam jarak 30 menit berjalan kaki (pulang pergi). Jika gagal untuk memenuhi kondisi tersebut, maka rumah tangga dianggap terdeprivasi pada akses terhadap air. 4.) Listrik. Rumah tangga dianggap terdeprivasi pada indikator tersebut jika tidak memiliki akses terhadap listrik. 5) Kondisi rumah. Rumah tangga dengan lantai rumah yang terbuat dari tanah, pasir atau lainnya yang tidak layak dianggap terdeprivasi pada indikator tersebut. 6) Kepemilikan aset. Jika rumah tangga tidak memiliki lebih

dari satu aset berupa radio, TV, telepon, sepeda, sepeda motor atau kulkas, serta tidak memiliki mobil maka terdeprivasi pada indikator tersebut.

Islam memandang kemiskinan begitu sangat serius. Ungkapan paling populer ketika membahas tentang kemiskinan adalah perkataannya Ali bin Abi Thalib yaitu “Seandainya kemiskinan berwujud manusia, niscaya aku akan membunuhnya”.

Pada dasarnya Islam tidak menganjurkan umatnya untuk berada pada kondisi kemiskinan. Kewajiban-kewajiban umat islam salah satunya adalah zakat, infak, jihad, menjalankan ibadah haji, dan lain sebagainya. Dimana kewajiban-kewajiban tersebut bisa dilakukan apabila pemeluknya memiliki kecukupan harta.

Cahya (2015) menerangkan bahwa Islam mendorong penganutnya untuk kaya dan memiliki kecukupan harta. Hal ini didasari dari surat Al – Anfal ayat 60:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ ۚ عَدُوُّ اللَّهِ
وَعَدُوْكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan). (QS. Al Anfal: 60).

Akan tetapi, apabila terdapat muslim kaya dan terdapat muslim miskin di suatu tempat, maka timbul

perintah lain yaitu kewajiban miskin kaya untuk senantiasa memperhatikan, menyantuni dan menolong umat muslim yang berada dalam keadaan miskin. Secara tegas Allah SWT memerintahkan untuk memperhatikan orang miskin dan memberikan celaan kepada mereka yang menyepelekan dan menelantarkan orang miskin, seperti yang tercantum dalam surat al-Ma'un ayat 1-3 yang artinya; "Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin." (Q.S. Al-Ma'un (107): 1-3) Cahya (2015).

Dalam Islam kemiskinan identik juga dengan kata fakir dan miskin. Dua kata ini yang sering memiliki pemaknaan yang berbeda. Menurut Syekh An-Nabhani mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang mempunyai harta, tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Sementara miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta, serta tidak memiliki penghasilan (Ulya, 2018). Islam memandang apabila berbicara soal kemiskinan adalah berbicara tentang upaya pembelaan, perhatian, dan perlindungan terhadap kelompok orang miskin, sehingga islam tidak berbicara tentang menghilangkan kemiskinan akan tetapi berusaha mereduksi dan meminimalisir kemiskinan itu sendiri (Beik & Arsyianti, 2019).

PEMBAHASAN

Pada pembahasan penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Tujuan dari metode ini yaitu untuk mendapatkan data yang mendalam serta mengandung makna. Moleong (2011) mendefenisikan metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang dapat diamati.

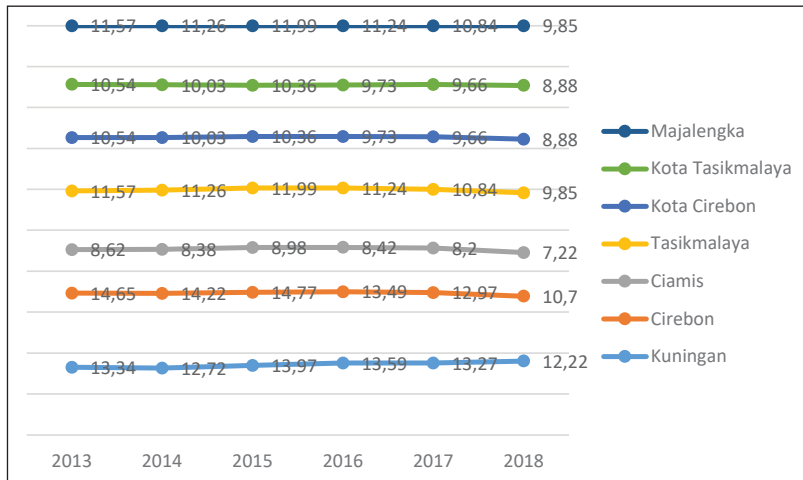
Sumber data diperoleh dari kajian literatur dan data dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Kuningan dan Provinsi Jawa Barat. Objek penilitan ini adalah penduduk miskin Kabupaten Kuningan dengan jumlah total penduduk miskin tahun 2020 yaitu 139.200 orang (12,82 persen) yang tersebar di 32 Kecamatan. Teknik analisis data bersifat induktif dengan tujuan untuk meneliti kondisi pada objek yang alamiah, dimana peneliti kemudian menginterpretasikan menjadi gambaran yang lebih jelas (Sugiyono, 2011).

Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Kuningan

Berdasarkan BPS Kabupaten Kuningan tahun 2018, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kuningan sebanyak 131,16 jiwa atau 12,22 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Kuningan. Kemudian pada tahun 2020 BPS Provinsi Jawa Barat (2021) menjelaskan bahwa angka persentase penduduk miskin Kabupaten Kuningan kembali mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar 11,41% dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 12,82%. Hal ini menandakan bahwa terjadi kenaikan 1,41% atau sekitar 16 ribu jiwa penduduk Kabupaten Kuningan masuk dalam kategori penduduk miskin baru.

Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, tingkat kemiskinan Kabupaten Kuningan terbilang tinggi. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kuningan menempati posisi kedua tertinggi se-provinsi Jawa Barat setelah Kota Tasikmalaya. Dalam periode waktu 2013-2018, urutan tingkat kemiskinan Kabupaten Kuningan terus mengalami perubahan dari peringkat 5 di tahun 2013 menjadi peringkat ke-2 tertinggi tingkat kemiskinannya se-Jawa Barat.

Gambar 3.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kuningan dan Sekitarnya, 2013-2018



Sumber: BPS Jawa Barat (2019)

Berdasarkan gambar 3.1, dapat dicermati bahwa selama kurun waktu tahun 2013-2018 perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kuningan berfluktuatif. Secara umum, dalam periode waktu 2013-2018 tingkat kemiskinan di Kabupaten Kuningan turun sebesar 1,12 persen. Akan tetapi perlu di cermati, bahwa perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kuningan terlihat paling lambat bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Barat terutama daerah sekitarnya. Dalam kurun waktu 2013-2018 tingkat kemiskinan di Kabupaten Ciamis turun 1,4 persen, Kabupaten Cirebon turun 3,95 persen, Kabupaten Majalengka turun 3,28 persen, Kabupaten Tasikmalaya turun 1,72 persen, Kota Cirebon turun 1,86 persen dan Kota Tasikmalaya turun 4,48 persen.

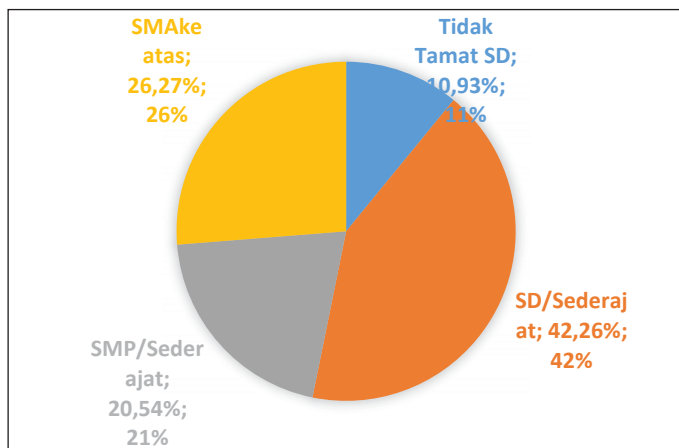
Secara umum kondisi kemiskinan di Kabupaten Kuningan dari tahun ke tahun memang mengalami penurunan. Akan tetapi penurunan angka kemiskinannya masih terbilang

lamban. Hal ini bisa terlihat jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di sekitar Kabupaten Kuningan. Sehingga perlu ada rencana dan program khusus dari pemerintah Kabupaten Kuningan dalam upaya mempercepat angka penurunan kemiskinan di Kabupaten Kuningan.

Kondisi Kemiskinan Dimensi Pendidikan

Pendidikan berperan penting dalam mengurangi angka kemiskinan. Hal ini dikarenakan seseorang dengan tingkat pendidikan yang tinggi biasanya akan memiliki peluang yang lebih rendah untuk menjadi orang miskin. Pada tahun 2018, pendidikan tertinggi sebagian besar penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Kuningan adalah tidak tamat SD sebanyak 22,87 persen. Tamat SD/SLTP yaitu sebesar 69,23 persen dan tamat SMA ke atas sebanyak 7,98 persen. Secara keseluruhan dalam aspek pendidikan, BPS Kabupaten Kuningan tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tertinggi usia 15 tahun ke atas adalah SD/ sederajat.

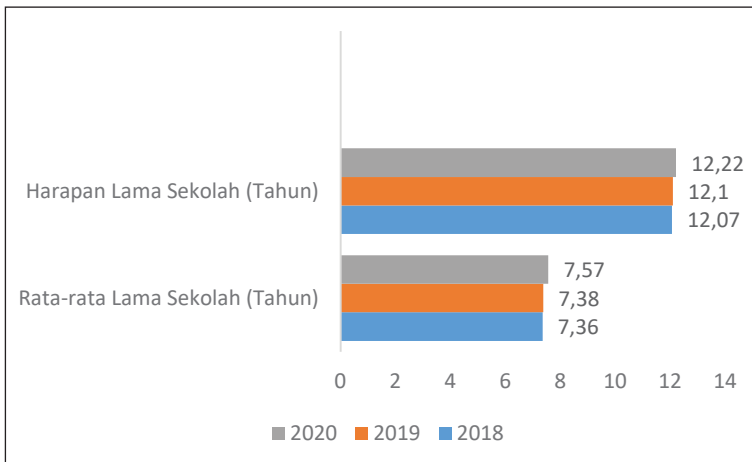
Gambar 3.2. Pendidikan Tertinggi Penduduk Usia 15 Tahun keatas



Sumber: BPS Kab.Kuningan (2021)

Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Kuningan terbilang cukup baik, yang menunjukkan adanya kesadaran dari masyarakat Kabupaten Kuningan untuk bersekolah sampai jenjang pendidikan yang tinggi. Angka rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Gambar 3.3. Angka Rata-Rata & Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kuningan 2018-2020



Sumber: BPS Kabupaten Kuningan (2021)

Meskipun mengalami kenaikan setiap tahun, angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah Kabupaten Kuningan masih dibawah angka harapan lama sekolah dan rata-rata sekolah Provinsi Jawa Barat yaitu 12,50% dan 8.55%. Dengan masih dibawahnya angka harapan sekolah dan rata rata sekolah di Kabupaten Kuningan, pemerintah Kabupaten Kuningan telah memprioritaskan sektor pendidikan ke dalam program pembangunan daerah jangka menengah dan jangka panjang. Program kerja di sektor pendidikan yang di susun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan 2021 yaitu program rehabilitasi kelas-kelas dan pemberian beasiswa.

Kondisi Kemiskinan Dimensi Ekonomi

Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dilihat dari status miskin atau tidak miskin yang ditentukan dari rata-rata pengeluaran per kapita per bulan suatu rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pengeluaran untuk membiayai komoditi makanan dan pengeluaran untuk membiayai komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pengeluaran/konsumsi tersebut dibatasi oleh pendapatan. Teorema Engel's menyatakan bahwa saat pendapatan meningkat, proporsi pendapatan yang dihabiskan untuk membeli makanan akan berkurang. Pengeluaran per kapita per bulan untuk makanan pada rumah tangga miskin tahun 2018 di Kabupaten Kuningan sebesar 75,34 persen.

Sedangkan apabila melihat dari status kerja penduduk miskin yang bisa menjadi indikator kondisi ekonomi suatu rumah tangga, menunjukkan bahwa pada tahun 2018 tercatat sebanyak 45,27 persen penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Kuningan tidak bekerja, sebanyak 40,64 persen bekerja di sektor informal dan 14,09 persen bekerja di sektor formal (BPS Kabupaten Kuningan, 2020).

Dengan adanya permasalahan penduduk miskin yang tidak bekerja dan masih rendahnya pendapatan penduduk miskin, maka pemerintah Kabupaten Kuningan telah mengeluarkan program program unggulan berbasis ekonomi. Program unggulan di sektor ekonomi berupa peningkatan produktivitas dan lapangan kerja melalui UMKM berbasis teknologi dan informasi, ketersediaan bantuan permodalan dan pengembangan usaha.

Kondisi Kemiskinan Dimensi Kualitas Hidup

Sebanyak 80,13 persen rumah tangga miskin di Kabupaten Kuningan pada tahun 2018 menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri, 16,06 persen bebas sewa dan 3,78 persen menempati bangunan tempat tinggal dengan status lainnya. Sebanyak 1,08 persen rumah tangga miskin di Kabupaten Kuningan jenis lantai terluasnya adalah tanah. Sebagian besar rumah tangga miskin di Kabupaten Kuningan memiliki dinding terluasnya adalah tembok yaitu sebanyak 94,13 persen. Dan persentase rumah tangga miskin yang memakai dinding bambu/anyaman sebanyak 4,74 persen. Rumah tangga miskin di Kabupaten Kuningan sebagian besar telah menggunakan beton atau genteng atau sirap sebagai atap terluas tempat tinggalnya yaitu 96,97 persen. Ketersediaan jamban menjadi salah satu fasilitas rumah sehat. Fasilitas jamban dibedakan atas jamban sendiri, jamban bersama/komunal dan jamban umum/tidak ada. Persentase rumah tangga miskin di Kabupaten Kuningan yang menggunakan jamban sendiri/bersama sebesar 92,68 persen. Air yang layak merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap manusia. Air layak pada umumnya digunakan pada aktivitas minum dan memasak setiap rumah tangga.

Oleh karena itu, penggunaan air yang layak dapat mendukung keberlangsungan hidup setiap rumah tangga. Rumah tangga pengguna air layak adalah rumah tangga yang menggunakan sumber utama air minum dari air tidak sustain (air hujan), air terlindung maupun tidak terlindung dengan syarat sumber mandi/cuci/dll yang digunakan berasal dari air terlindung. Sedangkan air terlindung adalah sumber air dari leding meteran, leding eceran, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung yang jarak penampungan kotoran/limbah ≥ 10 meter. Sebanyak 80,09 persen rumah

tangga miskin di Kabupaten Kuningan telah menggunakan air layak.

Berdasarkan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa secara kualitas hidup yang dilihat dari infrastruktur rumah tangga, kondisi penduduk miskin di Kabupaten Kuningan masih memiliki rumah dan infstruktur yang layak.

Rekomendasi Kebijakan

Secara umum penanggulangan kemiskinan tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu pihak dalam hal ini pemerintah. Perlu adanya sinergitas antara masyarakat, pemerintah, akademis, pebisnis dan unsur masyarakat lainnya. Adapaun hal-hal berkaitan dengan rekomendasi kebijakan yang diusulkan dalam berbagai dimensi diantaranya sebagai berikut:

Dimensi pendidikan

Berdasarkan gambaran kondisi pendidikan yang ada di Kabupaten Kuningan, perlu adanya upaya lebih bagi pemerintah untuk mendorong dan memfasilitasi penduduk miskin agar memprioritaskan pendidikan sebagai suatu kebutuhan primer. Penduduk miskin yang mempunyai pendidikan menengah ke atas dapat diberikan keterampilan tambahan dan diberikan peluang oleh pemerintah daerah untuk dapat terlibat dalam sektor bisnis langsung sehingga diharapkan mampu memberikan pendapatan dan pada akhirnya bisa keluar dari kemiskinan.

Dimensi Ekonomi

Berdasarkan gambaran kondisi ekonomi penduduk miskin di Kabupaten Kuningan, maka harus ada langkah kongkrit untuk mendorong lapangan kerja dan lapangan usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita penduduk

miskin di Kabupaten Kuningan. Program-program pelatihan keterampilan siap kerja dan siap usaha bisa menjadi program yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pekerja, sehingga diharapkan dapat semakin tinggi kualitas kerja semakin tinggi pula pendapatan per kapitanya.

Dimensi Kualitas Hidup

Berdasarkan kondisi kualitas kehidupan yang diukur dengan infrastuktur rumah tangga penduduk miskin di Kabupaten Kuningan, kebijakan mengenai program-program renovasi penduduk miskin tidak perlu diprioritaskan sebagai program utama dalam pembangun daerah, akan tetapi lebih kepada program penunjang. Melihat kondisi yang ada, bahwa secara kualitas hidup yang dilihat dari infarstruktur rumah tangga, kondisi penduduk miskin di Kabupaten Kuningan masih memiliki rumah dan infstruktur yang layak.

KESIMPULAN

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kuningan selama periode 2013 - 2018 semakin menurun dari 139,40 ribu jiwa menjadi 131,16 ribu jiwa. Begitu pula halnya dengan tingkat kemiskinannya juga mengalami penurunan dari 13,34 persen menjadi 12,22 persen. Namun penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kuningan dirasakan berjalan lambat bila dibandingkan dengan kabupaten/kota di sekitarnya. Pada periode 2013 - 2018 penurunan hanya mencapai 1,21 persen.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan kemiskinan di Kabupaten Kuningan tidak terlihat secara kasat mata dari karakteristik perumahan. Tetapi lebih pada pendapatan yang sangat kecil yang diterima rumah tangga miskin. Kemiskinan dapat dilihat pengeluaran

masing-masing penduduk miskin yang masih berada dibawah dari garis kemiskinan itu sendiri. Sementara dari keparahan kemiskinan didapatkan bahwa penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin cukup timpang. Kebijakan yang sebaiknya diterapkan adalah kebijakan yang memudahkan rumah tangga miskin berusaha dan bekerja sehingga dapat meningkatkan pendapatannya. Tingkat pendidikan rumah tangga miskin sangat rendah sehingga perlu dibina untuk kembali melanjutkan sekolah atau mengikuti pelatihan-pelatihan berbasis keterampilan siap kerja atau siap berwirausaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rasool, M. S., & Salleh, A. M. (2014). Non-Monetary Poverty Measurement in Malaysia: A Maqāṣid Al-Sharī'ah Approach. *Islamic Economic Studies*, 22(2), 33–45. <https://doi.org/10.12816/0008094>
- Alkire, S., and J.E. Foster. (2011). *Counting and Multidimensional Poverty Measurement*. Journal of Public Economics. 95(7-8): 476-487.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Kemiskinan di Kabupaten Kuningan*. Kuningan: BPS Kabupaten Kuningan.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Kabupaten Kuningan Dalam Angka*. Kuningan: BPS Kabupaten Kuningan.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat*. Bandung: BPS Provinsi Jawa Barat.
- Beik, Irfan Syauqi dan Arsyianti, Laily Dwi. (2019). *Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi*. Bogor: PT Penerbit IPB press.
- Bourguignon, Francois and Satya R. Cakravarty. 2003. *The Measurement of Multidimensional Poverty*. *Journal of*

- Economic Inequality*. April 2003. pg 25. Netherland
- Brum, M., & De Rosa, M. (2021). Too little but not too late: nowcasting poverty and cash transfers' incidence during COVID-19's crisis. *World Development*, 140. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105227>
- Cahya, B. T. (2015). Kemiskinan Ditinjau Dari Perpekstif Al-Quran Dan Hadis. *Jurnal Penelitian*, 9(1), 41–66. <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.850>
- Khatib, S. (2018). Konsep Maqashid Al-Syari`Ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syathibi. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 5(1), 47–62. <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1436>
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Todaro, M., & Smith, S. C. (2011). Chapter 5: Poverty, Inequality and Development. *Economic Development*, 202–265.
- Ulya, H. N. (2018). Paradigma Kemiskinan Dalam Perspektif Islam Dan Konvensional. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1), 129. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i1.1448>
- World Bank. (2007). *World Development Report 2007 (Overview): Building Institutions for Markets*

DAMPAK AKTIVITAS PEMBANGUNAN EKONOMI TERHADAP EKSTERNALITAS NEGATIF KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KOTA PONTIANAK

Dr. Abdul Haris

(abdul.haris@uin-suka.ac.id)

Fadia Dini Aulia

(fadiadiniau@gmail.com)

PENDAHULUAN

Masalah yang terjadi akibat tingginya aktivitas pembangunan ekonomi diantaranya adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kebakaran hutan dan lahan terjadi akibat eksploitasi yang berlebih, dan semakin tinggi intensitas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi maka semakin besar kekayaan alam yang hilang (Singh, 2016). Karhutla berdampak pada penurunan kualitas udara yang kemudian akan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat di Kota Pontianak. Peningkatan polusi, kekeringan berkepanjangan, penurunan beban pada kandungan air, serta menurunnya kandungan pangan merupakan dampak nyata dari karhutla. Pencegahan karhutla menjadi penting

dan memerlukan kerja sama pihak pemerintah dan swasta. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang terintegrasi dengan keberlanjutan (sustainability) sehingga eksploitasi berlebihan dapat dicegah dan diminimalisir dan didukung oleh lembaga pemerhati lingkungan sehingga dampak eksternalitas negatif dapat diminimalisir. Masalah penting dalam pembangunan ekonomi adalah bagaimana menghadapi trade-off antara pembangunan dengan upaya pelestarian pembangunan lingkungan (Drews & van den Bergh, 2017) the environment and prosperity has continued for many decades now. In 2015, we conducted an online survey of researchers' views on various aspects of this debate, such as the compatibility of global GDP growth with the 2 °C climate policy target, and the timing and factors of (never-

Salah satu kota yang mengalami dampak dari pembangunan ekonomi adalah Kota Pontianak. Letak geografis Kota Pontianak berada di Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, dimana pada Provinsi Kalimantan Barat sendiri sering terjadi karhutla yang menjadikan Malaysia seringkali ikut terkena asap dari kebakaran hutan sehingga hal tersebut dapat mengganggu hubungan diplomasi antar kedua negara (Bilqis et al., 2020).

Selain berdampak dan mengganggu hubungan sosial diplomasi antara kedua negara, kebakaran ini menimbulkan dampak ekonomis dan ekologis yang menyebar melintasi batas negara. Dari dampak yang ditimbulkan tersebut merupakan dampak eksternalitas negatif yaitu dampak yang merugikan dari tindakan seseorang atau suatu pihak terhadap kesejahteraan atau kondisi orang atau pihak lain (Mankiw et al., 2012). Mediasi masalah ini membutuhkan kebijakan yang efektif dan dapat diterapkan, yang dirumuskan dari dasar bukti yang kuat. Dengan demikian, kualitas informasi menjadi

hal yang sangat penting dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kebakaran hutan yang tepat (Ekayani et al., 2016).

Akibat dari kebakaran hutan berdampak pada tercemarnya udara di Kota Pontianak yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan bencana kabut asap. Kebakaran hutan tersebut menimbulkan banyak dampak negatif lainnya, antara lain polusi udara berupa senyawa karbon monoksida, partikulat, ozon, senyawa sulfur, senyawa oksida, dan senyawa nitrogen oksida. Polutan-polutan tersebut dapat menimbulkan perubahan iklim secara langsung dan kekambuhan tidak langsung dapat mengganggu dinamika kualitas udara perkotaan dan hilangnya biomassa untuk energi (Bo et al., 2020).

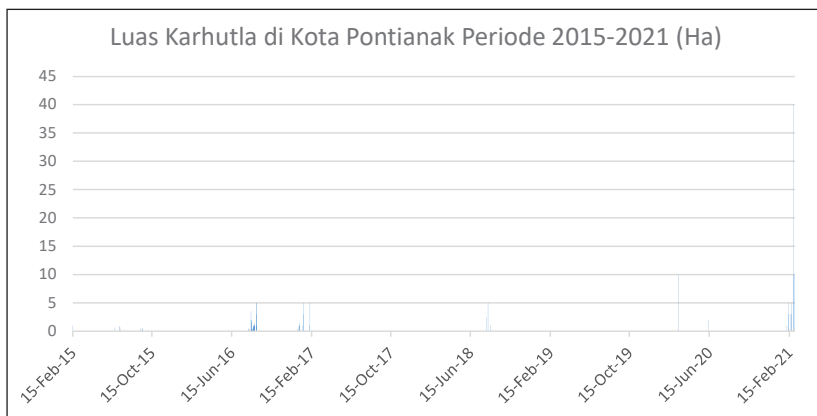
Kabut asap yang terjadi di kota Pontianak akibat karhutla akan mengganggu kelancaran dan produktivitas berbagai sektor perekonomian di Kota Pontianak, terutama pada sektor transportasi. Berdasarkan data bulan Febuari 2021 dewasa ini menyebutkan bahwa kualitas udara berdasarkan partikulat meter 2,5 mencapai angka 198 pm_{2,5}. Angka ini berada pada zona kualitas udara tidak sehat dan nyaris menyentuh zona merah tidak sehat (Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, 2021).

Dari kualitas udara yang tidak sehat tersebutlah, bahwa kebakaran hutan dan di Kota Pontianak sedang marak terjadi akibat ulah dari oknum yang tidak bertanggungjawab yang hendak melakukan pembangunan baru yang tidak mementingkan asas pembangunan yang baik sehingga dampaknegatifyangterjadiberdampakpada sistem kesehatan masyarakat yang terganggu, salah satunya dari kualitas udara yang buruk dan tidak sehat tersebutlah berdampak sistemik kepada masyarakat yang merasakan dampak dari

kebakaran dan hutan tersebut. Dari dampak yang terjadi, hal ini sangat berkaitan dengan jumlah luas hutan dan lahan yang mengalami kebakaran.

Berikut data rekapitulasi dari luas kebakaran hutan dan lahan di Kota Pontianak pada lima tahun terakhir dari tahun 2015 hingga tahun 2019 sebagai berikut:

Gambar 1.1 Luas Karhutla di Kota Pontianak pada Tahun 2015-2021



Sumber: BPBD Kota Pontianak (2021)

Pada gambar 1.1, terlihat intensitas karhutla relatif lebih tinggi pada tahun 2021, dimana pada 27 Februari 2021 sebesar 40 Ha lahan terbakar dan merupakan yang terbesar sejak tahun 2015. Kemudian pada 28 Februari dan 3 Maret kembali terjadi karhutla seluas masing-masing 10 Ha. Total luas lahan terbakar pada tahun 2021 adalah sebesar 80,4 Ha yang juga merupakan jumlah terbesar sejak tahun 2015. Adapun pada tahun 2016 terjadi 55 peristiwa karhutla dengan total lahan yang terbakar sebesar 42 Ha yang merupakan intensitas tertinggi peristiwa karhutla sejak tahun 2015.

Sebagian besar wilayah di Kota Pontianak terdiri dari tanah gambut, dimana ketika hutan dan lahan yang memiliki

tanah gambut terbakar lebih cepat dan besar dikarenakan kandungan unsur yang mudah terbakar lebih tinggi dibanding jenis tanah lainnya. Karhutla cenderung disebabkan oleh tindakan manusia, baik secara individu maupun kolektif. Adapun tindakan pemerintah umumnya difokuskan pada pemadaman kebakaran, masalah biofisik dan teknologi seperti sekat kanal dan sistem peringatan dini serta penindakan hukum pelaku karhutla. Tindakan signifikan atas penyebab utama kebakaran seperti pemberian insentif ekonomi untuk penyiapan lahan tanpa pembakaran jarang terjadi (Purnomo et al., 2017), begitu pula dengan tindakan pencegahan karhutla. Hal ini menunjukkan perlunya tindakan pemerintah dalam rangka prevensi terjadinya karhutla.

BMKG mengungkap tercatat titik panas di wilayah Kalimantan Barat sebanyak 325 titik panas dengan 21 titik di Kota Pontianak (Antara, 2021). Dari data tersebut menunjukkan bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Pontianak memiliki dampak sistemik, salah satunya yaitu gangguan kesehatan yang ditimbulkan akibat polusi udara dan asap antara lain, asma, bronchitis, Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) serta berujung kematian.

Berikut data kasus kebakaran hutan yang terjadi di Kota Pontianak pada lima tahun terakhir, tahun 2015 hingga tahun 2019 sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Jumlah Kasus Karhutla di Kota Pontianak
Periode 2015-2021**

Bulan	Tahun						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Januari	2	0	11	0	0	0	0
Februari	9	0	0	0	0	0	10
Maret	3	1	0	0	0	2	1

Bulan	Tahun						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
April	0	1	0	0	0	0	-
Mei	0	0	0	0	0	0	-
Juni	0	0	0	0	0	1	-
Juli	4	0	0	7	6	0	-
Agustus	7	53	0	31	9	0	-
September	5	0	0	0	12	0	-
Oktober	0	0	0	0	0	0	-
November	0	0	0	0	0	0	-
Desember	0	0	0	0	0	0	-
Total Kasus	30	55	11	38	27	3	11

Sumber: BPBD Kota Pontianak (2021)

Keterangan: Angka disajikan dalam bentuk jumlah kasus.

Pada tabel 1.2, terlihat intensitas tertinggi kasus karhutla terjadi pada tahun 2016 sebanyak 55 kasus, kemudian pada tahun 2018 sebanyak 38 kasus. Pada bulan Agustus 2016 terjadi 53 kasus karhutla yang diduga disebabkan oleh pembakaran hutan yang dilakukan bertepatan dengan musim kemarau sehingga dampak kebakaran semakin parah dan menyebabkan sekolah-sekolah diliburkan. Bencana karhutla yang terjadi di Kota Pontianak sangat krusial untuk diperhatikan oleh pemangku kepentingan.

Dampak dari karhutla terlihat dari kualitas udara di Kota Pontianak, dimana pada bulan Agustus 2018 kualitas udara Kota Pontianak berada pada tingkat tidak sehat hingga berbahaya setelah terjadi tujuh peristiwa karhutla. Karhutla pada 11 dan 12 Maret 2020 menyebabkan kualitas udara pada 14 hingga 21 Maret berada pada tingkat tidak sehat. Pada 7 Februari hingga 3 maret terjadi sebelas peristiwa karhutla yang menyebabkan kualitas udara menjadi tidak sehat hingga

berbahaya hingga 4 maret 2021.

Dari kasus kebakaran hutan dan lahan yang marak terjadi setiap tahunnya, Indonesia sendiri telah memberlakukan sejumlah regulasi dan membentuk berbagai lembaga untuk menangani kebakaran hutan dan lainnya, namun terbukti tidak efektif. Perubahan iklim di masa depan dan praktik pengelolaan kebakaran saat ini, hutan hujan tropis Indonesia juga menyebabkan lebih rentan terhadap kebakaran. Efektivitas dapat ditingkatkan dengan cara mengatasi penyebab utama kebakaran, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan peraturan dan meningkatkan penegakan hukum (Herawati & Santoso, 2011).

Aspek penting dalam pembangunan adalah proses memperbaiki kualitas kehidupan manusia. Tiga aspek yang sama pentingnya dalam pembangunan adalah: (1) menaikkan tingkat kehidupan masyarakat, seperti pendapatan dan konsumsi pangan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya melalui pertumbuhan ekonomi yang sesuai; (2) menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan harga diri masyarakat melalui pematapan sistem dan institusi, sosial, politik dan ekonomi yang mengutamakan rasa hormat dan martabat manusia; dan (3) meningkatkan kebebasan masyarakat dengan memperluas kisaran pilihan barang dan jasa (Todaro & Smith, 2011).

Pembangunan yang tidak memperhatikan ketiga aspek tersebut akan mengakibatkan masalah sistemik dikemudian hari. Secara ringkas, pembangunan ekonomi yang semata-mata hanya merujuk kepada sebuah keuntungan tanpa mempertimbangkan keberlangsungan alam dan lingkungan tidak hanya membawa dampak negatif bagi alam saja melainkan juga pada aspek kehidupan dan kesejahteraan manusia. Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini

bertujuan untuk menganalisis, mendeskripsikan serta menawarkan solusi alternatif dari dampak eksternalitas negatif yang disebabkan oleh pembangunan ekonomi.

KERANGKA TEORITIS

Pembangunan

Menurut Todaro & Smith (2011) pembangunan didefinisikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara kontinyu oleh suatu negara dalam rangka menciptakan masyarakat yang lebih baik atau kesejahteraan. Setiap individu (society) atau negara (state) akan selalu bekerja keras untuk melakukan pembangunan demi keberlangsungan hidupnya saat dan masa depan. Pembangunan juga merupakan suatu proses dinamis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Negara memiliki tujuan bersama yaitu pembangunan. Dengan tujuan semua orang turut mengambil bagian. Adapun kemajuan ekonomi merupakan suatu komponen esensial dari pembangunan itu, walaupun bukan satu-satunya. Hal ini disebabkan pembangunan itu bukanlah semata-mata fenomena ekonomi. Dalam pengertian yang paling mendasar, pembangunan haruslah mencakup masalah-masalah materi dan finansial dalam kehidupan. Pembangunan seharusnya dipahami sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi dari semua sistem ekonomi dan sosial.

Pembangunan haruslah diarahkan kembali sebagai suatu serangan terhadap kebusukan/kejahatan dunia sekarang seperti krisis pangan, kurang gizi, pengangguran, dan ketimpangan distribusi pendapatan karena jika diukur dari pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,

pembangunan telah mencapai kesuksesan yang besar, namun apabila ditinjau dan dikaji dari segi pengurangan tingkat kemiskinan, keadilan dan pengangguran maka pembangunan itu mengalami dapat dinilai sebagai suatu kegagalan (Lincolin, 1997).

Tiga Nilai Inti Pembangunan

Menurut Todaro (2011) mengatakan bahwa paling tidak adanya tiga komponen dasar atau nilai inti yang harus dijadikan sebagai basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami makna pembangunan yang paling hakiki. Ketiga komponen dasar itu adalah Kecukupan (*sustenance*) jati diri (*self-estem*), serta kebebasan (*freedom*); ketiga hal tersebut nilai pokok atau tujuan inti yang harus dicapai dan diperoleh oleh setiap masyarakat melalui pembangunan. Ketiga komponen tersebut berkaitan secara langsung dengan kebutuhan manusia yang paling mendasar, yang terwujud dalam berbagai macam manifestasi di seluruh masyarakat dan budaya sepanjang zaman.

1. Kecukupan: kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang dimaksud dengan kecukupan bukan hanya sekedar menyangkut makanan, melainkan mewakili semua hal yang merupakan kebutuhan dasar manusia secara fisik. Kebutuhan dasar ini meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keamanan. Apabila salah satu dari sekian banyak kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi maka muncullah keterbelakangan *absolute*.
2. Jati diri: merupakan harga diri Sebagai manusia. Komponen inti dari pembangunan yang kedua adalah menyangkut jati diri. Kehidupan yang serba lebih baik adalah adanya dorongan dari dalam diri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri, untuk merasa diri pantas (*able*) dan layak

untuk melakukan sesuatu. Semua itu terangkum dalam jati diri (*self-esteem*).

3. Kebebasan dari perbudakan yaitu tata nilai ketiga sebagai nilai-nilai hakiki pembangunan adalah konsep kebebasan atau kemerdekaan. Kebebasan dalam konteks ini diartikan secara luas sebagai kemampuan untuk berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran aspek-aspek materil dalam kehidupan serta bebas dari perasaan perbudakan sosial sebagai manusia terhadap alam. Lewis (1954) menekankan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kebebasan dari sikap-sikap budak, dengan menyimpulkan, bahwa keuntungan dari pertumbuhan ekonomi bukanlah kenikmatan karena kekayaan bertambah, tapi karena meningkatnya kebebasan manusia untuk memilih.

Pengertian dan Teori Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan proses atau kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu negara dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang ekonomi. Adam Smith mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada kemampuan negara tersebut dalam menabung dan berinvestasi. Smith juga memperhatikan ukuran pasar yang dimiliki suatu negara sebab luas pasar sangat mempengaruhi volume produksi yang akhirnya tergantung pada tingkat pendapatan. Ukuran pasar dapat mempengaruhi produktivitas dan pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat pendapatan. Tinggi rendahnya tingkat pendapatan sangat berpengaruh pada tingkat kemampuan untuk menabung dan dorongan berinvestasi.

Selain itu, Malthus mengemukakan salah satu gagasannya mengenai konsep pembangunan, khususnya bidang ekonomi bahwa pembangunan ekonomi dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan penduduk suatu negara. Kesejahteraan suatu negara sebagian bergantung pada kuantitas produk yang dihasilkan oleh tenaga kerjanya dan sebagian lagi pada nilai atas produk tersebut.

Malthus mendefinisikan masalah pembangunan ekonomi sebagai sesuatu yang menjelaskan perbedaan Gross National Product potential (kemampuan menghasilkan kekayaan) dan Gross National Product actual (kekayaan aktual), tetapi masalah pokoknya adalah bagaimana mencapai tingkat GNP potensial yang tinggi. Kuncoro (1997) juga memberikan gagasannya bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional yang melibatkan kepada perubahan besar, baik terhadap struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi.

Menurut Rostow, proses pembangunan ekonomi bisa dibedakan ke dalam lima tahap, yaitu (1) masyarakat tradisional (*the traditional society*), (2) prasyarat untuk tinggal landas (*the preconditions for take-off*), (3) tinggal landas (*the take-off*), (4) menuju kekedewasaan (*the drive to maturity*), dan (5) masa konsumsi tinggi (*the age of high mass-consumption*). Dasar pembedaan tahap pembangunan ekonomi menjadi lima tahap tersebut adalah karakteristik perubahan keadaan ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi.

Menurut Rostow (1960), pembangunan ekonomi atau proses transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat moderen merupakan suatu proses yang multidimensional. Pembangunan ekonomi bukan hanya

berarti perubahan struktur ekonomi suatu negara yang ditunjukkan oleh menurunnya peranan sektor pertanian dan peningkatan peranan sektor industri saja.

Menurut Rostow, pembangunan ekonomi berarti pula sebagai suatu proses yang menyebabkan antara lain:

1. perubahan orientasi organisasi ekonomi, politik, dan sosial yang pada mulanya berorientasi kepada suatu daerah menjadi berorientasi ke luar.
2. perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga, yaitu dari menginginkan banyak anak menjadi keluarga kecil.
3. perubahan dalam kegiatan investasi masyarakat, dari melakukan investasi yang tidak produktif (menumpuk emas, membeli rumah, dan sebagainya) menjadi investasi yang produktif.
4. perubahan sikap hidup dan adat istiadat yang terjadi kurang merangsang pembangunan ekonomi (misalnya penghargaan terhadap waktu, penghargaan terhadap pertasi perorangan dan sebagainya).

Menurut Mill, pembangunan ekonomi sangat tergantung pada dua jenis perbaikan yaitu perbaikan dalam tingkat pengetahuan masyarakat, dan perbaikan yang berupa usaha-usaha untuk menghapus penghambat pembangunan seperti adatistiadat, kepercayaan dan berpikir tradisional. Perbaikan dalam pendidikan, kemajuan dalam ilmu pengetahuan, perluasan spesialisasi dan perbaikan dalam organisasi produksimerupakan faktor yang penting yang sangat memperbaiki mutu dan efisiensi faktor-faktor produksi dan akhirnya menciptakan pembangunan ekonomi. Menurut mill, faktor pendidikan melaksanakan dua fungsi yaitu: mempertinggi pengetahuan teknik masyarakat, dan mem-

pertinggi ilmu pengetahuan umum. Pendidikan dapat menciptakan pandangan-pandangan dan kebiasaan moderen dan besar peranya untuk menentukan kemajuan ekonomi masyarakat.

Menurut Mankiw (2003) modal manusia adalah pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh oleh para pekerja melalui pendidikan mulai dari program untuk anakanak sampai dengan pelatihan dalam pekerjaan (On the job training) untuk para pekerja dewasa, seperti halnya dengan modal fisik, modal manusia meningkatkan kemapuan untuk memproduksi barang dan jasa. Untuk meningkatkan level modal manusia dibutuhkan investasi dalam bentuk guru, perpustakaan dan waktu belajar. Sementara itu untuk menyesuaikan dalam tingkat pertumbuhan penduduk kb yang tinggi, Negara-negara harus memperhatikan kualitas sumber daya manusia dengan menyujudkan program-program spesifik yakni (Samuelson & Nordhaus, 2001):

1. Mengendalikan penyakit serta meningkatkan kesehatan dan nutrisi. Meningkatkan standar kesehatan penduduk menyebabkan penigkatan produksivitas mereka sebagai tenaga kerja. Pusat kesehatan masyarakat dan penyediaan air bersih merupakan modal social yang bermanfaat.
2. Meningkatkan pendidikan, menurunkan angka buta huruf dan melatih tenaga kerja. Manusia terdidik merupakan tenaga kerja yang lebih produktif karena mampu menggunakan modal secara lebih efektif, mampu mengadopsi teknologi dan mampu belajar dari kesalahan.
3. Tidak boleh mengestimasi secara lebih rendah (*under estimate*) terhadap pentingnya sumberdaya manusia. Becker (1993) mengemukakan bahwa teori modal manusia telah menjadi pemikiran banyak pihak sejalan dengan berhasilnya umat manusia mengendalikan tingkat

pertumbuhan produk, menanggapi kekhawatiran Malthus akan adanya bencana bagi umat manusia bila penduduk terus bertambah

Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam

Pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam menempatkan manusia sebagai fokus dalam pembangunan. Pemikiran pembangunan menurut paradigma Islam diantaranya berasal dari Ibn Khaldun dan Shah Wali Allah, dua tokoh islam yang hidup pada periode waktu yang berbeda. Islam menunjukkan jalan hidup yang menyeluruh bagi umat manusia, yang tidak membedakan manusia menurut ras, kebangsaan atau warna kulit, tetapi manusia dilihat hanya dari pengakuan manusia pada keesaan Tuhan dan kepatuhan manusia pada kehendak dan bimbingan-Nya. Misi manusia menjadi pengabdian bagi penciptanya, sementara ibadah dan pengabdian pada sang pencipta menjadi tujuan hidup manusia. Karena islam bersifat menyeluruh, ibadah juga bersifat menyeluruh. Oleh karena itu, agar proses pembangunan dapat dipandang sebagai ibadah, pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan spiritual dan materiil seharusnya tidak dipisahkan, tetapi dibangun secara bersamaan (Lincoln, 1997).

Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rum 30 ayat 41-42:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ

Artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah

menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah (Muhammad), “Bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).”

Pada ayat di atas, Allah menghendaki manusia merasakan akibat dari perbuatan mereka yang merusak alam agar mereka kembali ke jalan yang benar. Manusia harus mengambil pelajaran dari kejadian terdahulu sehingga dapat menghindari dampak dari eksploitasi berlebihan.

Lingkungan

Kombinasi antar kondisi fisik dan kelembagaan. Kondisi fisik mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air energi surya, udara, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Keadaan lingkungan yang asri akan berpengaruh kepada sosial ekonomi masyarakat. Disisi lain biaya untuk mendapatkan lingkungan yang bersih juga bersifat ekonomi, karena biaya-biaya untuk membersihkan udara dan air semestinya dapat digunakan untuk menghasilkan barang lain lagi (Suparmoko, 2000).

Kebakaran Hutan, Lahan dan Pencemaran Udara

Kebakaran hutan merupakan kejadian terbakarnya vegetasi oleh api secara tidak terkendali (Syaufina, 2008).

Dampak kebakaran hutan dan lahan yang paling menonjol adalah terjadinya kabut yang sangat mengganggu kesehatan masyarakat dan sistem transportasi sungai, darat, laut, dan udara. Secara sektoral dampak kebakaran ini mencakup sektor perhubungan, kesehatan, ekonomi, ekologi

dan sosial, termasuk citra bangsa di mata negara tetangga dan dunia (Hermawan, 2006).

Pencemaran udara dapat diartikan sebagai adanya satu atau lebih pencemaran yang masuk ke dalam udara atau atmosfer yang terbuka, yang dapat mengganggu kesehatan manusia, tanaman dan binatang atau pada benda-benda dapat pula mengganggu pandangan mata, kenyamanan hidup dari manusia dan penggunaan benda-benda (Suratmo, 2004).

Sumber pencemaran dapat merupakan kegiatan yang bersifat alami (natural) dan kegiatan antropogenik. Pencemaran udara akibat aktivitas manusia (kegiatan antropogenik), secara kuantitatif sering lebih besar. Untuk kategori ini sumber-sumber pencemaran dibagi dalam pencemaran akibat aktivitas transportasi, industri, dari persampahan, baik akibat proses dekomposisi ataupun pembakaran, dan rumah tangga (Soedomo, 2001).

Menurut Soedomo (2001), upaya pengendalian pencemaran udara dapat dilakukan melalui:

1. Pengendalian dan Pemantauan
2. Peraturan Perundangan
3. Teknologi Pengendalian

Dampak Pencemaran Terhadap Lingkungan

Pencemaran diartikan sebagai masuknya aliran residual yang diakibatkan oleh perilaku manusia kedalam sistem lingkungan. Dari perspektif ekonomi, pencemaran bukan saja dilihat dari hilangnya nilai ekonomi sumber daya akibat berkurangnya kemampuan sumber daya secara kualitas dan kuantitas untuk menyuplai barang dan jasa namun juga dari dampak pencemaran tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat (Fauzi, 2006).

Dalam pasal 1 butir 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982, perusakan lingkungan diartikan sebagai tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat- sifat fisik dan atau hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan (Husein, 1993).

Eksternalitas

Menurut Yakin (2004) kegiatan perusahaan dikatakan memiliki dampak jika perusahaan tersebut mampu mempengaruhi kondisi disekitarnya baik itu kondisi yang menimbulkan harga (kompensasi). Secara umum eksternalitas didefinisikan sebagai dampak (positif atau negatif), atau dalam bahasa formal ekonomi sebagai net cost atau benefit, dari tindakan satu pihak terhadap pihak lain. Lebih spesifik lagi eksternalitas terjadi jika kegiatan produksi atau konsumsi dari satu pihak mempengaruhi utilitas (kegunaan) dari pihak lain secara tidak diinginkan, dan pihak pembuat eksternalitas tidak menyediakan kompensasi terhadap pihak yang terkena dampak (Fauzi, 2004).

Dilihat dari dampaknya, eksternalitas dibagi menjadi dua, yaitu eksternalitas negatif dan eksternalitas positif.

- a. Eksternalitas negatif adalah eksternalitas yang bersifat negatif bagi yang terkena dampaknya dan tidak menerima kompensasi.
- b. Eksternalitas positif adalah eksternalitas yang sifatnya positif bagi yang terkena dampaknya tanpa adanya kompensasi dari pihak yang terkena dampak

Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Terhadap Pembangunan Ekonomi

Dampak dari pencemaran udara terhadap kesehatan pada akhirnya akan menimbulkan beban ekonomi (economic burden) yang harus ditanggung oleh masyarakat. Beban ekonomi dari suatu penyakit meliputi tiga komponen biaya, yaitu: biaya langsung (direct cost), biaya tidak langsung (indirect cost), dan biaya yang bersifat tidak nyata (*intangible cost*). Biaya langsung berupa penggunaan sumberdaya untuk merawat dan mengobati sakit, yang dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu biaya kesehatan (medical cost), seperti biaya berobat dan jasa konsultasi medis serta biaya non-kesehatan (non-medical cost) seperti transportasi menuju dan akomodasi selama di tempat berobat. Biaya tidak langsung merupakan nilai sumber daya yang hilang, yang meliputi biaya morbiditas dan mortalitas, biaya pengobatan informal, dan biaya kehilangan akibat tindakan kriminal. Sementara itu, *intangible cost* merupakan jenis biaya yang sulit diukur karena terkait dengan perasaan, baik fisik dan psikologi, seperti sakit, menderita, dan tidak nyaman (Sangkey, et al, 2011). Dalam perspektif ekonomi, faktor pendorong terjadinya pencemaran adalah ketidakmampuan pasar untuk memberikan 'harga' pada barang dan jasa lingkungan yang digunakan dalam produksi dan konsumsi (Myer, 1998). Pada umumnya lingkungan dianggap sebagai 'barang publik' (public goods) atau 'barang milik bersama' (common property) dimana hak kepemilikannya tidak dapat dinyatakan secara jelas (Hadi, 2002).

PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian ini. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga dimanfaatkan sebagai gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan penelitian (Sugiyono, 2017).

Pembahasan penelitian ini berfokus pada faktor yang ditimbulkan dari degradasi lingkungan terhadap dampak eksternalitas negatif dari peristiwa kabut asap, kebakaran hutan, dan lahan di kota Pontianak. Berikut data tabel luas kebakaran hutan Kota Pontianak, sebagai berikut:

Tabel 1.1

TAHUN	LUAS	SATUAN
2015	3024	Ha
2016	174150	Ha
2017	6,01	Ha
2018	22,78	Ha
2019	8,1	Ha

Sumber: data diolah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, (2021)

Berdasarkan data tabel dari luas dan satuan kebakaran hutan dan lahan di kota Pontianak menunjukkan bahwa kebakaran hutan dan lahan tersebut kerap terjadi setiap tahunnya dari data tabel diatas dimulai pada tahun 2015 yang terjadi kebakaran hutan dengan luas 3024 Ha, selanjutnya pada tahun berikutnya yaitu pada 2016 sebesar 174.150 ha yang mana pada tahun tersebut menjadi satuan luas terbesar

pada data tabel dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Dengan satuan luas kebakaran hutan tertinggi pada tahun 2016, pada tahun 2017 luas satuan lahan yang terbakar sangat turun signifikan menjadi sebesar 6,01 ha. Ditahun 2018 mulai kembali naik menjadi 22,78 ha dan terakhir data tabel 2019 total satuan luas kebakaran pada tahun 2019 sebesar 8,1 ha. Dari data tabel tersebut menunjukkan luas satuan lahan yang mengalami kebakaran hutan terjadi sangat fluktuatif dan berubah-ubah. Kebakaran terjadi di lahan gambut, dampaknya jauh lebih tinggi daripada di lahan mineral karena kepadatan api. Kebakaran di Indonesia disebabkan oleh manusia baik secara individu maupun kolektif. Tindakan pemerintah difokuskan pada pemadaman kebakaran, masalah biofisik dan teknologi seperti sekat kanal dan sistem peringatan dini. Tindakan signifikan atas penyebab utama kebakaran seperti pemberian insentif ekonomi untuk penyiapan lahan tanpa pembakaran jarang terjadi (Purnomo et al., 2017).

Berikut data kasus kebakaran hutan yang terjadi di Kota Pontianak pada lima tahun terakhir, tahun 2015 hingga tahun 2019, sebagai berikut:

Tabel 1.2

BULAN	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
JANUARI	2	0	11	0	0
FEBRUARI	9	0	0	0	0
MARET	3	1	0	0	0
APRIL	0	1	0	0	0
MEI	0	0	0	0	0
JUNI	0	0	0	0	0
JULI	4	0	0	7	6
AGUSTUS	7	53	0	31	9

BULAN	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
SEPTEMBER	5	0	0	0	12
OKTOBER	0	0	0	0	0
NOVEMBER	0	0	0	0	0
DESEMBER	0	0	0	0	0
Total Kasus	30	55	11	38	27

Sumber: data diolah, Dinas Lingkungan Kota Pontianak, (2021)

Berdasarkan data tabel dari luas dan satuan kebakaran hutan dan lahan dikota Pontianak menunjukkan bahwa kebakaran hutan dan lahan tersebut kerap terjadi setiap bulan hingga setiap tahunnya pada 5 tahun terakhir dengan angka kasus yang bervariasi. Dapat dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa data kebakaran hutan yang terjadi di Kota Pontianak pada 5 tahun terakhir yakni tahun 2015 hingga tahun 2019 kasus tertinggi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kota Pontianak adalah tahun 2016 yang mana dari angka kasus tersebut relevan dengan pembahasan sebelumnya yang mana pada tahun 2016 terjadi kebakaran hutan dan lahan yang memakan satuan luas tanah tersebut sebesar 174,150 ha yang mana dari jumlah terbesar dari kelima data tabel tersebut menjadikan tahun 2016 Kota Pontianak dilabelisasi menjadi status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan sehingga terjadinya perpanjangan status siaga darurat kebakaran hutan.

Dari data tabel diatas mendeskripsikan bahwa persoalan yang terjadi akibat dari eksternalitas lingkungan salah satunya peristiwa bencana kebakaran hutan lahan yang terjadi di Kota Pontianak sangat krusial untuk diperhatikan oleh pemangku kepentingan utama dalam melihat data kasus kebakaran tersebut cenderung naik setiap tahunnya secara

signifikan). Dari kasus kebakaran hutan dan lahan yang marak terjadi setiap tahunnya, Indonesia telah memberlakukan sejumlah regulasi dan membentuk berbagai lembaga untuk menangani kebakaran hutan dan lainnya, namun terbukti tidak efektif. Kedua, di bawah skenario perubahan iklim di masa depan dan praktik pengelolaan kebakaran saat ini, hutan hujan tropis Indonesia bisa lebih rentan terhadap kebakaran. Ketiga, efektivitas dapat ditingkatkan dengan mengatasi penyebab utama kebakaran, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan peraturan dan meningkatkan penegakan hukum (Herawati & Santoso, 2011).

KESIMPULAN

Kebakaran hutan dan lahan terjadi setiap tahun, dimana intensitas karhutla relatif lebih tinggi pada tahun 2021, dimana pada 27 Februari 2021 sebesar 40 Ha lahan terbakar dan merupakan yang terbesar sejak tahun 2015. Kemudian pada 28 Februari dan 3 Maret kembali terjadi karhutla seluas masing-masing 10 Ha. Total luas lahan terbakar pada tahun 2021 adalah sebesar 80,4 Ha yang juga merupakan jumlah terbesar sejak tahun 2015. Adapun pada tahun 2016 terjadi 55 peristiwa karhutla dengan total lahan yang terbakar sebesar 42 Ha yang merupakan intensitas tertinggi peristiwa karhutla sejak tahun 2015. Kebakaran terjadi di lahan gambut sehingga dampaknya jauh lebih besar dibanding jenis tanah lainnya karena kepadatan api lebih tinggi. Kebakaran di Indonesia disebabkan oleh manusia baik secara individu maupun kolektif. Tindakan pemerintah baru difokuskan pada pemadaman kebakaran, masalah biofisik dan teknologi seperti sekat kanal dan sistem peringatan dini dan belum berfokus pada tindakan atau kebijakan preventif.

Dampak dari karhutla terlihat dari kualitas udara di Kota Pontianak, dimana pada bulan Agustus 2018 kualitas udara Kota Pontianak berada pada tingkat tidak sehat hingga berbahaya setelah terjadi tujuh peristiwa karhutla. Karhutla pada 11 dan 12 Maret 2020 menyebabkan kualitas udara pada 14 hingga 21 Maret berada pada tingkat tidak sehat. Pada 7 Februari hingga 3 maret terjadi sebelas peristiwa karhutla yang menyebabkan kualitas udara menjadi tidak sehat hingga berbahaya hingga 4 maret 2021.

Pembangunan ekonomi perlu memerhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan lingkungan, sehingga sumber daya dan kekayaan hutan dapat dinikmati terus oleh generasi mendatang. Dalam Islam juga ditekankan untuk melakukan aktivitas ekonomi tanpa merusak alam dan lingkungan, dan manusia yang mengeksplorasi alam secara berlebihan akan merasakan akibat tindakannya.

Diantara rekomendasi kebijakan yang dapat diambil sebagai upaya pencegahan karhutla yaitu pemberian penghargaan bagi pemerintah, aparat, relawan, serta masyarakat yang telah ikut berkontribusi dalam penanganan karhutla, peningkatan program pengolahan lahan tanpa bakar, mitigasi bencana yang lebih efektif, pendekatan ke wilayah-wilayah yang rawan karhutla, patroli rutin ke wilayah rawan titik api, peningkatan kapasitas daerah dalam mitigasi perubahan iklim dan karhutla, sosialisasi dan bimbingan teknis terkait pencegahan karhutla, pembentukan seksi karhutla dalam skala lokal, dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku karhutla.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara. (2021). *BMKG: Ada 325 Titik Panas di Kalbar, Terbanyak di Kubu Raya*. iNews.id KALBAR. <https://kalbar.inews.id/berita/bmkg-ada-325-titik-panas-di-kalbar-terbanyak-di-kubu-raya>
- Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis* (special re). The University of Chicago Press.
- Bilqis, N., Studi, P., Ilmu, M., & Diponegoro, U. (2020). Analisis Dampak Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia Terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. *Journal of Government and Political Studies*, 3(2).
- Bo, M., Mercalli, L., Pognant, F., Berro, D. C., & Clerico, M. (2020). Urban air pollution, climate change and wildfires: The case study of an extended forest fire episode in northern Italy favoured by drought and warm weather conditions. *Forest Policy and Economics, Elsevier*, 6, 781–786.
- BPBD Kota Pontianak. (2021). *Rekapitulasi Kebakaran Lahan Kota Pontianak Tahun 2015-2021*.
- Drews, S., & van den Bergh, J. C. J. M. (2017). Scientists' views on economic growth versus the environment: a questionnaire survey among economists and non-economists. *Global Environmental Change*, 46(2), 88–103. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2017.08.007>
- Ekayani, M., Darusman, D., & Nurrocmat, R. (2016). The role of scientists in forest fire media discourse and its potential influence for policy-agenda setting in Indonesia. *Forest Policy and Economics, Elsevier*, 68(7), 22–29.

- Herawati, H., & Santoso, H. (2011). No Title. *Forest Policy and Economics, Elsevier*, 13(227–233).
- Kuncoro, M. (1997). *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan kebijakan*. UPP AMP YKPN.
- Lewis, M. A. (1954). *Economic Development with Unlimited Supplies of Labour*. Manchester School.
- Lincoln, A. (1997). *Ekonomi Mikro*. BPFE.
- Mankiw, G., Quah, E., & Elson, P. (2012). *Pengantar Ekonomi Mikro*. Salemba Empat.
- Purnomo, H., Shantiko, B., Sitorus, S., Gunawan, H., Achdiawan, R., Kartodihardjo, H., & Dewayani, A. A. (2017). Fire economy and actor network of forest and land fires in Indonesia. *Forest Policy and Economics, Elsevier*, 78(5), 21–31.
- Rostow, W. W. (1960). *The Stages of Economic Growth*. Cambridge University Press.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2001). *Ilmu Makro Ekonomi*. PT Media Edukasi.
- Singh, S. (2016). Implications of forest fires on air quality – a perspective. *Bulletin of Environmental and Scientific Research*, 5(3–4), 1–4.
- Suparmoko. (2000). *Keuangan Negara: Teori dan Praktek*. BPFE.

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN MANUSIA YANG DIANALISIS DARI KOMPONEN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI KABUPATEN BONE

Dr. Slamet Haryono

(slamet.haryono@uin-suka.ac.id)

Hasnidar Yuslin

(hasnidaryuslin@gmail.com)

PENDAHULUAN

Pembangunan menurut Rustiadi dkk, (2011) dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu wilayah/negara untuk mengembangkan kualitas hidup masyarakatnya. Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses untuk mewujudkan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke pembangunan selanjutnya (Latuconsina, 2017). Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas manusia di suatu wilayah/negara (Pake, 2018). Namun, dalam realitas pembangunan, ternyata pembangunan yang fokus pada pertumbuhan

ekonomi tidak mampu memberikan kesejahteraan semua lapisan masyarakat. Kondisi tersebut, memunculkan pemikiran tentang perlunya dilaksanakan reformasi ekonomi yang memperhatikan dimensi manusia dalam pembangunan .

Keberhasilan pembangunan manusia suatu wilayah dapat diukur dengan beberapa parameter, dan yang paling populer saat ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) (Maulana, 2013). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia yang dapat dilihat dari komponen IPM yaitu: indeks kesehatan, indeks pendidikan dan paritas daya beli. IPM hadir sebagai alat ukur yang mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan secara menyeluruh karena dapat menggambarkan faktor ekonomi dan non-ekonomi (Latuconsina, 2017).

UNDP (United Nation Development Programme) memberikan ukuran terhadap keberhasilan pembangunan manusia yakni Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index). Indeks Pembangunan Manusia atau disingkat IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata dari indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks paritas daya beli. Sejak otonomi daerah, maka setiap daerah diharapkan untuk mengetahui ukuran IPM daerahnya sendiri baik untuk keperluan perencanaan maupun untuk evaluasi khususnya dalam mengetahui perkembangan dan sebaran hasil-hasil pembangunan di bidang manusia (Latuconsina, 2017).

Ditinjau dari olahan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, diketahui bahwa daerah ini menduduki nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada peringkat 23 dari 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan (Statistik, 2020b). Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 1.1 Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018-2020

No	Kabupaten/Kota (terdekat)	2018		2019		2020	
		IPM	Rank Prov.	IPM	Rank Prov	IPM	Rank Prov
1.	Gowa	68,78	11	69,66	10	70,14	7
2.	Sinjai	66,24	20	67,05	20	67,60	20
3.	Maros	68,94	10	69,50	11	69,86	11
4.	Pangkep	67,71	16	68,29	16	68,72	18
5.	Barru	70,05	8	70,60	8	71,00	8
6.	Bone	65,04	23	65,67	23	66,06	23
7.	Soppeng	67,60	19	68,26	18	68,67	19
8.	Wajo	68,57	13	69,05	14	69,15	14
9.	Sulawesi Selatan	70,90	-	71,66	-	71,93	-

Sumber: BPS Sulawesi Selatan

Keterangan: Ranking IPM berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bone Tahun 2018 sekitar 65,04, berdasarkan peringkatnya menduduki urutan 23 dari 24 Kabupaten/Kota. Namun seiring meningkatnya beberapa komponen pendukung maka pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 IPM di Kabupaten Bone menunjukkan peningkatan, akan tetapi peringkatnya tidak berubah, tetap pada posisi peringkat 23. Tetapnya posisi peringkat IPM di Kabupaten Bone bukan berarti tidak mengalami peningkatan, hanya saja ada beberapa Kabupaten yang kecepatan perkembangannya melebihi kecepatan IPM di Kabupaten Bone, sehingga peringkat IPM di Kabupaten lain menurun. Secara umum IPM di Kabupaten Bone dari tahun ke tahun mengalami peningkatan akan tetapi peningkatannya lamban.

Berdasarkan kriteria UNDP (United Nation Development Programme), jika nilai IPM kurang dari 60 termasuk

IPM rendah, nilai $60 \leq \text{IPM} < 70$ digolongkan IPM sedang, $70 \leq \text{IPM} < 80$ digolongkan tinggi, dan nilai $\text{IPM} \geq 80$ digolongkan sangat tinggi (Human Development Report, 2016). Maka sesuai dengan kriteria tersebut, IPM di Kabupaten Bone tergolong dalam kategori sedang. Olehnya itu, Kabupaten Bone masih membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah setempat, untuk lebih di tingkatkan lagi agar tercapai keinginan mensejahterakan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, sebab pendidikan dan kesehatan sangat erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi suatu wilayah/negara (Todaro, 2012). Jika pendidikan dan kesehatan ditingkatkan maka akan meningkat pula produktivitas penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sehingga masyarakat memiliki modal untuk selanjutnya dapat melanjutkan hidup dengan lebih baik lagi (Pake, 2018).

Dalam mengungkap keberhasilan pembangunan manusia di Kabupaten Bone, maka perlu adanya kajian yang lebih komprehensif. Olehnya itu, studi ini fokus untuk membahas masalah pembangunan manusia yang dianalisis dari komponen Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bone.

LANDASAN TEORI

Teori Pembangunan

Todaro (dalam Lepi T. Tarmidi, 1992) mengartikan pembangunan sebagai suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan nasional maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan penghapusan dari kemiskinan mutlak. Hal ini sejalan dengan Sadono Sukirno (1996)

yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator lain yaitu distribusi pendapatan (Sukirno, 1996).

Hal tersebut dipertegas lagi oleh Irawan (2002) yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita. Ini senada dengan ungkapan Sadono Sukirno (1985) yang mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan perkapita yang terus menerus berlangsung dalam jangka panjang (Sukirno, 1985).

Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith (2012) menuliskan setidaknya ada 4 teori klasik dalam pembangunan ekonomi, yaitu Linear Stages Development Model Approach, Structural Change Theory, International Dependence Model dan Neoclassical Counterrevolution. Tiap-tiap model atau teori memiliki pendekatannya masing-masing dalam menjelaskan fenomena pembangunan yang terjadi dalam sebuah negara.

- a. *Linear Stages Development Model Approach*. Pendekatan ini muncul pada sekitar tahun 1970an yang berdasarkan adanya pemikiran dari negara barat yang melihat munculnya kemiskinan di banyak negara. Ada dua tokoh utama dalam pendekatan ini, yaitu W.W Rostow yang

menyebutkan peralihan dari negara miskin menjadi negara kaya harus melewati beberapa tahapan yang harus dilewati dan Harrold Domar yang menyebutkan pertumbuhan terjadi ketika produk domestik bruto tergantung pada tingkat tabungan nasional namun berbanding terbalik dengan *capital-output ratio*.

- b. *Structural Change Theory* menyatakan bahwa negara menjadi miskin karena ketidakmampuan mereka untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya dikarenakan adanya faktor ketidakmampuan struktur dan institusi, baik di tingkat domestik ataupun internasional. Hal ini mengakibatkan pembangunan yang dilakukan oleh negara miskin seharusnya tidak hanya meningkatkan modal, tetapi juga merubah struktur secara besar-besaran dari tradisional pertanian menjadi lebih modern dan mengarah pada industrialisasi.
- c. *International Dependence Model*. Pemikiran dasar dari pendekatan ini adalah melihat negara-negara berkembang mengalami kemiskinan dikarenakan mereka didominasi dan tergantung secara politik, institusi dan ekonomi baik secara nasional maupun internasional kepada negara kaya.
- d. *Neoclassical Counterrevolution, Market fundamentalism*. Beberapa negara maju seperti AS, Inggris dan Jerman memperkenalkan pendekatan neoclasical ini. Argumen utama dari pendekatan ini adalah bahwa kemiskinan (*underdevelopment*) yang terjadi di negara-negara berkembang berasal dari ketidakmampuan mereka dalam mengalokasikan sumber daya dikarenakan ketidakmampuan menentukan kebijakan harga dan terlalu besarnya pengaruh negara terhadap pasar.

Islam mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai tempat pemenuhan kebutuhan dasar sebagai prioritas utama demi memelihara lima maslahat pokok, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap individu berhak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya agar dapat mempertahankan eksistensi hidup dan menjalankan peran utamanya sebagai khalifah di bumi. Disisi lain pengembangan ekonomi dalam perspektif Islam menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, bertindak sebagai subjek sekaligus sebagai objek pembangunan itu sendiri, hal ini didasari oleh pandangan dunia Islam yang menempatkan manusia sebagai pelaku utama dalam kehidupan (Ratih, 2021).

Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia menurut UNDP (United Nations Development Programme) adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia. Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya (Report, 2016).

Sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia sebagaimana yang dikutip dari UNDP (Human Development Report, 1995) (dalam (Yektiningsih, 2018) adalah sebagai berikut:

- a) Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
- b) Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu konsep pembangunan

manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.

- c) Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.
- d) Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.
- e) Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Berdasarkan konsep tersebut, penduduk di tempatkan sebagai tujuan akhir sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu., olehnya itu penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arrah) kehidupan mereka serta untuk berpartisipasi dan mengambil keputusan dalam proses pembangunan.

Konsep pembangunan manusia seutuhnya merupakan konsep yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental maupun secara spiritual. Bahkan secara eksplisit disebutkan bahwa pembangunan yang dilakukan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan (Yektiningsih, 2018).

Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di tiap-tiap negara. Salah satu tolok ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli). Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia (Pake, 2018). UNDP (United Nations Development Programme) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai sebuah proses untuk memperluas pilihan bagi penduduk. Dalam konsep ini, populasi ditempatkan sebagai ujung akhir (*ultimate end*) sedangkan upaya pengembangan dipandang sebagai sarana (sarana utama) untuk mencapai tujuan tersebut (Sudriman, 2017).

Pembangunan Indeks Manusia (IPM) tidak terlepas dari pemenuhan kebutuhan berdasarkan *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* yaitu bertujuan dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-qur'an dan Hadis. Karena semua perintah dan larangan Allah dalam Al-qur'an dan Hadis yang terumuskan dalam *fiqh* yang akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia, semua mempunyai hikmah mendalam, yaitu sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat yang dimaksud adalah kemaslahatan umat (Ratih, 2021).

Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan yang terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan. Dengan demikian. Maka pertumbuhan

ekonomi menurut Islam merupakan hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan (Supaijo et al., 2017).

Secara umum pembangunan berarti pertumbuhan yang positif pada semua aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, budaya dan lingkungan yang menjadikan manusia sebagai subjek dan juga objek dalam pembangunan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu umur yang panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi ini terangkum dalam satu nilai tunggal yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Sumber daya manusia dalam ukuran kuantitatif yang disebut Human Development Index (HDI) yang telah dipublikasikan oleh Lembaga United Nation Development Programme (UNDP) sebagai alat ukur pembangunan sumber daya manusia yang dirumuskan secara konstan, diakui tidak akan pernah menangkap gambaran pembangunan sumber daya manusia secara sempurna.

Adapun indikator yang dipilih untuk mengukur dimensi HDI adalah sebagai berikut (UNDP, Human Development Report 1993):

- a) *Longevity*, diukur dengan variabel harapan hidup saat lahir atau *life expectancy of birth* dan angka kematian bayi per seribu penduduk atau *infant mortality rate*.
- b) *Educational Achievement*, diukur dengan dua indikator, yakni melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas

(*adult literacy rate*) dan tahun rata-rata bersekolah bagi penduduk 25 tahun ke atas (*the mean years of schooling*).

- c) *Access to resource*, dapat diukur secara makro melalui PDB riil perkapita dengan terminologi *purchasing power parity* dalam dolar AS dan dapat dilengkapi dengan tingkatan angkatan kerja.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa komponen-komponen yang mempengaruhi IPM antara lain (Yektiningsih, 2018):

- 1) Derajat kesehatan dan panjangnya umur yang terbaca dari angka harapan hidup (*life expectancy rate*), parameter kesehatan dengan indikator angka harapan hidup, mengukur keadaan sehat dan berumur panjang.
- 2) Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf rata-rata lamanya sekolah, parameter pendidikan dengan angka melek huruf dan lamanya sekolah, mengukur manusia yang cerdas, kreatif, terampil, dan bertaqwa.
- 3) Pendapatan yang diukur dengan daya beli masyarakat (*purchasing power parity*), parameter pendapatan dengan indikator daya beli masyarakat, mengukur manusia yang mandiri dan memiliki akses untuk layak.

Olehnya itu, untuk mengetahui keberhasilan pembangunan manusia pada suatu daerah/wilayah dapat dianalisis atau diukur dari komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya.

Dari beberapa penjelasan para ahli tentang pembangunan, Indeks Pembangunan Manusia serta hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi, maka secara umum dapat dijelaskan bahwa pembangunan manusia sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, sebab pertumbuhan ekonomi tidak dapat berjalan sendiri, bergantung pada pendapatan

penduduk dan prioritas belanja pemerintah dalam pembangunan. Untuk mencapai peningkatan kesehatan dan pendidikan perlu perbaikan standar hidup penduduk yaitu penurunan tingkat kemiskinan untuk mencapai keberhasilan pembangunan yaitu kesejahteraan masyarakat.

PEMBAHASAN

Dalam membahas apa yang menjadi tujuan dari penulis, maka pendekatan yang digunakan oleh ialah pendekatan deskriptif karena sifat data yang digunakan merupakan data lunak yaitu dokumen yang relevan untuk digunakan sebagai data dan mengandalkan interpretasi kreatif dari peneliti (Neman, 2003). Data diperoleh dari studi literatur dan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone dari tahun 2015-2020 tentang komponen Indeks Pembangunan Manusia yang kemudian diinterpretasi oleh penulis.

Pendekatan deskriptif ini digunakan untuk menelaah secara mendalam tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan suatu negara/wilayah. Proses analisis dilakukan dengan cara analisis naratif kualitatif kemudian disajikan secara deskripsi naratif kualitatif tentang hal-hal yang esensial serta memperoleh gambaran yang jelas tentang tema yang diangkat (Sugiyono, 2014).

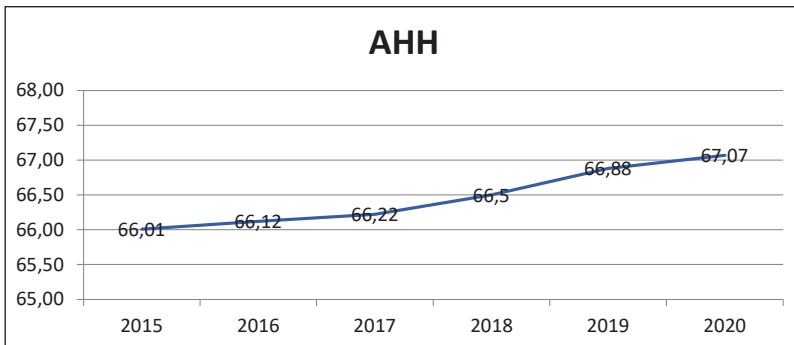
Dimensi Indeks Kesehatan

Salah satu indeks penting dalam pembangunan manusia adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat angka kesehatan penduduk. Komponen IPM yang digunakan untuk melihat kualitas kesehatan penduduk adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Angka Harapan Hidup (AHH)

adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup. Angka Harapan hidup (AHH) diartikan sebagai umur yang mungkin dicapai seseorang yang lahir pada tahun tertentu (Yektiningsih, 2018).

Berdasarkan data BPS Kabupaten Bone bahwa ukuran indeks kesehatan dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dilihat dari Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bone disajikan dalam Gambar 1.1 (Statistik, 2021a).

Gambar 1.1 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bone Tahun 2015-2020



Sumber: BPS Kabupaten Bone 31 Maret 2021

Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Bone menunjukkan trend yang terus meningkat dan penduduk di Kabupaten Bone pada tahun 2020 memiliki peluang hidup hingga usia 67,07 tahun. Angka Harapan Hidup (AHH) ini berlaku pada manusia yang berumur nol tahun atau baru lahir. Dengan kata lain bahwa, seorang bayi yang lahir di tahun 2020 memiliki Angka Harapan Hidup sampai 67,07 tahun. Variabel ini mencerminkan “lama hidup” sekaligus “hidup sehat” suatu masyarakat. Angka Harapan Hidup ini akan lebih jelas berbobot jika perbandingan dari tahun sebelumnya atau dengan daerah yang lain. Sebelum tahun 2020 dengan Angka

Harapan Hidup 67,07, di tahun sebelumnya dari tahun 2015 sebesar 66,01 dan meningkat di tahun 2016 sebesar 66,12. Kemudian di tahun 2017 sebesar 66,50 dan selanjutnya mengalami peningkatan di tahun 2018 sebesar 66,88 begitu pula di tahun 2019 meningkat menjadi 67,17. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas kesehatan yang cukup signifikan pada masyarakat di Kabupaten Bone yang ditandai dengan peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH).

Hal ini mengindikasikan bahwa secara rata-rata derajat kesehatan di Kabupaten Bone relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata derajat kesehatan daerah lain di Provinsi Sulawesi Selatan, hal tersebut disajikan dalam tabel 1.2 sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/
Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2015-2020**

No	Wilayah	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kepulauan Selayar	67,70	67,76	67,82	68,03	68,34	68,46
2	Bulukumba	66,73	66,84	66,96	67,27	67,69	67,92
3	Bantaeng	69,77	69,84	69,90	70,11	70,42	70,54
4	Jeneponto	65,49	65,57	65,65	65,89	66,24	66,39
5	Takalar	66,20	66,29	66,38	66,64	67,01	67,18
6	Gowa	69,88	69,92	69,95	70,11	70,37	70,43
7	Sinjai	66,46	66,54	66,61	66,83	67,17	67,30
8	Maros	68,55	68,58	68,60	68,74	68,98	69,02
9	Pangkajene dan Kepulauan	65,67	65,77	65,86	66,12	66,49	66,66
10	Barrau	68,03	68,16	68,30	68,60	68,91	69,02
11	Bone	66,01	66,12	66,22	66,50	66,88	67,07
12	Soppeng	68,52	68,62	68,72	69,02	69,43	69,65
13	Wajo	66,23	66,38	66,52	66,79	67,17	67,35

No	Wilayah	2015	2016	2017	2018	2019	2020
14	Sindereng Rappang	68,57	68,69	68,82	69,15	69,59	69,83
15	Pinrang	68,43	68,55	68,68	68,98	69,39	69,61
16	Enrekang	70,31	70,34	70,38	70,55	70,83	70,91
17	Luwu	69,44	69,52	69,60	69,84	70,19	70,34
18	Tana Toraja	72,41	72,48	72,56	72,80	73,15	73,30
19	Luwu Utara	67,40	67,50	67,61	67,90	68,31	68,51
20	Luwu Timur	69,64	69,71	69,79	70,03	70,38	70,53
21	Toraja Utara	72,80	72,87	72,94	73,09	73,35	73,39
22	Makassar	71,47	71,49	71,51	71,70	72,00	72,09
23	Parepare	70,59	70,64	70,69	70,88	71,18	71,27
24	Palopo	70,20	70,25	70,30	70,49	70,79	70,88
25	Sulawesi Selatan	69,80	69,82	69,84	70,08	70,43	70,57

Sumber: BPS Kabupaten Bone 31 Maret 2021

Besar kecilnya Angka Harapan Hidup (AHH) dipengaruhi oleh beberapa variabel, salah satunya yaitu penolong persalinan. Diharapkan bahwa dengan semakin tingginya persentase balita yang ditolong kelahirannya oleh tim medis, akan semakin tinggi kemungkinan kelangsungan hidupnya. Tetapi perkiraan hubungan tersebut dapat menyimpang jika pertolongan tenaga medis digunakan untuk proses kelahiran yang abnormal dan dengan penanganan yang sudah terlambat. Faktor yang lain ialah factor geografis, kondisi sosial masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan. Hal yang paling memungkinkan untuk meminimalkan resiko kematian adalah dengan cara memperbaiki faktor pendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat seperti meminimalkan Angka Kematian Bayi (AKB), menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan menerapkan pola sehat.

Kondisi sosial wilayah, tradisi dan kebiasaan masyarakat juga mempengaruhi kondisi masyarakat. Dimana pada

tahun 2019 persentase persalinan balita yang ditolong oleh tim medis menurun yaitu dari 95,27% menjadi 94,59%. Pertolongan oleh tim medis dapat dirinci sebagai berikut: persalinan yang ditolong oleh dokter kandungan dan dokter umum sebanyak 14,79%, persalinan dibantu oleh bidan sebesar 79,80%, persalinan yang dibantu oleh perawat dan tenaga medis lainnya sebesar 0%. Hal ini membuktikan bahwa terdapat sekitar 5,41% balita pada waktu dilahirkan masih ditolong oleh tenaga non medis (seperti dukun beranak dan lainnya), yang masih belum ada jaminan mengenai kelangsungan kesehatan baik ibu maupun bayi yang dilahirkan. Penanganan kelahiran yang benar merupakan salah satu harapan untuk dapat menekan atau meminimalisir tingkat moralitas (Statistik, 2020). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yasril dan Mahmudah (2018), pernikahan dini, pertolongan persalinan non medis dan komplikasi kebidanan berpengaruh terhadap tingkat kematian Ibu (Yasril, 2018).

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu isu nasional bahkan salah satu prioritas di program Sustainable Development Goals (SDG's). Salah satu hal yang bisa menurunkan tingkat Angka Kematian Ibu (AKI) adalah Program Keluarga Harapan yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial, yaitu program yang memfasilitasi dan mewajibkan Ibu hamil yang terkategori rumah tangga miskin untuk memeriksakan kandungannya ke fasilitas kesehatan minimal 4 (empat) kali selama masa kehamilan (Susiana, 2018).

Situasi kesehatan di Kabupaten Bone juga sangat dipengaruhi oleh peran pemerintah daerah. Pemerintah berperan besar baik sebagai perencana, penggerak dan penyedia layanan kesehatan bagi masyarakat. Yang lebih penting lagi untuk mendongkrak Indeks Kesehatan peran serta masyarakat di bidang kesehatan juga perlu ditingkatkan

terutama pihak-pihak terkait untuk konsisten mengupayakan perbaikan segala bidang, terutama perbaikan sarana dan prasarana kesehatan.

Dalam kajian ekonomi, suatu negara/wilayah akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya. Terkait dengan teori human capital bahwa modal manusia berperan signifikan, bahwa lebih penting daripada factor teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Kesehatan penduduk sangat menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi(Yektiningsih, 2018).

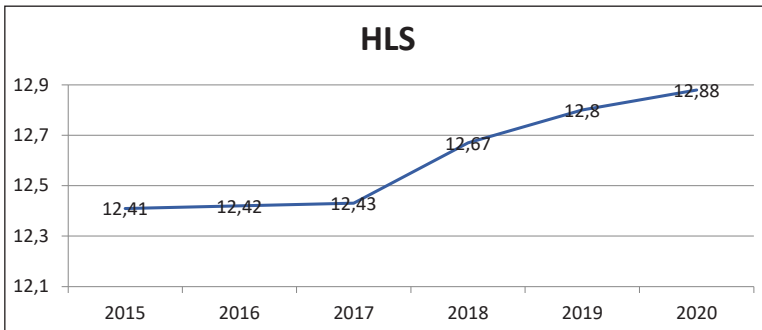
Dimensi Indeks Pendidikan

Dimensi indeks pendidikan juga merupakan salah satu komponen penting yang dijadikan ukuran kesejahteraan sosial dalam pembangunan. Dengan asumsi bahwa semakin tinggi pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah maka semakin tinggi pula kualitas seseorang, baik pola pikir maupun pola tindakannya (Siswati & Hermawati, 2018).

Indeks pendidikan dihitung dari dua indicator komponen, yaitu: Pertama: komponen Angka Lama Harapan Sekolah (HLS). Komponen ini digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan system pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak yang berusia 7 tahun ke atas.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Bone bahwa ukuran indeks pendidikan pada komponen Angka Lama Harapan Sekolah (HLS) Kabupaten Bone disajikan dalam Gambar 1.2 (Statistik, 2021b).

**Gambar 1.2 Angka Lama Harapan Sekolah (HLS)
Kabupaten Bone Tahun 2015-2020**



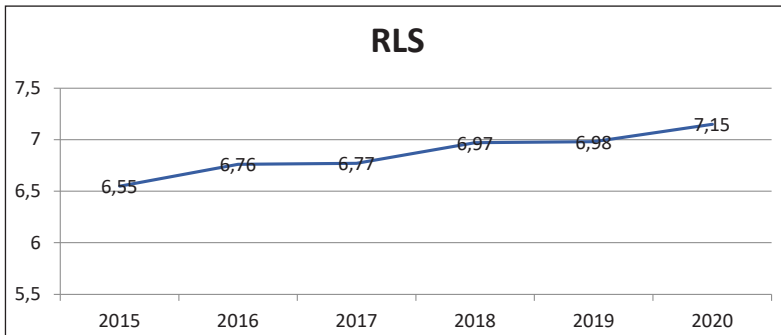
Sumber: BPS Kabupaten Bone 31 Maret 2021

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Bone masih di bawah rata-rata Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Sulawesi Selatan, meskipun begitu dalam kurun waktu 3 tahun terakhir Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Bone terus menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat pada gambar 1.2, pada tahun 2015 penduduk usia 7 tahun ke atas yang merupakan variabel dalam perhitungan IPM tercatat sekitar 12,41 tahun mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 12,42 tahun, kemudian di tahun 2017 meningkat menjadi 12,43 tahun. Kemudian mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2018 sebesar 12,67 hingga di tahun 2019 dan 2020 sebesar 12,80 dan 12,88 tahun. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa terjadi peningkatan kualitas pendidikan masyarakat di Kabupaten Bone yang ditandai dengan peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) meskipun peningkatannya lamban.

Komponen kedua dalam perhitungan indeks pendidikan yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka yang diperoleh dari penduduk yang berusia 25 tahun ke atas. Berdasarkan data BPS Kabupaten Bone bahwa ukuran indeks pendidikan

pada komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bone disajikan dalam Gambar 1.3 (Statistik, 2021e).

Gambar 1.3 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bone Tahun 2015-2020



Sumber: BPS Kabupaten Bone 31 Maret 2021

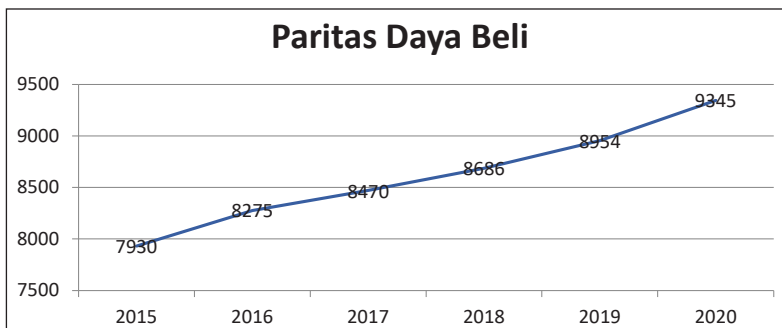
Rata-rata lama sekolah (RLS) masih tergolong rendah. Pada tahun 2015 sebesar 6,55 tahun, 2016 sebesar 6,67 tahun, tahun 2017 sebesar 6,77 tahun, kemudian di tahun 2019 sebesar 6,98 tahun dan di tahun 2020 sebesar 7,15 tahun. Hal ini berarti bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Bone hampir menyelesaikan kelas VII pada Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Komponen indeks pendidikan dalam IPM juga terbilang sulit untuk meningkat satu poin dalam kurun hanya satu tahun. Hal tersebut karena hasil pembangunan pendidikan tidak bisa dilihat dalam waktu yang singkat, perhitungan lamanya bersekolah atau rata-rata lama bersekolah satuannya adalah tahun. Begitu juga dengan harapan lama sekolah pada titik tertentu yang telah dicapai, maka peningkatannya akan terlihat bergerak cukup lambat.

Indeks Paritas Daya Beli

Indeks paritas daya beli berbeda dengan komponen pendidikan dan kesehatan, karena komponen indeks paritas daya beli lebih mudah ditingkatkan kontribusinya dalam pembentukan Indeks Pembangunan Manusia. Secara teori bahkan berkali-kali ditingkatkan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hanya saja pertumbuhan ekonomi akan berdampak kepada meningkatnya paritas daya beli masyarakat jika pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat melalui pemerataan pendapatan. Factor lain yang mempengaruhi daya beli adalah inflasi, apabila inflasi naik maka daya beli masyarakat akan menurun, begitu pula sebaliknya. Dari data Badan Pusat Statistik untuk paritas daya beli penduduk Kabupaten Bone disajikan dalam gambar 1.4 (Statistik, 2021).

Gambar 1.4 Paritas Daya Beli Penduduk Kabupaten Bone Tahun 2015-2020



Sumber: BPS Kabupaten Bone 31 Maret 2021

Paritas daya beli penduduk Kabupaten Bone pada tahun 2015 sebesar 7.930, pada tahun 2016 sebesar 8.275, pada tahun 2017 sebesar 8.470, pada tahun 2018 sebesar 8.686, kemudian di tahun 2019 sebesar 8.954. dan di tahun 2020 sebesar 9.345. Hal tersebut menunjukkan bahwa

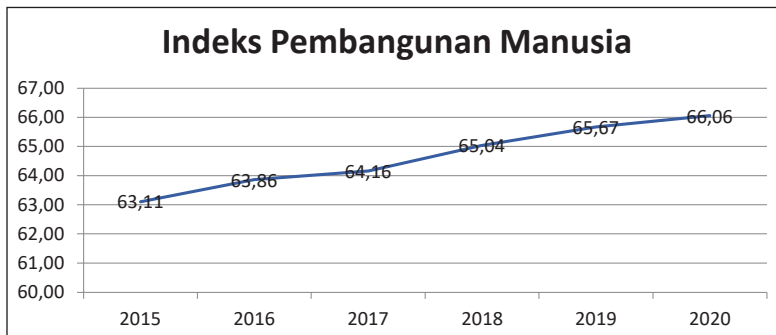
paritas daya beli penduduk kabupaten bone 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan, artinya bahwa pertumbuhan ekonomi telah dinikmati oleh lapisan masyarakat meskipun tidak maksimum.

Indeks Pembangunan Manusia

Indikator komponen IPM ini merupakan suatu jawaban untuk menilai tingkat kinerja pembangunan secara keseluruhan dari tingkat pencapaian pembangunan manusia. Indikator ini juga secara mudah dapat memberikan posisi kinerja pembangunan (output pembangunan) yang dicapai oleh suatu daerah.

Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kinerja pembangunan yang dicapai wilayah tersebut. Dari data Badan Pusat Statistik melihat tingkat kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Bone disajikan dalam gambar 1.5 (Statistik, 2021c).

Gambar 1.5 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bone Tahun 2015-2020



Sumber: BPS Kabupaten Bone 31 Maret 2021

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menentukan peringkat, namun tidak mutlak untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia. Akselerasi peningkatan

capaian IPM melambat dari tahun 2015 ke tahun 2017 sebesar 0,75% dan 0,35. Namun mengalami peningkatan di tahun 2018 sebesar 0,88%, dan di tahun 2019 ke tahun 2020 peningkatannya sebesar 0,63% dan 0,39%.

Tingkat pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bone yang digambarkan oleh IPM pada tahun 2015 sebesar 63,11 dan terus meningkat hingga tahun 2020 sebesar 66,06. Selama tahun 2015 sampau dengan tahun 2020, pertumbuhan tertinggi IPM terjadi di tahun 2018 sebesar 0,88%. Jika dibandingkan ditahun 2015 ke tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 0,75% dan 0,35%. Peningkatan IPM yang cukup signifikan dari tahun 2015-2020, hal tersebut menandakan bahwa arah pembangunan daerah mulai berpihak kepada peningkatan kualitas hidup manusia di Kabupaten Bone. Dari capaian Indeks Pembangunan Manusia tersebut dapat dikategorikan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Bone cukup berhasil meskipun peningkatannya lambat, hal tersebut masih butuh perhatian dari pemerintah setempat dalam percepatan IPM demi keberhasilan pembangunan yang lebih signifikan. Hal ini dibuktikan pada tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2015-2020

No	Wilayah	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kepulauan Selayar	64,32	64,95	65,39	66,04	66,91	67,38
2	Bulukumba	65,58	66,46	67,08	67,70	68,28	68,99
3	Bantaeng	66,20	66,59	67,27	67,76	68,30	68,73
4	Jeneponto	61,61	61,81	62,67	63,33	64,00	64,26
5	Takalar	64,07	64,96	65,48	66,07	66,94	67,31
6	Gowa	66,87	67,70	68,33	68,87	69,66	70,14

No	Wilayah	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7	Sinjai	64,48	65,36	65,80	66,24	67,05	67,60
8	Maros	67,13	67,76	68,42	68,94	69,50	69,86
9	Pangkajene dan Kepulauan	66,65	66,86	67,25	67,71	68,29	68,72
10	Barru	68,64	69,07	69,56	70,05	70,60	71,00
11	Bone	63,11	63,86	64,16	65,04	65,67	66,06
12	Soppeng	65,33	65,95	66,67	67,60	68,26	68,67
13	Wajo	66,90	67,52	68,18	68,57	69,05	69,15
14	Sindereng Rappang	69,00	69,39	69,84	70,60	71,05	71,21
15	Pinrang	69,24	69,42	69,90	70,62	71,12	71,26
16	Enrekang	70,03	70,79	71,44	72,15	72,66	72,76
17	Luwu	68,11	68,71	69,02	69,60	70,39	70,51
18	Tana Toraja	65,75	66,25	66,82	67,66	68,25	68,75
19	Luwu Utara	67,44	67,81	68,35	68,79	69,46	69,57
20	Luwu Timur	70,43	70,95	71,46	72,16	72,80	73,22
21	Toraja Utara	66,76	67,49	67,90	68,49	69,23	69,33
22	Makassar	79,94	80,53	81,13	81,73	82,25	82,25
23	Parepare	76,31	76,48	76,68	77,19	77,62	77,86
24	Palopo	76,27	76,45	76,71	77,30	77,98	78,06
25	Sulawesi Selatan	69,15	69,76	70,34	70,90	71,66	71,93

Sumber: BPS Kabupaten Bone 31 Maret 2021

Rekomendasi Kebijakan/Program Pemerintah demi Keberhasilan Pembangunan Manusia

Konsep pembangunan manusia tidaklah berdiri sendiri sebagai suatu yang eksklusif. Perlu kebijakan dan program pembangunan yang terencana dalam menentukan dan memilih prioritas atas kebutuhan masyarakat Kabupaten Bone, sehingga pembangunan manusia dapat tepat sasaran sesuai dengan tujuan pembangunan. Berdasarkan pada

setiap komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka pemerintah Kabupaten Bone perlu melakukan kebijakan yang difokuskan untuk mendukung peningkatan pembangunan manusia sebagai berikut:

Dimensi Kesehatan

- a) Perlu adanya pemerataan penyebaran fasilitas pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana pada fasilitas kesehatan serta masih kurangnya tenaga medis khususnya dokter spesialis sehingga perlu ditingkatkan untuk menunjang kualitas kesehatan penduduk.
- b) Pada Dinas Kesehatan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan Kabupaten Bone perlu adanya penurunan jumlah kematian Ibu dengan cara mensosialisasikan program KB melalui pemberdayaan masyarakat, program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, penurunan gizi buruk, mengurangi kasus pernikahan usia dini.

Dimensi Pendidikan

- a) Perlu adanya peningkatan partisipasi sekolah penduduk dalam pengembangan dan peningkatan sarana serta prasarana pendidikan di tingkat pendidikan menengah pertama dan menengah atas.
- b) Peningkatan jumlah guru yang berkompeten agar pendidikan di Kabupaten Bone semakin berkualitas.
- c) Untuk mempermudah dan memperluas jangkauan dan mutu pelayanan serta kesempatan memperoleh pendidikan dalam rangka menunjang pendidikan wajib belajar. Olehnya itu perlu adanya kebijakan pemberian SPP gratis bagi masyarakat yang kurang mampu, program beasiswa serta kebijakan yang dapat menunjang perbaikan pendidikan.

Dimensi Layak Hidup Masyarakat

- a) Kebijakan dan program yang berguna meningkatkan dukungan usaha industri rumah tangga dalam pengembangan perdagangan, pemberdayaan BUMdes, pengembangan koperasi dan UKM dalam memberdayakan kemampuan usaha masyarakat serta membuka peluang terhadap pasar modern.
- b) Perlu adanya upaya pengembangan kebijakan lapangan pekerjaan yang beragam dalam peningkatan pendapatan untuk memenuhi beragam kebutuhan hidupnya. Dengan adanya kebijakan tersebut kemampuan daya beli masyarakat pun akan terpenuhi.

KESIMPULAN

Pembangunan manusia sesungguhnya memiliki makna yang sangat luas. Ide dasar dari pembangunan manusia cukup sederhana, yaitu menciptakan pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan, serta perubahan dalam kesejahteraan manusia. Dengan konsep tersebut, tujuan utama dari pembangunan manusia harus mampu menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif.

Dari hasil pengamatan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bone selama periode tahun 2015-2020 maka dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya:

Selama kurun waktu 2015-2020, pembangunan manusia di Kabupaten Bone menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Nilai IPM Kabupaten Bone menurut UNDP termasuk kedalam tingkat pembangunan kategori “sedang”. namun secara substansial IPM di Kabupaten Bone

termasuk IPM yang lambat sebab berada pada peringkat ke-23 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Bila dilakukan perbandingan capaian IPM dengan daerah sekitar, maka IPM Kabupaten Bone masih kalah dengan Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Kategori keberhasilan pembangunan manusia di Kabupaten Bone dapat dikatakan sebagai kategori yang cukup berhasil meskipun peningkatan angka IPM terbilang lambat. Olehnya itu dibutuhkan peran pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan/program agar keberhasilan pembangunan manusia di Kabupaten Bone dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Latuconsina, Z. M. Y. (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Berbasis Pendekatan Perwilayahan dan Regresi Panel. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 1(2), 202. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2017.1.2.202-216>.
- Maulana, R. P. A. B. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan Dan Teknologi Terhadap Ipm Provinsi Di Indonesia 2007-2011. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan Dan Teknologi Terhadap Ipm Provinsi Di Indonesia 2007-2011*, 6(2). <https://doi.org/10.15294/jejak.v6i2.3886>.
- Neman, W. (2003). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Allyn and Bacon.
- Pake, S. D. S. G. M. V. K. dkk. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten

- Halmahera Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(4), 13–22.
- Ratih, I. S. T. (2021). Indeks Pembangunan Manusia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Report, H. D. (2016). *Published for the United Nations Development Program (UNDP)*.
- Siswati, E., & Hermawati, D. T. (2018). Analisis Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, 18(2), 93–114. <https://doi.org/10.30742/jisa.v18i2.531>.
- Statistik, B. P. (2020a). *Indeks Pembangunan Manusia 2019*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone
- Statistik, B. P. (2020b). *Rangking Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan*. Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan.
- Statistik, B. P. (2021a). *Angka Harapan Hidup (AHH)*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone.
- Statistik, B. P. (2021b). *Harapan Lama Sekolah (HLS)*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone.
- Statistik, B. P. (2021c). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*. Badan Pusat Statisti Kabupaten Bone.
- Statistik, B. P. (2021d). *Paritas Daya Beli (PPP)*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone
- Statistik, B. P. (2021e). *Rata-rata Lama Sekolah (RLS)*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone.
- Sudriman, M. Z. M. . (2017). The Effect of Government Expenditures in Education and Health Against Human Development Index in Jambi Province. *The International Journal of Social Science and Humanities*, 4.

- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (1985). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LPEF-UI Bima Grafika.
- Sukirno, S. (1996). *Pengantar Teori Makro Ekonomi* (1st ed.). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Supaijo, Iqbal, M., & Mawaddah, H. F. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Metro Tahun 2007-2017 dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Salam: Islamic Economic Journal*, 1(1), 1–22.
- Susiana, S. (2018). Peran Program Keluarga Harapan dalam Penurunan Angka Kematian Ibu di Provinsi Jambi dan Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 10(1).
- Todaro, M. P. S. C. S. (2012). *Economic Development*. New York: Pearson Education.
- Yasril, A. I. Ma. (2018). Analisis Jalur Faktor Angka Kematian Ibu di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014. *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan*, 7(2).
- Yektiningsih, E. (2018). Analisis Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Kabupaten Pacitan Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, 18(2), 32–50. <https://doi.org/10.30742/jisa.v18i2.528>.

KORUPSI SEBAGAI HAMBATAN PEMBANGUNAN EKONOMI: STUDI KASUS KABUPATEN BREBES, JAWA TENGAH

Dr. Ibnu Muhdir

(ibnu.muhdir@uin-suka.ac.id)

Ita Eviyanah

(itaeviyana05@gmail.com)

PENDAHULUAN

Institusi yang baik, seperti supremasi hukum dan pembatasan elit, mengarah pada pertumbuhan dan pendapatan yang lebih tinggi pada suatu negara (Todaro & Smith, 2011). Penyelewengan yang terjadi pada institusi dapat mempengaruhi kondisi suatu negara, salah satunya yaitu praktik korupsi. Korupsi menjadi penghambat utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, di mana korupsi merusak keuangan publik dan menghambat perkembangan ekonomi nasional serta mempengaruhi investasi asing dan domestik (Jalal & Mustapha, 2016). Dengan meningkatnya korupsi pada suatu daerah maka pertumbuhan ekonomi daerah tersebut akan terhambat. Sarana prasarana serta pembangunan infrastruktur pada daerah tersebut akan menjadi semakin melambat yang mengakibatkan permasalahan kemiskinan meningkat.

Pemerintah telah melakukan beberapa strategi untuk mengentaskan kemiskinan dan mendorong pemerataan ekonomi yaitu salah satunya dengan mengucurkan dana desa dan bantuan pemerintah sesuai kebutuhan daerah. Namun, dana bantuan dari pemerintah yang diberikan ke setiap desa di Indonesia tidak luput dari kasus penyelewengan. Salah satu daerah yang memiliki banyak kasus korupsi atas bantuan dari pemerintah yaitu daerah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Terdapat banyak kerugian diakibatkan kasus korupsi yang dilakukan oleh pegawai daerah Kabupaten Brebes.

Pada tahun 2017 hingga tahun 2020 terjadi banyak kasus penyelewengan atas dana yang diberikan di Kabupaten Brebes. Beberapa di antaranya yaitu korupsi oleh Kepala Desa atas dana bantuan untuk program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, korupsi dana pajak bumi dan banunan (PBB), pajak penghasilan (PPH) dan pajak pertambahan nilai (PPN) yang merugikan negara sebesar Rp574.609.232 (Arifin, 2019). Kemudian penyelewengan dana bantuan sapi dari pemerintah yang merugikan Rp204.000.000 oleh Kepala Desa (Ded & Ima, 2020). Penyelewengan lainnya yaitu korupsi yang menyebabkan kerugian sebesar 343 juta rupiah dari anggaran dana desa dilakukan oleh Kepala Desa Kabupaten Brebes (Nugroho, 2020). Kasus korupsi atas dana desa lainnya juga terjadi yang merugikan negara sebesar Rp 120.917.382 oleh Kepala Desa di Kabupaten Brebes (Suripto, 2020). Dampak dari kasus-kasus tersebut diterima dan dirasakan masyarakat desa secara langsung. Upaya yang dilakukan Kabupaten Brebes dalam menekan angka korupsi dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi daerah.

Penelitian terkait korupsi dan pembangunan ekonomi telah banyak diteliti. Penelitian oleh Otusanya (2011) menunjukkan bahwa pembangunan sosial-politik dan ekonomi,

politik, kekuasaan, sejarah, dan globalisasi terus mereproduksi dan mentransformasikan struktur kelembagaan dan aktor yang memfasilitasi praktik korupsi di negara berkembang yang berdampak pada kerusakan perekonomian dan menyebabkan kemiskinan. Dampak korupsi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi juga telah banyak diuji oleh para peneliti. Akkoyunlu & Ramella (2020) menemukan hasil signifikan korupsi pada pembangunan ekonomi, produktivitas, ketidaksetaraan pendapatan dan inovasi. Praktik korupsi juga ditemukan oleh Amoh et al. (2020) secara independen dan timbal balik menghambat pertumbuhan ekonomi di Ghana. Alfada (2019), Ibraheem & Ajoke (2013), serta Papaconstantinou et al. (2009) menemukan hal serupa yaitu korupsi memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara.

Groenendijk (2014) menyatakan bahwa meskipun korupsi pada umumnya dianalisis sebagai fenomena sosial, terutama dalam penelitian komparatif, korupsi berasal dari keputusan individu. Oleh karena itu analisis dalam penelitian ini menggunakan Principal Agent theory. Menurut Walton & Jones (2017) teori ini pada permasalahan korupsi didasarkan pada dua pelaku utama: pelaku (dengan berbagai cara digambarkan sebagai menteri, badan, atau pemilihan pemerintah) dan pelaku, kelompok atau individu yang dipantau oleh pelaku utama. Oleh karena itu, korupsi terjadi ketika prinsipal tidak dapat memantau agen secara memadai dan ketika tujuan keduanya tidak sejalan.

Penelitian ini berupaya untuk menganalisis dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Brebes serta menganalisis atas strategi dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dalam menanggulangi kasus korupsi di Kabupaten Brebes.

KERANGKA TEORETIS

Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada principal agent theory. Dalam ilmu ekonomi, principal agent theory adalah teori atau dilema bahwa satu orang (agen) mampu mengambil keputusan yang berdampak pada orang lain (principal), dilema ini muncul karena terkadang, agen memiliki motif untuk bertindak demi kepentingan terbaiknya sendiri daripada kepentingan principal (Sall, 2014). Menurut Walton & Jones (2017) principal agent theory diadopsi oleh peneliti yang berpendapat bahwa korupsi terjadi ketika informasi dan preferensi asimetri antara principal dan agen, di mana terdapat kesempatan dalam pengambilan insentif bagi agen untuk terlibat dalam korupsi.

Korupsi muncul ketika principal harus bergantung pada agen untuk melakukan suatu tindakan, ketika agen tersebut memiliki keleluasaan yang tinggi, dan ketika agen menghadapi akuntabilitas yang rendah (Mistree & Dibley, 2002). Hubungan yang muncul yaitu kontraktual, di mana terjadi ketegangan antara “Principal” yang menuntut layanan dan “Agent” sebagai penyedia layanan. Dalam hal ini principal merupakan ilustrasi dari masyarakat yang memiliki hak untuk diberdayakan melalui kinerja “agent”, sedangkan “agent” mengilustrasikan pejabat pemerintah, legislator, dan birokrat pemerintah.

Institusi pemerintah memiliki kekuatan untuk menentukan potensi pertumbuhan ekonomi dan distribusi sumber daya di masa depan serta membentuk insentif investasi dalam suatu perekonomian, kemudian memiliki efek langsung pada pertumbuhan ekonomi melalui investasi dalam teknologi serta investasi dalam modal manusia dan fisik (Sall, 2014). Terjadinya penyalahgunaan wewenang sebagai

konflik kepentingan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah sebagai agen, memicu terjadinya konflik dan mengakibatkan kerugian. Kerugian yang ditimbulkan sebagai dampak dari korupsi yaitu dapat berupa menurunnya kualitas layanan publik dan kekayaan publik yang dapat mengakibatkan ketimpangan ekonomi yang akhirnya dapat menghambat pembangunan ekonomi suatu negara.

Apabila korupsi dianggap sebagai masalah principal-agent, terdapat kemungkinan strategi antikorupsi, reformasi dapat berfokus pada:

- a) menghilangkan kekuasaan dari pejabat pemerintah, mungkin dengan meningkatkan titik akses untuk menerima layanan, dengan memprivatisasi layanan, atau dengan komputerisasi prosedur perizinan;
- b) meningkatkan pemantauan pejabat pemerintah, biasanya melalui inisiatif transparansi yang ditingkatkan, dan / atau;
- c) menciptakan mekanisme akuntabilitas yang lebih ketat terhadap pejabat pemerintah, seperti menurunkan standar pembuktian korupsi atau dengan meningkatkan hukuman bagi mereka yang tertangkap (Mistree & Dibley, 2002).

Terdapat dua teori yang menjelaskan bagaimana korupsi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu “grease the wheels” dan “sand the wheels” (Gründler & Potrafke, 2019). Gründler & Potrafke (2019) menjelaskan bahwa teori grease the wheels di mana korupsi meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena korupsi menghindari regulasi yang tidak efisien, sebaliknya sand the wheels menyatakan bahwa korupsi menurunkan pertumbuhan ekonomi karena korupsi menghalangi produksi dan inovasi yang efisien. Berdasarkan

kedua teori tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan *sand the wheels*, di mana korupsi menjadi penghambat lajunya perekonomian suatu negara. Hal ini dikarenakan keuangan negara yang diperuntukkan sebagai modal produksi, investasi dan pembiayaan pengeluaran pemerintah diselewengkan untuk kebutuhan pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Hoinaru et al. (2020) menemukan temuan yang sesuai dengan teori *sand the wheels* yang memaparkan dampak negatif antara korupsi, ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Hoinaru et al. (2020) juga menemukan bahwa pembangunan ekonomi dan berkelanjutan di negara-negara berpenghasilan tinggi lebih kuat dan dipengaruhi secara negatif oleh fenomena korupsi dari pada di negara-negara yang berpenghasilan rendah, di mana tata kelola pemerintahan lebih lemah. Di sisi lain, Alfada (2019) menjelaskan bahwa dampak korupsi terhadap suatu negara bervariasi berdasarkan komponen pengeluaran pemerintah. Korupsi dapat berdampak pada konsumsi pemerintah, investasi, dan pembiayaan lainnya yang mendukung pembangunan ekonomi suatu negara.

Selain korupsi tidak sejalan dengan konsep laju pertumbuhan ekonomi, korupsi juga tidak sesuai dengan norma dan moral yang dianut masyarakat. Iqbal & Lewis (2006) menjelaskan bahwa terdapat penerimaan yang cukup umum bahwa nilai dan konsep masyarakat tentang keadilan sosial membentuk perilaku moral. Selain itu agama bagi sebagian orang memiliki pengaruh yang penting, namun bagi seorang muslim agama adalah pertimbangan utama dalam melakukan suatu perbuatan (Iqbal & Lewis, 2006). Korupsi yang diartikan sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk mengambil manfaat bagi keuntungan pribadi dapat merugikan masyarakat atas kesejahteraan yang

berhak mereka peroleh. Padahal, di sisi lain syariah mengambil sikap yang sangat serius terhadap penyalahgunaan hak milik (Er, 2008).

Korupsi dilarang (haram) oleh ajaran Islam (Bougatef, 2015). Korupsi disebutkan dalam Al-Qur'an beberapa kali (Iqbal & Lewis, 2006). Al-Quran menyebut istilah korupsi melalui ayat-ayat yang berkaitan dengan tindakan penipuan harta benda dan penyalahgunaan wewenang, seperti, dalw (penyuapan), saraqah (pencurian), seperti dalam surat Al-Baqarah (2: 188) dan surat Al-Maidah (5: 38) sebagai berikut (Fikriawan et al., 2019).

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”

Berdasarkan pemaparan di atas, korupsi dilarang oleh Islam dan Islam mengancam pelaku korupsi dengan memberikan balasan setimpal sesuai dengan perbuatannya. Namun, maraknya kasus korupsi seolah mengindikasikan

bahwa orang yang melakukan korupsi tidak menjadikan agama dan nilai masyarakat sebagai pedoman dalam bertindak. Dengan berbagai faktor korupsi dan kesempatan yang ada maka seseorang dengan kekuasaannya dapat melakukan tindakan korupsi. Oleh karena itu peneliti beranggapan bahwa korupsi bukanlah hal yang mudah untuk dicegah dan diberantas. Perlu adanya peran dan upaya dari diri pribadi, sosial, agama dan negara untuk memerangi tindakan korupsi.

PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis dan memaparkan suatu fenomena berdasarkan data dari berbagai sumber (Indriantoro & Supomo, 2016). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif pada penelitian ini diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan korupsi dan pembangunan ekonomi. Sedangkan data kuantitatif diperoleh dari beberapa sumber, yaitu koran digital dan Badan Pusat Statistik yang diperoleh dari tahun 2010-2020.

Penelitian ini berfokus pada korupsi dan pembangunan ekonomi di Kabupaten Brebes. Adapun pengembangan analisis dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga. Pertama, analisis kasus korupsi dan pembangunan ekonomi di Kabupaten Brebes. Kedua, peran pemerintah dalam mengatasi kasus korupsi di Kabupaten Brebes. Ketiga, efektifitas peran pemerintah dalam menanggulangi kasus korupsi di Kabupaten Brebes ditinjau berdasarkan teori yang relevan.

Korupsi dan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Brebes

Kabupaten Brebes adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayahnya 1.769,62 km², jumlah penduduknya berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 adalah berjumlah 1.978.759 jiwa. Brebes merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk paling banyak di Jawa Tengah, dan paling luas di Jawa Tengah ke-2 setelah Kabupaten Cilacap (Wikipedia, 2021b). Kabupaten Brebes memiliki 17 kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Tegal di bagian timur, berbatasan dengan Kabupaten Banyumas di bagian selatan, berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan di bagian barat, serta berbatasan dengan Laut Jawa di bagian utara.

Berdasarkan pemaparan tersebut diperoleh bahwa Kabupaten Brebes memiliki potensi dari segi geografis dan kependudukan. Namun potensi tersebut juga bisa menjadi celah bagi permasalahan ekonomi. Salah satu penyebabnya yaitu penyelewengan oleh aparat pemerintah yang mengakibatkan ketimpangan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari data korupsi berikut ini.

Tabel 1. Data Korupsi Kabupaten Brebes 2011-2020

No	Tahun	Pelaku	Kasus	Kerugian
1	2020	Kades Legok, Bantarkawung	Korupsi anggaran dana desa tahun 2018	Rp 343.000.000
2	2020	Kades Kedungtukang, Jatibarang	Korupsi alokasi dana desa anggaran tahun 2015-2017	Rp 120.917.382
3	2019	kades Sindangjiaya, Ketanggungan	Korupsi dana desa tahun 2017	Rp 574.609.232
4	2019	kades Sindangjiaya, Ketanggungan	Korupsi bantuan Bupati program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis	
5	2019	kades Sindangjiaya, Ketanggungan	Korupsi dana PBB, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH)	
6	2019	Kades Cipelem, Bulakamba	Korupsi dana desa	Rp 281.000.000
7	2019	Kades kedunguter, Brebes	Korupsi dana desa	Rp 300.000.000
8	2020	Kades Brebes	Korupsi dana bantuan sapi	Rp 204.000.000
9	2013	Kades Brebes	Korupsi dana aspirasi dewan	
10	2018	Kades Brebes	Korupsi dana desa untuk penerangan jalan umum	
11	2017	Kades Wanacala, Songgom	Korupsi dana desa	Rp 284.000.000
12	2017	Suhirman, Kepala Sekolah	Korupsi penyalahgunaan penyaluran dana APBN BOS SMK Kerabat Kita Bumiayu tahun ajaran 2015-2017	Rp 2.053.309.800
13	2017	Sugiarto, Perangkat Sekolah	Korupsi penyalahgunaan penyaluran dana APBN BOS SMK Kerabat Kita Bumiayu tahun ajaran 2015-2018	

No	Tahun	Pelaku	Kasus	Kerugian
14	2016	Dwi Nurhadi Setiawan, Pensiunan Dinas Pertanian	Korupsi pengadaan bahan/sarana produksi kegiatan pengembangan kawasan bawang merah	Rp 93.472.500
15	2016	Kartoib, Pensiunan Dinas Pertanian	Korupsi pengadaan bahan/sarana produksi kegiatan pengembangan kawasan bawang merah	Rp 132.000.000
16	2011	Sekdin Pekerjaan Umum	Korupsi proyek pembangunan Kantor Pelayanan Terpadu Anggaran APBD	Rp 7.840.000.000 Rp 404.900.000
17	2011	Direktur PT ABP	Korupsi proyek pembangunan Kantor Pelayanan Terpadu Anggaran APBD	
18	2011	Indra Kusuma, Bupati Brebes	Korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan pasar di Brebes pada tahun 2003	Rp 7.800.000.000

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan data korupsi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa korupsi dilakukan oleh tingkat pemerintahan terkecil hingga terbesar dalam lingkup Kabupaten Brebes. Terdapat pelaku korupsi pun melakukan penyelewengan lebih dari satu kasus korupsi. Kasus korupsi di Kabupaten Brebes didominasi oleh penyelewengan yang dilakukan oleh perangkat desa atas dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat. Penyelewengan terhadap dana desa terjadi berturut-turut setiap tahun dari beberapa desa. Sedangkan dana desa yang disalurkan untuk Kabupaten Brebes sangat besar. Berikut dana desa yang diperoleh Kabupaten Brebes.

Tabel 2. Alokasi Dana Desa Kabupaten Brebes Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Desa (unit)	Jumlah Dana Desa
2020	292	Rp 495.634.148.000
2019	292	Rp 441.009.459.000
2018	292	Rp 343.915.727.000
2017	292	Rp 270.922.338.000
2016	292	Rp 212.385.910.000

Sumber: Data diolah Kemenkeu (2021)

Jumlah dana desa yang semakin besar setiap tahunnya menandakan usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan desa semakin tinggi. Namun, terjadinya kasus korupsi dana desa di Kabupaten Brebes yang merugikan ratusan juta rupiah menandakan bahwa alokasi dana desa masih belum dilakukan pengawasan yang baik. Pengelolaan dan pencegahan tindakan korupsi atas dana desa membutuhkan sinergi dari pemerintah, aparat desa dan masyarakat. Jika hal tersebut tidak dilakukan dengan baik maka kasus korupsi akan terjadi berulang. Dana desa yang merupakan bantuan bertujuan untuk mensejahterakan

masyarakat desa, sehingga apabila dana desa diselewengkan oleh perangkat desa maka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi pada suatu daerah tidak dapat dihindari sehingga pembangunan ekonomi pun menjadi terhambat.

Korupsi di Kabupaten Brebes selain dilakukan pada dana desa juga dilakukan penyelewengan atas bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah untuk kemakmuran dan mengentaskan kemiskinan. Apabila penyelewengan atau kasus korupsi tidak dapat dicegah dan diminimalisir maka masyarakat akan mengalami kesulitan dan kemiskinan tidak dapat dihindari. Kemiskinan di Kabupaten Brebes menjadi tingkat kemiskinan yang tertinggi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Brebes pada Maret 2019, 293,2 ribu jiwa atau 16,22% (Insetyonoto, 2020). Tingginya kemiskinan Kabupaten Brebes juga dapat dilihat dari data berikut ini.

Grafik 1 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Brebes Mei 2010-Mei 2020



Sumber; Brebes BPS (2021)

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten mengalami penurunan dari tahun 2010 hingga

tahun 2019, namun meningkat Kembali di tahun 2020. Berdasarkan data tersebut kemiskinan di Kabupaten Brebes masih tinggi di mana pada Maret 2020 tingkat kemiskinan sebesar 308,78 ribu jiwa. Dengan kasus kemiskinan yang tinggi dan tingkat korupsi yang tinggi menyebabkan Kabupaten Brebes terus mengalami ketidakstabilan ekonomi yang berdampak pada kualitas layanan publik, ketimpangan ekonomi dan pembangunan ekonomi di Kabupaten Brebes.

Tabel 3. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Brebes menurut Lapangan Usaha (persen), 2016-2020

Lapangan Usaha/Industry		2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,60	1,75	2,43	0,64	3,67
B	Pertambangan dan Penggalian	6,16	6,72	6,04	3,84	1,38
C	Industri Pengolahan	7,07	8,17	5,27	12,98	-0,17
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,61	5,30	5,34	4,51	2,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,17	3,19	4,97	4,32	3,43
F	Konstruksi	-0,98	5,3	6,08	5,2	-2,83
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor	5,27	7,06	5,75	6,35	-4,98
H	Transportasi dan Pergudangan	6,69	6,27	7,07	8,91	-30,75
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,86	12,1	8,51	8,61	-4,83
J	Informasi dan Komunikasi	8,37	16,25	14,52	12,2	11,31
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,36	6,15	3,69	3,73	0,96
L	Real Estat	6,85	2,38	5,74	5,81	-0,51
M, N	Jasa Perusahaan	10,62	9,44	10,05	11,07	-4,43

Lapangan Usaha/Industry		2016	2017	2018	2019*	2020**
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,37	4,44	3,85	1,12	-0,92
P	Jasa Pendidikan	7,71	7,53	8,58	7,97	-0,31
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,94	6,68	9,35	7,06	7,70
R, S, T, U	Jasa Lainnya	8,70	8,08	10,12	9,48	-4,89
	Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>	5,11	5,65	5,26	5,72	-0,59
*	Angka Sementara					
**	Angka Sangat Sementara					

Sumber: Brebes (2021b)

Berdasarkan data PDRB atas dasar harga kosntan 2010 pada beberapa sektor terdapat fluktuasi naik turun persentase PDRB Kabupaten Brebes. Sedangkan pada tahun 2020 semua sektor kecuali sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta jasa Kesehatan dan kegiatan sosial mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes pada tahun 2020 juga mengalami pertumbuhan yang negatif (-0,59 persen) yang merupakan pertumbuhan ekonomi terendah dalam satu dekade terakhir.

Pemicu pertumbuhan negatif yaitu pada tahun 2020 terjadinya penyebaran virus corona yang menjadi pandemi dan memberikan dampak pada semua lini kehidupan masyarakat. Pemerintah mengantisipasi pandemi ini dengan mengeluarkan kebijakan dana bantuan masyarakat yaitu salah satunya melalui dana desa. Dana desa yang diselewengkan

oleh perangkat desa mengakibatkan masyarakat semakin mengalami kesulitan dan mengakibatkan kemiskinan semakin meningkat dan menurunkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes.

Peran Pemerintah Kabupaten Brebes dalam Menanggulangi Kasus Korupsi

Kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Brebes terus terjadi. Bahkan kasus korupsi yang paling banyak dilakukan oleh perangkat desa atas dana desa yang seharusnya diberikan guna menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat. Atas dasar tersebut, Pemerintah Pusat Kabupaten Brebes menerapkan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya penyelewengan atas dana atau bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Beberapa upaya pemerintah Kabupaten Brebes di antaranya yaitu:

- a. Menanamkan dan mensosialisasikan komitmen anti korupsi pada seluruh aparatur negara. Pemerintah Kabupaten Brebes juga mendeklarasikan pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Brebes (Suprpto & Wasdiun, 2020).
- b. Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Inspektorat menggelar sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (saber pungli) dengan tema membangun budaya anti pungutan liar, yang di ikuti oleh Kepala Desa, Kepala Sekolah, camat serta kepala dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes (Ys, 2017).
- c. Kejaksaan Negeri Brebes meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Jaga Kawal Dana Desa (SI JAKSA) yang bertujuan untuk membantu Kepala Desa dalam melakukan

pengelolaan dana desa. Aplikasi ini juga bermanfaat guna mengontrol dan memonitoring perencanaan anggaran dan penyaluran dana desa (Sugiarto & Wasdiun, 2012).

Efektivitas Penanggulangan Kasus Korupsi di Kabupaten Brebes

Berdasarkan data pada Tabel 1, kasus korupsi masih terjadi pada kasus terbaru yaitu tahun 2020 dan meliputi bagian terkecil pada pemerintahan yaitu desa maka menurut peneliti pencegahan kasus korupsi di Brebes masih belum maksimal. Tentu banyak faktor yang menyebabkan korupsi masih meningkat di Kabupaten Brebes. Berikut beberapa pengamatan peneliti yang mungkin menjadi faktor kasus korupsi di Kabupaten Brebes yaitu.

- a. Luasnya Kabupaten Brebes yaitu kabupaten ketiga terluas di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Grobogan (Wikipedia, 2021a) yang menyebabkan keterjangkauan dan akses yang lemah bagi pemerintah dalam melakukan pencegahan dan pengontrolan.
- b. Rendahnya tingkat pendidikan Kabupaten Brebes dengan rata-rata lama sekolah terendah di Jawa Tengah yaitu 6,21 tahun pada tahun 2020 (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021) dapat menjadi lemahnya kontrol atas kinerja pemerintah. Meskipun pemerintah memberikan sosialisasi atau menerapkan teknologi untuk transparansi kinerja pemerintah, tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang rendah menjadikan sinergi transparansi dan kontrol yang lemah pada kinerja pemerintah desa di Kabupaten Brebes.

Selain dua faktor di atas tentunya ada faktor lain yang menyebabkan tingginya kasus korupsi di Kabupaten Brebes seperti kondisi ekonomi, politis, sosial, dan budaya.

Oleh karena itu Kabupaten Brebes perlu memperbaharui kebijakan terkait pemberantasan korupsi dan bekerja sama dengan semua bagian masyarakat.

Pentingnya Penanggulangan dan Pencegahan Korupsi dalam Pembangunan Ekonomi Daerah

Institusi yang baik seperti supremasi hukum dan pembatasan elit mengarah pada pertumbuhan dan pendapatan yang lebih tinggi (Todaro & Smith, 2011). Begitupun pada badan pemerintahan. Pemerintahan yang bersih dari korupsi dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi pemerintahan yang diwarnai dengan kasus korupsi dapat menambah biaya pemerintah yang semestinya dipergunakan untuk investasi dan pembangunan ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu, penindakan lanjutan atas kasus korupsi perlu dilakukan, baik itu tindakan pencegahan atau tindakan pemberian sanksi hukum atas kasus korupsi yang dilakukan.

Korupsi memberikan dampak yang cukup besar pada kondisi perekonomian suatu daerah. OECD (2016) menyatakan beberapa di antaranya yaitu.

- a. Korupsi mengurangi produktivitas sektor swasta. Korupsi meningkatkan biaya berbisnis karena suap dan negosiasi berlarut-larut untuk menawar mereka menambah biaya transaksi bisnis.
- b. Korupsi menyebabkan pemborosan sumber daya publik. Korupsi menurunkan efisiensi dan efektivitas sektor publik. Investasi publik tidak dialokasikan ke sektor dan program yang mewakili nilai terbaik atau kebutuhan paling tinggi, tetapi digunakan untuk kehidupan pribadi pejabat korup.
- c. Korupsi merampas pendapatan yang berharga dari sektor publik. Pendapatan dari sektor publik yang semestinya

dipergunakan untuk kebutuhan publik tapi diselewengkan oleh pejabat pemerintah.

- d. Korupsi melanggengkan ketimpangan dan kemiskinan. Kaum miskin menderita terutama akibat korupsi dalam bentuk program sosial yang kekurangan dana atau tidak dikelola dengan baik.
- e. Korupsi merusak perdamaian dan demokrasi. Ketika aturan dan regulasi dilakkan oleh suap, maka kendali anggaran publik dirusak oleh aliran uang ilegal dan kritik politik dan media dibungkam melalui suap, sistem check and balances yang demokratis dirusak.

Berdasarkan dampak korupsi di atas, pemberantasan korupsi penting untuk pembangunan ekonomi karena beberapa alasan (Todaro & Smith, 2011), yaitu sebagai berikut.

- a. Pemerintahan yang jujur dapat mendorong pertumbuhan dan pendapatan tinggi yang berkelanjutan.
- b. Asosiasi pemberantasan korupsi dengan pemberdayaan publik menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan tujuan langsung dari pembangunan.
- c. Dampak korupsi menimpa penduduk miskin secara tidak proporsional dan menjadi penghalang utama bagi kemampuan mereka untuk keluar dari kemiskinan.

Oleh karena itu, pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan pada suatu daerah dapat menjadi salah satu strategi mengurangi kemiskinan hingga pada akhirnya mengarah pada pembangunan ekonomi. Namun, penanggulangan kasus korupsi meliputi banyak pihak yang terjalin dan saling bekerja sama. Pemberantasan dan penanggulangan korupsi membutuhkan peran dari pemerintah, swasta dan seluruh elemen masyarakat.

Adapun beberapa strategi pencegahan korupsi yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut (OECD, 2016).

- a. Membangun strategi integritas publik. Korupsi adalah fenomena yang beraneka ragam dan terus berkembang dan merupakan gejala sekaligus penyebab lemahnya sistem pemerintahan. Pencegahan korupsi membutuhkan pendekatan sistemik yang didasarkan pada aturan dan nilai dengan strategi yang komprehensif.
- b. Menangani risiko tertinggi: pengadaan publik. Manajemen yang baik dari kontrak pengadaan publik sangat penting untuk pembelanjaan uang pembayar pajak yang transparan dan akuntabel. Pada saat yang sama, pengadaan publik adalah area berisiko tinggi yang paling dikenal untuk korupsi di pemerintahan.
- c. Menargetkan proyek bergengsi, berdampak tinggi, dan berbiaya tinggi: infrastruktur publik berskala besar. Memastikan integritas dan infrastruktur sangat penting untuk hasil yang produktif dan adil yang membangun kepercayaan pada pemerintah.
- d. Menahan risiko pengambilan kebijakan. Perhatian khusus di banyak negara adalah penangkapan kebijakan publik oleh kepentingan khusus dan elit yang semakin memperbesar ketidaksetaraan. Kebijakan yang diambil memberikan manfaat hampir secara eksklusif kepada sekelompok kecil orang berpengaruh yang bertentangan dengan kepentingan publik.
- e. Memastikan semua perusahaan bermain sesuai aturan. Perusahaan dari semua ukuran dan kepemilikan, termasuk perusahaan kecil dan menengah, perusahaan multinasional (MNE) dan badan usaha milik negara (BUMN), terpapar risiko korupsi dan pelanggaran perusahaan lainnya. Mereka

memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan mendeteksi korupsi melalui kerangka tata kelola perusahaan yang kuat dan untuk mempromosikan budaya integritas

Selain pencegahan yang diungkapkan oleh OECD di atas, Bank Dunia memberikan beberapa langkah untuk mengatasi korupsi yaitu (Hunja, 2015):

- a. Korupsi bukan hanya tentang suap: Orang-orang terutama yang miskin terluka ketika sumber daya terbuang percuma. Itulah mengapa sangat penting untuk memahami berbagai jenis korupsi untuk mengembangkan tanggapan yang cerdas.
- b. Kekuatan rakyat: Ciptakan jalur yang memberi warga alat yang relevan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pemerintahan mereka - identifikasi prioritas, masalah dan temukan solusi.
- c. Potong birokrasi: Satukan proses formal dan informal (ini berarti bekerja dengan pemerintah serta kelompok non-pemerintah) untuk mengubah perilaku dan memantau kemajuan.
- d. Ini bukan tahun 1999: Gunakan kekuatan teknologi untuk membangun pertukaran yang dinamis dan berkelanjutan antara pemangku kepentingan utama: pemerintah, warga negara, bisnis, kelompok masyarakat sipil, media, akademisi, dan lain-lain.
- e. Mengirimkan barang: Berinvestasi dalam lembaga dan kebijakan - peningkatan berkelanjutan dalam cara pemerintahan memberikan layanan hanya mungkin jika orang-orang di lembaga ini mendukung aturan dan praktik yang masuk akal yang memungkinkan perubahan sambil memanfaatkan sebaik-baiknya tradisi dan warisan yang telah teruji.

- f. Dapatkan insentif yang tepat: Sejajarkan langkah-langkah antikorupsi dengan kekuatan pasar, perilaku, dan sosial. Mengadopsi standar integritas adalah keputusan bisnis yang cerdas.
- g. Sanksi adalah penting: Menghukum korupsi adalah komponen penting dari setiap upaya anti-korupsi yang efektif.
- h. Bertindak secara global dan lokal: Menjaga warga terlibat dalam pencegahan korupsi di tingkat lokal, nasional, internasional dan global - sejalan dengan skala dan ruang lingkup korupsi. Manfaatkan arsitektur yang telah dikembangkan dan platform yang ada untuk keterlibatan.
- i. Bangun kapasitas bagi mereka yang paling membutuhkan: Negara-negara yang menderita kerapuhan kronis, konflik dan kekerasan - seringkali negara-negara yang memiliki sumber daya internal paling sedikit untuk memerangi korupsi. Identifikasi cara untuk memanfaatkan sumber daya internasional untuk mendukung dan mempertahankan pemerintahan yang baik.
- j. Belajar sambil mempraktikkan: Setiap strategi yang baik harus terus dipantau dan dievaluasi untuk memastikan dapat dengan mudah diadaptasi saat situasi di lapangan berubah.

Kabupaten Brebes harus terus memacu kinerjanya dalam mengendalikan dan mengatasi kasus korupsi dengan membuat strategi dan kebijakan seperti yang dicantumkan di atas, tentunya perlu bersinergi dengan elemen swasta dan masyarakat. Kemudian Kabupaten Brebes dapat mengevaluasi hasil dari kinerjanya tersebut. Kabupaten Brebes juga perlu berbenah dalam semua aspek, terutama pada aspek pendidikan sehingga kualitas sumber daya manusianya dapat menunjang pembangunan ekonomi Kabupaten Brebes.

KESIMPULAN

Indikator kemajuan ekonomi suatu negara berasal dari maju dan bertumbuhnya ekonomi daerah. Terdapat program-program yang diterapkan oleh pemerintah untuk mencapai kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Program-program tersebut dapat berupa pemerataan ekonomi dan bantuan yang diberikan kepada daerah baik itu dari tingkat Provinsi hingga tingkat desa. Namun, dengan adanya program tersebut dampak yang terjadi tidak hanya dampak positif, melainkan dampak negatif. Dampak negatif tersebut salah satunya adalah penyelewengan dana atau dikenal dengan korupsi. Kasus korupsi menjadi salah satu penghambat ekonomi negara dan daerah. Salah satu penyebabnya yaitu dana pemerintah yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan, investasi, pembiayaan pusat dan daerah tidak terealisasi.

Terdapat banyak kasus korupsi di Indonesia, dari tingkat pemerintahan pusat hingga tingkat pemerintahan daerah termasuk Kabupaten Brebes. Tingginya kasus korupsi di Kabupaten Brebes membuat Pemerintah Kabupaten berupaya untuk memberantas kasus tersebut. Strategi yang digunakan oleh Kabupaten Brebes dimulai dengan sosialisasi pemberantasan korupsi hingga membuat aplikasi yang dapat mengurangi tingginya angka kasus korupsi di Kabupaten Brebes.

Berdasarkan data yang menunjukkan meningkatnya kasus korupsi Kabupaten Brebes hingga Kabupaten Brebes menjadi Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa strategi yang diterapkan oleh Kabupaten Brebes kurang maksimal dalam memberantas kasus korupsi di Jawa Tengah. Oleh karena itu, sebaiknya

Pemerintah Kabupaten Brebes dapat mempelajari dan menerapkan strategi-strategi yang dapat meminimalisir tingkat korupsi di Kabupaten Brebes. Kabupaten Brebes juga dapat bekerja sama dengan masyarakat maupun pihak swasta memberantas korupsi serta mnegevaluasi setiap kebijakan dan strategi pemberantasan korupsi. Dengan dilakukannya strategi tersebut, diharapkan dapat menekan laju kasus korupsi sehingga pembangunan ekonomi Kabupaten Brebes dapat terlaksana dengan pesat.

DAFTAR ISI

- Akkoyunlu, S., & Ramella, D. (2020). Corruption and economic development. *Journal of Economic Development*, 45(2), 63–94. <https://doi.org/10.21113/iir.v2i1.164>
- Alfada, A. (2019). The destructive effect of corruption on economic growth in Indonesia: A threshold model. *Heliyon*, 5(10), e02649. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02649>
- Amoh, J. K., Awuah-Werekoh, K., & Ofori-Boateng, K. (2020). Do corrupting activities hamper economic growth?: Fresh empirical evidence from an emerging economy. *Journal of Financial Crime*. <https://doi.org/10.1108/JFC-11-2019-0150>
- Arifin, M. Z. (2019). *Korupsi Dana Desa, Polres Brebes Tahan 1 Kades dan 1 Mantan Kades Selama Juli 2019*. TribunJateng.Com. <https://jateng.tribunnews.com/2019/07/14/korupsi-dana-desa-polres-brebes-tahan-1-kades-dan-1-mantan-kades-selama-juli-2019?page=1>
- Bougatef, K. (2015). The impact of corruption on the soundness of Islamic banks. *Borsa Istanbul Review*, 15(4), 283–

295. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2015.08.001>
- BPS Provinsi Jawa Tengah. (2021). *Indeks Pembangunan Manusia (metode baru) 2018-2020*. Jateng.Bps.Go.Id. <https://jateng.bps.go.id/indicator/26/83/1/indeks-pembangunan-manusia-metode-baru-.html>
- Brebes, B. (2021a). *Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Brebes, Mei 2010-Mei 2020*. BPS Brebes. <https://brebeskab.bps.go.id/>
- Brebes, B. (2021b). *Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Brebes menurut Lapangan Usaha (persen), 2016-2020*. BPS Brebes. <https://brebeskab.bps.go.id/statictable/2021/02/26/1631/laju-pertumbuhan-pdrb-kabupaten-brebes-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-lapangan-usaha-persen-2010-2020.html>
- Ded, & Ima. (2020). *Korupsi Bantuan Sapi dan Dana Desa Hingga Rp204 Juta, Mantan Kades di Brebes Terancam Hukuman 20 Tahun Penjara*. Radartegal.Com. <https://radartegal.com/korupsi-bantuan-sapi-dan-dana-desa-hingga-rp204-juta-mantan-kades-di-brebes-terancam-hukuman-20-tahun-penjara.3661.html>
- Er, M. (2008). Corruption from the Islamic perspective: Some recommendations for the MENA region. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1(1), 31–51. <https://doi.org/10.1108/17538390810864241>
- Fikriawan, S., Kholiq, A., & Parangu, K. A. (2019). Corruption in The Text and Context of The Qur'an: Maudhu'i's Interpretation Approach. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1(2), 124–154. <https://doi.org/10.1108/17538390810864241>

org/10.37680/almanhaj.v1i2.168

- Groenendijk, N. (2014). *A principal-agent model of corruption*. April 1997. <https://doi.org/10.1023/A>
- Gründler, K., & Potrafke, N. (2019). Corruption and economic growth: New empirical evidence. *European Journal of Political Economy*, 60. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2019.08.001>
- Hoinaru, R., Buda, D., Borlea, S. N., Văidean, V. L., & Achim, M. V. (2020). The impact of corruption and shadow economy on the economic and sustainable development. Do they “sand the wheels” or “grease the wheels”? *Sustainability (Switzerland)*, 12(2). <https://doi.org/10.3390/su12020481>
- Hunja, R. (2015). *Here are 10 Ways To Fight Corruption*. World Bank Blogs. <https://blogs.worldbank.org/governance/here-are-10-ways-fight-corruption>
- Ibraheem, K., & Ajoke, F. (2013). *Corruption And Economic Development : Evidence From Nigeria*. 3(2), 46–56.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen* (1st ed.). BPFE Yogyakarta.
- Insetyonoto. (2020). *Penduduk Miskin Brebes Tertinggi, Magelang Terendah*. Gatra.Com. <https://www.gatra.com/detail/news/465609/politik/penduduk-miskin-brebes-tertinggi-magelang-terendah>
- Iqbal, Z., & Lewis, M. (2006). Governance and Corruption: Can Islamic Societies and the West Learn from Each Other? *American Journal of Islamic Social Sciences*, 19(2), 1–33.
- Jalal, K., & Mustapha, M. (2016). *Corruption Impacts on Growth and Development of the Moroccan Society*. 7(1), 20–31. <https://doi.org/10.9790/5933-07112031>

- Kemenkeu, D. (2021). *Alokasi Dana Desa Kabupaten Brebes Tahun 2016-2020*. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>
- Mistree, D., & Dibley, A. (2002). Corruption and the Paradox of Transparency. *Working Paper, June*, 1–31.
- Nugroho, F. E. (2020). *Korupsi Dana Desa Rp 343 Juta, Mantan Kades Legok Brebes Divonis 2 Tahun Penjara*. PanturaPost. <https://kumparan.com/panturapost/korupsi-dana-desa-rp-343-juta-mantan-kades-legok-brebes-divonis-2-tahun-penjara-1tvng1HHs6O/full>
- OECD. (2016). Putting an end to corruption. In *Putting an end to corruption*. <https://www.oecd.org/corruption/putting-an-end-to-corruption.pdf>
- Otusanya, O. J. (2011). *Corruption as an obstacle to development in developing countries : a review of literature* (Vol. 14, Issue 4). <https://doi.org/10.1108/13685201111173857>
- Papaconstantinou, P., Tsagkanos, A. G., Siriopoulos, C., Dhahi, A., & Emirates, U. A. (2009). *How Bureaucracy and Corruption affect economic growth and convergence in the European Union ? The case of Greece . June 2014*. <https://doi.org/10.1108/MF-12-2009-0143>
- Sall, S. (2014). *Does corruption have a significant effect on economic growth ?*
- Sugiarto, B., & Wasdiun. (2012). *Aplikasi Si Jaksa, Membantu Pengelolaan Dana Desa*. Jatengprov.Go.Id. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/aplikasi-si-jaksa-membantu-pengelolaan-dana-desa/>
- Suprpto, & Wasdiun. (2020). *Komitmen Anti Korupsi, Bukan untuk Pimpinan Saja*. Pemerintah Kabupaten Brebes. <https://brebeskab.go.id/index.php/content/1/komitmen-anti-korupsi-bukan-untuk-pimpinan-saja>

- Suripto, I. (2020). *Tilap Dana Desa Rp 120 Juta, Eks Kades di Brebes Terancam Bui Seumur Hidup*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5244184/tilap-dana-desar-p-120-juta-eks-kades-di-brebes-terancam-bui-seumur-hidup>
- Todaro, M., & Smith, S. C. (2011). Chapter 5: Poverty, Inequality and Development. In *Economic Development*.
- Walton, G., & Jones, A. (2017). The Geographies of Collective Action, Principal-Agent Theory and Potential Corruption in Papua New Guinea. *SSRN Electronic Journal*, June. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2993709>
- Wikipedia. (2021a). Jawa Tengah. In *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*. https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
- Wikipedia. (2021b). Kabupaten Brebes. In *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Brebes
- Ys. (2017). *Sosialisasi Saber Pungli Kabupaten Brebes Membangun Budaya Anti Pungli*. Jatengprov.Go.Id. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/sosialisasi-saber-pungli-kabupaten-brebes-membangun-budaya-anti-pungli/>

STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAJINAN KERIS DI KOTA SUMENEP MELALUI TRANSAKSI EKSPOR

Dr. Sunaryati

(sunaryati@uin-suka.ac.id)

Juhariyah

(19208012031@student.uin-suka.ac.id)

PENDAHULUAN

Kabupaten Sumenep dikenal sebagai kota keris dan juga telah dinobatkan sebagai Kota Keris di Indonesia. Hal ini dikarenakan banyaknya penghasil keris yang sudah mahir memproduksi sekitar 6.000 keris setiap bulannya. Bahkan keris telah dikirim ke berbagai negara di dunia seperti Malaysia, Brunai Darussalam dan Belanda (Pembab, 2018). Ada sebuah kota di Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep Madura yang dinobatkan sebagai penghasil pusaka adat sebagai keris paling banyak di Asia Tenggara. Penobatan Kota Sumenep diberikan pada tahun 2012 oleh UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) (Sudrajat, 2017). Kota Sumenep dulunya merupakan wilayah keraton yang lekat dengan

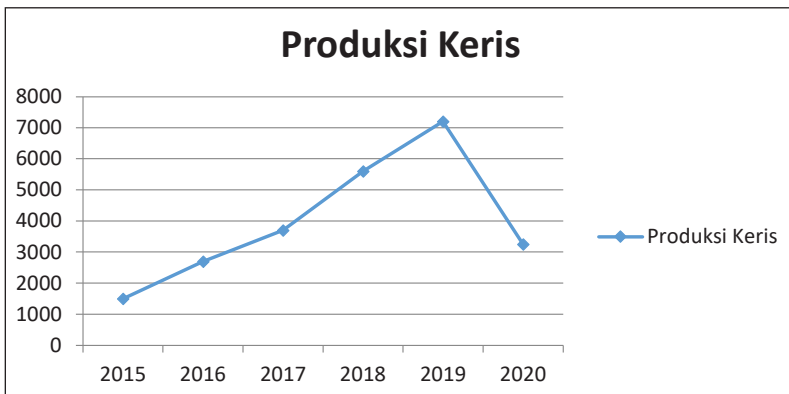
benda bersejarah seperti keris. Oleh karena itu, hingga saat ini masih banyak pekerja terampil yang tetap memproduksi keris dan wisatawan keris yang menjumpai wilayah Sumenep. Dibandingkan dengan wilayah lain yang pengrajin keris sudah usia lanjut, masih banyak pengrajin keris di Sumenep yang berasal dari usia yang lebih muda. Ini membuktikan bahwa budaya keris di Kota Sumenep masih tergolong lestari.

Penelitian ini menggunakan teori komparatif yang dikemukakan oleh David Richardo. Teori manfaat relatif menerima bahwa kelimpahan suatu bangsa akan bertambah seiring dengan peningkatan kemampuan dan produktivitas kerja di bidang penciptaan. David Richardo mengklarifikasi bahwa suatu negara dapat dikatakan menikmati keuntungan yang besar jika negara tersebut memiliki keahlian dalam mengirimkan barang dagangan. Dengan kata lain adalah barang yang dikirim harus tidak sama dengan ciptaan negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa barang dagangan yang diperdagangkan haruslah produk yang tidak diklaim oleh negara yang berbeda atau karena barang dagangan yang dibatasi di dalam negeri sehingga perlu diimpor dari negara yang berbeda.

Perdagangan internasional di seluruh dunia secara teratur mengambil bagian penting dalam wawasan sejarah negara-negara berkembang (Todaro dan Smith, 2012). Sektor perdagangan di Sumenep merupakan sektor strategis setelah bercocok tanam. Ada 954 organisasi usaha yang memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) di Sumenep pada tahun 2018. Skala usaha penukaran terdiri dari pedagang besar, pedagang menengah dan pedagang kecil. Padahal, pedagang yang paling dominan di Kota Sumenep adalah pedagang kecil, bukan pedagang besar. Dengan demikian, pembuatan keris yang diselesaikan oleh para ahli di Sumenep membutuhkan

tugas badan publik untuk penyuluhan periklanan. Transaksi keris di luar negeri saat ini mengalami penyumbatan atau penurunan setelah penyebaran virus Corona. Omset yang dihasilkan antara sebelum gejala dan sesudahnya mengalami korelasi yang kuat, sehingga hal ini mempengaruhi kestabilan ekonomi para ahli keris di sekitar sana.

Gambar 1.



Sumber: Badan Pusat Statistik Sumenep (2019)

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa produksi keris semakin meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020. Hal ini diakibatkan oleh datangnya wabah covid 19 yang kemudian memberikan dampak pada tidak dapat terlaksananya pemasaran ekspor. Akibatnya, para pengrajin hanya memproduksi keris yang dapat dipasarkan ke daerah lokal dengan asumsi tetap mempertahankan produksi keris bagaimanapun kondisinya.

Keadaan darurat seperti yang pernah dialami pada krisis dunia tahun 1998 sempat mengalami penurunan tajam. Pada saat itu, ekspresi manusia pada tahun 1998 mengalami peningkatan yang luar biasa, mengingat fakta bahwa barang-

barang pengerjaan ini dilahap oleh pasar yang sehat. Sementara itu, yang diteruskan adalah ekonomi yang tumbuh di dalam negeri. Padahal, di tahun 2008 yang menggigit debu adalah ekspresi manusia dan pasar spesialisasi. Sekitar saat itu, budaya Barat, untuk situasi ini Amerika dan negara-negara Eropa lainnya, mengalami keterkejutan karena keadaan darurat, sehingga mereka ragu-ragu untuk memasukkan sumber daya ke dalam kebutuhan tambahan. Mereka berada dalam situasi yang ideal untuk menahan uang tunai dan menjadi laten sehingga semua bidang ekonomi di Barat tangguh. Hal ini, tentunya, berdampak sangat besar pada lingkungan keseharian pengerjaan dan karya seni di Indonesia. Terutama para ahli yang mengirimkan banyak barang ke Amerika dan Eropa. Ditegaskan, kondisinya semakin menurun secara mengesankan, seperti diungkapkan Ambar Polah, bahwa kondisi tahun 2008 anjlok hingga 50 persen bila dibandingkan dengan tahun 2007.

Penelitian tentang perdagangan internasional telah dieksplorasi oleh beberapa pencipta, salah satunya adalah Ben Reid di mana Ben menganalisis hubungan pertukaran China dengan Thailand dan Indonesia menggunakan gagasan pergantian peristiwa yang miring dan terkonsolidasi serta perdagangan yang tidak konsisten. Massa kelebihan nilai yang diperoleh melalui pertukaran China dengan negara-negara yang terbentuk telah mengalir ke perluasan yang cukup besar dalam impor China dari negara-negara agraris sejak tahun 2000. Hasilnya adalah penyatuan lebih lanjut dari otoritas penghimpunan modal. Indonesia, bagaimanapun, memiliki kerangka politik dan moneter yang untuk beberapa waktu telah diliputi oleh penyalahgunaan aset yang sebanding dengan sebagian kapital. Oleh karena itu, tarif barang dagangan penting telah membanjiri (Reid, 2016).

Kaitan antara penelaahan masa lalu dan eksplorasi yang akan dianalisis oleh pencipta saat ini adalah bahwa keterkaitan dua negara dalam pertukaran pertukaran global sangat berharga. Jika teridentifikasi dengan teori, sebagai gantinya, seseorang akan membeli barang yang tidak dia miliki dan sebaliknya. Keris cenderung dikatakan tidak lazim di luar negeri, hal ini dibuktikan dengan banyaknya wisatawan yang datang ke Sumenep hanya untuk melihat langsung cara membuat keris dan membeli pusaka tersebut untuk dibawa pulang ke negaranya.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana strategi membudidayakan kerajinan keris dan meningkatkan daya saing baik di tingkat nasional maupun internasional agar membantu kemajuan perekonomian di Kabupaten Sumenep. Peran peningkatan mutu guna menjaga kelestarian kerajinan keris agar Kota Sumenep tetap memiliki kualitas tertentu. Sebagian dari pemeriksaan yang telah dilakukan adalah mendalami perencanaan UMKM pembuatan keris ini di Perda Sumenep. Hasil dari perencanaan ini dapat dimanfaatkan sebagai kontribusi upaya pembentukan teknik dalam kemajuan UMKM keris.

KERANGKA TEORITIS

Pemberdayaan

Teori Ekologi (Kelangsungan organisasi)

Konsepsi ekologi pertama kali diperkenalkan oleh Haeckel di awal abad ke 20 (Adiwibowo, 2007). Pada teori ini, menguji asosiasi sebagai wadah untuk perkumpulan individu dengan tujuan yang sama agar terkoordinasi, jelas dan solid. Arahan otoritatif menyinggung pertemuan individu / massa

yang pertemuan harus memiliki kekuasaan. Silaturahmi yang memiliki pergaulan yang kokoh dan praktis diharapkan dapat difungsikan (Prasetyo, 2015).

Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana tuntutan kinerja tugas tersebut. Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai interaksi yang dilakukan melalui berbagai upaya, seperti memberi posisi, memperluas kerja sama, memberi kepercayaan agar setiap individu atau perkumpulan dapat memahami apa yang akan dilakukannya. Pada titik tersebut pada akhirnya akan ada saran untuk memperluas pencapaian tujuan secara memadai dan mahir (Kurniawan, 2014).

Pemberdayaan yang dimaksud dalam makalah ini diidentikkan dengan penguatan ekonomi pengerjaan, di mana spesialisasi dapat diartikan sebagai ekonomi inventif yang dilakukan oleh daerah setempat. Ekonomi inovatif dapat berkembang pesat karena dapat membuka pintu pekerjaan, meningkatkan gaji, meningkatkan nilai, dan menyelamatkan budaya lingkungan. Macam-macam inventifitas yang membentuk ekonomi inovatif adalah imajinasi logis, inovasi finansial, inventifitas sosial, dan inovasi mekanis (Sunariani dkk, 2017).

Kerajinan

Kerajinan adalah seni, dan seni merupakan suatu hal yang bernilai sebagai kreatifitas alternatif yaitu sesuatu yang diciptakan dengan kerajinan tangan. Pada umumnya, banyak hal pengerjaan yang berkaitan dengan komponen kreatif yang kemudian disebut seni kerajinan. Seni kerajinan adalah implementasi dari karya seni kriya yang telah diproduksi secara massal (*mass product*). Produk massal tersebut

dilakukan oleh para pengrajin. Ini penting bagi perekonomian individu dan oleh otoritas publik dikelompokkan ke dalam jenis Miniatur, Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dalam keadaan darurat keuangan tahun 1998, UMKM ini dipandang sebagai usaha yang mampu bertahan dalam keadaan darurat tersebut. Karena UMKM semacam ini bergantung pada bahan dan kemampuan lingkungan, namun memiliki jangkauan pasar yang luas. Bahan dan pekerjaan yang dapat diakses cukup sederhana. Perubahan dan penurunan nilai tukar rupiah terhadap uang tunai asing, khususnya dolar AS, juga membuat barang-barang non-impor menjadi meningkat peminatnya dalam kemajuan finansial individu yang memiliki pilihan untuk maju pada masa itu (Raharjo, 2018).

Menurut Kusnadi (2017) kerajinan kata harfiahnya dilahirkan oleh sifat rajin dari manusia. Dikatakan pula bahwa titik berat penghasilan atau pembuatan seni kerajinan bukan dikarenakan oleh sifat rajin (sebagai lawan dari sifat malas), melainkan dibawa ke dunia dari ide yang mumpuni seseorang dalam membuat barang kerajinan. Kemampuan diperoleh atas fakta dan ketekunan dalam bekerja, dengan tujuan dapat meningkatkan strategi pengembangan suatu barang, sifat pekerjaan seseorang yang pada akhirnya memiliki keterampilan bahkan kemampuan dalam pemanggilan tertentu (Ismayati & Mastiah, 2017).

Kerajinan Keris di Kabupaten Sumenep sampai saat ini sudah memiliki nama hampir di seluruh Indonesia. Salah satu keunggulannya adalah kualitas pengerjaan yang menakjubkan. Hal ini jelas tidak terlepas dari penekunan-penekunan para empu untuk memproduksi keris dengan baik. Daya dukung lingkungan dan masyarakat sangat melimpah disana. Kepiawaian kelompok masyarakat dalam menyelesaikan keris sudah cukup lama. Sumber daya tenaga ahli pengrajin

juga berasal dari lingkungan di sekitar Kabupaten Sumenep. Hal ini menjadi sorotan signifikan betapa cepatnya UMKM keris ini berkembang. Beberapa solusi penting untuk menjaga koherensi antara langkah-langkah pra-penciptaan, penciptaan dan setelah penciptaan keris (Wardhana dkk., 2019).

Ekspor

Teori Keunggulan komparatif

Dalam teori keunggulan komparatif David Richardo, di mana meskipun fakta bahwa suatu negara tidak memiliki keuntungan total, pertukaran global antar negara dalam hal apa pun biasanya menguntungkan. Dengan catatan bahwa negara-negara ini memiliki pengalaman praktis yang sedang berlangsung tentang produk-produk dengan biaya yang lebih rendah daripada negara-negara lain. Teori perdagangan internasional membantu menjelaskan arah dan komposisi pertukaran antar negara dan pengaruhnya terhadap struktur perekonomian suatu negara yang menunjukkan manfaat yang muncul dari pertukaran global (*gains from trade*).

Ekspor merupakan pembelian negara lain atas barang buatan perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Faktor terpenting yang menentukan ekspor adalah kemampuan negara untuk memberikan barang dagangan yang dapat bersaing di sektor bisnis asing. Ekspor mencerminkan aktivitas perdagangan antar bangsa yang dapat memberikan dorongan dalam dinamika pertumbuhan perdagangan internasional, sehingga negara berkembang mungkin akan mencapai kemajuan moneter sesuai standar dengan negara-negara yang lebih maju. (Benny, 2013).

Menurut Mankiw (2006), ekspor dimaksudkan dalam negeri kemudian dilakukan penjualan ke luar negeri. Menurut

Samuelson dan Nordhaus (2001) ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu negara dan dibeli oleh orang asing dari negara lain. Sedangkan menurut Setyowati et al (2004) ekspor suatu negara biasanya terdiri dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara sendiri. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk dijual atau dibeli oleh luar negeri.

Bersamaan dengan itu, teori keunggulan komparatif mengalami banyak perkembangan dan menimbulkan teori yang berbeda, seperti siklus hidup produk global, keunggulan, dan *hyper competitive*. Dari ketiganya, salah satu teori paling menonjol adalah teori keunggulan yang dipelopori oleh Michael Doorman, yang pada dasarnya menyatakan bahwa dalam periode persaingan global ini, suatu negara akan benar-benar ingin bersaing jika memiliki unsur-unsur yang berlaku, misalnya faktor dan persyaratan permintaan, bisnis terkait dan pendukung, serta desain dan persaingan prosedur perusahaan. Bahkan akhir-akhir ini, ada kecenderungan untuk kemajuan serius terjadi, yang merupakan perpaduan antara implementasi dinamis dari beberapa teori (Sabaruddin, 2015).

Perdagangan Internasional Dalam Islam

Dari segi konsep, jauh sebelum teori perdagangan ditemukan di Barat, Islam telah menerapkan konsep-konsep perdagangan internasional. Ulama besar yang bernama Abu Ubaid bin Salam bin Miskin bin Zaid al Azdi telah menyoroti praktik perdagangan internasional khususnya ekspor impor. Abu Ubaid merupakan orang pertama yang memotret kegiatan perekonomian pada masa Rasulullah saw, Khulafaur Rasyidin, sahabat dan tabiin. Ini dalam dilihat dari buku karangan Abu Ubaid yang berjudul *al-Amwal* yang ditulisnya hampir 1000

tahun sebelum teori keunggulan absolut Adam Smith (1723-1790). Akan tetapi, sebelum Abu Ubaid masih ada tokoh yang pernah membahas perdagangan internasional dalam Islam, ia adalah Abu Yusuf dan bukunya yang berjudul *al-Kharaj* (Waluya, 2016).

Perdagangan internasional telah dilakukan oleh semua manusia dan bangsa sejak dahulu kala. Salah satu potret perdagangan internasional yang dicatat dalam al-Qur'an adalah perdagangan Suku Quraisy sehingga diabadikan dalam QS. Al-Quraisy. Suku Quraisy melakukan perdagangan pada musim dingin (*Al syita*) ke Yaman dan pada musim panas (*Al shaif*) berdagang ke Syam. Perdagangan internasional adalah sebuah keniscayaan, karena tidak mungkin sebuah bangsa dapat memenuhi kebutuhan negerinya secara langsung. Kemudian Allah SWT menciptakan pada setiap daerah dan negara keunggulan dan keterbatasan Allah memerintahkan untuk mencari rezeki baik di daerah atau negaranya maupun di daerah ataupun negara lain. Hal tersebut sebagaimana yang termaktub dalam surat QS. al-Jumu'ah: 10 dan al-Mulk: 15 pada penelitian Waluya (2016) berikut ini.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ
الْمُشُورُ

Artinya: "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan" (Q.S al-Mulk: 15).

Pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib selalu melaksanakan berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan kesejahteraan umat Islam dengan meningkatkan ekspor daripada impor sehingga memperoleh surplus perdagangan

(Mukhtar, 2016). Karena sejatinya menurut Sedyaningrum (2016), indikator untuk mengukur prestasi dan keberhasilan suatu negara adalah dapat dilihat dari ekspor dan impornya. Kegiatan perdagangan internasional pada zaman sekarang ini hadir dengan persaingan yang cukup ketat dan mengakibatkan nilai-nilai etika malah terabaikan. Untuk menghadapi hal tersebut, al-Qur'an perlu dihadirkan sebagai pedoman dalam perdagangan internasional. Al-Qur'an dipandang memiliki formulasi yang relevan dengan perkembangan zaman. Dari sekian ayat-ayat al-Qur'an, sebagiannya mendorong manusia untuk mencari rezeki yang berkah apapun bentuk produksinya. Al-Qur'an mendorong setiap perbuatan harus menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia dan mendatangkan kemakmuran serta kesejahteraan bersama (Harahap, 2019).

METODE PENELITIAN

Menurut Tanjung (2013) metode penelitian adalah ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menentukan kebenaran tergantung dari realitas yang sedang dikaji.

Jenis Penelitian

Kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan strategi pemberdayaan keris di Kabupaten Sumenep. Menurut Sugiono (2010) penelitian kualitatif adalah penelitian dimana peneliti ditempatkan sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif. Sama halnya dengan yang pernah

diungkapkan Poerwandari (2005) bahwa penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sumenep dari tahun 2015-2020 dan literatur-literatur yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemberdayaan, kerajinan keris dan transaksi ekspor.

Pemberdayaan Kerajinan Keris Di Kabupaten Sumenep

Pengrajin keris pada tahun 1971 adalah Mpu Murka' beliau lahir pada 1943 dibesarkan di Desa Aeng Tong-tong, Mpu Murka' telah belajar keris mulai dari usia 7 tahun sekarang telah sudah dinobatkan sebagai Maestro keris Indonesia. Mpu murka' menjadi tokoh penting bagi daerah Aeng Tong-tong karyanya telah membuka peluang lebar bisnis industri souvenir keris, Tahun 1972 dibentuklah agenda pertemuan yang dihadiri berbagai kalangan dengan pembahasan utama yaitu mengenai cara menarik minat pelanggan yang berasal dari seluruh kalangan di tanah air. Pertemuan tersebut memberikan dampak positif sehingga sedikit demi sedikit pengrajin mengalami kemajuan dari segi mental, keterampilan dan kesanggupan mengelola penjualan barang di pasaran. Dari pertemuan tersebut dihasilkan kesepakatan untuk mendesain produk siap saji yang dapat dikenal oleh berbagai lapisan masyarakat yaitu berupa souvenir keris dengan alasan mudah diproduksi, tidak terlalu sulit di dapatkan dan mudah untuk dirawat (Sudrajat, 2017).

Kemudian pemberdayaan keris di Sumenep hanya dilakukan oleh empat empu saja, namun sering perkembangan zaman ternyata banyak para generasi muda yang mampu melanjutkan pembuatan keris secara professional. Dengan bakat alami yang diperoleh dari nenek moyangnya dipadukan dengan keterampilan teknis, maka terciptalah bentuk keris bermotif indah yang banyak diminati oleh penggemar keris dan sesuai dengan permintaan pasar. Berikut ini jumlah empu di Kabupaten Sumenep yang tersebar di beberapa kecamatan dan desa.

Pada tahun 1973-1976 terjadi revitalisasi industri souvenir keris tetapi tetap ada hambatan yang muncul. Untuk mempertahankan tradisi supaya bisa terus hidup pada masa selanjutnya maka hambatan yang dihadapi tidaklah ringan apalagi modernisasi gencar dilakukan oleh pemerintahan orde baru (Harsrinuksmo, 2008).

Tabel 2. Jumlah Empu yang Tersebar di Kabupaten Sumenep

Nama Kecamatan	Nama Desa	Jumlah Empu
Kecamatan Bluto	Desa Palongan	150 orang
	Aengg Bhaja	40 orang
	Kandangan	35 orang
	Gingging	25 orang
	Sera Timur	30 orang
	Karang Campaka	20 orang
Kecamatan Saronggi	Aeng Tongtong	150 orang
	Talang	29 orang
	Juluk	25 orang
Kecamatan Lenteng	Lenteng Barat	40 orang
	Lembung Barat	7 orang
	Lembung Timur	3 orang

Nama Kecamatan	Nama Desa	Jumlah Empu
Jumlah		554 Empu

Sumber: Masterplan Smart City Kabupaten Sumenep

Dari 554 pembuat keris, mampu mengeksplorasi 450 bentuk dan nama keris dari zaman ke zaman. Sehingga keris buatan empu Sumenep terus diminati oleh kolektor keris dari berbagai belahan dunia. Pembuatan keris di Sumenep tidak hanya asal membuat, akan tetapi disesuaikan dengan pesanan para kolektor. Jadi dapat dipastikan bahwa keris yang sudah dibuat adalah barang yang akan terjual (Tini, 2015).

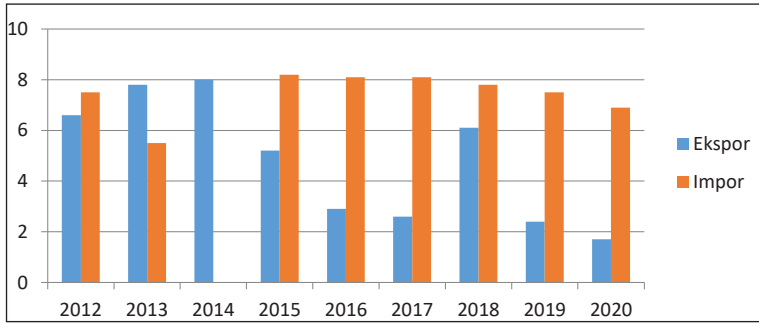
Kerajinan Keris Sebagai Pendorong Ekspor Kota Sumenep

Tindakan jual beli keris tidak sama dengan tindakan jual beli barang lainnya. Karena keris memiliki ciri khas tersendiri sehingga tidak sedikit pembeli yang mendalami dan mengkaji lebih dalam tentang kualitas imajinatif teori dan implikasi yang terkandung dalam keris yang akan dibeli. Begitu pula dengan nilai yang harus ditanamkan pada setiap keris. Harga yang dipatok pada keris untuk dibeli memiliki berbagai variasi. Hal ini tergantung pada bahan yang digunakan, ketukan produksinya, kemudian dengan fokus pada ukiran yang ditambahkan pada keris itu sendiri.

Harga pasar setiap keris sangat berfluktuasi. Hal ini dapat bergantung pada kualitas dan pemanfaatan masing-masing keris. Jika keris dibuat dengan bahan berkualitas rendah, sangat mungkin diketahui bahwa harga keris tergolong murah, karena disesuaikan dengan bahan pembuatnya. Sementara itu, bila menggunakan bahan berkualitas tinggi, harga keris dapat meningkat seperti yang ditunjukkan oleh bahan bahan yang digunakan (Tauhedy, 2019). Berikut ini adalah data dari jumlah ekspor impor produk secara

keseluruhan di Kota Sumenep sejak tahun 2012 hingga tahun 2020.

Gambar 3. Domestik Domestik



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekspor di Sumenep fluktuatif, berbeda dengan pertumbuhan impornya yang terbilang normal. Ekspor adalah produk dan jasa yang dikirim secara lokal untuk dijual ke luar negeri, sedangkan impor adalah tenaga kerja dan produk yang dibuat di luar negeri untuk dijual secara lokal (dalam negeri) (Mankiw, 2014:170). Dalam penyaluran kerajinan keris, DISPERINDAG mengadakan seminar dan pajangan keris yang melibatkan masyarakat umum dan pemerhati sosial, sehingga dapat membuka porsi industri secara keseluruhan, khususnya keris dalam meningkatkan perekonomian daerah setempat. Sekaligus melindungi pandai dan ahli keris di Sumenep. Bagaimanapun, tanpa bantuan aksesibilitas bahan mentah, penciptaan berhenti. Mendukung bisnis keris dengan memperluas SDM, meningkatkan daya agar stabil dan mendapatkan mesin produksi. Bantuan ini masih dianggap kurang ideal oleh para pelaku bisnis mengingat banyak bahan mentah impor yang dituding memiliki bea masuk yang tinggi.

Peran Pemerintah Sumenep Memajukan Industri Kerajinan Keris

Adanya Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumenep nomor 16 Tahun 2008 memberikan landasan berdirinya pembentukan organisasi dinas daerah. Divisi Perindustrian dan Pertukaran (DISPERINDAG) Peraturan Daerah Sumenep merupakan kantor pemerintahan yang melayani daerah dalam bidang pengembangan usaha dan peningkatan UMKM di Kabupaten Sumenep. Kehadiran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep dipandang sangat berperan dalam mengembangkan dan menumbuhkan organisasi-organisasi kecil dan menengah, salah satunya pembuatan keris dalam menunjang perekonomian kelompok masyarakat Sumenep. Hal ini tentu merupakan reaksi positif dari pemerintah daerah dalam fokus pada pengembangan dan kemajuan bisnis (Tini, 2015).

Untuk situasi ini, tugas otoritas publik khususnya dinas terkait, adalah sebagai penghubung dan promosi. Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Sumenep dalam industri pembuatan keris, otoritas publik telah melakukan kegiatan demi mengenalkan keris di lapangan dunia. Dengan demikian, pemberdayaan daerah harus diselesaikan di semua bagian, khususnya; pemerintah, daerah dan swasta. Tanpa mengikutsertakan semua segmen di kabupaten, tidak mungkin upaya pengembangan ini akan meningkatkan kapasitas dan *bargaining position* daerah. Jika hanya mencakup sebagian atau salah satu segmen saja, maka akan terjadi ketidakseimbangan yang diharapkan dapat memperbesar ketidakberdayaan Daerah. Kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Sumenep selama ini adalah (Tini (2015):

- a. Peresmian Monumen Keris yang berada di pintu masuk bagian barat kota Kabupaten Sumenep dan Pemkab memfasilitasi dengan mendeklarasikan diri menjadi Kota Keris. Deklarasi tersebut pada 31 Oktober 2013 lalu bertepatan dengan Hari Jadi Sumenep. Ikon kota keris, juga bagian dari upaya promosi wisata sehingga kecintaan terhadap keris dapat ditumbuhkan ditengah-tengah kehidupan masyarakat.
- b. Diadakan pameran 5.000 keris dalam rangka mendapatkan rekor MURI pada 31 Oktober 2014.
- c. Pembinaan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sumenep kepada 35 kelompok perajin keris dengan anggota 10-15 orang sebelum hari jadi kota Sumenep 31 Oktober 2013.
- d. Dibukakannya pusat UMKM atau gerai pusat keris dan UMKM lainnya yang bernama Gerai Wiraraja pada tanggal 19 Januari 2014

Selain itu keterlibatan dinas terkait sangat berpengaruh, dalam hal ini peran Disperindag adalah:

- a. Memberikan fasilitas bagi UMKM, salah satunya pameran industri kreatif.
- b. Mengadakan pelatihan-pelatihan serta lomba desain kreatif dari kerajinan keris.
- c. Peluang industri keunikannya

Dari ketiga hal tersebut didukung dengan Keputusan Pemerintah Kabupaten Sumenep, mengukurkan anggaran bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) senilai Rp 1,8 miliar pada APBD tahun anggaran 2014. Pemberian modal segar tersebut diperuntukan kepada 295 UMKM. Dengan rincian, untuk bantuan sosial bagi UMKM perorangan sebanyak 265 orang, pedagang sayur 15 orang. Masing-

masing orang mendapatkan Rp. 1 juta. Sedangkan dalam bentuk bantuan hibah kepada 15 kelompok masing-masing mendapatkan Rp. 6 juta.

Namun permasalahannya sekarang tidak jauh beda dengan permasalahan yang dihadapi para produsen keris di kabupaten lainnya. Sumenep pun mengalami hal yang sama yaitu pada bahan baku produksi mentah yang menjadi faktor utama bagi keberlangsungan industri produk keris. Hambatan-hambatan kurangnya bahan baku sampai saat ini masih sering dirasakan oleh produsen, sehingga mereka mengharapkan keseriusan dalam regulasi ini dari pemerintah dan mengharapkan pemerintah lebih serius menangani permasalahan ini.

Selain itu masalah pengurusan ijin usaha maupun ijin khusus terkait dengan menyimpan dan membawa barang benda pusaka keris tersebut. Karena selama ini para pengusaha keris yang banyak menerima pesanan dari luar kota bahkan dari luar negeri, kesulitan ketika harus membawa keris karena sulitnya berbagai bentuk perijinan yang harus dilalui, sehingga hal tersebut dapat menghambat kelancaran pengusaha dalam memajukan usahanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Saat ini keris dianggap sebagai barang aksesoris dan peninggalan leluhur yang antik. Oleh karena itu, keris memiliki kebutuhan produksi yang gigih dan berkesinambungan. Dari penelusuran potensi keris membuat UMKM di Kabupaten Sumenep, cenderung terlihat potensi yang sangat besar. Namun, ada beberapa hal yang bisa diciptakan untuk lebih memperluas peluang bagi UMKM ini. Peluang tersebut dapat dilakukan oleh beberapa unit organisasi yang secara

langsung diidentifikasi dengan siklus yang terjadi di UMKM tersebut. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan adalah berkaitan dengan keberlanjutan produksi dan pemesanan. Lebih detail dan mendalam lagi, maka kegiatan yang dilaksanakan adalah memperkuat networking dan promosi serta pengelolaan pelaksanaan produksinya. Guna mendukung kegiatan di atas, maka digunakan kegiatan yang paling sesuai adalah promosi dan manajemen pelaksanaan produksi.

Kedua rencana di atas, khususnya pemajuan dan manajemen pelaksanaan kreasi, diselesaikan dengan baik oleh dinas-dinas pemerintah yang menyelenggarakan UMKM pembuatan keris. Kegiatan promosi dilakukan untuk mendapatkan dan menarik minat dari pembeli yang luas. Adanya Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumenep nomor 16 Tahun 2008 memberikan landasan berdirinya pembentukan organisasi dinas daerah. Divisi Perindustrian dan Pertukaran (DISPERINDAG) Peraturan Daerah Sumenep merupakan kantor pemerintahan yang melayani daerah dalam bidang pengembangan usaha dan peningkatan UMKM di Kabupaten Sumenep. Kehadiran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep dipandang sangat berperan dalam mengembangkan dan menumbuhkan organisasi-organisasi kecil dan menengah, salah satunya pembuatan keris dalam menunjang perekonomian kelompok masyarakat Sumenep. Hal ini tentu merupakan reaksi positif dari pemerintah daerah dalam fokus pada pengembangan dan kemajuan bisnis di Kabupaten Sumenep (Arfiyanto et al, 2013).

Sebagai pelaku usaha seseorang juga dituntut harus memiliki pola pikir kreatif dan inovatif agar mampu bersaing dan tetap survive. *Opportunity creation* tidak akan pernah

dilakukan jika kreativitas (*creativity*) sebagai salah satu *entrepreneurial* mindset belum dimiliki. Pemikiran kreatif (*creative thought*) merupakan proses mental yang melibatkan kemampuan *creative problem solving* dan penemuan ide atau konsep baru, kemudian dapat menghubungkan keterkaitan antar ide/konsep yang telah ada sebelumnya. Dari sudut pandang ilmiah, produk dari pemikiran kreatif harus memiliki nilai orisinal dan kelayakan yang tinggi. Walaupun tampaknya fenomena produk pemikiran kreatif cukup sederhana, namun faktanya cukup kompleks. Beberapa orang percaya bahwa kreativitas adalah bakat yang dimiliki seseorang dari lahir, beberapa mengatakan kreativitas dapat diajarkan dengan teknik aplikasi yang sederhana. Kreativitas juga dipandang sebagai buah dari suatu perenungan (*muse*). Kreativitas juga bagian esensi dari inovasi dan penemuan dimana hal ini sangat penting dimiliki seseorang khususnya pelaku usaha.

KESIMPULAN

Sifat entrepreneur yang dimiliki oleh pelaku usaha dipengaruhi oleh faktor 3 L yaitu lahir, lingkungan dan latihan. Beberapa kesimpulan penting yang dapat dikembangkan mengenai potensi dan hambatan tersebut adalah fokus pada keberlanjutan penciptaan seni keris Kabupaten Sumenep. Keberlanjutan ini mempertimbangkan sisi permintaan dan kemampuan membuat keris yang dipesan oleh pembeli. Dengan memperhatikan dua faktor yang menyertai kesenian keris Pemerintahan Sumenep ini, maka diperoleh optimalisasi bagi instansi yang membantu UMKM dalam tahap ini yaitu instansi pemerintah Kabupaten Sumenep dan mitra swasta yang dapat mengelola produksi dengan baik.

Instansi pemerintah khususnya Kabupaten Sumenep merupakan instansi yang paling cocok dalam pendampingan, karena pemerintah Sumenep sangat mengetahui kondisi dan kebutuhan pembuatan UMKM keris ini. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membina UMKM kerajinan keris ini adalah dengan mengadakan acara promosi yang baik seperti pertukaran kunjungan dan pengenalan kesenian keris daerah Sumenep kepada pelanggan baru. Perencanaan pelanggan atau konsumen baru, ini menjadi penting untuk dianalisa di masa mendatang.

Melakukan promosi melalui pameran keris yang diikuti oleh sebagian besar pengusaha kecil dan menengah, peluncuran gerai keris oleh kantor-kantor penting dan pendirian monumen citra kota Sumenep sebagai simbol kota keris. Produsen keris pada umumnya adalah sudah berskala besar dan telah memiliki pasar, meskipun begitu nation branding dirasa belum cukup membantu dalam pemasaran karena informasi belum sepenuhnya mudah dicari seperti informasi yang di pasang di media sosial masih kesulitan untuk mencarinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwibowo, Soeryo. (2007). *Ekologi Manusia*. Bogor: Fakultas Ekologi Manusia-IPB.
- Arfiyanto, Dedi., et al. (2013). Entrepreneur Mindset Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) (Studi Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Saronggi). *Jurnal Performance Bisnis & Akuntansi*. 3(1).
- BUKU 1 Masterplan Smart City Kabupaten Sumenep Tahun 2019-2028. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep 2018.

- Benny, J. (2013). Ekspor Dan Impor Pengaruhnya Terhadap Posisi Cadangan Devisa Di Indonesia. *Jurnal EMBA*. Volume 1. No. 4.
- Harahap, Hakim Muda. (2019). Epistemologi Etika Perdagangan Internasional Dalam Konsep Alquran. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*. 3 (2).
- Ismayati J.s, Sali., & Masti'ah (2017). Upaya Meningkatkan Keterampilan Kerajinan Tangan Menggunakan Metode Demonstrasi Teknik Kolase. *Jurnal Pendidikan*. Volume 5. No. 1.
- Kurniawan, Duwi Ferry & Luluk Fauziah. 2014. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *JKMP*. Vol. 2, No. 2.
- Mankiw, N. Gregory. (2006). Pengantar Ekonomi Makro. Jakarta: Salemba Empat.
- Muchtar, Evan Hamzah (2016). Perkembangan Tasyri' Ekonomi pada masa Khulafaurrasyidin. *Jurnal:Asy-Syukriyyah*. Vol.17.
- Prasetyo. (2015). *Konsep dan Teori Pemberdayaan Masyarakat*. Informasi peternakan
- Raharjo, Timbul. (2018). *Seni Kriya dan Kerajinan*. Yogyakarta: Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia.
- Reid, B. (2016). China's "South-South" Trade: Unequal Exchange and Uneven and Combined Development. Dalam R. Desai (Ed.). *Research in Political Economy*. Emerald Group Publishing Limited. Vol. 30.
- Sunariani, Ni Nyoman at al., 2017. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Program Binaan di Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*. 2(1).

- Sabaruddin, S. S. (2015). Dampak Perdagangan Internasional Indonesia terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Aplikasi Structural Path Analysis. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*. 17(4).
- Samuelson, Paul A. and William D. Nordhaus. (2001). *Economics*. Fifteenth Edition, McGraw-Hil.
- Sedyaningrum, M., Suhadak, S., & Nuzula, N. (2016). Pengaruh Jumlah Nilai Ekspor, Impor Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Nilai Tukar Dan Daya Beli Masyarakat Di Indonesia Studi Pada Bank Indonesia Periode Tahun 2006:Iv-2015:Iii. *Jurnal Administrasi Bisnis*. 34(1).
- Setyowati, Endang., et al. (2004). *Ekonomi Makro Pengantar*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara.
- Sudrajat, U. (2017). *Riwayat Industri Keris Di Sumenep, Madura The History Of Keris Industry In Sumenep, Madura*. *Jurnal Kebudayaan*. 12(2).
- Sudrajat, Unggul. (2017). *The History of Keris Industri in Sumenep Madura*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan, Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tanjung, Hendri dan Abrista Devi. 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* Jakarta: Gramata Publishing.
- Tauhedy, Fahmi. (2019). *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Keris Berdasarkan Pengaruh Usianya Di Desa Aeng Tongtong Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep*. Universitas Sunan Ampel.
- Tini, Dwi Listia Rika. (2015). *Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Produk Kerajinan Keris Berdasarkan Analisis Global Value Chain (Studi Kasus Kerajinan Keris Di Kabupaten Sumenep)*. Universitas Wiraraja.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic development* (11th ed). Addison-Wesley.

Waluya, Atep Hendang. (2016). *Perdagangan Internasional Dalam Islam*. Majalah Tabligh. 4(14).

PENANGANAN PRODUKSI PERTANIAN AKIBAT PERUBAHAN IKLIM DALAM MENJAGA PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BONE

Dr. Taosige Wau
(taosige.wau@uin-suka.ac.id)

Putri Deflyanty. S
(putridflynty@gmail.com)

PENDAHULUAN

Permasalahan utama pada sektor pertanian yakni rentan terhadap perubahan iklim, akibat dari perubahan iklim dapat menurunkan hasil panen. Hal ini akan memberikan dampak negatif terhadap permintaan pangan dalam suatu daerah maupun negara, hingga perubahan iklim terintegrasi dapat mempengaruhi sektor ekonomi atau dinilai dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi (Huang et al., 2020). Lahan pertanian di Bontocani (Febrinastri, 2020), Kecamatan Bengo dan Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone (Shofihara, 2020), mengalami gagal panen diakibatkan karena kekeringan. sementara pada sektor pertanian di Kabupaten Bone memiliki kontribusi yang besar terhadap peningkatan

PDRB, sehingga perubahan hasil pertanian memungkinkan mendapatkan perhatian yang besar bagi pemerintah.

Tabel 1 Kontribusi Nilai Tambah Bruto Lapangan Usaha di kabupaten Bone Tahun 2016-2019 (%)

Lapangan Usaha	2016	2017	2018*)	2019**)
1. Pertanian, Peternakan, dan Pemburuan	56,67	54,98	55,18	52,47
a. Tanaman Pangan	62,30	63,03	63,69	62,11
b. Tanaman Hortikultura semusim	2,46	2,28	2,09	2,29
c. Perkebunan semusim	2,09	1,97	1,89	2,17
d. Tanaman Hortikultura Tahunan	2,76	2,71	2,49	2,74
e. Perkebunan Tahunan	21,30	20,68	20,26	20,07
f. Peternakan	6,21	6,39	6,59	7,63
g. jasa Pertanian dan perburuan	2,88	2,95	2,95	2,99
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,16	54,98	0,15	0,15
3. Perikanan	43,17	44,87	44,67	47,37
Produk Domestik Regional Bruto	100,0	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Bone, 2019.

Tabel di atas menjelaskan beberapa sektor lapangan usaha terhadap pertumbuhan PDRB di Kabupaten Bone. Diantara ketiga sub Lapangan Usaha di atas sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan tanaman pangan yang memiliki kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB secara keseluruhan di Kabupaten Bone pada tahun 2019. Di mana hal ini membuktikan denyut nadi perekonomian Kabupaten Bone mempunyai ketergantungan yang besar pada Sektor Pertanian, hal ini dapat dilihat dari tabel 2.

Tabel 2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bone Tahun 2016–2019

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)	PDRB Perkapita (Juta Rp)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2016	26.254.402	35.15	9,01
2017	29.319.723,7	39.04	8,41
2018*)	33.120.526,6	43.87	8,91
2019**)	36.034.720	47.5	7,01

Sumber: BPS Kabupaten Bone, 2019.

Sektor pertanian memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bone, di mana sektor pertanian menyumbang sebesar 47,20 persen terhadap total PDRB. Tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2018 terjadi pergeseran, oleh karena itu hal ini menunjukkan bahwa jika sektor pertanian produktifitasnya baik maka kontribusinya akan memberi dampak positif terhadap kemajuan ekonomi Kabupaten Bone secara keseluruhan. Demikian juga sebaliknya jika sektor pertanian produktifitasnya menurun, maka akan berdampak besar terhadap kemerosotan perekonomian secara keseluruhan di Kabupaten Bone (Statistik Kabupaten Bone, 2019).

Hal tersebut juga didukung oleh penelitian mengenai perubahan iklim pertanian yang mengakibatkan dampak pada pertumbuhan ekonomi, beberapa penelitian yang menjadi dasar peneliti antara lain: Pertama, (Huang et al., 2020) dalam penelitiannya menilai dampak ekonomi perubahan iklim pada sektor pertanian di Cina, hasil penelitian menunjukkan adanya dampak dari perubahan iklim hingga mengakibatkan penurunan luas lahan pertanian dan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kedua, (Alrwis et al., 2021) dalam penelitiannya mengukur dampak kelangkaan

air terhadap pembangunan ekonomi di Arab Saudi, hasil penelitian menunjukkan diperlukan regulasi kebijakan untuk konservasi sumber daya air, pemerintah menghentikan ekspor air virtual. Ketiga, (Vallino, Ridolfi, & Laio, 2020) many countries where water is abundant according to hydrological indicators face difficulties in the utilization of water in agriculture, being in a situation of economic water scarcity (EWS meneliti terkait Measuring economic water scarcity in agriculture: a cross-country empirical investigation, hasil penelitian menunjukkan penggunaan indikator IWRM sebagai alat yang baik untuk mengukur EWS di bidang pertanian, menjembatani kesenjangan dari kelangkaan air, dengan implikasi kebijakan langsung yang mendukung investasi dalam pengelolaan air sebagai pendorong untuk meningkatkan ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi.

Berdasarkan pemaparan di atas, dengan pemahaman yang lebih dalam terkait penanganan produksi pertanian dari perubahan iklim di mana dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi Kabupaten Bone. Dalam hal ini penting dalam pembuatan keputusan dengan menganalisis kebijakan yang sesuai untuk dapat memberi kontribusi pembangunan ekonomi terkhusus masalah produksi pertanian. Penelitian ini disusun untuk menganalisis dampak penurunan hasil pertanian yang diakibatkan perubahan iklim terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bone dan menganalisis kebijakan pemerintah Kabupaten Bone dalam menanggulangi masalah tersebut.

KERANGKA TEORITIS

Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi pada sektor pertanian dianggap memainkan peran pasif dan suportif. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan pangan dan tenaga kerja dengan harga rendah yang cukup untuk ekonomi industri yang sedang berkembang, yang dianggap sebagai sektor terdepan yang dinamis secara keseluruhan strategi pembangunan ekonomi. Model dua sektor Lewis yang terkenal adalah teori pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan industri dengan sektor pertanian yang mendorong ekspansi industri melalui pangan murah dan kelebihan tenaga kerja (Todaro & Smith, 2011).

Peran Produksi Pertanian

Sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam membangun perekonomian di Indonesia. Karena dalam sektor ini peranannya berkaitan dengan penyediaan lapangan kerja, penyediaan pangan, penyumbang devisa melalui ekspor dan sebagainya. Dengan kuatnya sektor pertanian dipandang dari sisi penawaran maupun permintaan maka pertanian akan mampu mendukung dan membuat jalinan dengan sektor kegiatan ekonomi lain. Namun ada beberapa penyebab utama terjadinya penurunan peran sektor pertanian adalah pertumbuhan produksi pertanian yang masih terlalu berbasis pada ketersediaan lahan, padahal ada beberapa kegiatan ekonomi yang disertai konversi lahan pertanian yang menjadi kegunaan lain masih terus berlangsung. Tidak hanya itu saja, kondisi sektor pertanian sekarang pun sedang mengalami gejala penerimaan output yang terus berkurang dikarenakan alokasi dan kombinasi dari faktor produksi

pertanian yang digunakan masih dikatakan belum mampu untuk mengimbangi penurunan yang sedang terjadi (Imsar, 2018).

Produksi pertanian terkhusus masalah produksi pangan juga merupakan sektor yang sangat strategis. Pentingnya peranan pangan dalam menunjang kehidupan manusia maka pemerintah Indonesia selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan pangan penduduknya, tidak saja ditinjau dari segi kuantitas, tetapi juga dari segi kualitas. Penyediaan pangan yang cukup dapat lebih memantapkan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Usaha peningkatan produksi pangan ditujukan pula untuk meningkatkan taraf hidup, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat dengan merata dan adil, serta meletakkan landasan yang kuat untuk tahap ekonomi pembangunan (Hanafie, 2020).

Perubahan Iklim

Menurut Kementerian Pertanian pengaruh perubahan iklim terhadap sektor pertanian bersifat multidimensional, mulai dari sumber daya, infrastruktur pertanian, dan sistem produksi pertanian, hingga aspek ketahanan dan kemandirian pangan, serta kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya. Pengaruh harga dan produktivitas yang berubah-ubah mengakibatkan pendapatan petani yang ikut berubah. Selain berdampak pada pendapatan, harga juga akan berdampak pada pola konsumsi rumah tangga. Besarnya pendapatan yang dihasilkan akan mempengaruhi konsumsi rumah tangga baik pangan, sandang atau papan. Jika tingkat pendapatan yang dihasilkan semakin besar, petani akan cenderung memperbesar proporsi pengeluaran rumah tangganya begitu juga dengan sebaliknya (Mardiana,

Abidin, & Soelaiman, 2014). Perubahan iklim memiliki dampak negatif terhadap produksi pertanian, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayati & Suryanto, (2015), dan penelitian (Huang et al., 2020) akibat perubahan iklim dapat mempengaruhi penurunan produksi pertanian dikarenakan menurunnya luas lahan panen, sehingga hal ini mengakibatkan perubahan harga dan penurunan produktivitas petani.

Teori Baqir al-Sadr

Masalah ekonomi terkait dengan kelangkaan bersifat imajiner. Baqir al-Sadr mempunyai pendapat bahwa Allah SWT sebagai pencipta manusia mengetahui kebutuhan manusia sehingga Allah SWT telah menyediakan ketersediaan kebutuhan manusia, sehingga bukan ketersediaan sumber daya alam yang menjadi masalah utama ekonomi, tetapi manusia yang menyebabkan masalah ekonomi. Pendapat Baqir al-Sadr didasarkan pada Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 32-34 yang berbunyi:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ وَآتَاكُم مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

Terjemahan: "Allah SWT yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan sebagai rejeki untukmu. Menundukkan lautan bagimu untuk berlayar dengan kehendakNya, menundukkan matahari dan bulan untukmu yang terus menerus beredar (dalam orbitnya), menundukkan malam dan siang untukmu dan Dia telah memberikan segala sesuatu yang kamu mohonkan

kepadaNya. Dan jika kamu menghitung nikmat dari Allah SWT, tidaklah kamu mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia sangat zhalim dan sangat mengingkari nikmat.”

Pendapat Baqir al-Sadr berimplikasi pada nilai tauhid, di mana Allah SWT menyediakan sumber daya alam sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia yang berperan sebagai khalifah, dapat memanfaatkan sumber daya yang banyak itu untuk kebutuhan hidupnya. Selanjutnya melalui ayat tersebut, Baqir al-Sadr ingin menunjukkan bahwa masalah utama ekonomi adalah kezaaliman dan kekufuran manusia (Qomar, 2016) Maka dari itu keterbatasan pangan yang terjadi bukan dikarenakan ketidakmampuan alam dalam menyediakan sumber daya pangan, akan tetapi merupakan suatu akibat dari tindakan manusia itu sendiri dimana proses produksi yang secara berlebih-lebihan sehingga dilakukannya eksploitasi sumber daya yang ada menimbulkan kerusakan dan berdampak pada kelangsungan hidup manusia. Hal inilah yang sebenarnya menjadi penyebab kelangkaan pangan (Muna & Qomar, 2020).

PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif di mana penelitian digunakan untuk menganalisis dampak penurunan hasil pertanian yang diakibatkan perubahan iklim terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bone dan menganalisis kebijakan pemerintah Kabupaten Bone dalam menanggulangi masalah tersebut.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, dan teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi literatur di mana data diambil dari BPS Kabupaten Bone, dan

literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian. Rancangan analisis data menggunakan analisis deskriptif, peneliti mengumpulkan data yang telah diperoleh kemudian menganalisis data-data tersebut, dan diinterpretasikan secara deskriptif.

1. Produksi pertanian dan pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bone

Bone merupakan kabupaten terluas ketiga yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, terbagi menjadi 27 kecamatan dan 372 desa/kelurahan. Apabila dilihat menurut luas kecamatan, tiga kecamatan terluas yakni Kecamatan Bontocani (10,16 %), Libureng (7,55 %), dan Tellu Limpoe (6,98 %). Sementara tiga kecamatan terkecil adalah Kecamatan Tanete Riattang (0,52 %), Tanete Riattang Timur (1,07 %), dan Tanete Riattang Barat (0,52 %) (Badan Pusat Statistik, 2020).

Dengan memiliki lahan yang cukup luas, Kabupaten Bone sendiri merupakan penghasil pertanian yang besar di Sulawesi Selatan terkhusus usaha tani padi. Hal ini dibuktikan dengan tabel 3.

Tabel 3 Tabel Luas Panen Padi (ribu ha) Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2018-2019

Kabupaten/Kota	Produksi Padi GKG			
			Perkembangan	
	2018	2019	Selisih	Persentase (%)
KEP. SELAYAR	0.09	0.22	0.13	140.75
BULUKUMBA	242.18	202.1	-40.09	-16.55
BANTAENG	65.33	52.88	-12.44	-19.05
JENEPONTO	233.15	153.23	-79.92	-34.28
TAKALAR	129.12	113.8	-15.32	-11.86
GOWA	271.75	250.82	-20.93	-7.7

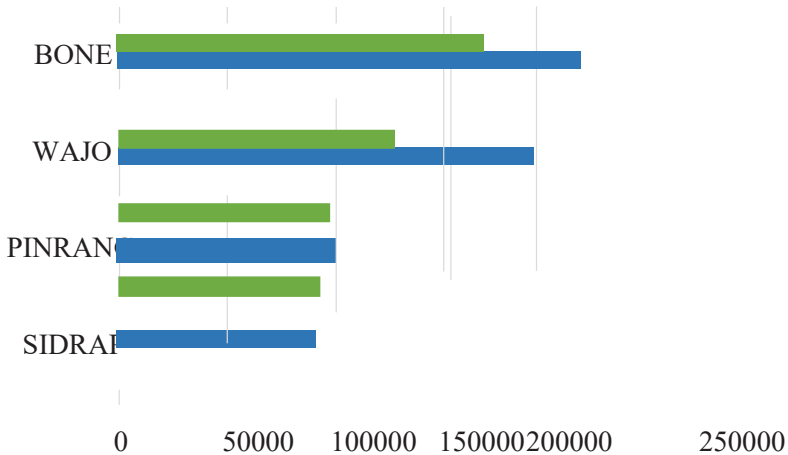
Penanganan Produksi Pertanian Akibat Perubahan Iklim dalam Menjaga
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bone

Kabupaten/Kota	Produksi Padi GKG			
			Perkembangan	
	2018	2019	Selisih	Persentase (%)
SINJAI	126.69	118.14	-8.55	-6.75
MAROS	223.97	210.62	-13.35	-5.96
PANGKEP	137.59	119.77	-17.82	-12.95
BARRU	143.45	133.51	-9.94	-6.93
BONE	1005.5	774.34	-231.17	-22.99
SOPPENG	301.59	273.74	-27.86	-9.24
WAJO	907.24	602.77	-304.47	-33.56
SIDRAP	533.84	513.67	-20.16	-3.78
PINRANG	610.74	593.38	-17.37	-2.84
ENREKANG	55.08	41.57	-13.51	-24.53
LUWU	280.99	312.77	31.78	11.31
TANA TORAJA	92.8	59.08	-33.72	-36.34
LUWU UTARA	194.3	181.43	-12.87	-6.62
LUWU TIMUR	249.83	220	-29.82	-11.94
TORAJA UTARA	107.22	93.19	-14.03	-13.08
MAKASSAR	13.56	11.71	-1.85	-13.67
PAREPARE	6.11	5.44	-0.66	-10.87
PALOLO	20.56	20.98	0.42	2.05

Sumber: BPS Kabupaten Bone, 2020.

Dari tabel di atas menunjukkan Kabupaten Bone merupakan Kabupaten yang memiliki luas panen terluas di Sulawesi Selatan. Hal ini membuktikan bahwa Kabupaten Bone juga merupakan penghasil padi terbesar di Sulawesi Selatan. Sekitar 20% hasil sektor pertanian Sulawesi Selatan dihasilkan dari Bone (Badan Pusat Statistik, 2020).

Grafik 1 Empat Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dengan Luas Panen Padi Terbesar, Tahun 2018-2019



	SIDRAP	PINRANG	WAJO	BONE
2019	93080.02	97975.29	127870.39	169471.29
2018	91961.03	101253.19	191530.52	214390.24

Sumber: BPS Kabupaten Bone, 2019

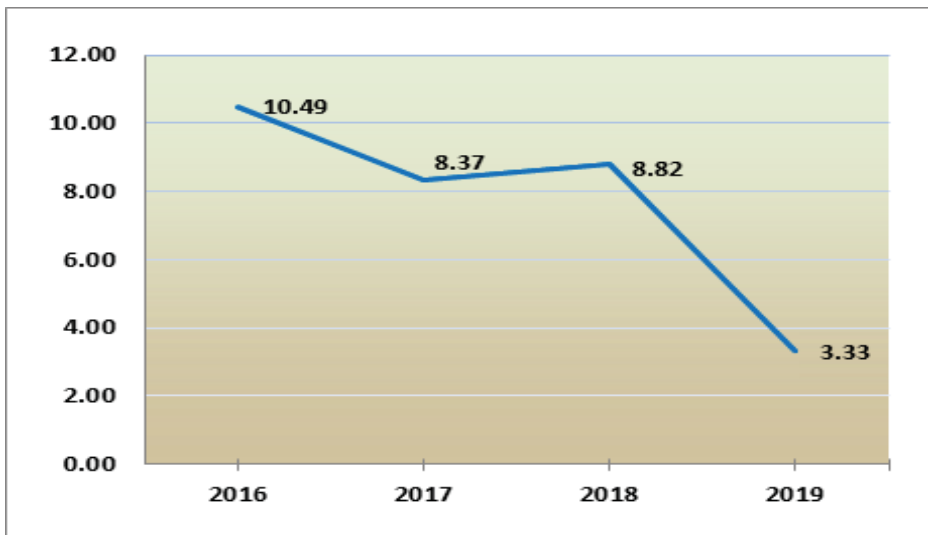
Dari grafik di atas, menunjukkan tanaman padi dari ke empat kabupaten dengan wilayah luas panen terbesar di Sulawesi Selatan yakni Kabupaten Wajo, Pinrang, Sidrap, dan Bone keempat wilayah tersebut adalah empat besar daerah penyokong luas panen produksi padi di wilayah Sulawesi Selatan setiap tahunnya.

Pola luas panen padi di Kabupaten Bone pada periode Januari sampai Desember 2019 relatif sama dengan pola panen 2018. Puncak panen padi pada tahun 2018 pada bulan september, sedangkan puncak panen pada tahun 2019 di bulan Agustus. Sementara luas panen terendah terjadi pada bulan November dan Desember. Total luas panen padi 2019 seluas 169,47 ribu hektar dengan luas panen tertinggi

terjadi pada Agustus, yaitu sebesar 63,36 juta hektar. Jika dibandingkan dengan total luas panen padi 2018, luas panen padi 2019 mengalami penurunan sebesar 44,91 ribu hektar atau -21 persen.

Penurunan luas lahan produksi pada tahun 2019 dikarenakan perubahan iklim di mana terjadi kekeringan yang melanda sebagian wilayah di Sulawesi Selatan. Perubahan produksi yang begitu mencolok sangat mudah terjadi, salah satunya seperti faktor perubahan iklim di mana masalah ini masih sulit untuk ditangani.

Grafik 2 Pertumbuhan lapangan usaha Pertaniandi Kabupaten Bone Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2019



Sumber: BPS Kabupaten Bone, 2019

Perubahan lapangan usaha pertanian merupakan skala pengukuran terjadinya pasang surutnya produksi pertanian secara keseluruhan. Bila terjadi perubahan produksi, maka hal ini dapat memberi dampak negatif seperti

yang terjadi pada tahun 2019 sehingga menyebabkan lapangan usaha pertanian menurun drastis. Hal ini membuktikan bahwa jika terjadi penurunan produksi pertanian maka akan mengakibatkan lapangan usaha pertanian juga semakin menurun, juga berdampak pada petani dan ketersediaan pangan. Sehingga akan memberi pengaruh negatif bagi pertumbuhan ekonomi di kabupaten Bone.

Tabel 4 Hasil Uji Korelasi

Keterangan	Korelasi
Usaha pertanian & PDRB	0.98078

Sumber: data diolah penulis, 2021

Dari hasil uji korelasi di atas, dapat diketahui bahwa hubungan antara pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bone tahun 2016-2019 sebesar 0.98078. Dari angka tersebut dapat diketahui bahwa hubungan keduanya berpengaruh positif dan searah dengan teori yang ada, artinya jika produksi pertanian meningkat maka akan berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone begitupun sebaliknya, jika produksi pertanian menurun akan diikuti oleh penurunan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone. Hal ini juga diungkap oleh (Hanafie, 2020) bahwa penyediaan pangan yang cukup dapat lebih memantapkan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Usaha peningkatan produksi pangan ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat dengan merata dan adil, serta meletakkan landasan yang kuat untuk tahap ekonomi pembangunan.

2. Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Produksi Pertanian

Usaha di sektor pertanian khususnya usaha tani padi dihadapkan pada risiko ketidakpastian yang cukup tinggi, antara lain kegagalan panen yang disebabkan perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, serangan hama dan penyakit Organisme Pengganggu Tumbuhan atau OPT yang menjadi sebab kerugian usaha petani. Untuk menghindarkan dari keadaan tersebut pemerintah saat ini memberikan solusi berupa program Asuransi Usaha Tani Padi yang disingkat dengan AUTP, yang diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap risiko ketidakpastian dengan menjamin petani mendapatkan modal kerja untuk berusaha tani dari klaim asuransi. Jaminan perlindungan ini maka petani dapat membiayai pertanaman di musim berikutnya.

Risiko yang dijamin dalam AUTP meliputi banjir, kekeringan, serangan hama dan OPT. Hama pada tanaman padi antara lain, wereng coklat, penggerek batang, walang sangit, keong mas, tikus dan ulat grayak. Sedangkan penyakit pada tanaman padi antara lain, tungro, penyakit blas, busuk batang, kerdil rumput, dan kerdil hampa. Waktu pendaftaran dapat dimulai paling lambat satu bulan sebelum musim tanam dimulai. Kelompok tani didampingi PPL dan UPTD kecamatan mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan formulir yang telah disediakan (Kementrian Pertanian Republik Indonesia, 2021).

Dinas pertanian kabupaten atau kota membuat daftar peserta asuransi definitif, kemudian menyampaikan ke Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan tembusan dinas pertanian propinsi. Dinas pertanian propinsi membuat rekapitulasi dari masing-masing kabupaten atau

kota dan menyampaikan ke Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk proses bantuan premi 80%. Pembayaran klaim untuk luas lahan satu hektar sebesar enam juta rupiah. Jika terjadi resiko terhadap tanaman yang diasuransikan, serta kerusakan tanaman atau gagal panen, maka klaim AUTP akan diproses jika memenuhi syarat. Adapun beberapa syarat yang telah ditentukan antara lain (Kementrian Pertanian, 2021):

- a. Umur padi sudah melewati 10 hari setelah tanam
- b. Umur padi sudah melewati 30 hari setelah tebar pada sistem tanam benih langsung (menggunakan teknologi)
- c. Umur padi sudah melewati 30 hari setelah pemotongan (HSP) atau panen pada tanaman utama dan tumbuh tunas baru pada sistem padi.
- d. Intensitas kerusakan mencapai 75% berdasarkan luas petak alami tanaman padi.

Pembayaran ganti rugi atas klaim dilaksanakan paling lambat 14 hari kalender sejak berita acara hasil pemeriksaan kerusakan. Pembayaran ganti rugi dilaksanakan melalui pemindah bukuan ke rekening. Dengan terpenuhinya syarat dan ketentuan klaim, maka pihak perusahaan asuransi akan membayarkan klaim asuransi melalui transfer bank terhadap rekening kelompok tani (Kementrian Pertanian Republik Indonesia, 2021).

Tahun 2019 di Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone sawah seluas 33,75 hektar mengalami gagal panen yang disebabkan oleh kekeringan. Pemerintah dalam hal ini kementrian pertanian memberikan asuransi pertanian (AUTP). Terdapat 6 kempok tani yang mendapatkan AUTP di mana mereka telah terdaftar menjadi anggota asuransi tersebut (Shofihara, 2020).

Pada dasarnya dana AUP untuk meringankan beban petani yang mengalami gagal panen, sehingga diharapkan ketika musim panen berikutnya dapat menanam kembali dengan modal yang telah diberikan. Hal ini sejalan dengan UUD Pasal 1 ayat 1 No 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Akan tetapi kebijakan tersebut tidak hanya sebagai solusi akhir dari permasalahan gagal panen yang diakibatkan perubahan iklim. Hal ini memerlukan tinjauan lebih lanjut, seperti sarana dan prasarana yang mendukung, pemenuhan dan perbaikan infrastruktur irigasi yang memadai dan merata disetiap daerah Kabupaten Bone, sehingga ketika terjadi kekeringan, masalah tersebut dapat lebih diminimalisir. Serta terjadinya banjir terutama pada lahan sawah yang jaringan irigasinya kurang baik. Kemudian pelatihan terkait informasi cuaca oleh petani. Oleh karena itu, upaya antisipasi perubahan iklim hendaknya dipertimbangkan lebih lanjut.

Dari perspektif ekonomi Islam masalah produksi pertanian menurut Baqir al-Sadr bahwa masalah utama ekonomi adalah kezaliman dan kekufuran manusia (Qomar, 2016). Keterbatasan pangan yang terjadi merupakan suatu akibat dari tindakan manusia itu sendiri dimana proses produksi yang secara berlebihan sehingga dilakukannya eksploitasi sumber daya yang ada menimbulkan kerusakan dan berdampak pada kelangsungan hidup manusia. Hal inilah yang menjadi penyebab kelangkaan pangan (Muna & Qomar, 2020). Oleh karena itu, produksi pangan dilakukan dengan cara dapat memenuhi keberlangsungan kehidupan di masa depan, dengan memperhatikan waktu tanam dan kondisi tanah di daerah masing-masing sehingga ketika selesai musim tanam padi, tanaman-tanaman lainnya dapat dibudidayakan kembali dengan memperhatikan kondisi dan struktur tanah

yang cocok dengan tanaman lainnya. Serta memproduksi dengan tidak berlebihan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah menekankan bahwa produksi pertanian memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditunjukkan oleh kurangnya ketersediaan pangan yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kemudian kebijakan pemerintah terkait masalah penurunan produktivitas pertanian diakibatkan perubahan iklim, pemerintah saat ini memberikan solusi berupa program Asuransi Usaha Tani Padi yang disingkat dengan AUTP. Di mana bantuan tersebut digunakan untuk meringankan beban petani yang mengalami gagal panen akibat perubahan iklim.

DAFTAR PUSTAKA

- Alrwis, K. N., Ghanem, A. M., Alnashwan, O. S., Al Duwais, A. A. M., Alaagib, S. A. B., & Aldawdahi, N. M. (2021). Measuring the impact of water scarcity on agricultural economic development in Saudi Arabia. *Saudi Journal of Biological Sciences*, 28(1), 191–195. <https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2020.09.038>.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Kabupaten Bone*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone. (2020). *Indikator Ekonomi Kabupaten Bone*
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone (2018).
- Febrinastri, F. (2020). Petani yang Gagal Panen di Bone Dapat Klaim Asuransi Usaha Tani Padi. Retrieved from 4 April website: <https://www.suara.com/>

- bisnis/2020/04/04/193606/petani-yang-gagal-panen-di-bone-dapat-klaim-asuransi-usaha-tani-padi?page=all. Diakses tanggal 4 Maret 2021.
- Hanafie, R. (2020). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Retrieved from https://books.google.co.id/books?id=RQ_mXpu-Cl9oC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
- Hidayati, I. N., & Suryanto, S. (2015). Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Produksi Pertanian Dan Strategi Adaptasi Pada Lahan Rawan Kekeringan. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan.*, 16(1), 42–52. <https://doi.org/10.18196/jesp.16.1.1217>
- Huang, C., Li, N., Zhang, Z., Liu, Y., Chen, X., & Wang, F. (2020). Assessment of the economic cascading effect on future climate change in China: Evidence from agricultural direct damage. *Journal of Cleaner Production*, 276, 123951. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123951>
- Imsar. (2018). *Analisis Produksi Dan Pendapatan Usahatani Kopi Gayo (Arabika) Kabupaten Bener Meriah*.
- Kementrian Pertanian Republik Indonesia. (2021). Asuransi Usaha Tani Padi, Solusi Kegagalan Panen. Retrieved from <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=1609>
- Kementrian Pertanian. (2021). Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Tahun Anggaran 2021. Retrieved from psp.pertanian.go.id.
- Mardiana, R., Abidin, Z., & Soelaiman, A. (2014). Pendapatan Dan Kesejahteraan Petani Karet Rakyat Di Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan. *Jiia*, 2(3), 239–245.
- Muna, T. I., & Qomar, M. N. (2020). Relevansi Teori Scarcity Robert Malthus Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i1.134>

Qomar, M. N. (2016). Telaah Kritis Masalah Ekonomi Perspektif Muhammad Baqir al-Sadr. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1–14.

Shofihara, I. J. (2020). Bukti Nyata Asuransi Petani, 6 Poktan di Bone Gagal Panen dapat Ganti Rugi. Retrieved from 5 April website: <https://kilaskementerian.kompas.com/kementan/read/2020/04/05/082311926/bukti-nyata-asuransi-petani-6-poktan-di-bone-gagal-panen-dapat-ganti-rugi>. Diakses tanggal 4 Maret 2021.

Todaro, M., & Smith, S. C. (2011). Chapter 5: Poverty, Inequality and Development. In *Economic Development*.

PENGARUH POPULASI DAN PERTUMBUHAN UKM (USAHA KECIL MENENGAH) PADA PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA BATAM

Dr. Darmawan

(darmawan@uin-suka.ac.id)

Muhammad jundi asshiddiq

(Jundia1muhamad@gmail.com)

PENDAHULUAN

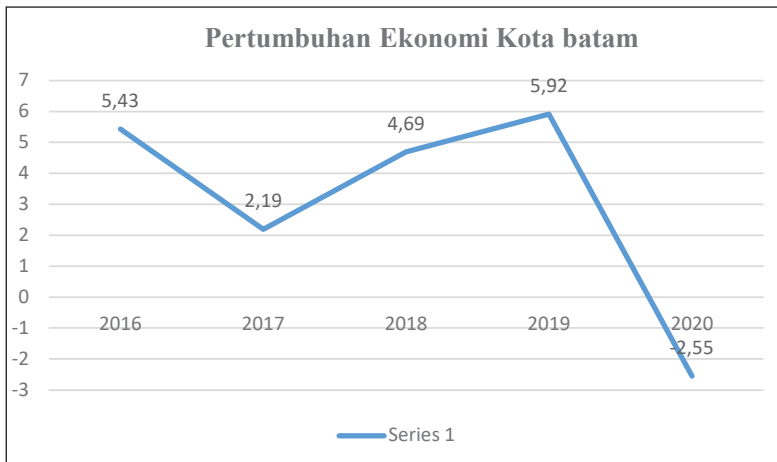
Dimulai dari penandatanganan Keppres No. 41 tahun 1973 dan Keppres No. 05 tahun 1983, Batam mulai memajukan daerahnya di bidang industri, perdagangan dan galangan kapal. Terbukti dengan hadirnya para investor yang masuk ke daerah batam. Pada semester I 2018, realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sudah mencapai 391 juta dolar AS. Angka tersebut sudah mencapai 78,3 persen dari target PMA BP Batam sepanjang 2018 sebesar 500 juta dolar AS. Tidak mau salah ambil langkah, Pemerintah Pusat menjadikan Batam sebagai lokomotif perekonomian nasional yang kini sedang melakukan pemulihan ekonomi (recovery) Diproyeksikan, hingga akhir tahun 2007 kontribusi dari

pajak penghasilan sebesar Rp 5 triliun dan diharapkan target pertumbuhan ekonomi Batam tahun ini sebesar 4,5 persen bisa diwujudkan (Nasution, 2016).

Pembangunan yang diciptakan pemerintah dan masyarakat kota Batam bisa dibilang berhasil dengan meningkatnya kemampuan swasta dan masyarakat Batam. Dimulai dari merencanakan dan melaksanakan kegiatan proyek dan kemampuan memenuhi segi finansial. Sedangkan di lain pihak, kemampuan dana pemerintah semakin menurun. Dengan demikian, perencanaan pembangunan khususnya perencanaan kegiatan proyek, juga semakin bergeser dari pemerintah ke masyarakat dan swasta. Pertama, kegiatan fisik pemerintah daerah semakin menurun dan terbatas hanya pada penyediaan public goods, seperti air minum, tenaga listrik, telepon, sekolah, dan rumah sakit/puskesmas. Kedua, Sebagian besar kegiatan fisik pembangunan berada di otoritas masyarakat/swasta, dalam hal ini perlu adanya integritas antara pemerintah dan masyarakat agar terciptanya visi dan misi yang sama. Dimulai adanya kesepakatan mengenai tujuan umum ke mana pembangunan bangsa Kota Batam lebih mengarah. Ketiga, peran masyarakat yang dulu konsumen sekarang bergeser menjadi produsen yang dimana ini akan membuat konsekuensi dengan pemerintahan setempat tidak hanya berperan sebagai fasilitator pembangunan atau dengan menyediakan public goods, tetapi juga melalui kebijakan publik untuk mengarahkan dan mendukung kegiatan masyarakat/swasta (Nasution, 2016).

Khayalak umum beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Batam memberikan janji manis untuk masyarakat. Karena letak geografis berdekatan dengan Singapura yang merupakan negara terkaya ke-3 di dunia. Tapi khalayak itu tidak sesuai dengan ekspektasi bahwa

pertumbuhan ekonomi batam mengalami fluktuatif yang signifikan dari tahun ke tahun. Dari data pertumbuhan ekonomi di kota batam beberapa tahun sebelumnya terlihat angka menunjukkan hasil fluktuatif yang cukup signifikan dari tahun ketahun. Berikut data pertumbuhan ekonomi dari tahun 2016 – 2020:



Sumber : BPS kota batam

Dari diagram diatas kita bisa melihat bahwa pertumbuhan ekonomi batam tidak seindah dengan negara tetangga yaitu singapura. Pertumbuhan yang mencolok ialah dari tahun 2016 menuju 2017 yang mengalami penurunan yang sangat drastis, walaupun ditahun berikutnya pertumbuhan ekonomi di kota batam mulai membaik dan kembali merosot hingga negative karena factor terbesar yaitu pandemic covid -19 yang mengenai seluruh negara.

Pertumbuhan ekonomi Batam rata-rata 10% lebih besar dari pertumbuhan ekonomi Nasional. Penelitian Sumarni (2019) Menyebutkan Data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Batam tercatat

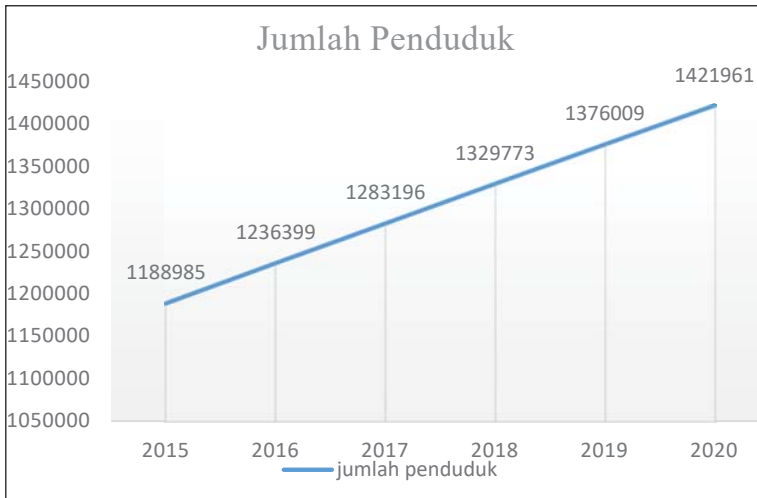
bahwa dalam kurun waktu terhitung Januari 2016 sampai Desember 2016 telah terdapat 1.156 usaha yang telah didirikan dari berbagai macam sektor usaha di Batam. Data tersebut menunjukkan bahwa kewirausahaan Batam 2016 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu 10% dari tahun sebelumnya. Data tersebut terlihat jelas potensi Batam sangat menjanjikan untuk pengembangan wirausaha Batam. Selain data potensi yang dimiliki oleh Batam, potensi lainnya terkait sumber daya di Batam juga sangat menjanjikan.

Jumlah masyarakat atau juga bisa disebut populasi akan meningkat setiap tahunnya. Populasi penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya menjadikan beban dimasing-masing daerah, pasalnya di era covid-19 ini lapangan pekerjaan sudah terbatas dan menipis karena tidak diimbangi dengan pertumbuhan kualitas penduduknya. Dengan populasi penduduk yang semakin meningkat tiap tahun dan terbatasnya lapangan pekerjaan maka akan berdampak pada pengangguran di daerah tersebut. Hasil penelitian Rahmatullah (2015) Problem pengangguran yang semakin banyak dan tidak teratasi akan berdampak pada kemiskinan di suatu wilayah. Jumlah penduduk yang besar dianggap oleh sebagian ahli ekonom bagian dari penghambat pembangunan. Hasil penelitian Mulyadi (2003) Menyatakan bahwa tingginya angka pertumbuhan penduduk yang terjadi di negara sedang berkembang seperti Indonesia dapat menghambat proses pembangunan. Pertumbuhan penduduk (yang juga mengakibatkan pertumbuhan penduduk umur produktif meskipun dengan tenggang waktu) secara tradisional dianggap merupakan faktor positif dalam menimbulkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini akan tergantung pada kemampuan sistem ekonomi untuk menyerap dan mempekerjakan secara produktif tenaga kerja tambahan,

peran kausalitas sangat berperan disini, dimana hubungan erat akumulasi modal dengan tersedianya peran-peran lain yang saling terkait, salah satunya keterampilan manajerial dan administrasi (Todaro, 2000).

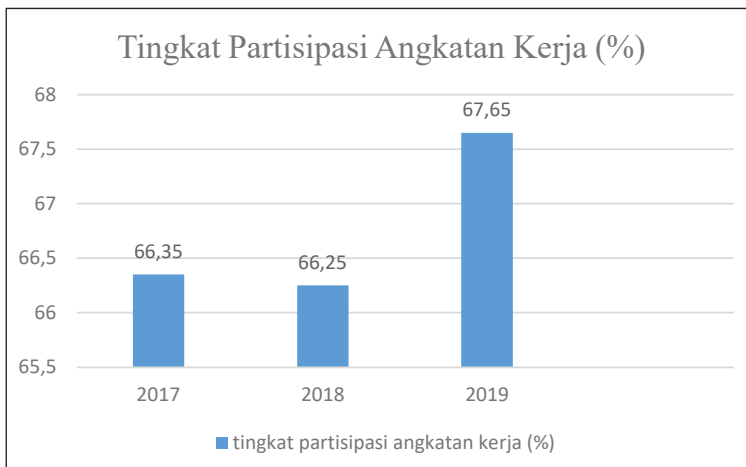
Banyaknya penduduk tidak selalu menimbulkan permasalahan terhadap tenaga kerja. Banyaknya penduduk bisa menjadi kekuatan dari wilayahnya untuk dapat berkembang karena dengan sumber daya manusia yang melimpah wilayah tersebut akan dapat memperoleh sisi positifnya yaitu dapat meningkatkan output produksi sehingga dapat meningkatkan perekonomian wilayah tersebut. Dalam teori deviden demografi atau bonus demografi suatu wilayah akan menjadikan besarnya populasi penduduk sebagai kekuatan dari wilayahnya ketika rata-rata populasi penduduk tersebut berada pada usia produktif 15-64 tahun. Karena pada usia produktif populasi penduduk dalam jumlah yang besar dapat meningkatkan output produksi atau dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Untuk melihat peluang yang terjadi di kota batam kita akan melihat Populasi penduduk di kota batam dari tahun ke tahun semakin meningkat, terhitung dari tahun 2015, jumlah penduduk kota batam naik 100.000 pertahunnya. Dilihat dari data kependudukan BPS di kota batam dari tahun 2015-2020:

Penanganan Produksi Pertanian Akibat Perubahan Iklim dalam Menjaga
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bone



Sumber: BPS kota batam

Hal ini bisa menjadi kekuatan dan kelemahan bagi kota batam, jika pemerintah dan masyarakat bisa memaksimalkan pertumbuhan penduduk yang pesat maka batam akan maju akan tetapi ketika peluang itu tidak bisa termaksimalkan maka kemunduran akan menghadapi kota batam. Dan berikut partisipasi angkatan kerja di kota batam:



Sumber: BPS kota batam

Dalam tabel ini, peran angkatan kerja dari tahun 2017-2019 mengalami fluktuatif dari 66,35 % -67,65%. Angka ini akan mengalami fluktuatif menyesuaikan peran umur produktif kerja. Peran tenaga kerja sangat berpengaruh pada investasi yang membuat lapangan kerja baru, inovasi pemerintah dan hal lain. Seiring bertambahnya partisipasi angkatan kerja akan menambah produktivitas ekonomi di daerah tersebut. Selaras dengan penelitian Hellen (2018) Pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi, jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi Peranan UKM (Usaha Kecil Menengah) dalam Pertumbuhan Ekonomi Daerah dapat diindikasikan dengan pertumbuhan UKM itu sendiri. Apabila sektor UKM tumbuh dan berkembang dalam suatu daerah, akan menyebabkan penyerapan pada tenaga kerja bertambah dan tentu kegiatan produksi serta output yang akan dihasilkan juga bertambah, dimana hal ini akan berdampak pada kenaikan PDRB daerah. Didukung dengan polemik tenaga kerja yang dilakukan perusahaan untuk pensiun dini, berakibat pada meningkatnya jumlah pengangguran di Batam, demo kenaikan UMK yang membuat investor lari dari Batam sehingga banyak perusahaan tutup karena tidak mampu memenuhi tuntutan upah tenaga kerja. Sehingga jika keadaan tersebut kita kelola untuk mengarahkan masyarakat menjadi wirausaha, akan tepat, efektif, dan efisien sehingga dapat mengangkat perekonomian masyarakat Batam.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Apabila PDRB suatu daerah menunjukkan adanya

peningkatan, maka dapat diartikan pula bahwa perekonomian daerah tersebut juga meningkat. Paradigma pembangunan yang dapat digunakan untuk mencapai itu semua adalah dengan diterapkannya strategi pemberdayaan. Salah satu pemberdayaan yang sering diterapkan adalah pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM). Pemberdayaan UKM ini dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah baik secara langsung maupun tidak langsung, yang kemudian juga akan berpengaruh pada perekonomian secara nasional. Sektor UKM merupakan penyumbang terbesar Produk Domestik Bruto (PDB) secara nasional dan pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan proses dimana terjadi naiknya Produk domestik Bruto (PDB) dalam jangka waktu yang panjang (Intan Utna Sari, 2020).

KERANGKA TEORI

Pertumbuhan ekonomi akan berjalan semestinya ketika kegiatan perekonomian output dan input berjalan dengan ideal. Toeri Sukirno (2011) Menyebutkan beberapa faktor yang berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi, antara lain:

- a. Tanah dan kekayaan alam.
- b. Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja
- c. Barang-barang modal dan tingkat teknologi
- d. Sistem sosial dan sikap masyarakat

Menurut BPS (2020) tenaga kerja adalah setiap orang yang bisa menghasilkan atau memperkerjakan sesuatu untuk tersedianya barang dan jasa. Adapun tenaga kerja terbagi atas 2 kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja, atau mempunyai

pekerjaan namun untuk sementara tidak bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan.

Dijelaskan oleh Mathis (2006) Sumber daya manusia atau bisa disebut sebagai masyarakat mempunyai peran penting dalam segala proses, karena manusia sebagai subjek penggerak dalam system yang ada untuk non manusia atau manusia itu sendiri guna mencapai tujuan bersama. Menurut BPS, Kondisi ketenagakerjaan baik menyangkut tingkat pengangguran dan penduduk yang bekerja tidak terlepas dari kinerja sektor-sektor perekonomian yang ada. Jumlah penduduk yang bekerja pada tiap sektor menunjukkan kemampuan sektor tersebut dalam penyerapan tenaga kerja. Situasi ketenagakerjaan dikatakan semakin membaik, apabila tersedianya jaminan kelangsungan pekerjaan bagi pekerja. Jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan status pekerjaan juga menjadi salah satu indikasi kualitas tenaga kerja.

Pengertian Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia merujuk pada Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pengertian UKM yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20, Bab 1 Pasal 1 Tahun 2008 tersebut, sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang per orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria

usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Jumlah Penduduk dalam Perspektif Islam

Konsep Jumlah penduduk yang diterapkan dalam ekonomi islam menyodorkan tentang peningkatan kualitas sumber daya Manusia. yang dimiliki oleh suatu daerah atau negara. Keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu negara sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM yang dipunya, salah satunya dengan menitik beratkan pembangunan manusia terlebih dahulu dan Kualitas dari SDM akan mengikuti (Beik, 2016). Hal ini selaras dengan pendekatan yang dipakai oleh Ibnu Khaldun bahwa dengan jumlah penduduk maka perlu peningkatan di setiap SDM hal ini agar terwujudnya pembangunan ekonomi yang mampu memenuhi kebutuhan dasar seluruh umat manusia (*basic needs*), dan 'dematerialisasi'. Dalam kegiatan ekonomi Ibnu Khaldun berpendapat bahwa keadilan, nilai kesederhanaan dan bekerja sama menjadi dasar dalam terapan perekonomian. Sebaliknya, fenomena konsumsi berlebihan, korupsi moral dan keserakahan ekonomi adalah indikator awal kejatuhan sebuah peradaban.

Menurut salah satu ulama besar muslimin yaitu Ibn Khaldun tentang jumlah penduduk yang menitik beratkan

persoalan jumlah penduduk dengan tamadun, yang dimana tamadun memiliki arti kemampuan intelek (*quwwah natiqah*), mampu berpikir (*fikr*) dan mampu membuat pertimbangan (*rawiyyah*) dan perlakuan (*action*), karena praktik yang dilakukan manusia berlandaskan akal yang mampu menjadi tersistem (*muntazam*) Hal ini menunjukkan bahwa modal manusia yang ingin dibangun harus dimulai dari penguasaan ilmu, semangat kerjasama, menimbulkan respect antar sesama dan penguasaan keahlian dibidang masing-masing. Selain tamaddun, ibn khaldun juga memiliki teori tentang malakah yang memiliki arti tabiat (*habit*) yang terbina dalam diri modal insan yang terhasil dari latihan (*training*), pengulangan (*repetition*), tindakan yang benar (*the actual act of doing things*), proses berpikir (*thinking*), aktivitas fisik, teknikal, bahasa dan spiritual yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga sikap dan sifat yang dikehendaki terbentuk dalam diri (Khaldun, 1967). Hal ini mengartikan bahwa populasi penduduk mampu dimaksimalkan dengan baik dengan dua teori yang diberikan Ibnu Khaldun yaitu dengan tamadun dan malakah yang dimana keduanya memiliki ketersinambungan yang tak bisa dipisahkan. Dimana modal awal harus di tanamkan ialah sifat tamadun (berfikir sistematis) lalu disambungkan dengan sifat malakah (kebiasaan) yang dimana jika keduanya dijalankan dengan baik dan benar maka akan menciptakan masyarakat yang beradab dengan kemampuan skill yang tinggi dalam bidang yang (Joni Thamkin, 2009).

Pandangan Ibnu khaldun terkait populasi penduduk atau Demografi ialah '*ashabiyyah* atau social solidarity sebagai fundamen utama dalam proses peningkatan nilai kemasyarakatan dan pembangunan negara. Konsep yang ditawarkan oleh Ibnu Khaldun tidak terlepas dari peran

agama dalam keseharian umat muslim. Ibn Khaldun telah membicarakan secara rinci terkait 'ashabiyyah di bagian kedua buku al-muqaddimah, yang dimana di dalamnya terdapat sifat al-rahim sebagai dasar utama pembentukan 'ashabiyyah (Khaldun, 1967). Sifat al-rahim memiliki arti "sifat yang dimiliki setiap manusia, sifat meng-inginkan muncul untuk menimbulkan perasaan saling mengasihi dan menyayangi antara satu sama lain. Sifat ini juga membuat orang untuk tidak terlalu peduli terhadap diluar golongannya". Bagi Ibn Khaldun jika manusia hanya mempunyai 'ashabiyyah saja, maka manusia tidak dapat mengatur negara dengan baik dan menyia-nyiakan jumlah penduduk yang ada. Dengan itu agama harus menjadi spiritual dalam menyeimbangi sifat 'ashabiah yang dimiliki oleh setiap manusia. Gerakan keagamaan tidak akan berhasil atau efektif tanpa 'ashabiyyah yang kuat dan juga 'ashabiyyah tanpa agama tidak akan berguna. Dengan kata lain, agama dan semangat solidarity adalah saling membutuhkan. Dalam hal ini Ibn Khaldun mempercayai bahwa fungsi agama adalah untuk mempersatukan kelompok-kelompok di antara umat islam dan menyatukan kekuatan islam. Agama mendorong mereka meninggalkan tabiat mereka yang kasar dan buas untuk hidup dalam keadaan yang aman dan harmonis (Borhan, 2000).

PEMBAHASAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang dilakukan secara deskriptif. Penelitian ini mendeskripsikan data-data yang didapat tanpa melakukan pengolahan data. Data yang digunakan bersifat sekunder yang didapat dari web Badan Pusat Statistik (BPS) kota batam dan dinas ketenagakerjaan kota batam mulai dari tahun 2013

hingga tahun 2017. Data yang digunakan yaitu PDRB untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi di kota batam. Populasi masyarakat untuk menjelaskan pertumbuhan jumlah masyarakat kota batam dan jumlah UKM yang diperoleh dari dinas ketenagakerjaan yang menjelaskan tentang pertumbuhan jumlah ukm pertahunnya di kota batam.

Penelitian ini berfokus pada pengaruh populasi penduduk dan jumlah UKM pada tingkat pertumbuhan ekonomi di kota batam. Adapun pengembangan analisis dalam penelitian ini dibagi dua. Pertama, analisis populasi penduduk pada pertumbuhan ekonomi di kota batam dan kedua, analisis jumlah UKM pada pertumbuhan ekonomi di kota batam.

Populasi penduduk dan pertumbuhan ekonomi

Dilihat dari luas wilayah kota batam sebesar 1.595 km² dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.157.882 ditahun 2020 (BPS, 2020), Hal ini menjadikan kota batam sebagai salah satu kota padat penduduk yang dimana besar wilayah yang tidak cukup besar akan tetapi dipadati dengan jumlah masyarakat. Kepadatan penduduk dikota batam mengisyaratkan banyaknya SDM yang tersedia, dijelaskan oleh Mathis (2006) Sumber daya manusia atau bisa disebut sebagai populasi penduduk mempunyai peran penting dalam segala proses, karena manusia sebagai subjek penggerak dalam system yang ada untuk non manusia atau manusia itu sendiri guna mencapai tujuan bersama.

Kota batam bukan sebagai ibu kota di kepulauan riau akan tetapi dapat di katakan sebagai pusat perekonomian di kepulauan riau. Dimana letak geografis batam yang sangat berdekatan dengan singapura, yang dimana kita ketahui singapura sebagai kota dengan pertumbuhan ekonomi yang

sangat tinggi karena berada di wilayah perbatasan yang strategis. Kemampuan singapura dalam memanfaatkan SDM dikategorikan sangat baik karena wilayah singapura yang tidak memiliki SDA yang mencukupi. Hal ini menjadi point plus pada kota batam yang dimana peningkatan SDM itu dapat ditiru dan dijalankan dengan baik.

Berikut populasi penduduk kota batam dan pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi di kota batam:

Tahun	Populasi penduduk	Pertumbuhan ekonomi
2017	1.283.196	97.459.730.000
2016	1.236.399	95.369.700.000
2015	1.188.985	90.457.740.000
2014	1.141.816	84.644.070.000
2013	1.094.623	78.991.100.000

Sumber: BPS kota batam

Peran SDM pun menjadi bagian penting dalam proses pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Dapat dilihat dari tabel diatas jumlah penduduk dari tahun ketahun meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Secara singkat dapat diartikan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk di kota batam berhubungan positif pada pertumbuhan ekonomi di kota batam. Adapun hasil analisi pearson yang dilakukan di aplikasi Microsoft excel:

Hasil uji korelasi

Populasi penduduk dan pertumbuhan ekonomi	0,988323604
---	-------------

Sumber: data diolah oleh peneliti

Dilihat dari tabel diatas adalah hasil dari uji korelasi antara populasi penduduk dan pertumbuhan ekonomi dikota batam pada tahun 2013 – 2017 sebesar : 0,988323604. Dari

angka ini dapat diartikan bahwa hasil uji jumlah penduduk di kota batam pada pertumbuhan ekonomi di kota batam positif dan korelasi keduanya sangat kuat. Dilihat dari standarisasi pada angka hasil uji korelasi, jika angka berada di 0.80 – 1 maka hasil uji korelasi yang di dapat sangat kuat. Hal ini selaras dengan hipotesis yang dibuat dan beberapa teori yang ada bahwa ketika jumlah penduduk bertambah maka akan menjadikan point plus pada daerah tersebut dalam proses peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan syarat harus adanya pelatihan dan dukungan dari pihak-pihak terkait yaitu swasta dan pemerintah.

Pertumbuhan UKM dan Pertumbuhan Ekonomi

Pengertian Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia merujuk pada Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pengertian UKM yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20, Bab 1 Pasal 1 Tahun 2008 tersebut, sebagai berikut:

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

- a. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang per orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- b. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa UKM akan membantu proses pertumbuhan ekonomi dikarenakan bertambahnya aktivitas transaksi di kalangan masyarakat bawah. Pertumbuhan ekonomi tidak selalu membicarakan pada skala yang besar saja akan tetapi juga pada skala yang kecil. Bisa dilihat pada sejarah 1997 yang menyebabkan Indonesia krisis ekonomi. Pada tahun itu pertumbuhan ekonomi tertolong pada UKM yang masih bisa berkegiatan karena terlepas dari dana – dana besar yang sengkabut. Hal lain yang berkesinambungan ialah proses pelaksanaan UKM lebih mudah dan fleksibel yang membuat banyak masyarakat melakukan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

Berikut jumlah UKM dan pengaruh korelasinya pada pertumbuhan ekonomi di kota batam:

Tahun	Jumlah UKM	Pertumbuhan ekonomi
2017	1297	97.459.730.000
2016	1131	95.369.700.000
2015	1077	90.457.740.000
2014	1000	84.644.070.000
2013	849	78.991.100.000

Sumber: BPS dan dinas ketenagakerjaan kota batam.

Dari data diatas secara singkat dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi disetiap tahunnya meningkat seiring dengan peningkatan jumlah UKM yang berada di kota batam. Hal ini menandakan bahwa pertumbuhan penduduk

memiliki hubungan positif dengan jumlah UKM yang berada di kota batam. Pertumbuhan UKM juga bisa tidak lepas dari peran pertumbuhan jumlah penduduk yang beredar. Sama halnya yang telah disampaikan oleh peneliti ketika semakin banyaknya UKM maka secara langsung akan meningkatkan proses terjadinya kegiatan perekonomian atau terjadinya proses transaksi yang beredar di masyarakat dan hal ini selaras dengan apa yang terjadi dilapangan. Berikut data hasil analisis korelasi yang diuji di aplikasi Microsoft Excel:

UKM dan pertumbuhan Ekonomi	0,95980591
-----------------------------	------------

Sumber: data diolah oleh peneliti.

Data diatas hasil dari analisis korelasi yang dilakukan di Microsoft Excel yang dimana hasil uji Jumlah UKM dari tahun 2013 -2017 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar: 0,95980591. Angka ini menandakan bahwa peningkatan jumlah UKM di kota batam bergaris lurus dan berhubungan positif dengan jumlah pertumbuhan ekonomi di kota batam krena standarisasi dari hasil uji tes ialah jika angka hasil uji tes berada pada 0.80 – 1 maka hasil uji itu dikatan sebagai hasil uji sangat kuat. Hal ini tidak berbalik terbalik dengan teori yang ada dan hipotesis yang ditampilkan oleh peneliti, jika semakin banyaknya UKM yang beroperasi maka secara langsung akan membuahkan hasil baik yaitu pada proses pertumbuhan ekonomi di kota tersebut.

Dari keseluruhan data dan olahan data yang ada bahwa penelitian ini menyimpulkan pertumbuhan ekonomi di kota batam dari tahun 2013- 2017 berbanding lurus dan berhubungan positif dengan jumlah UKM dan populasi masyarakat di kota batam. Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Intan Utna Sari (2020) dan Mei Sumarni (2019) yang dimana kedua penelitain ini mempunyai hasil

yang sama yaitu pada korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dengan jumlah UKM, populasi masyarakat dan variabel lainnya yang tidak diteliti oleh peneliti.

Dari keseluruhan hasil uji korelasi menjelaskan bahwa ketika pertumbuhan penduduk bertambah maka secara otomatis dengan segala prosesnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan ini juga berlaku pada setiap pertumbuhan UKM secara otomatis dengan segala prosesnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kota Batam dan meningkatkan tarif kehidupan perekonomian masyarakat di kota Batam

DAFTAR PUSTAKA.

- Al-Mizan. (2016). Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam. *Maqdis*, 10.
- Beik, I. S. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Borhan, J. T. (2000). "Sumbangan Ibn Khaldun Dalam Pemikiran Ekonomi Islam dan Relevansinya dengan ekonomi Semasa. *Jurnal Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam*, 155.
- BPS. (2020). *Statistik Indonesia*. . JAKARTA: Statistical Yearbook of Indonesia.
- Dessler, G. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prehalindo.
- Hasan, Z. (2004). Measuring Efficiency of Islamic Bank : Criteria, Methods and Social priorities. *Review Of Islamic Economics*, 5-30.
- Hellen, H. M. (2018). Pengaruh investasi dan tenaga kerja serta pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesempatan kerja. *INOVASI*.

- Intan Utna Sari, a. s. (2020). Analisis Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi batam. *SNISTEK*, 74.
- Joni Thamkin, C. J. (2009). Modal Insan Dan Kependudukan Dalam Pembangunan Negara Menurut IBN KHALDUN. *MIQOT. Akademi Pengajian Islam*, 290.
- Khaldun, I. (1967). *The Muqaddimah*. New York: Terj. Franz Rosental.
- Mathis, R. L. (2006). *Human Resource Management*. Jakarta: salemba empat.
- Mei sumarni, S. W. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Usaha Muslimpreneur Kota Batam. *Iqtishoduna*, 71.
- Mulyadi. (2003). *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*. JAKARTA: PT. Raja Grafindo.
- Nasution, A. P. (2016). Peran Dan Kompetensi Kemampuan Pemerintah Terhadap Perkembangan Ekonomi Dankesejahteraan Masyarakat Di Kota Batam. *Journal Unrika*, 2.
- Rahmatullah. (2015). Indonesia, Pengaruh Penduduk Umur Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *ISSN*, 68.
- Sukirno. (2011). *Teori Pengantar Ekonomi Makro*. jakarta.
- Syarifah, L. N. (2020). Determinan Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Pada Provinsi-Provinsi Di Indonesia. *Thesis* <https://library.universitaspertamina.ac.id/xmlui/handle/123456789/854>.
- Todaro, M. p. (2000). *ekonomi untuk negara berkembang*. jakarta: Bumi aksara.
- Umar, H. (2016). *Metode Penelitian: Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali.

ANALISIS TINGKAT KESEHATAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Dr. Misnen Ardiansyah
(misnen.ardiansyah@uin-suka.ac.id)

Yuliana
(Anayulia26.ay@gmail.com)

PENDAHULUAN

Tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah dapat diketahui dari pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Penyelenggaraan pembangunan bertujuan untuk menciptakan taraf hidup masyarakat dengan menghadirkan peluang pemerataan ekonomi yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat. Jika pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah meningkat, maka aktivitas ekonomi wilayah tersebut berkembang. Namun, jika pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah menurun, kegiatan ekonominya akan mengalami kemunduran (Amar et al., 2019)

Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang berhasil dapat dicapai dengan meningkatkan sumber-sumber utama pertumbuhan ekonomi kumulatif. Salah satu sumber

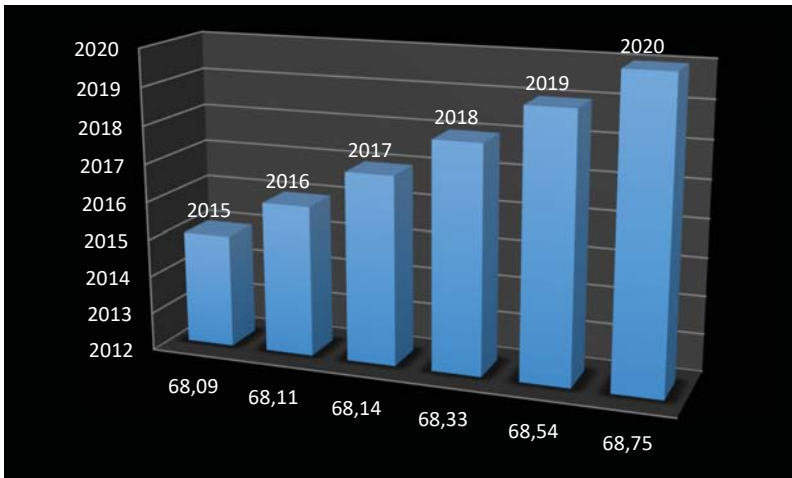
utamanya adalah sumber daya manusia. Menurut teori human capital, kesehatan merupakan salah satu faktor penentu kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, seiring dengan tingkat pendidikan (Todaro & Smith, 2011).

Kesehatan adalah inti dari kesejahteraan di suatu daerah. Karena kesehatan merupakan prasyarat untuk meningkatkan produktivitas guna menghasilkan pendapatan. Pemerataan kesehatan sama pentingnya dengan pembagian pendapatan, karena kesehatan pekerja baik secara fisik ataupun mental akan lebih produktif sehingga mampu menghasilkan barang yang lebih banyak. Pertumbuhan angka harapan hidup di masyarakat menunjukkan tingginya tingkat kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. Keadaan ini tentunya akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah (Fatimah & Sa'roni, 2020).

Kesehatan masyarakat dapat dicerminkan melalui berbagai indikator, salah satunya yaitu kematian bayi. Dapat disimpulkan bahwa penurunan angka kematian bayi dalam kondisi kesehatan yang sangat baik pada saat itu dan penurunan angka kematian bayi meningkatkan harapan hidup, sehingga kegiatan produktif selanjutnya dapat terlaksana dan pertumbuhan ekonomi dapat terangsang (Yuhendri, 2013).

Status kesehatan masyarakat 68 Kabupaten Musi Banyuasin dilihat berdasarkan angka harapan hidup mengalami peningkatan, tercatat pada tahun 2018 sebesar 68,33, pada tahun 2019 - 68,54, dan pada tahun 2020 - 68,75. Sedangkan jumlah kematian ibu melahirkan di Muba pada tahun 2018 menempati urutan kedua setelah Kabupaten Banyuasin yaitu 86 / 100.000 (13 kasus). Berdasarkan data BPS, angka kematian bayi di Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 74 kasus.

**Gambar 1 . Angka Harapan Hidup Kab. Musi Banyuasin
2015-2020**



Sumber: BPS Musi Banyuasin

Infopublik.id (2020) melaporkan bahwa status gizi masyarakat menunjukkan bahwa Kabupaten Musi Banyuasin merupakan daerah paling pendek dan gizi buruk di Sumatera Selatan. Keadaan ini disebabkan oleh masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi, dalam hal ini, pemerintah kota berperan dalam memperlambat stunting, memperbaiki gizi, dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Hasil penelitian Barro (2013) menemukan bahwa beberapa pertumbuhan berkorelasi positif dengan harapan hidup. Onisanwa, (2014) menemukan melalui hubungan ekonomi jangka panjang antara kesehatan dan PDB Nigeria bahwa kesehatan memiliki dampak yang sangat penting pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang Nigeria. Semua variabel kesehatan yang digunakan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Nigeria dengan variabel kesehatan berupa angka harapan dan angka kelahiran.

Selain itu, Prananda et al. (2019) menyatakan bahwa Angka Harapan Hidup (AHH) berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan peningkatan usia harapan hidup menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut studi yang dilakukan oleh Amar et al., (2019) gizi juga memiliki pengaruh positif yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera. Dengan kata lain, ketika masyarakat ternutrisi dengan baik, pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat.

Berdasarkan uraian di atas, hal inilah yang menjadi dasar peneliti untuk mengkaji hubungan kesehatan dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Musi Banyuasin.

KERANGKA TEORITIS

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Kuznets dalam (Amar et al., 2019) pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya kemampuan jangka panjang suatu negara untuk menyediakan berbagai produk ekonomi kepada rakyatnya. Peningkatan kapasitas itu sendiri ditentukan oleh kemajuan teknologi, kelembagaan, dan ideologi, atau untuk memenuhi beragam kebutuhan situasi baru yang muncul.

Salah satu indikator penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah selama periode waktu tertentu adalah indikator PDRB, yang dihitung dengan harga berlaku dan harga tetap. PDRB didefinisikan sebagai nilai tambah yang diciptakan oleh semua unit ekonomi. Pada harga saat ini, PDRB dapat menunjukkan perubahan dalam ekonomi dan struktur lokal. Pada saat yang sama, PDB berdasarkan harga konstan digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi selama periode waktu tertentu. Jika tingkat

kegiatan ekonomi lebih tinggi dari periode sebelumnya, maka perekonomian akan mengalami pertumbuhan atau perkembangan (Handayani et al., 2016).

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menurut Solow merupakan salah satu teori yang berpengaruh di bidang pertumbuhan ekonomi. Teori model Solow bertujuan untuk menunjukkan bagaimana total output barang dan jasa suatu negara dipengaruhi oleh pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi (Ridwan Maulana, 2015).

Modal Manusia (Human Capital)

Sumber daya manusia (human capital) merupakan salah satu istilah yang sering digunakan para ekonom untuk pendidikan, kesehatan, dan kapabilitas manusia, jika ditambahkan istilah-istilah tersebut maka produktivitas dapat ditingkatkan (Todaro & Smith, 2011). Dengan kata lain, human capital merupakan salah satu penentu pertumbuhan ekonomi. Tanpa modal manusia berkualitas tinggi, modal fisik tidak ada artinya.

Kesehatan

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap orang, tanpa kesehatan masyarakat tidak akan mampu membawa produktivitas bagi negara. Jika setiap warga negara memiliki asuransi kesehatan, maka kegiatan ekonomi suatu negara akan berlangsung. Terkait dengan teori human capital, human capital memegang peranan penting (Suparno, 2015) health and infrastructure to economic growth and human development index, 2.

Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup (AHH) digunakan sebagai indeks untuk mengukur kesehatan seseorang di suatu daerah. Angka harapan hidup (AHH) diartikan sebagai usia yang dapat dicapai seseorang yang lahir pada tahun tertentu. Angka harapan hidup yang rendah pada suatu daerah menunjukkan bahwa pembangunan yang sehat belum berhasil, semakin tinggi AHH maka pembangunan sehat tersebut akan semakin berhasil. (Riyan et al., 2019). Di negara-negara dengan kesehatan yang lebih baik, setiap orang memiliki rata-rata harapan hidup yang lebih lama, sehingga terdapat peluang finansial untuk pendapatan yang lebih tinggi (Saraswati, 2009).

Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi di bawah usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu. Kegunaan AKB digunakan untuk mencerminkan status kesehatan masyarakat.

Status Gizi Masyarakat

Indikator lain yang digunakan untuk memeriksa status kesehatan masyarakat adalah status gizi. Ketika status gizi masyarakat membaik, berarti status kesehatan masyarakat juga meningkat. Meningkatkan kesehatan masyarakat dapat membuat semua orang lebih produktif di tempat kerja. Peningkatan produktivitas dapat meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa. (Amar et al., 2019).

Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam

Menurut ilmu ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi merupakan Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan faktor-faktor produksi yang tepat dan berkontribusi pada

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan manusia (Muttaqin, 2018). Namun, hal ini tidak hanya berkaitan dengan meningkatnya produk atau jasa, tetapi juga keseimbangan antara kualitas moral dan moral dengan tujuan sekuler dan tujuan ukhrawi (Almizan, 2016).

Oleh karena itu, kebijakan pertumbuhan dalam ekonomi Islam harus bertujuan untuk menyeimbangkan distribusi pendapatan ekonomi untuk semua kelompok tanpa membedakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Sehingga harapan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat terpenuhi (Abidin, 2012).

Kesejahteraan adalah tujuan ajaran Islam di bidang ekonomi. Namun, manfaat yang disebutkan dalam Alquran bukannya tanpa syarat untuk memperolehnya. Allah Swt akan memberikan kesejahteraan jika manusia melaksanakan segala sesuatu yang telah diperintahkan dan menjauhi segala larangan-Nya (Siregar, 2018). Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT pada surat An- Nahl ayat 97 yang berbunyi:

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik [839] dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan” (QS. An-Nahl: 97).

Sebagaimana ditegaskan di atas bahwa kebahagiaan adalah jaminan atau janji Allah SWT dan merupakan jaminan yang diberikan kepada laki-laki atau perempuan yang bertawakal kepada-Nya. Allah SWT juga membalas perbuatan baik hamba-hamba-Nya daripada membalasnya. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, nyaman dan

memuaskan dengan nutrisi yang tepat, yang mencakup segala bentuk ketenangan (Siregar, 2018).

Kesehatan Dalam Perspektif Islam

Ajaran Islam mengatur semua aspek kehidupan umat Islam, baik itu kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat, termasuk kesehatan. Islam percaya bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia, dan itu adalah pemberian Tuhan terbesar kedua setelah iman. Seperti yang tertuang dalam hadits, Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: “Rasulullah Saw berdo’a: Ya Allah saya berindung kepada-Mu dari kehilangan nikmat karunia-Mu, dari perubahan kesehatan yang telah Engkau berikan, mendadaknyanya balasan-Mu, dan dari segala kemurkaan-Mu”. (HR. Muslim).

Sesuai dengan penjelasan hadits di atas, ada dua macam nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hamba-Nya, dan yang sering dilupakan oleh manusia yaitu nikmat sehat dan bahagia, bahagia di waktu senggang. Sungguh merugi apabila seorang hamba tidak bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Karena kesehatan merupakan modal utama bagi umat Islam untuk menunaikan kewajibannya hidup dan beribadah di dunia (Husin, 2014).

Islam sangat memperhatikan soal kesehatan dengan cara antara lain mengajak dan menganjurkan untuk menjaga dan mempertahankan kesehatan yang telah dimiliki setiap orang. Anjuran menjaga kesehatan itu bisa dilakukan dengan tindakan preventif (pencegahan) dan represif (pengobatan). Secara preventif, perhatian Islam terhadap kesehatan ini bisa dilihat dari anjuran sungguh-sungguh terhadap pemeliharaan kebersihan.

Penekanan Islam untuk memelihara kesehatan yang baik berfokus pada kesejahteraan fisik, mental dan sosial. Dalam Al-Qur'an memiliki bagian-bagian yang mengharuskan manusia untuk tetap sehat dalam kegiatan konsumsi, produksi dan distribusi. Dalam tindakan konsumsi, Al-Qur'an melarang konsumsi produk kotor dan haram, termasuk produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan (Herwanti & Irwan, 2013). Salah satu firman Allah terdapat dalam surat Abasa ayat 24:

Artinya "Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya." (QS. Abasa: 24)

Makanan yang dimaksudkan dalam ayat diatas adalah makanan yang memenuhi kualifikasi halal dan baik (makanan yang tidak berbahaya bagi kesehatan). Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah yaitu;

Artinya: "...makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi...." (QS. Al-Baqarah: 168)..

Dengan demikian penting untuk memperhatikan asupan makanan yang mana akan berpengaruh terhadap kesehatan baik secara fisik dan mental. Dengan menjaga kesehatan akan tercipta tubuh yang kuat, rohani yang sehat dan jasmani yang kuat yang dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan memungkinkan setiap orang hidup produktif baik secara sosial dan ekonomi. Dengan kata lain, jika menginginkan kehidupan yang harmonis dan kaya secara sosial ekonomi, maka dapat dibentuk dengan pola hidup yang sehat (Husin, 2014).

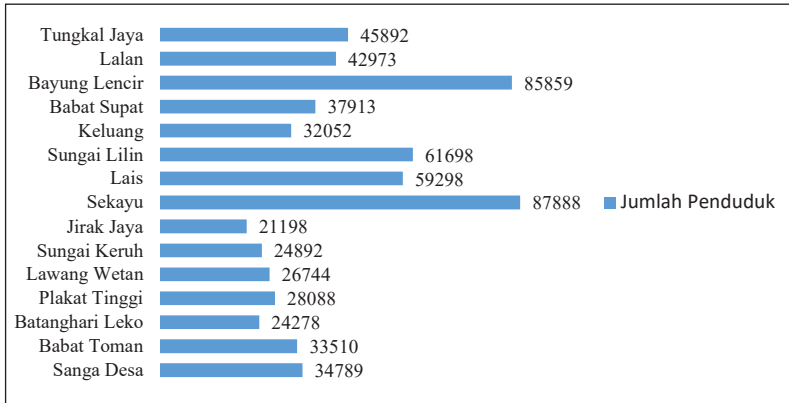
PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan mendeskripsikan kondisi kesehatan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2015-2019. Penelitian deskriptif adalah studi yang secara sistematis menggambarkan peristiwa dan karakteristik suatu kelompok. Deskriptif akan lebih akurat jika mendeskripsikan hasil penelitian dengan memadukan variabel satu dengan variabel lain (Muhyiddin et.al, 2017). Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik, Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, Dinas Kesehatan Musi Banyuasin, dan literatur-literatur lain yang relevan dengan topik penelitian.

Penelitian ini menggunakan indikator seperti harapan hidup, kematian bayi, dan gizi masyarakat untuk menilai kesehatan. Indeks lain yang digunakan untuk merepresentasikan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah berdasarkan nilai produk domestik bruto (PDB) wilayah tersebut. Analisis kualitatif juga berfokus pada interpretasi pandangan Islam tentang kesehatan dan pertumbuhan ekonomi untuk menghasilkan SDM berkualitas dan produktif secara ekonomi dan sosial.

Kabupaten Musi Banyuasin meliputi wilayah seluas 14.265,96 km² atau sekitar 15% dari luas wilayah Sumatera Selatan. Kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 15 kecamatan. Dari segi jumlah penduduk, Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu Kabupaten terpadat di Sumatera Selatan.

Gambar 3.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Kecamatan Tahun 2019



Sumber: BPS Musi Banyuasin

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2019 mencapai 622.206 jiwa. Konsentrasi kepadatan penduduk sebanyak 14 % terpusat di Kecamatan Sekayu yang merupakan ibukota Kabupaten Musi Banyuasin.

Keberhasilan pembangunan masyarakat dapat dibuktikan dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPKM) yang telah mencapai IPKM, dan salah satu faktor kunci yang mempengaruhinya adalah indikator status kesehatan dan pendidikan. Adapun indikator kesehatan meliputi mortalitas, morbiditas, dan status gizi. Tercapainya pembangunan kesehatan mencerminkan masyarakat yang ber-cirikan penduduk berperilaku sehat, hidup dalam lingkungan yang sehat dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Hubungan Angka Harapan Hidup dan Pertumbuhan Ekonomi

Kesehatan tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga aspek fisik, mental, dan social, tetapi juga mencakup aspek ekonomi. Panjang umur adalah dambaan setiap orang. Kita membutuhkan kesehatan yang lebih baik untuk hidup lebih lama. Menyadari pentingnya kesehatan dalam pembangunan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Musi banyuasin telah melakukan upaya besar untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Hal ini terlihat pada Angka Harapan Hidup (AHH). Angka Harapan Hidup (AHH) adalah usia di mana orang-orang dari usia rata-rata diharapkan untuk hidup.

Sumber: BPS Musi Banyuasin

Pada Gambar 3.3 dapat kita lihat bahwa Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kabupaten Musi Banyuasin semakin meningkat setiap tahunnya. Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019 yaitu 68.54 tahun. Jika dibandingkan pada tahun sebelumnya, Angka Harapan Hidup (AHH) meningkat. Hal ini menggambarkan bahwa derajat kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin telah membaik. Hasil tersebut tidak lepas dari peran pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam meningkatkan pelayanan kesehatan seperti fasilitas kesehatan dan penyediaan tenaga kesehatan yang lebih baik.

Peningkatan usia harapan hidup ini dapat dicapai apabila ada usaha maksimal yang dilakukan baik secara internal dan eksternal. Upaya yang dilakukan penduduk secara internal meningkatkan kesadaran akan dampak dan manfaat kesehatan dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, menjaga kebersihan dalam segala hal.

Tabel 3.1 Hasil Uji Korelasi

Keterangan	Korelasi
Angka Harapan Hidup dan Pertumbuhan ekonomi	0.95298146

Sumber: Data diolah peneliti, 2021

Berdasarkan hasil korelasi sederhana menggunakan excel antara angka harapan hidup dan pertumbuhan ekonomi diperoleh hasil 0.95298146. Hasil ini menunjukkan hubungan yang positif dan berkorelasi sangat kuat. Hasil ini selaras dengan penelitian Barro (2013) Prananda et al. (2019) Onisanwa (2014) yang menyatakan bahwa tingkat kesehatan melalui angka harapan hidup berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin panjang usia harapan hidup suatu masyarakat, maka semakin panjang pula usia harapan hidup masyarakat tersebut,, sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan yang akan meningkatkan produktivitas penduduk dari segiekonomi. Dengan demikian akan menambah peluang untuk meningkatkan pendapatan mereka.

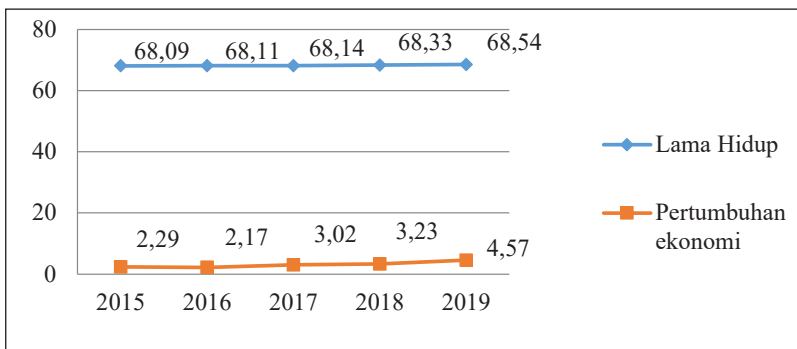
Pertumbuhan pendapatan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan apabila ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya. Terkait dengan teori human capital bahwa modal manusia memainkan peran yang jauh lebih penting daripada faktor teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hubungan Angka Kematian dan Pertumbuhan Ekonomi

Angka kematian (mortalitas) adalah ukuran untuk memvisualisasikan grafik pembangunan kesehatan masyarakat dan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan kesehatan. Angka kematian diketahui dari

keseluruhan kematian di masyarakat dan seringkali dapat dihitung melalui survei. Angka kematian bayi (AKB), kematian ibu akibat melahirkan (AKI) dan kematian balita (AKA Balita) merupakan indikator penting untuk mencapai kondisi kesehatan masyarakat.

**Gambar 3.3 Grafik Angka Harapan Hidup dan
Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Musi Banyuasin
Periode 2015-2019**



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin

Berdasarkan tabel 3.3 diatas dapat kita ketahui bahwa angka kematian bayi di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 angka kematian bayi menunjukkan angka 74 kasus dari 5/1000 kelahiran hidup. Sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 sebanyak 51 kasus, tahun 2017 sebanyak 49 kasus, 2016 terdapat 23 kasus dan pada tahun 2015 hanya ada 9 kasus kematian bayi.

Meningkatnya angka kematian bayi ini disebabkan karena masih rendahnya kualitas pelayanan neonatus dan bayi sesuai standar, masih adanya persalinan di poskesdes yang belum memenuhi standar PMK No.28 Tahun 2017 dan masih rendahnya kemampuan penanganan kegawatdaruratan neonates. Tingginya angka kematian bayi menunjukkan

rendahnya kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk menekan angka kematian bayi tampaknya masih sulit untuk dijalankan.

Tabel 3.2 Hasil Uji Korelasi

Keterangan	Korelasi
Angka Kematian Bayi dan Pertumbuhan Ekonomi	0.937133296

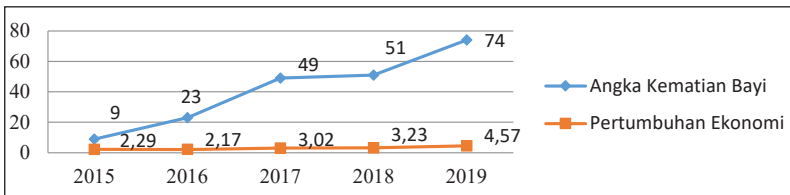
Sumber: Data diolah peneliti, 2021

Berdasarkan hasil uji korelasi pada tabel diatas angka kematian bayi dan pertumbuhan ekonomi yaitu 0.937133296. Maka dapat dijelaskan bahwa angka kematian bayi berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Musi Banyuasin. Angka 0.937133296 mejelaskan hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat karena mendekati angka 1. Nilai positif dari hasil korelasi menunjukkan hubungan yang searah dalam artian jika angka kematian bayi meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat.

Hasil penelitian ini tidak relevan dengan teori human capital yang menyatakan bahwa peningkatan pendapatan dapat menurunkan angka kematian bayi. Dengan meningkatnya pendapatan, gizi dan kesehatan masyarakat secara otomatis terpengaruh (Todaro, Michael P. and Smith, 2011). Penelitian Rezaei et al. (2015) Setiarini et al. (2017) dan Suhaeri & Sugiharti (2020) menyatakan bahwa angka kematian PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap kematian bayi dimana pertumbuhan ekonomi akan menunkan angka kematian bayi. Pendapatan yang tinggi merupakan prasyarat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik serta makanan dan lingkungan yang sehat baik demi mengurangi resiko kematian bayi.

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan trend yang positif seharusnya diikuti dengan menurunnya angka kematian bayi. Namun, terdapat beberapa masalah yang sedang dihadapi Kabupaten Musi Banyuasin seperti pernikahan dini, distribusi pendapatan, ketimpangan fasilitas kesehatan dan distribusi penduduk yang tidak merata. Beberapa teori menjelaskan bahwa kematian bayi erat kaitannya dengan kondisi ekonomi suatu wilayah.

Gambar 3.4 Grafik Angka Kematian Bayi di Kabupaten Musi Banyuasi Periode 2015-2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin jumlah angka kematian ibu menunjukkan angka yang fluktuatif. Angka kematian ibu pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu 12 kasus kematian dibanding dengan tahun sebelumnya yaitu 13 kasus. Angka kematian ibu di Kabupaten Musi Banyuasin karena sebagian kasus kematian disebabkan oleh komplikasi penyakit penyerta pada kehamilan dan masih rendahnya kualitas pelayanan ANC standar PMK No.97 Tahun 2014, masih adanya persalinan di poskesdes yang belum memenuhi standar PMK No.28 Tahun 2017 dan masih rendahnya kemampuan penanganan kegawatdaruratan obstetri.

Tabel 3.3 Hasil Uji Korelasi

Keterangan	Korelasi
Angka Kematian Ibu dan Pertumbuhan Ekonomi	-0.536412102

Sumber: Data diolah peneliti, 2021

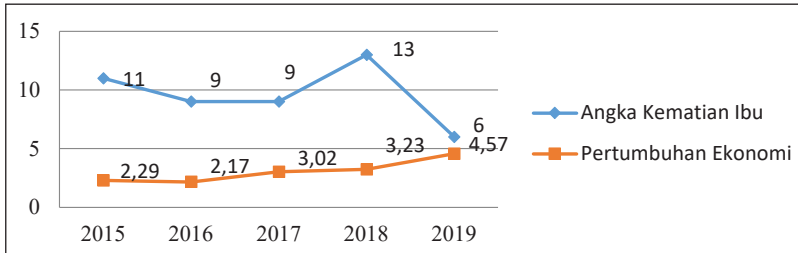
Hasil uji korelasi pada tabel 3.3 hubungan angka kematian ibu dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Musi Banyuasin yaitu -0.536412102. Nilai negatif pada hasil tersebut mengindikasikan bahwa apabila angka kematian ibu naik 1% maka pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebanyak 1%. Sedangkan korelasi kedua variabel tersebut cukup kuat karena berada diantara 0.40 -0.70.

Tingkat kematian ibu memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Tingginya kematian ibu akan mengurangi jumlah pelaku ekonomi produktif yang tersedia sedikit dan akan menghambat investasi sehingga pertumbuhan ekonomi akan menurun. Dampak paling buruk yang disebabkan tingginya angka kematian yaitu kemiskinan. Kematian ibu merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi negara berkembang. Artinya, kemampuan memberikan pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan (Suryaningsih, 2017).

Hubungan Status Gizi dan Pertumbuhan Ekonomi

Status gizi mencerminkan sejauh mana kebutuhan gizi terpenuhi. Gizi yang baik adalah lahirnya generasi yang sehat, kuat dan intelektual. Hal ini mempengaruhi produktivitas tenaga kerja rakyat, kinerja nasional, daya saing nasional di dunia internasional, ketahanan nasional, dan keberhasilan pembangunan nasional.

Gambar 3.5 Grafik Angka Kematian Ibu di Kabupaten Musi Banyuasi Periode 2015-2020



Sumber: BPS Kabupaten Musi Banyuasin

Grafik diatas menjelaskan bahwa kasus gizi buruk mengalami fluktuatif. Dimana pada tahun 2015-2018 mengalami penurunan sampai dengan 2 kasus, namun pada tahun 2019 mengalami kenaikan yaitu terdapat 4 kasus gizi buruk di Kabupaten Musi banyuasin. Hal ini didukung oleh masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang posyandu dan ibu balita belum terbiasa dengan pendekatan konseling serta masih belum adanya anggaran dari sumber lainnya untuk program penurunan stunting.

Malnutrisi pada anak memiliki efek akut dan kronis. Anak yang mengalami kekurangan gizi dalam waktu lama atau pada stadium kronis, terutama sebelum usia dua tahun, mengalami keterbelakangan dan kecacatan fisik. Secara umum, anak dengan gizi buruk akut secara fisik dan mental di bawah rata-rata dibandingkan dengan anak dengan pertumbuhan yang tidak seimbang dan pertumbuhan yang baik. Tingginya proporsi anak yang menderita gizi buruk, kurang gizi dan stunting di suatu negara juga mempengaruhi pangsa sumber daya manusia yang dihasilkan. Ringkasnya, besarnya masalah stunting pada anak saat ini akan mempengaruhi kualitas negara di masa depan.

Tabel 3.4 Hasil Uji Korelasi

Keterangan	Korelasi
Gizi Buruk dan Pertumbuhan Ekonomi	-0.573250078

Sumber: Data diolah peneliti

Berdasarkan hasil uji korelasi diatas yaitu -0.573250078. hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa gizi buruk dan pertumbuhan ekonomi berkorelasi negatif dan hubungan antara keduanya cukup kuat. Nilai negatif dapat dijelaskan yaitu jika gizi buruk meningkat maka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Musi Banyuasin akan menurun. Aksol (2021) menyebutkan bahwa Status sosial ekonomi keluarga secara langsung dan positif mempengaruhi gizi anak.

Kualitas sumber daya manusia terutama ditentukan oleh gizi yang baik, yang ditentukan oleh jumlah makanan yang dikonsumsi. Masalah gizi kurang dan buruk secara langsung dipengaruhi oleh faktor konsumsi makanan dan penyakit infeksi. Secara tidak langsung dipengaruhi oleh pola asuh, ketersediaan makanan, faktor sosial ekonomi, budaya dan politik. Jika gizi buruk terus berlanjut, hal itu dapat menjadi penghambat pembangunan ekonomi.

Kebijakan pemerintah di tingkat makro juga berdampak signifikan terhadap status gizi masyarakat. Selain kebijakan terkait masalah anggaran, ada kebijakan lain seperti perdagangan, pertanian, peternakan, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Sejauh ini upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu mencanangkan program penguatan gerakan anti stunting. Bahkan, program ini juga menjadi program prioritas Bupati. Untuk mencegah masalah stunting, Bupati Musi Banyuasin telah mengalokasi dana desa sebesar Rp13 miliar dengan target tahun 2022 permasalahan stunting tidak

ada lagi di Musi Banyuasin. Upaya yang dilakukan di antaranya menyediakan obat-obatan dan makanan untuk ibu hamil dan bayi usia 0 sampai 23 bulan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Angka harapan hidup (AHH) berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Musi Banyuasin. Semakin panjang usia harapan hidup suatu masyarakat, maka semakin panjang pula usia harapan hidup masyarakat tersebut, dan dari segi ekonomi masyarakat memiliki peluang untuk melakukan kegiatan yang meningkatkan produktivitas penduduk.

Angka kematian bayi berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini menunjukkan hubungan yang searah dalam artian jika angka kematian bayi meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat.

Angka kematian Ibu berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Tingginya kematian ibu akan mengurangi jumlah pelaku ekonomi produktif yang tersedia sedikit dan akan menghambat investasi sehingga pertumbuhan ekonomi akan menurun.

Status gizi buruk berkorelasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Musi Banyuasin. masalah gizi buruk secara langsung dipengaruhi oleh faktor konsumsi makanan dan penyakit. Apabila terjadi malnutrisi yang berkelanjutan dapat menjadi penghalang bagi pembangunan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2012). Meneropong konsep pertumbuhan ekonomi (telaah atas kontribusi sistem ekonomi islam atas sistem ekonomi konvensional). *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 7(2), 356–367.
- Aksol, M. I. (2021). *Pengaruh Ekonomi Faktor Ekonomi Terhadap Gizi Balita*.
- Almizan, A. (2016). Pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1(2), 203–222.
- Amar, S., Satrianto, A., & Ariusni, A. (2019). Pengaruh Kondisi Kesehatan Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat. *Jurnal Kesehatan Medika Saintika*, 10(2), 118–129.
- Anwar, A. (2018). Pendidikan, Kesehatan dan Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia: Pendekatan Model Panel Dinamis. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 19(1), 50–60.
- Barro, R. (2013). Health and Economic Growth. *Annals of Economics and Finance*, 14(2), 329–366. <https://econpapers.repec.org/RePEc:cuf:journl:y:2013:v:14:i:2:barro:health>
- Fatimah, S., & Sa'roni, C. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kesehatan, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Tanah Laut. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 3(2), 585–599.
- Handayani, N. S., Bendesa, I., & Yuliarmi, N. (2016). Pengaruh Jumlah Penduduk, Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, dan PDRB Per Kapita Terhadap

- Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(10), 3449–3474.
- Herwanti, T., & Irwan, M. (2013). Kualitas Sumberdaya Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Nusa Tenggara Barat. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 17(2), 131–154.
- Husin, A. F. (2014). Islam dan kesehatan. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 1(2).
- Muhyiddin, Nurlina T, Tarmizi , M. Irfan, Yulianita, A. (2017). *Metode Penelitian Ekonomi & Sosial : Teori, Konsep, dan Rencana Proposal*. Salemba Empat.
- Muttaqin, R. (2018). Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 1(2), 117–122.
- Onisanwa, I. D. (2014). The impact of health on economic growth in Nigeria. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 5(19), 159–166.
- Prananda, D., Idris, I., & Putri, D. Z. (2019). Dampak Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ecogen*, 1(3), 578–585.
- Rezaei, S., Moradi, K., & Karami Matin, B. (2015). Macro determinants of infant mortality In ECO countries: Evidence from panel data analysis. *International Journal of Pediatrics*, 3(1.2), 441–447.
- Ridwan Maulana. (2015). Pengaruh Human Capital Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012. *Economics Development Analysis Journal*, 4(2), 159–165. <https://doi.org/10.15294/edaj.v4i2.6734>
- Riyan, Koleangan, R., & Kalangi, J. B. (2019). Pengaruh Angka Harapan Hidup, Tingkat Pendidikan Dan Pengeluaran

- Perkapita Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Utara Pada Tahun 2003-2017. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(01), 44–55.
- Saraswati, S. W. dan H. C. (2009). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Kesehatan terhadap PDRB per Kapita di Kota Surabaya. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 2(3).
- Setiarini, O. W., Komariyah, S., & Yuliati, L. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Infant Mortality dan Implikasi Kebijakan Pemerintah Di Negara ASEAN (The Influence Of Economic Growth On Infant Mortality And The Implications Of Government Policy In The ASEAN Countries). *Jurnal Riset Ekonomi Dan Manajemen*, 17(1), 85–99.
- Siregar, P. P. (2018). Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan dalam Perspektif Islam. *Bisnis Net*, 1(1).
- Suhaeri, F., & Sugiharti, L. (2020). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Angka Kematian Bayi (AKB) Pada Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 20(1), 68–87.
- Suparno, H. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Timur. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.22219/jibe.vol5.no1.1-22>
- Suryaningsih, R. (2017). Analisis Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi terhadap Tingginya Mortalitas Penduduk. *Economics Development Analysis Journal*, 6(4), 458–468.
- Todaro, Michael P. and Smith, S. C. (2011). *Economic Development* (11th ed.). Addison Wesley.

- Todaro, M., & Smith, S. C. (2011). Chapter 5: Poverty, Inequality and Development. In *Economic Development*.
- Yuhendri, Y. (2013). Pengaruh kualitas pendidikan, kesehatan dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di sumatera barat. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(02).

POTENSI INVESTASI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN BULUNGAN KALIMANTAN UTARA

Dr. Afdawaiza

(afdawaiza@uin-suka.ac.id)

Muhammad Idham Khalid

(19208012037@student.uin-suka.ac.id)

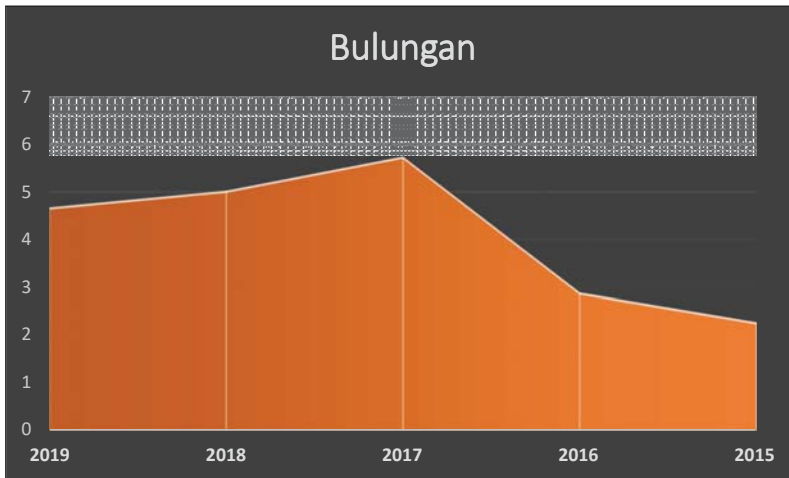
PENDAHULUAN

Melihat dari sejarah Indonesia yang ada ternyata otonomi daerah sudah dilaksanakan sejak zaman kolonial dan terus menerus berjalan hingga memasuki era reformasi pasca orde baru. Pemerintah mengeluarkan dua kebijakan tentang otonomi daerah pada era reformasi ini yang tertuang dalam Undang-undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No.25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian dilakukan revisi yang tertuang dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, diharapkan peranan pemerintah daerah mampu membangun daerah masing-masing menjadi

lebih baik dan mampu mensejahterakan masyarakatnya. Meskipun proses pembangunan dari tiap daerah berbeda-beda dikarenakan perbedaan yang ada dari tiap daerah tersebut (Ibnu Rizky Briwantara, 2018) which has a vast coastal area with 42km. Kendal potential coastal areas, but has not been used optimally. Kendal coastal communities still to be poor and low human resource. One way that can be done to overcome this is by the readiness in realizing a new concept Blue Economy. Blue economy is a new concept for the development of coastal areas. This study aims to determine which alternative programs that can be prioritized in efforts to achieve Kendal Blue Economy. The data used in this study are primary and secondary data. The primary data sourced from the results of the questionnaire by the relevant agencies and the fishermen. Secondary data for this study were obtained from the Central Statistics Agency (BPS). Sejatinya otonomi daerah merupakan wadah yang dapat dijadikan pemerintah untuk mendorong dan menarik para investor lokal maupun nasional atau bahkan investor mancanegara untuk melakukan investasi pada daerah tersebut (Marsuki, 2007).

Investasi daerah menjadi penting untuk dilaksanakan karena investasi merupakan kegiatan dalam ekonomi guna menjadi *core* dalam pembangunan suatu daerah yang dampaknya dapat merubah tatanan ekonomi masyarakat daerah tersebut (Marsuki, 2007). Investasi yang terjadi akan menjalankan perputaran ekonomi daerah tersebut melalui penyerapan tenaga kerja lokal, meningkatkan pendapatan serta konsumsi, yang akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Itulah kenapa investasi daerah menjadi penting untuk diberikan perhatian lebih oleh pemerintah daerah.

Gambar 1. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Bulungan tahun 2015–2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Utara¹

PDRB merupakan indikator dalam mengukur tingkat kemakmuran suatu daerah. jika berbicara kemakmuran suatu wilayah, maka hal tersebut tentu saja memiliki hubungan dengan perekonomian yang ada disana. Melihat pada grafik di atas menunjukkan bahwa laju dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 di Kabupaten Bulungan mengalami fluktuasi, yakni pada tahun 2015 laju pertumbuhan PDRB di sana mencapai 2,27% dan mengalami peningkatan laju pertumbuhan pada tahun 2016 yang mencapai 2,89%, hingga akhirnya mencapai titik tertinggi pada tahun 2017 dengan presentase sebesar 5,74%. Namun pada tahun 2018 hingga 2019 laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten Bulungan mengalami penurunan hingga 4,67% (BPS Kalimantan Utara, 2021).

¹ <https://kaltara.bps.go.id/indicator/155/47/2/-seri-2010-laju-pertumbuhan-pdrb-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-kabupaten-kota.html> diakses pada 3 Maret 2021

Pemerintah daerah Kabupaten Bulungan telah berupaya dalam meningkatkan perekonomian daerah salah satunya dengan melakukan perencanaan strategis untuk menarik investor masuk. Dalam laporan Dinas Penanaman Modal dan Penyaluran Terpadu Satu Pintu Kalimantan Utara (DPMPTSP Kaltara) saat ini yang termasuk dalam rencana strategis yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk menarik investor masuk adalah proyek pembangunan pada sektor energi listrik dan sektor kelautan (DPMPTSP.Kaltara, 2019). Pada sektor energi listrik saat ini sedang dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Kayan yang terletak di Kecamatan Peso. Energi yang dihasilkan dari PLTA Sungai Kayan ini mencapai 6.080 Megawatt dan PLTA ini digadang-gadang merupakan PLTA terbesar se Indonesia dengan menghasilkan energi paling banyak dibandingkan PLTA lainnya. Pada sektor kelautan terdapat proyek Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi. KIPI menjadi daya tarik tersendiri dikarenakan letak geografis Kalimantan Utara sangat strategis yang menjadi salah satu alur pelayaran yang termasuk dalam kawasan Alur Laut Kawasan Indonesia II yang sering dilewati kapal pelayaran menuju alur pelayaran internasional².

Melihat dari beberapa penelitian terdahulu, telah banyak yang mengatakan bahwa investasi memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Seperti hasil dari penelitian yang dilakukan (Kambono & Marpaung, 2020) dengan judul “Pengaruh investasi asing dan investasi dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia” yang mengatakan bahwa investasi asing berpengaruh positif signifikan terhadap

²<https://dpmptsp.kaltaraprov.go.id/wp-content/uploads/2019/04/PROFIL-POTENSI-DAERAH-INVESTASI-KALTARA-2018.pdf> diakses pada 11 Maret 2021

pertumbuhan ekonomi, namun investasi dalam negeri tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian lain milik (Maryaningsih et al., 2014) menyimpulkan bahwa investasi terbukti secara empiris sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun dalam penelitian (Jyanthi & Arka, 2019) tentang “Analisis pengaruh investasi, ekspor, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Bali” menunjukkan hasil bahwa investasi tidak berepengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Bali.

Untuk melihat apakah investasi berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di Kabupaten Bulungan, maka penelitian ini perlu untuk dilakukan dengan fokus membahas pengaruh investasi daerah dalam meningkatkan perekonomian.

KERANGKA TERORITIS

Menurut (Sukirno, 2005) di dalam aktivitas investasi akan mendorong masyarakat untuk terus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, dan taraf kemakmuran masyarakat. hal tersebut bersumber dari tiga penting dalam kegiatan investasi: 1. Investasi merupakan bagian dari konponen pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional, 2. Pemabnahan barang modal yang diakibatkan dari investasi akan meningkatkan produktifitas, 3. Investasi selalu dibuntuti dengan perkembanagnan teknologi.

Todaro (2006) membagi atau mengklasifikasi teori tentang pertumbuhan ekonomi kedalam empat pendekatan, yang pertama teori pertumbuhan linier, selanjutnya teori pertumbuhan struktural, lalu teori revolusi ketergantungan internasional, dan yang terakhir teori neo klasik. Pada teori

pertumbuhan linier, Adam Smith mengemukakan pendapatnya hingga dikenal dengan teori Adam Smith yang memandang bahwa pekerja merupakan salah satu bagian dalam proses produksi. Menurut Adam Smith proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan satu dengan yang lain, di mana peningkatan kinerja dapat meningkatkan daya tarik dalam pemupukan modal, meningkatkan spesialisasi, mengembangkan pasar dan mendorong kemajuan teknologi.

Teori Horrod-Domar merupakan teori pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan oleh Roy F. Horrod (1984) dan Evesy D. Domar (1957). Kedua ahli tersebut mengemukakan sebuah teori dengan cara, tempat dan waktu yang berbeda namun menghasilkan temuan yang serupa, itulah mengapa teori ini disebut teori Horrod-Domar. Teori ini merupakan pengembangan dari teori Keynes, di mana Keynes melihat dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi yang statis atau dalam jangka pendek, sedangkan Horrod-Domar melihat dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi yang dinamis atau dalam jangka waktu panjang. Di dalam penelitian (Sulistiawati, 2012) mengatakan bahwa pengembangan teori Horrod-Domar dari teori Keynes yakni dengan memberi peran kunci pada investasi dalam proses pengembangan ekonomi. khususnya pada sifat ganda yang terdapat pada investasi tersebut: 1. Investasi menciptakan pendapatan (dampak dari perintah investasi). 2. Investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok capital (dampak dari penawaran investasi).

Kajian dalam Prespektif Keislaman

Kegiatan investasi merupakan kandungan dari *Muamalah Maaliyah* yakni muamalah harta. Dan di dalam bermuamalah tentu saja sudah diatur dalam asas-asas fiqih

yang sesuai dengan hukum Islam. Ahmad Azhar Basyir dalam penelitian (Pardiansyah, 2017) menyebutkan asas-asas dalam muamalah adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali ada dalil yang mengharamkannya (dalil yang ditentukan dan tertuang dalam Al-Quar'an dan Hadist Rasullullah SAW)
2. Muamalah dilaksanakan dalam bentuk suka rela (tanpa mengandung unsur paksaan)
3. Muamalah dilaksanakan atas pertimbangan untuk mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat*
4. Muamalah dilakukan dengan memelihara unsur keadilan, menghindari unsur penganiyaan, menghindari unsur *dharar* (sesuatu yang membahayakan), dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Aziz dalam (Pardiansyah, 2017) mengungkapkan ada beberapa prinsip syariah yang secara khusus terkait dengan investasi yang seharusnya menjadi pegangan, prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tidak mencari keuntungan dalam usaha yang haram, baik itu dari segi objek maupun prosesnya. Serta tidak untuk digunakan dalam sesuatu yang haram pula
- b. Tidak mendzalimi dan didzalimi
- c. Keadilan dalam pendistribusian pendapatan
- d. Transaksi dilakukan atas dasar mau sama mau
- e. Tidak ada unsur riba, maysir, gharar, tadlis, dharar, dan tidak pula mengandung maksiat.

Prinsip prinsip diatas dapat dikatan merupakan intisari atau saripati dari sumber rujukan utama yang dianut dalam ajaran Islam yakni Al-Qur'an dan Hadist, yang kemudian

dielaborasi oleh ulama dan para ahli agama sehingga mudah untuk dipahami dan diimplementasikan dalam ekonomi. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa dikenal dengan DSN-MUI kerap mengeluarkan fatwa-fatwa guna mengatur jalannya kegiatan yang sesuai dengan syariah agama. Fatwa DSN-MUI mengatur berbagai macam transaksi ekonomi dan termasuk di dalamnya yakni investasi agar semua kegiatan tersebut tidak melenceng dari koridor syariat. Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa mengenai bagaimana memilih investasi yang diperbolehkan dan melarang kegiatan yang bertentangan dengan syariat seperti yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI No.80/DSN-MUI/III/2011 meskipun dalam fatwa tersebut menyebutkan secara khusus mengenai investasi di bursa efek, namun juga dapat diartikan untuk investasi secara umum.

Selanjutnya dalam pembangunan ekonomi yang memegang kaidah pokok yakni “segala usaha manusia yang menyangkut urusan pembangunan duniawi yang tidak ada larangannya, hukumnya boleh” oleh karena itu bagi siapapun yang menjadi pelaku ekonomi memiliki kebebasan dalam berkreasi serta berinovasi sepanjang hal tersebut tidak ada larangannya. Di dalam penelitian (Djumadi, 2016) mengatakan bahwa prinsip dan landasan pelaku ekonomi pembangunan dalam perspektif Islam adalah sebagai berikut:

Kepemilikan

Menurut Aedy dalam (Djumadi, 2016) kepemilikan dalam pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam terbagi menjadi tiga:

Pertama, Kepemilikan individu. Dalam pemanfaatan kepemilikan individu harus terikat adanya kewajiban untuk selalu menjadikan kepemilikan tersebut sebagai ibadah

(memanfaatkan dijalan yang benar), tidak boleh merugikan orang lain, dan tidak mendatangkan kemudharataan. Selanjutnya, Kepemilikan umum. Berbicara mengenai kepemilikan umum, di dalam Islam menghendaki terkait campur tangan pemerintah terhadap perekonomian hanyalah sebatas pengendalian dan kebijakan, hasil akhirnya diserahkan secara utuh kepada masyarakat guna mendorong dan meningkatkan pendapatan serta pembangunan ekonomi sehingga *makosidul al-khamsah* tetap terjaga. Dan yang terakhir, Kepemilikan negara.

Menghidupkan tanah mati

Konsep mengenai tanah mati dalam Islam adalah menjadikan tanggung jawab atas pemilikannya. Tanggung jawab tersebut ada dua: Pertama, pemilik lahan akan dibebankan pada *fardhu kifayah*, yakni lahan tersebut akan dituntut dan diminta pertanggung jawabannya pada Tuhan. Sehingga untuk menghindari hal tersebut, maka pemilik lahan harus mencari orang untuk diberikan lahan tersebut dan mengolahnya hingga memperoleh manfaat dari lahan tersebut demi kemakmuran bersama. Kedua, pemilik lahan mati harus mengeluarkan zakat kepada negara, karena lahan tersebut tidak difungsikan.

Pengelolaan sumber daya liar

Sumberdayaliar adalah bagian dari sumber pendapatan masyarakat. pengelolaan sumber daya liar yang baik tentu akan mendatangkan manfaat serta menjadikan masyarakat lebih makmur, karena masyarakat akan memperoleh pendapatan yang lebih guna memenuhi kebutuhan mereka. Serta dalam pengelolaan sumber daya liar yang baik akan menyelamatkan lingkungan serta alam, sehingga kerusakan yang ditimbulkan tidak merusak bumi.

Sehingga dapat dikatakan bahwa prinsip umum pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam merupakan serangkaian usaha dalam mengembangkan ekonomi melalui pemanfaatan dan pengeloaan yang baik. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin kerap memperhatikan pembangunan ekonomi bukan saja untuk kesejahteraan individu, melainkan juga untuk kesejahteraan sosial yang berada dalam pengawasan Allah SWT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

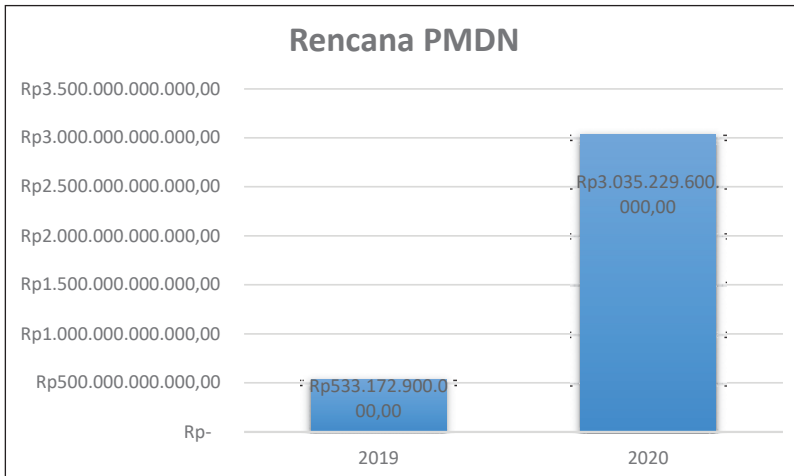
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, di mana penelitian ini mencoba untuk memberikan gambaran terkait data yang ada, menafsirkan data, serta menganalisa dan meninterpretasikan data tersebut guna mendapatkan deskripsi mengenai investasi daerah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Kabupaten Bulungan.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang telah diterbitkan oleh suatu instansi/organisasi. Data yang dipergunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan dan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu terdapat pula data dari berbagai studi pustaka yang dianggap dapat mendukung penelitian dan dijadikan sumber untuk menganalisa, data tersebut bersumber dari surat kabar harian, internet/website instansi daerah, serta karya-karya ilmiah yang relevan.

Rencana dan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Sebagaimana yang tertuang dalam undang undang No 6 tahun 1968 dan undang undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, yang dimaksud PMDN ialah kegiatan penggunaan modal untuk menjalankan suatu usaha yang mana modal yang dimaksud adalah modal dalam negeri.

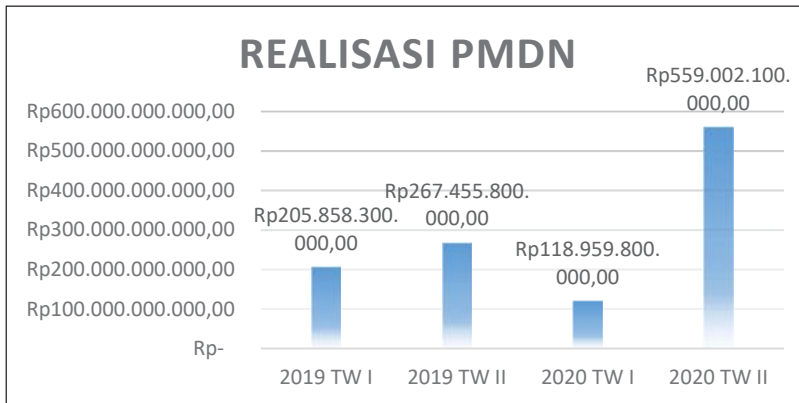
Gambar 2. Rencana Penanaman Modal Dalam Negeri di Kabupaten Bulungan Tahun 2019-2020



Sumber: DPMTSP Kalimantan Utara

Gambar di atas menunjukkan nominal dalam rencana penanaman modal dalam negeri di Kabupaten Bulungan dari tahun 2019 hingga 2020. Terlihat dari gambar tersebut bahwa terjadi peningkatan dalam rencana pada PMDN yang semulanya sebesar Rp 533.172.900.000,- pada tahun 2019 (dpmtsp.kaltaraprovo.go.id., 2019d), meningkat pesat pada tahun 2020 dengan nominal sebesar Rp 3.035.229.600.000,- (dpmtsp.kaltaraprovo.go.id., 2020a)

**Gambar 3. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri
Kabupaten Bulungan Tahun 2019-2020**



Sumber: DPMPTSP Kalimantan Utara

Gambar di atas menunjukkan hasil dari realisasi penanaman modal dalam negeri yang ada di Kabupaten Bulungan pada tahun 2019 hingga 2020. Realisasi PMDN yang terdata untuk wilayah Kabupaten Bulungan pada tahun 2019 triwulan I yakni sebesar Rp 205.858.300.000,- (dpmptsp.kaltaraprov.go.id., 2019d) dan mengalami peningkatan pada triwulan II dengan nominal sebesar Rp 267.455.800.000,- (dpmptsp.kaltaraprov.go.id., 2019b). Namun pada triwulan I tahun 2020, realisasi PMDN mengalami penurunan bahkan melebihi realisasi pada tahun sebelumnya yakni turun menjadi Rp 118.959.800.000,- (dpmptsp.kaltaraprov.go.id., 2020b) dan pada triwulan II mengalami peningkatan yang sangat pesat menjadi Rp 559.002.100.000,- (dpmptsp.kaltaraprov.go.id., 2020a).

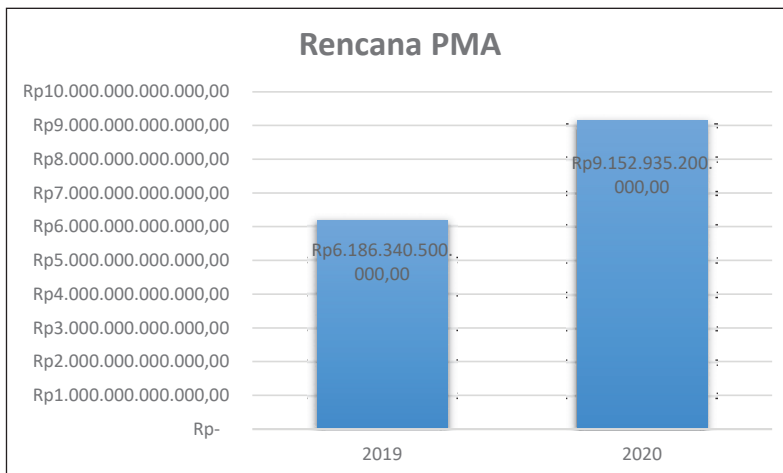
Melihat dari kedua gambar di atas menunjukkan informasi bahwa realisasi penanaman modal dalam negeri di Kabupaten Bulungan pada tahun 2019 berhasil mencapai 89% dari rencana penanaman modal dalam negeri yang telah ditetapkan. Pencapaian realisasi pada tahun 2020

sangat jauh jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019, di mana realisasi pada tahun 2020 hanya mencapai 22% dari rencana awal penanaman modal dalam negeri. Hal tersebut dikarenakan rencana PMDN 2020 yang sangat tinggi yakni mencapai pada angka 3 triliun rupiah sedangkan realisasi yang tercapai masih tetap sama dengan tahun sebelumnya dengan rata-rata realisasi enam ratus miliaran rupiah.

Rencana dan Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman modal asing sesuai dengan undang undang No 1 tahun 1967 dan undang undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing memiliki arti suatu kegiatan untuk menjalankan usaha di Indonesia dengan menggunakan modal asing sepenuhnya maupun gabungan dengan penanaman modal dalam negeri.

Gambar 4. Rencana Penanaman Modal Asing di Kabupaten Bulungan Tahun 2019-2020

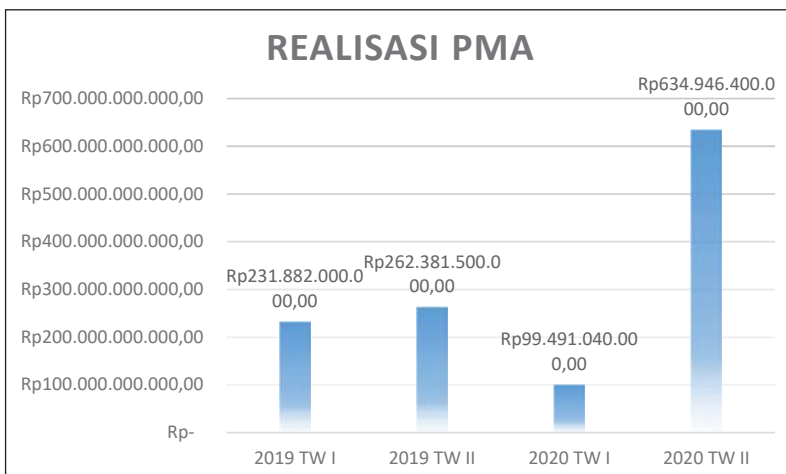


Sumber: DPMPTSP Kalimantan Utara

Gambar di atas menunjukkan rencana dari penanaman modal asing di Kabupaten Bulungan dari tahun 2019 hingga

2020, terlihat dari gambar bahwa rencana penanaman modal asing pada tahun 2019 mencapai Rp 6.186.340.500.000,- (dpmptsp.kaltaraprov.go.id., 2019c) dan pada tahun selanjutnya mengalami peningkatan pada rencana penanaman modal asing yakni sebesar Rp 9.152.935.200.000,- (dpmptsp.kaltaraprov.go.id., 2020a).

Gambar 5. Realisasi Penanaman Modal Asing di Kabupaten Bulungan Tahun 2019-2020



Sumber: DPMPTSP Kalimantan Utara

Gambar di atas menunjukkan keberhasilan dalam realisasi penanaman modal asing di Kabupaten Bulungan. Terlihat bahwa pada tahun 2019 triwulan I realisasi PMA mencapai Rp 231.882.000.000,- (dpmptsp.kaltaraprov.go.id., 2019c) dan sedikit mengalami peningkatan pada triwulan selanjutnya yakni sebesar Rp 262.381.500.000,- (dpmptsp.kaltaraprov.go.id., 2019a) namun hal serupa terjadi seperti pada PMDN, realisasi PMA diawal tahun 2020 mengalami penurunan yang hanya mencapai Rp 99.491.040.000,- (dpmptsp.kaltaraprov.go.id., 2020b) dan pada triwulan

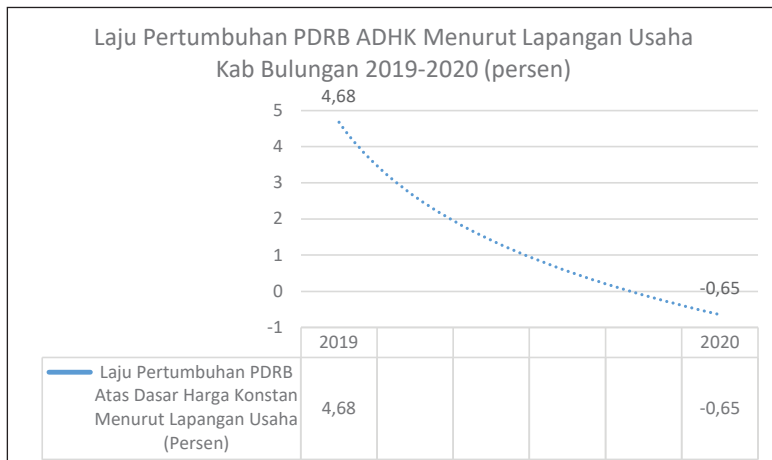
selanjutnya meroket hingga mencapai Rp 634.946.400.000,- (dpmpst.kaltaraprov.go.id., 2020a).

Melihat dari kedua data di atas, baik dari data rencana hingga realisasi penanaman modal asing di Kabupaten Bulungan, keduanya sama-sama mencapai realisasi dengan tingkat presentase sebesar 8% baik di tahun 2019 maupun di tahun 2020. Jika dibandingkan dengan pencapaian pada PMDN yang ada di Kabupaten Bulungan, realisasi PMA jauh berada dibawah realisasi PMDN. Hal tersebut cukup jelas terlihat dikarenakan besaran rencana PMA jauh berada di atas rencana PMDN, itulah kenapa capaian realisasi PMA terlihat kecil.

Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator dalam mengukur kinerja pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah ialah melalui produk domestik regional bruto atau biasa disingkat dengan PDRB.

Gambar 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bulungan Tahun 2019-2020



Sumber: BPS Kab Bulungan

Gambar di atas memberikan informasi terkait laju dari pertumbuhan PDRB yang ada di Kabupaten Bulungan dari tahun 2019 hingga 2020. Terlihat bahwa laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten Bulungan mengalami penurunan, dimana pada tahun 2019 laju pertumbuhan PDRB disana mencapai 4,68%. Namun ditahun 2020 laju pertumbuhannya mengalami penurunan hingga mencapai 0,65% (BPS Kabupaten Bulungan, 2021a).

Jika dilihat dari masing-masing lapangan usahanya, hampir semua dari 17 sektor mengalami penurunan kecuali 3 sektor yakni sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, lalu sektor pengadaan listrik dan gas, dan yang terakhir sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Bahkan terdapat beberapa sektor yang mencapai angka minus seperti pada sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sokter konstruksi, sektor transportasi, dan beberapa sektor lainnya.

Tabel 1. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bulungan (Persen)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen)	
	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.71	4.01
Pertambangan dan Penggalian	-0.78	-4.11
Industri Pengolahan	4.89	-2.81
Pengadaan Listrik dan Gas	5.01	11.82
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.1	4.86
Konstruksi	9.9	-2.64

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen)	
	2019	2020
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.11	0.82
Transportasi dan Pergudangan	8	-2.46
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.02	-5.45
Informasi dan Komunikasi	9.01	6.77
Jasa Keuangan	5.39	1.15
Real Estate	6.68	0.84
Jasa Perusahaan	4.96	-0.52
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.99	0.54
Jasa Pendidikan	10.3	6.12
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.02	11.23
Jasa Lainnya	9.64	7.63

Sumber: BPS Kab Bulungan

Selanjutnya jika dilihat dari data PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha yang ada di Kabupaten Bulungan memang sedikit mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga 2020.

Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bulungan (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)	
	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1871306	1946259
Pertambangan dan Penggalian	3245568	3112172
Industri Pengolahan	1503335	1461050
Pengadaan Listrik dan Gas	5246	5866

Potensi Investasi Daerah dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
di Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)	
	2019	2020
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9632	10101
Konstruksi	1377487	1341174
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	943675	951412
Transportasi dan Pergudangan	533801	520669
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	151923	143641
Informasi dan Komunikasi	354506	378499
Jasa Keuangan	93054	94123
Real Estate	151334	152609
Jasa Perusahaan	13320	13251
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	759761	763900
Jasa Pendidikan	417851	443432
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	99898	111116
Jasa Lainnya	94824	102062
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	11626520	11551336

Sumber: BPS Kab Bulungan

Pada tabel di atas terlihat bahwa PDRB pada tahun 2019 di Kabupaten Bulungan mencapai Rp 11.626.520.000.000,- dan mengalami penurunan pada tahun selanjutnya yakni tahun 2020 di mana PDRB Kabupaten Bulungan turun menjadi Rp 11.551.336.000.000,- (BPS Kabupaten Bulungan, 2021b).

Setelah melihat data-data diatas baik dari data PDRB hingga laju pertumbuhan PDRB yang ada di Kabupaten Bulungan menunjukan bahwa keduanya mengalami penurunan ditahun yang sama yakni dari tahun 2019 hingga

2020. Dan karena PDRB merupakan salah satu indikator dalam pengukuran kinerja dari pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bulungan mengalami penurunan. Padahal jika dilihat data terkait PMDN dan PMA yang ada di Kabupaten Bulungan, keduanya sama-sama mengalami peningkatan dalam realisasi dari tahun 2019 hingga 2020 di mana seharusnya PMDN maupun PMA mampu untuk mendorong perekonomian suatu daerah dikarenakan produksi daerah tersebut dipermudah dengan bantuan atau suntikan dana dari luar. Namun hal ini tidak sejalan dengan apa yang ada di Kabupaten Bulungan di mana walaupun realisasi PMDN dan PMA di sana meningkat namun PDRB Kabupaten Bulungan tetap menurun.

KESIMPULAN

Investasi daerah memang memiliki potensi yang besar khususnya di Kabupaten Bulungan di mana daerah ini merupakan daerah baru yang masih bisa dikembangkan lebih jauh dan lebih besar, hal tersebut terlihat dari besarnya realisasi PMDN dan PMA yang dicapai disana. Namun dari potensi tersebut tidak menjamin terjadinya pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Bulungan. Karena pertumbuhan ekonomi tidak hanya sebatas dari sudut pandang PMDN dan PMA semata, melainkan masih banyak faktor yang mampu menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Maka untuk kasus di Kabupaten Bulungan, investasi daerah yang dilihat dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing tidak mempengaruhi pertumbuhan perekonomian yang ada di sana.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kabupaten Bulungan. (2021a). *Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bulungan*. <https://bulungankab.bps.go.id/indicator/52/140/1/-seri-2010-laju-pertumbuhan-pdrb-triwulanan-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-lapangan-usaha-di-kabupaten-bulungan-y-on-y-.html>
- BPS Kabupaten Bulungan. (2021b). *PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bulungan*. <https://bulungankab.bps.go.id/indicator/52/136/1/-seri-2010-pdrb-triwulanan-atas-dasar-harga-konstan-menurut-lapangan-usaha-di-kabupaten-bulungan.html>
- BPS Kalimantan Utara. (2021). *Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota*. <https://kaltara.bps.go.id/indicator/155/47/2/-seri-2010-laju-pertumbuhan-pdrb-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-kabupaten-kota.html>
- Djumadi. (2016). Konsep Pembangunan Ekonomi Persektif Islam. *Tahkim*, 12(1), 1–16. <http://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/25>
- DPMPTSP.Kaltara. (2019). *Profil Potensi Daerah dan Peluang Investasi*. <https://dpmptsp.kaltaraprov.go.id/wp-content/uploads/2019/04/PROFIL-POTENSI-DAERAH-INVESTASI-KALTARA-2018.pdf>
- dpmptsp.kaltaraprov.go.id. (2019a). *Realisasi Investasi PMA Provinsi Kalimantan Utara Triwulan II Tahun 2019*. <https://dpmptsp.kaltaraprov.go.id/2019/10/13/realisasi-investasi-pma-provinsi-kalimantan-utara-triwulan-ii-tahun-2019/>

- dpmptsp.kaltaraprov.go.id. (2019b). *Realisasi Investasi PMDN Provinsi Kalimantan Utara Triwulan II Tahun 2019*. <https://dpmptsp.kaltaraprov.go.id/2019/10/13/realisasi-investasi-pmdn-provinsi-kalimantan-utara-triwulan-ii-tahun-2019/>
- dpmptsp.kaltaraprov.go.id. (2019c). *Rencana, Realisasi dan Presentase Realisasi PMA Januari s/d Maret 2019*. <https://dpmptsp.kaltaraprov.go.id/2019/07/24/rencana-realisasi-dan-presentase-realisasi-pma-januari-s-d-maret-2019/>
- dpmptsp.kaltaraprov.go.id. (2019d). *Rencana, Realisasi dan Presentase Realisasi PMDN Januari s/d Maret 2019*. <https://dpmptsp.kaltaraprov.go.id/2019/07/24/rencana-realisasi-dan-presentase-realisasi-pmdn-januari-s-d-maret-2019/>
- dpmptsp.kaltaraprov.go.id. (2020a). *Press Release Capaian Realisasi Investasi Penanaman Modal Triwulan II Periode Tahun 2020*. <https://dpmptsp.kaltaraprov.go.id/2020/08/12/press-release-capaian-realisasi-investasi-penanaman-modal-triwulan-ii-periode-tahun-2020/>
- dpmptsp.kaltaraprov.go.id. (2020b). *Realisasi Investasi Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Lokasi Periode Triwulan I 2020*. <https://dpmptsp.kaltaraprov.go.id/2020/06/03/realisasi-investasi-provinsi-kalimantan-utara-berdasarkan-lokasi-periode-triwulan-i-tahun-2020/>
- Ibnu Rizky Briwantara. (2018). Analisis Pola Penyebaran Investasi dan Faktor yang Mempengaruhinya di Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*, 2(4), 446–455.

- Jayanthi, E. N. K., & Arka, S. (2019). Analisis Pengaruh Analisis Pengaruh Investasi, Ekspor, Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 8, 2102–2132.
- Kambono, H., & Marpaung, E. I. (2020). Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 12(1), 137–145. <https://doi.org/10.28932/jam.v12i1.2282>
- Marsuki. (2007). Peran Pemerintah Meningkatkan Investasi Dan Daya Saing Produk Unggulan. *LEKPIS Seminar Investasi, September*, 1–6.
- Maryaningsih, N., Hermansyah, O., & Savitri, M. (2014). Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 17(1), 62–98. <https://doi.org/10.21098/bemp.v17i1.44>
- Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 337–373. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>
- Sukirno, S. (2005). *Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran dari Klasik hingga Keynesian Baru*. Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Sulistiawati, R. (2012). Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Kewirausahaan Untan*, 3(1), 10500. <https://doi.org/10.26418/jebik.v3i1.9888>
- Todaro, M. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Penerbit Erlangga.

Kabupaten dan Kota memiliki peran dan tanggung jawab untuk terus memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi yang baik dalam suatu daerah mencerminkan kesejahteraan penduduknya. Karena itu, penulis berusaha dengan sekuat tenaga menghadirkan buku ini sebagai bentuk partisipasi dalam memajukan perekonomian untuk menjadi lebih baik lagi. Selain itu, buku ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa dalam memahami strategi pembangunan ekonomi di Kabupaten dan Kota. Bagi peneliti, buku ini diharapkan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi di Kabupaten dan Kota, dan bagi masyarakat umum, buku ini diharapkan sebagai dasar pandangan dalam melihat keadaan perekonomian di Kabupaten dan Kota yang ada di Indonesia.

Penerbit:
Magister Ekonomi Syariah (MES)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281

